DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A K H M A D

SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2012

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam disertasi saya berjudul: DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. Merupakan gagasan atau hasil penelitian disertasi saya sendiri, dengan bimbingan komisi pembimbing. Kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, November 2012

Akhmad
NRP. H363080011

ABSTRAK

AKHMAD, Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan (NOER AZAM ACHSANI sebagai ketua, MANGARA TAMBUNAN, dan SUMEDI ANDONO MULYO selaku anggota komisi pembimbing)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data panel 23 Kabupaten dan Kota tahun (2004-2009). Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama belanja modal, baik belanja modal pada sektor pertanian maupun belanja modal sektor lainnya berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah. Pada sisi lain kebijakan fiskal berupa pendapatan asli daerah berpengaruh nyata dan negatif terhadap investasi swasta. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemerintah daerah memaksakan untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah, maka akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Hasil simulasi kebijakan diperoleh bahwa realokasi anggaran dengan menurunkan belanja lain-lain dan belanja barang dan jasa, yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal memberikan hasil yang lebih baik dibanding simulasi kebijakan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, dan simulasi kebijakan meningkatkan tranfer dana dari pemerintah pusat, baik pada kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Hasil simulasi kebijakan non fiskal yaitu meningkatan investasi swasta memberi dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan produk dometik regional bruto dan pengurangan pengangguran, baik pada kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi swasta memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan.

Keywords: Kebijakan fiskal – Otonomi Daerah – Kinerja Perekonomian

ABSTRACT

AKHMAD, The Impact of Fiscal Policy on the Economy of the Regencies and Cities of South Sulawesi Province (NOER AZAM ACHSANI as Chairman, MANGARA TAMBUNAN, and SUMEDI ANDONO MULYO as Members of the Advisory Committee).

This study aimed to analyse the impact of fiscal policy on the regencies and cities' economy of the South Sulawesi Province. The econometric model with the system of simultaneous equations were used to analyse the panel data from 2004 to 2009 of 23 regencies and cities.

The result showed that the fiscal policies of local government, particularly, for the capital spending, either on agriculture or other sectors of capital expenditure had a positive effect on the local economy.

Private investments had a positive and significant effect on output (gross regional domestic product) on seven sectors including industry, electricity gas and water, construction, trade, transportation and communications, finance, and services. In addition, private investment may also increase non-farm employment, reduce unemployment, and inflation in the region. On the other side of fiscal policy in the form of local revenues and significant negative effect on private investment. It will be a high economic cost if the local governments must explore the potential taxes and retribution.

The policy simulations showed that the reallocation of budget policy by decreasing both expenditures for goods and services and other expenditures, in turn it used for increasing capital spending lead to provide better results compared to policy simulation by increasing the orginal of regional income, and policy simulations by increasing financial transfers from central government, both the district based on the agriculture sector and non-agriculture-based sector.

The simulation of non-fiscal policies by increasing the private investment would be considerable impact on the growth of gross regional product dometik and reduce unemployment, either the agriculture based or non-agriculture based of the districts. It indicated that the private investment played an important role to encourage the economic growth and reduce the unemployment.

Keywords: Fiscal policy - Autonomous Region - Economic performance

RINGKASAN

Akhmad, Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (NOER AZAM ACHSANI sebagai ketua, MANGARA TAMBUNAN dan SUMEDI ANDONO MULYO selaku Anggota Komisi Pembimbing).

Kebijakan fiskal pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberi stimulus terhadap perekonomian daerah secara berkesinambungan dan berkualitas. Variabel fiskal daerah meliputi; penerimaan pemerintah daerah yaitu (1) pendapatan asli daerah yang meliputi; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, (2) transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak, dan bukan pajak, dan dana alokasi khusus, dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara pengeluaran pemerintah daerah kabupaten kota dikelompokkan ke dalam; (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) belanja modal, dan (4) belanja lain-lain.

Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dalam mendorong peningkatan kinerja perekonomian kabupaten kota, terutama dari segi investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, mengurangan pengangguran, dan kemiskinan, (2) menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap kinerja sektor pertanian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dan (3) menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan, serta (4) melakukan simulasi kebijakan, dalam upaya untuk menemukan formasi kebijakan fiskal yang dapat mendorong kinerja perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan ***data panel*** 23 kabupaten dan kota tahun (2004-2009). Pemilihan rentang waktu data tahun 2004-2009 didasari oleh pertimbangan bahwa pada masa itu otonomi daerah sudah memasuki masa stabilnya dan perekonomian sudah mulai bangkit dari krisis. Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan. Model sistem persamaan simultan yang dibangun terdiri atas 26 persamaan struktural dan 9 persamaan identitas. Model tersebut dibagi ke dalam empat blok meliputi blok; (1) fiskal, (2) permintaan agregat, (3) output, dan (4) kinerja perekonomian.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama belanja modal berpengaruh positif terhadap perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada sisi lain kebijakan fiskal berupa pendapatan asli daerah berpengaruh nyata dan negatif terhadap investasi swasta. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemerintah daerah memaksakan untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah, maka akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy).*

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama belanja modal sektor pertanian berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto pada sektor pertanian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan investasi swasta juga berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto sektor pertanian.

Investasi swasta berpengaruh positif dan nyata terhadap output (produk domestik regional bruto) pada tujuh sektor yaitu sektor ; industri, listrik gas dan

air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan, dan jasa-jasa. Sementara dua sektor sisanya yaitu sektor pertanian dan pertambangan, walaupun tidak berpengaruh nyata tetapi tetap berpengaruh positif. Di samping itu investasi swasta juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja non pertanian, menurunkan angka pengangguran, dan inflasi di daerah.

Hasil simulasi kebijakan dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh bahwa simulasi kebijakan dengan melakukan realokasi anggaran dengan menurunkan belanja lain-lain, dan belanja barang dan jasa, yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal, baik pada sektor pertanian maupun pada sektor lain memberikan hasil yang lebih baik dan lebih realistis dari alternatif kebijakan meningkatkan variabel pendapatan asli daerah, dan kebijakan meningkatan transfer dana dari pemerintah pusat, baik pada kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Hasil simulasi kebijakan non fiskal yaitu meningkatan investasi swasta memberi dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto dan pengurangan pengangguran, baik pada kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi swasta memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran. Meskipun demikian peningkatan investasi swasta belum sepenuhnya dapat menurunkan angka kemiskinan baik pada kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

@Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, Tahun 2012
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. *Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber*
   a. *Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.*
   b. *Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.*

2. *Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagaian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin IPB.*

DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A K H M A D

Disertasi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Doktor

Pada

Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

Penguji Luar Komisi Ujian Tertutup:

1. Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A.
   Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
2. Prof. Dr. Ir. Rina Oktaviani, M.S.
   Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Penguji Luar Komisi Ujian Terbuka:

1. Dr. B. Raksaka Mahi, S.E., M.Sc.
   Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Univesitas Indonesia
2. Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.Si.
   Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Judul Disertasi	:	Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Nama	:	Akhmad
Nomor Pokok	:	H363080011
Mayor	:	Ilmu Ekonomi Pertanian

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S.
Ketua

Prof. Dr.Ir. Mangara Tambunan, M.Sc.
Anggota

Drs. Sumedi Andono Mulyo, M.A.,Ph.D.
Anggota

Mengetahui

2. Koordinator Mayor
Ilmu Ekonomi Pertanian

Dr. Ir. Sri Hartoyo, M.S.

3. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEKOLAH PASCA SARJANA

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr.

Tanggal Ujian: 9 Oktober 2012

Tanggal Lulus: 05 NOV 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul: Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Disertasi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S. selaku ketua komisi pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatian dalam membimbing dan memberikan dorongan moril kepada penulis mulai dari judul penelitian hingga penyajian hasil penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Mangara Tambunan, M.Sc. dan Bapak Drs. Sumedi Andono Mulyo, M.A., Ph.D. selaku anggota komisi pembimbing atas segala masukan, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan baik melalui pertemuan tatap muka, maupun konsultasi melalui telepon, dan sms.

Ucapkan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Pertanian Bogor, Dekan Sekolah Pascasarjana, Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu pengetahuan pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
2. Kooordinator Kopetis Wilayah IX Sulawesi yang telah memberi izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan para jenjang pendidikan Strata Tiga pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
3. Ketua Yayasan dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendididikan Ujung Pandang yang telah memberikan perhatian kepada penulis selama mengikuti pendidikan.

4. Rekan-rekan pada Program Studi Ekonomi Pertanian Angkatan 2008 yang begitu berjasa memberikan masukan, dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
5. Kedua orang tua penulis, Ibu Hajirah dan Bapak Pide (Almarhum) yang senantiasa memberikan dorongan dan doa kepada penulis.
6. Akhirnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Istriku Rahmawaty Gaffar beserta putra putri kami Muhammad Akram, Muhammad Al-Khahfi, dan Nurul Hikmah Maulidiah yang dengan penuh kesetiaan mendampingi dan senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuannya. Amin.

Penulis berharap agar disertasi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan peneliti-peneliti lainnya. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan disertasi ini.

Bogor, November 2012

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir tanggal 17 September 1965 di Maroanging Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai anak ke lima dari enam bersaudara, dari pasangan Pide (almarhum) dan Hajirah.

Pada tahun 1976 penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada MI Negeri Pattiro Bajo, lulus SMP Negeri Pattiro Bajo pada tahun 1980, selanjutnya pada tahun 1983 lulus SMPP Negeri Watampone.

Penulis melanjutkan pendidikan sarjana Strata Satu tahun 1984 pada Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang dan lulus tahun 1988, dengan skripsi berjudul "Analisis Biaya Produksi dan Perhitungan Harga Pokok Penjualan pada PT. Bukaka Meat di Ujung Pandang".

Pada tahun 1991 Penulis melanjutkan pendidikan Magister pada Program Studi Agribisnis, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dan lulus tahun 1983, dengann tesis berjudul "Analisis Distribusi dan Marjin Pemasaran Ikan Basah (Sudi Kasus Kabupaten Bone)".

Pada tahun 2008 penulis memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan program doktor pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dengan sponsor BPPS.

Penulis bekerja diawali dengan menjadi Dosen tetap yayasan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Pendidikan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) tahun 1989 sampai tahun 2004. Kemudian sebagai Dosen Kopertis Wilayah IX Sulawesi yang dipekerjakan pada STIE-YPUP sejak tahun 2004 sampai sekarang.

Menikah dengan Rahmawaty Gaffar pada tahun 1995 dan dikaruniai tiga orang anak: Muhammad Akram Akhmad, Muhammad Al Khahfi Akhmad, dan Nurul Hikmah Maulidiah Akhmad.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvii

DAFTAR LAMPIRAN xix

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 6

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 10

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 11

II. TINJAUAN PUSTAKA 13

2.1. Konsep Pembangunan Ekonomi Regional 13

2.2. Konsep Desentralisasi 16

2.3. Desentralisasi Fiskal 18

2.4. Keuangan Pemerintah Daerah 22

2.5. Tinjauan Studi Terdahulu 27

III. KERANGKA TEORI 44

3.1. Pertumbuhan Ekonomi 44

3.2. Kebijakan Fiskal 49

3.3. Konsumsi dan Investasi 54

3.4. Ekspor Impor 57

3.5. Pengangguran dan Kemiskinan 58

3.6. Inflasi 62

3.7. Kinerja Sektor Pertanian 63

3.8. Kerangka Pikir 65

3.9. Hipotesis 67

IV. METODE PENELITIAN 69

4.1. Lokasi Penelitian 69

4.2. Spesifikasi Model 69

4.3. Identifikasi Model 80
4.4. Metode Pendugaan Model 81
4.5. Validasi Model 82
4.6. Simulasi Model 83

V**. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN** 87

5.1. Penduduk dan Tenaga Kerja 87
5.2. Kondisi Fiskal Daerah 93
5.3. Kondisi Perekonomian 109
5.4. Deskripsi Perekonimian Kabupaten Kota 114

VI. **ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH** 117

6.1. Analisis Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto Bruto 117
6.2. Analisis Belanja Modal terhadap Kemiskinan 119
6.3. Analisis Belanja Modal terhadap Pengangguran 121
6.4. Analisis Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan 123
6.5. Analisis Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pengangguran 124

VII. HASIL ESTIMASI MODEL DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH 128

7.1. Hasil Estimasi Model Ekonometrika 128
7.2. Kerangka Blok Fiskal Daerah 129
7.3. Kerangka Blok Permintaan Agregat 141
7.4. Kerangka Blok Output dan Penyerapan Tenaga Kerja 145
7.5. Kerangka Model Kinerja Perekonomian 161
7.6. Ringkasan Hasil Estimasi 165

VII. SIMULASI DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP KINERJA PEREKOMIAN DAERAH 171

8.1. Validasi Model 171
7.2. Simulasi Kebijakan 174

VIII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 197

8.1. Kesimpulan 197

8.2. Implikasi Kebijakan 198

8.3. Saran untuk Penelitian Lanjutan 201

DAFTAR PUSTAKA 203

LAMPIRAN 213

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Perkembangan Dana Perimbangan di Indonesia Tahun 1996-2009 3
2. Pekembangan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita, dan Pertumbuhan PDRB Tahun 2004-2009 7
3. Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan Inflasi Tahun 2004-2009 8
4. Perkembangan Penerimaan Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 8
5. Perkembangan Pengeluaran Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 9
6. Perkembangan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 88
7. Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 89
8. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 90
9. Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 91
10. Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Non Pertanian Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 92
11. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 94
12. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 95
13. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 96
14. Perkembangan DAU Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 98
15. Perkembangan DBH Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 99
16. Perkembangan DAK Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 100
17. Perkembangan Belanja Pegawai Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 102
18. Perkembangan Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 103
19. Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 104

20. Perkembangan Belanja Modal Sektor Pertanian Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 105
21. Perkembangan Belanja Modal Sektor Lainnya Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 107
22. Perkembangan Belanja Lain-Lain Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 108
23. Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 110
24. Perkembangan Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 112
25. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 113
26. Keragaam Umum Model Kebijakan Fiskal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 129
27. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan Daerah 133
28. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Pengeluaran Daerah 136
29. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Permintaan Agregat Daerah ... 142
30. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Output Daerah 151
31. Hasil Estimasi Model Penyerapan Tenaga Kerja 159
32. Hasil Estimasi Model Kinerja Perekonomian Daerah 162
33. Hasil Validasi Model Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian Kobupaten Berbesasis Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan 172
34. Hasil Validasi Model Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian Kobupaten Kota Berbesasis Non Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan 173
35. Dampak Kenaikan Pajak Daerah Sebesar 10 Persen dan Kenaikan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lainnya Masing-masing 2.5 Persen 176
36. Dampak Peningkatan Retribusi Daerah 10 Persen dan Kenaikan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lainnya masing-masing 2.5 Persen 179
37. Dampak Peningkatan Panjak dan Retribusi Daerah Masing-masing Sebesar 10 Persen dan Kenaikan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lainnya Masing- masing 5 Persen 182
38. Dampak Peningkatan Dana Alokasi Umum Sebesar 10 Persen dan Peningkatan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lainnya Masing-masing 20 Persen 185

39. Dampak Peningkatan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus 10 Persen dan Peningkatan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lain Masing-masing Sebesar 10 Persen 187
40. Dampak Penurunan Belanja Barang dan Jasa 20 Persen, Belanja Lain-Lain 20 Persen dan Kenaikkan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor lain 25 Persen..... 190
41. Dampak Kenaikan Investasi Swasta 10 Persen 193

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Model Pertumbuhan Solow 46
2. Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Jangka Pendek 53
3. Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Jangka Panjang 53
4. Model Migrasi Haris Todaro 64
5. Kerangka Pikir Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Kabupaten/ Kota di Propinsi Sulawesi Selatan 68
6. Keterkaitan antar Variabel Model Kinerja Fiskal Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 71
7. Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004- 2009 93
8. Perkembangan Penerimaan dari PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004- 2009 97
9. Perkembangan Penerimaan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004- 2009 101
10. Share Penerimaan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 101
11. Share Masing-masing Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 107
12. Share Pengeluaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 109
13. Share Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 111
14. Hubungan antara Pertumbuhan APBD dengan Kemiskinan, Pengangguran, dan PDRB 114
15. Hubungan antara Pertumbuhan Belanja Modal dengan Kemiskinan dan Pengangguran 115
16. Hubungan antara PDRB dengan Kemiskinan dan Pengangguran 116
17. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Rata-rata Belanja Modal dengan Pertumbuhan Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2001-2005 118
18. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Rata-rata Belanja Modal dengan Pertumbuhan Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2006-2009 118
19. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Rata-rata Belanja Modal dengan Rata-rata Penduduk Miskin Tahun 2001-2005 120

20. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Rata-rata Belanja Modal dengan Rata-rata Penduduk Miskin Tahun 2006-2009..... 120
21. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Rata-rata Belanja Modal dengan Rata-rata Pengangguran Tahun 2001-2005 122
22. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Rata-rata Belanja Modal dengan Rata-rata Pengangguran Tahun 2006-2009 122
23. Pola hubungan Pertumbuhan Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto dengan Tingkat Rata-rata Kemiskinan Tahun 2001-2005. 124
24. Pola hubungan Pertumbuhan Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto dengan Tingkat Rata-rata Kemiskinan Tahun 2006-2009..... 124
25. Pola hubungan Pertumbuhan Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto dengan Tingkat Rata-rata Pengangguran Tahun 2001-2005 125
26. Pola hubungan Pertumbuhan Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto dengan Tingkat Rata-rata Pengangguran Tahun 2006-2009 126

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Nama Variabel, Simbol, Satuan, dan Sumber Data 214
2. Program Komputer Estimasi Model Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomia Kobupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan SAS Versi 9.0 SYSLIN Metode 2 SLS 216
3. Hasil Estimasi Model Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Kobupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan SAS Versi 9.0 SYSLIN Metode 2 SLS 219
4. Program Komputer Validasi Model untuk Kabupaten Berbasis Pertanian 245
5. Hasil Validasi Model untuk Kabupaten Berbasis Pertanian 248
6. Program Komputer Validasi Model untuk Kabupaten Berbasis Non Pertanian 253
7. Hasil Validasi Model untuk Kabupaten Kota Berbasis Non Pertanian 256
8. Program Komputer Simulasi Menaikkan Pajak dan Retribusi Daerah 10 Persen dan Menaikkan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lain 5 Persen Kabupaten Berbasis Pertanian 261
9. Hasil Simulasi Menaikkan Pajak dan Retribusi Daerah 10 Persen dan Menaikkan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lain 5 Persen Kabupaten Berbasis Pertanian 264
10. Program Komputer Simulasi Menaikkan Investasi Swasta Kabupaten Berbasis Non Pertanian 269
11. Hasil Simulasi Menaikkan Investasi Swasta Kabupaten Berbasis Non Pertanian 272
12. Rakapitulasi Hasil Simulasi Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Kabupaten Berbasis Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan..... 277
13. Rakapitulasi Hasil Simulasi Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Kabupaten Kota Berbasis Non Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan 278
14. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan 279

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berawal dari krisis moneter dan ekonomi serta pergolakan politik yang timbul pasca mundurnya rezim Soeharto yang sentralistik dan otoriter, Indonesia mengambil langkah raksasa dengan melakukan desentralisasi politik dan fiskal. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon permintaan desentralisasi yang semakin keras, dengan mengesahkan dua undang-undang pada bulan April 1999, dan menetapkan tanggal 1 Januari 2001, sebagai mulai dilaksanakannya desentralisasi di Indonesia. Bank Dunia (2007), menyebut program desentralisasi di Indonesia termasuk program besar dan disebut sebagai *big bang decentralization*.

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang secara efektif berlaku pada awal tahun 2001, ketika diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang selajutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, telah menjadi topik yang menarik dalam era reformasi untuk mewujudkan terciptanya *good governance*.

Rasyid (1998) mengemukakan bahwa hal yang diharapkan dari otonomi daerah adalah pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, mengakomodasi partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, menumbuhkan kemandirian dan kedewasaan daerah, serta menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi kebutuhan dan kondisi masyarakat merupakan inspirasi pertama dan utama dalam setiap kegiatan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut Simanjuntak (2002) mengatakan pada dasarnya desenstralisasi fiskal di Indonesia mempunyai beberapa sasaran umum yaitu (1) untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber keuangan negara, (2) mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, (4)

mengurangi ketimpangan antar daerah, (5) menjamin terselenggaranya pelayanan publik, dan (6) meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Hakekat dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya adalah distribusi sumberdaya keuangan yang bertujuan untuk memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam membiayai otonominya, dan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, rasional, serta kapasitas sumber keuangan yang berasal dari wilayah yang bersangkutan. Dengan desentralisasi fiskal, maka pemerintah daerah diharapkan lebih efektif dan mampu untuk memenuhi kebutuhan publik yang dibutuhkan, membangun sarana perekonomian serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Desentralisasi fiskal ditandai dengan meningkatnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (dana perimbangan), berupa: (1) peningkatan persentase dana bagi hasil (DBH) untuk pemerintah daerah, (2) peningkatan dana alokasi umum (DAU) yang sebelumnya dikenal dengan subsidi daerah otonom dan instruksi presiden, dan (3) pelimpahan dana alokasi khusus (DAK).

Tantangan utama dalam pembangunan Indonesia dewasa ini, bukan lagi untuk memberikan dana kepada daerah-daerah yang lebih miskin, tetapi bagaimana memastikan agar daerah-daerah tersebut menggunakan dana yang disalurkan dengan sebaik-baiknya. Sumber dana terpenting untuk daerah adalah dana alokasi umum (DAU) mengalami peningkatan hingga 64 persen pada tahun 2006, (World Bank, 2007).

Tabel 1 menunjukkan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2001, jumlahnya cukup besar, rata-rata 27.43 persen sampai 34.51 persen, dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan demikian maka pemerintah daerah mempunyai pendapatan yang lebih besar, dan apabila pemerintah daerah dapat memanfaatkan transfer fiskal tersebut secara efektif dan efisien, maka kinerja perekonomian daerah diharapkan dapat lebih baik.

Tabel 1. Perkembangan Dana Perimbangan di Indonesia Tahun 1996-2009

(juta rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan			Jumlah	APBN	Persen APBN
		DBH	DAU	DAK			
1996/97	6 117 322	3 343 476	9 003 666	5 425 264	17 772 406	84 792 000	20.96
1997/98	6 680 631	3 481 407	10 348 466	6 318 073	20 147 946	88 061 000	22.88
1998/99	5 354 865	4 828 185	10 534 915	6 357 805	21 720 905	147 220 800	14.75
1999/00	7 068 753	5 436 631	16 525 409	9 150 984	31 113 023	219 603 800	14.17
2000	5 528 432	4 457 842	14 864 152	10 109 063	29 431 058	197 030 300	14.94
2001	15 161 824	21 694 213	61 038 978	1 008 838	83 742 030	272 177 800	30.77
2002	21 460 243	25 250 146	66 995 717	1 952 978	94 198 841	328 100 000	28.71
2003	25 533 381	28 875 000	69 897 567	2 245 567	101 018 135	371 600 000	27.18
2004	31 220 950	30 314 166	71 592 275	2 500 219	104 406 660	374 351 320	27.89
2005	37 991 890	43 387 821	78 880 618	3 723 144	125 991 584	397 769 300	31.67
2006	38 384 881	58 705 601	123 648 656	10 653 688	193 007 945	559 236 700	34.51
2007	37 316 855	46 983 228	158 706 742	17 125 620	222 815 590	763 570 800	29.18
2008	53 976 036	65 588 871	178 210 498	22 531 730	266 331 099	836 418 200	31.84
2009	62 736 734	73 130 355	186 226 814	25 485 053	284 842 222	1 037 067 300	27.47

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Nanga (2006), mengatakan bahwa, selama kurun waktu 2001-2003 pangsa (*share*) dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) dalam keseluruhan penerimaan APBD kabupaten kota diseluruh Indonesia berkisar antara 85-90 persen. Oleh karena itu transfer fiskal dapat memiliki dampak yang cukup nyata dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, termasuk pembangunan pertanian dan pendapatan petani.

Dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki wewenang yang hampir penuh atas penggunaan sumber-sumber fiskal mereka. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kontrol terhadap pengeluaran dari seluruh sumber penerimaan, meliputi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi, pendapatan dari sumberdaya alam, dan dana hibah (kecuali dana alokasi khusus). Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saat ini mengelola sekitar 36 persen dari total pengeluaran publik, dibanding dengan kondisi pada pertengahan 1990-an yang hanya berjumlah sekitar 24 persen (World Bank. 2007).

Kebijakan fiskal adalah bentuk intervensi pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan maksud agar keadaan perekonomian tidak terlalu menyimpang dari keadaan yang diinginkan dengan alat *(policy instrument variable)* berupa pajak (T), transfer pemerintah (Tr), dan pengeluaran pemerintah

(G). Kebijakan fiskal disebut juga kebijakan anggaran *(budgetary policy)* yang dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), (Dornbusch. *at al*. 2008; Romer, 2001).

Kewenangan yang dimiliki oleh daerah dengan desentralisasi fiskal, maka daerah dapat menanggapinya dengan dua hal yang berbeda yaitu: (1) lebih memusatkan perhatian pada usaha memperbesar penerimaan, melalui intensifikasi dan perluasan pungutan pajak, retribusi daerah, serta pemanfaatan sumberdaya yang belum optimal melalui bagi hasil, atau (2) lebih berorientasi pada peningkatan efektivitas sisi pengeluaran, melalui usaha menstimulasi dunia usaha, dengan pengembangan iklim usaha yang lebih baik bagi daerahnya.

Tantangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di satu sisi, akan berdampak pada peningkatan biaya produksi yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (***high cost economic),*** yang selanjutnya berdampak pada produksi, dan mengganggu iklim usaha. Dampak selanjutnya dapat menurunkan investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja.

Susiyati (2007) mengemukakan sebagian daerah berkeinginan untuk meningkatkan peran pendapatan asli daerahnya, sebagai refleksi otonomi fiskal mereka. Namun karena kurangnya pemahaman akan prinsip-prinsip perpajakan yang baik, maka banyak upaya yang mereka lakukan justru mengganggu (distorsi) terhadap aktivitas perekonomian daerah tersebut, dan juga terhadap perekonomian kawasan secara keseluruhan. Berbagai pungutan-pungutan yang dilakukan daerah justru mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di daerah.

Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi yang terletak di sebelah selatan Pulau Sulawesi dengan luas daratan 45 519.24 km persegi, meliputi 20 kabupaten dan 3 kota serta 263 kecamatan. Topografi Provinsi Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, wilayah daratan ini dikelilingi oleh laut, di sebelah selatan terdapat Laut Flores, di sebelah barat terdapat Selat Makassar, dan di sebelah timur terdapat Teluk Bone, serta pulau-pulau tersebar pada perairan tersebut.

Potensi wilayah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di jalur pembangunan sumberdaya di kawasan timur Indonesia, antara Pulau Kalimantan dan Pulau Papua membuka peluang bagi kabupaten kota di Provinsi

Sulawesi Selatan untuk dapat memainkan perannya secara maksimal sebagai pusat pembangunan dan pertumbuhan di kawasan timur Indonesia.

Kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan sangat diharapkan akan menjadi acuan dalam pembangunan di wilayah timur Indonesia, yang membuka jalan baik untuk pembangunan wilayah maupun ruang. Pengembangan sumberdaya kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada berbagai isu yang perlu ditangani secara terpadu, berdasarkan potensi dan kondisi kabupaten kota, berdasarkan pada sumberdaya alam, perlu lebih dipromosikan demi perluasan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan (Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, 2007).

Kondisi perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dewasa ini masih didominasi oleh sektor pertanian, kerena menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Pada tahun 2009 tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian sebesar 49.20 persen, dan penyumbang terbesar terhadap PDRB yaitu 29 persen. Oleh karena itu sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan otonomi daerah, maka pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu mengelola kebijakan fiskalnya dengan baik, agar dapat mendorong pembangunan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam otonomi daerah dewasa ini, adalah bagaimana membangun daerahnya dengan sumberdaya yang dimilikinya. Mengingat keterbatasan anggaran yang dimilikinya, maka perintah daerah harus mampu menarik investasi swasta, dalam mengembangkan daerahnya dengan baik sesuai potensi dan sumberdaya manusia yang dimilikinya, untuk dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat kondisi perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dewasa ini: (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita rendah, (2) tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi, (3) tingkat kemiskinan tinggi, (4) tingkat inflasi yang juga tinggi, dan (5) produktivitas sektor pertanian yang rendah.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka menarik untuk mengkaji dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan fiskal pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menstimulasi pertumbuhan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan menanggulangi kemiskinan.

1.2. Rumusan Masalah

Tujuan kebijakan fiskal adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran, menanggulangi kemiskinan, dan mengatasi inflasi. (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2009).

Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan jumlah penduduk sebesar 8 032 551 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan timur Indonesia dengan 20 kabupaten, dan tiga kota, serta 263 kecamatan. Pada tataran konteks penyelenggaraan pembangunan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi riil menunjukkan bahwa masyarakat kabupaten kota mempunyai tingkat keanekaragaman yang sangat variatif, mulai dari kondisi geografi, ekonomi, maupun sosial budaya, sehingga apabila tidak dilakukan penataan dan pengkoordinasian secara efektif, dan bijaksana, dapat menjadi kendala di masa yang akan datang, seiring dengan tuntutan dinamika global.

Persoalan ekonomi dasar yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu: **Pertama** fakta menunjukkan bahwa PDRB perkapita penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan sangat rendah, hampir setengah dari pendapatan perkapita rata-rata nasional seperti terlihat pada Tabel 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan sangat rendah.

Tabel 2. Pekembangan PDRB Perkapita dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

Tahun	PDRB Perkapita (ribuan rupiah)				Pertumbuhan PDRB (persen)	
	Sul-Sel		Indonesia			
	H.Konstan	H.Berlaku	H.Konstan	H.Berlaku	Sul-Sel	Indonesia
2001	3 956	4 231	7 083	7 217	5.23	3.32
2002	4 221	4 645	7 236	7 567	4.08	3.69
2003	4 512	5 343	7 390	7 943	5.42	4.10
2004	4 655	6 047	7 656	10 610	5.26	4.44
2005	4 863	6 895	7 964	12 675	6.05	5.60
2006	5 118	7 982	8 293	15 028	6.72	5.18
2007	5 368	8 996	8 700	17 545	6.34	5.67
2008	5 708	10 909	9 111	21 678	7.78	5.59
2009	5 983	12 632	9 409	24 300	6.20	5.10

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Berbagai Tahun

Kedua adalah tingginya pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan. Fakta juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi, lebih tinggi dari tingkat rata-rata pengangguran terbuka nasional, seperti terlihat pada Tabel 3. Jadi dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk dapat menyerap tenaga kerja, karena itu pemerintah daerah kabupaten kota dituntut untuk melakukan kebijakan fiskal yang dapat menstimulasi penciptaan lapangan kerja yang luas.

Ketiga adalah tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan masih tinggi yaitu 12.10 persen atau sebesar 963 000 jiwa, pada tahun 2009. Walaupun angka kemiskinan ini dibawah tingkat rata-rata kemiskinan nasional 14.12 persen, namun tetap menjadi persoalan serius dan membutuhkan keberpihakan dari pemerintah kabupaten kota dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Keempat adalah kinerja sektor pertanian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Fakta menunjukkan bahwa sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan masih merupakan sektor ekonomi yang sangat penting kerena menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Pada tahun 2009 tenaga kerja yang terserap pada setiap sektor ekonomi sebanyak 3.2 juta pekerja, dan 49.20 persen bekerja pada sektor pertanian, serta penyumbang terbesar

terhadap PDRB yaitu 29 persen (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2010). Hal tersebut menunjukkan bahwa produktivitas sektor pertanian sangat rendah.

Tabel 3. Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(persen)

Tahun	Penduduk Miskinan		Pengangguran		Inflasi	
	Sul-Sel	Indonesia	Sul-Sel	Indonesia	Sul-Sel	Indonesia
2004	13.48	16.66	10.90	9.84	6.47	6.40
2005	13.23	15.97	13.60	11.22	15.20	17.11
2006	14.57	17.75	12.30	10.28	7.21	6.61
2007	14.11	16.58	12.01	9.75	5.71	6.59
2008	13.34	15.42	10.49	8.46	11.79	11.06
2009	12.31	14.15	8.74	8.14	9.01	7.92

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Berbagai Tahun.

Sementara disisi lain, pemerintah kabupaten kota di Provinsi Selatan dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber fiskal daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, lebih dari 85 persen berasal dari transfer keuangan dari pusat (DAU, DBH, dan DAK), dan hanya enam persen lebih berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Penerimaan Fiskal Kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

Tahun	Penerimaan	Pertum-buhan (%)	PAD	Rasio (%)	Dana Perimbangan	Rasio (%)
2004	4 965 641.58	20.66	345 109.86	6.95	4 282 627.45	86.25
2005	5 502 644.21	3.25	378 985.74	6.89	4 691 881.83	85.27
2006	8 422 654.14	64.29	518 528.75	6.16	7 455 964.15	88.52
2007	9 628 545.56	14.32	576 738.38	5.99	8 466 289.90	87.93
2008	10 961 980.00	6.07	664 378.00	6.06	9 549 139.00	87.11
2009	12 060 111.00	18.08	809 931.00	6.72	9 943 899.00	82.45

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Dengan keterbatasan penerimaan fiskal daerah, maka pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, lebih banyak menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya pada belanja pegawai, sementara belanja modal yang diharapkan dapat menstimulasi perekonomian sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Pengeluaran Kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

Tahun	Belanja Pegawai		Belanja Barang dan Jasa		Belanja Modal		Belanja Lainnya		T.Belanja
	Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
2004	2 503 441	55.89	526 918	11.76	866 209	19.34	582 986	13.01	4 479 554
2005	2 610 350	53.46	618 775	12.67	1 016 570	20.82	637 564	13.06	4 883 259
2006	3 121 829	44.04	1 010 555	14.26	2 018 133	28.47	937 775	13.23	7 088 292
2007	3 895 783	40.60	1 458 734	15.20	3 125 061	32.57	1 115 965	11.63	9 595 543
2008	5 032 358	41.68	1 859 637	15.40	3 909 441	32.38	1 272 128	10.54	12 073 564
2009	5 056 935	43.21	1 858 350	15.88	3 601 281	30.77	1 187 781	10.15	11 704 347

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Selatan dalam era otonomi daerah dewasa ini, sebagai otoritas fiskal di daerah diharapkan dapat mengambil kebijakan fiskal yang dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan cara memberikan insentif fiskal kepada investor swasta yang akan menanamkan modalnya. Oleh karena terbatasnya sumber fiskal yang dimiliki, maka dengan investasi swasta diharapkan dapat menjadi mesin penggerak dalam pembangunan ekonomi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sinaga dan Siregar (2005), Tambunan (2009), bahwa pada masa pemulihan ekonomi, maka aktivitas perdagangan dan investasi lokal menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi.

Jadi dalam era otonomi daerah dewasa ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan iklim ekonomi yang sehat untuk dapat menarik investasi swasta, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan meningkatnya investasi swasta, maka *multiplier effect* investasi dapat berdampak pada peningkatan kemampuan fiskal daerah, sehingga ketergantungan fiskal daerah ke pusat dapat berkurang. Oleh karena itu pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat di daerah.

Bertitik tolak pada uraian sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian kabupaten kota, terutama dari segi investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap kinerja sektor pertanian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan?
4. Bagaimana dampak kebijakan fiskal terhadap kinerja perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dalam mendorong peningkatan kinerja perekonomian kabupaten kota, terutama dari segi investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, mengurangan pengangguran, dan kemiskinan.
2. Menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap kinerja sektor pertanian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan.
4. Melakukan simulasi kebijakan, dalam upaya untuk menemukan formasi kebijakan fiskal yang dapat mendorong kinerja perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Sebagai referensi bagi studi-studi tentang kebijakan fiskal dalam kaitannya dengan perekonomian daerah di masa yang datang.
2. Sebagai rujukan bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menformulasikan kebijakan fiskalnya, sehingga potensi sumberdaya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan. Istilah pertanian dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pertanian dalam arti luas, yang mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan.

Dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan lainnya yang dimaksud dalam penelitian adalah semua jenis pengeluaran dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan tidak tercatat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten kota, termasuk di dalamnya dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dana yang bersumber dari provinsi, dan dana lain yang berasal dari pemerintah pusat.

Ruang lingkup analisis dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan (21 kabupaten dan 3 kota). Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Tana Toraja Utara dimasukkan ke dalam kabupaten induk yaitu Kabupaten Tana Toraja. Jadi jumlah kabupaten kota yang dianalisis adalah 23 kabupaten kota (20 kabupaten dan 3 kota) di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan ***data panel*** yaitu gabungan antara data ***time series*** tahun (2004-2009) dan data ***cross section*** 23 kabupaten kota. Pemilihan rentang waktu data tahun 2004-2009, didasari oleh pertimbangan bahwa pada masa itu otonomi daerah sudah memasuki masa stabil dan perekonomian sudah mulai bangkit dari krisis.

Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, dipandang perlu untuk menghilangkan pengaruh volatilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, maka digunakan harga konstan tahun 2000. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis ekonometrika dengan sistem persamaan simultan.

Keterbatasan penelitian ini terutama disebabkan oleh ketersediaan data, dimana untuk beberapa variabel terpaksa harus digunakan proksi guna memperoleh data yang diperlukan. Data fiskal yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data fiskal kabupaten kota yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Beberapa kabupaten kota tidak menyediakan data secara lengkap tentang produk domestik regional bruto dari sisi permintaan, sehingga terpaksa dilakukan proksi. Ketidak tersediaan data pada beberapa variabel seperti, penyerapan tenaga kerja untuk masing-masing sektor. Oleh karena itu dalam persamaan penyerapan tenaga kerja terpaksa hanya dibagi dalam dua sektor, yaitu penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja non pertanian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pembangunan Ekonomi Regional

Pembangunan ekonomi regional adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, membentuk suatu pola kemitraan antar pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru, guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Arsyad, 1999).

Oleh karena itu pembangunan daerah berkenaan dengan tingkat dan perubahan dalam suatu jangka waktu tertentu mengenai variabel-variabel seperti faktor produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal dan tenaga kerja, teknologi, serta faktor produksi lain dalam daerah yang dibatasi secara jelas. Fokus analisis dalam pembangunan ekonomi regional adalah aktivitas agregat berupa perekonomian makro di daerah tertentu dalam suatu set daerah yang terpisah (Azis, 1994). Pengertian tersebut lebih menekankan pada perubahan-perubahan pada variabel-variabel ekonomi, sementara (Arsyad, 1999) lebih menekankan pada aspek usaha untuk merubah variabel ekonomi.

Sementara itu Adisasmita (2005) mengemukakan bahwa pembangunan regional merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, sarana dan prasarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, teknologi, situasi ekonomi, dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah, dan lingkungan pembangunan secara luas.

Analisi ekonomi makro regional pada dasarnya bertujuan untuk memprediksi perubahan-perubahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam kegiatan ekonomi regional berdasarkan saling pengaruh dari veriabel-variabel ekonomi daerah, seperti hasrat mengkonsumsi marjinal, hasrat impor marjinal dan rasio output marjinal. Oleh karena itu pendekatan ekonomi makro interregional merupakan cara pendekatan yang cukup bermanfaat dalam melakukan analisis ekonomi regional, dan dapat menjelaskan banyak hal mengenai hubungan antar daerah, tetapi pendekatan ini memiliki kelemahan kerena tidak dapat menjelaskan tentang apa yang terjadi pada daerah-daerah yang

bersangkutan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendapatan regional, didasarkan pada teori basis ekspor dan perluasan dalam bentuk model pendapatan interregional (Richardson, 2001).

Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari beberapa aspek: (1) pertumbuhan ekonomi harus diukur dengan kenaikan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) nyata, dalam suatu jangka waktu yang panjang. Apabila pertumbuhan PDRB nyata diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka yang terjadi bukan pertumbuhan ekonomi, tetapi kemunduran ekonomi, (2) kenaikan pendapatan perkapita nyata dalam jangka panjang, dan (3) pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana PDRB perkapita naik, diiringi dengan penurunan kesenjangan pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (Jhingan, 2000).

Sejalan dengan hal tersebut Mawardi (2009) mengemukakan bahwa pembangunan daerah perlu diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, prakarsa dan peran aktif masyarakat, serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Pembangunan daerah ditujukan pula untuk mengisi otonomi darah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi interregional, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional antara lain adalah investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor daerah (Arsyad, 1999).

2.1.1. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Investasi merupakan suatu variabel penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan atau injeksi investasi tidak hanya meningkatkan permintaan agregat seperti dalam model makro ekonomi keynes, tetapi juga dapat meningkatkan penawaran agregat, melalui pengaruhnya terhadap peningkatan kapasistas produksi. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, maka investasi akan meningkatkan stok modal, dan setiap penambahan stok modal, akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan output dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Soediyono (1992) mengatakan bahwa masyarakat yang perekonomiannya tumbuh, disebabkan investasi nettonya bernilai positif, (investasi bruto lebih besar dari penyusutan). Oleh karena itu apabila pemerintah daerah bermaksud untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya, maka kapasitas produksi daerah perlu ditingkatkan. Sementara untuk meningkatkan kapasitas produksi maka perlu meningkakan stok kapital. Karena itu untuk meningkatkan stok kapital, dibutuhkan investasi yang besar.

Tarigan (2004) menggambarkan injeksi investasi di suatu daerah tidak hanya berpengaruh pada ekspor daerah tersebut, tetapi juga berpengaruh pada ekspor daerah-daerah lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa investasi dalam suatu daerah berpengaruh langsung terhadap pendapatan daerah tersebut. Artinya apabila investasi pada suatu daerah bertambah besar, maka secara teoritis dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Besarnya dampak perubahan pendapatan daerah akibat perubahan investasi, tergantung pada angka pengganda investasi regional.

2.1.2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah, menurut teori makro ekonomi, dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal dan belanja barang dan jasa merupakan injeksi terhadap perekonomian daerah dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Setiawan, (2006) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran eksogen yang besarannya ditentukan oleh seberapa besar anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak. Pengeluaran pemerintah biasanya ditujukan untuk pengadaan infrastruktur berupa fasilitas umum, maupun berupa transfer langsung yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinan.

Apabila mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi interregional, maka pengeluaran pemerintah daerah, akan berpengaruh langsung pada pendapatan daerah, dan besarnya dampak pengeluaran pemerintah tersebut, tergantung pada angka pengganda pengeluaran pemerintah.

2.1.3. Ekspor Impor dan Perumbuhan Ekonomi Regional

Dalam konteks ekonomi regional, perdagangan lebih ditekankan pada alokasi sumberdaya dari suatu daerah ke daerah lain dalam suatu negara. Oleh karena itu ekspor impor dalam ekonomi regional adalah transaksi perdagangan antar pelaku ekonomi pada suatu daerah dengan daerah lain, dan pengertian ekspor impor juga berlaku apabila transaksi perdagangan antar pelaku ekonomi pada suatu daerah dengan negara lain.

Napirin (1995) mengatakan bahwa perbedaan ekonomi internasional dan ekonomi regional adalah ekonomi internasional menyangkut hubungan internasional pada beberapa negara dimana: (1) mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar, (2) sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan serta politik berbeda, dan (3) faktor produksi yang dimiliki berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga yang dihasilkan.

Secara teoritis perdagangan antar daerah atau negara terjadi karena saling menguntungkan antar satu dengan yang lain. Dengan menggunakan asumsi dua daerah A dan B, dimana hanya ada satu barang yang diperdagangkan, dapat dilakukan analisis secara parsial untuk melihat proses perdagangan antara daerah.

Misalkan harga barang di daerah A lebih rendah dari pada di daerah B, maka perbedaan harga ini membuka peluang untuk terjadinya perdagangan antara daerah. Barang akan mengalir (diekspor) dari daerah A ke daerah B. Akibatnya harga barang di daerah B akan turun karena jumlahnya bertambah, sementara harga barang di daerah A akan naik karena jumlahnya berkurang. Proses perdagangan ini terus terjadi sampai mencapai titik keseimbangan harga antara daerah A dan daerah B.

2.2. Konsep Desentralisasi

Susiyati (2007) mengatakan desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Semakin besar suatu negara (dilihat dari penduduk dan luas wilayah), maka biasanya semakin kompleks dan heterogen pemerintahannya, yang tercermin dari tingkatan pemerintah daerah. Desentralisasi

adalah cara untuk melakukan penyesuaian tata kelola pemerintahan dimana dilakukan distribusi fungsi pengambilan keputusan dan kontrol.

Litvack *at al*. (1999); Sidik (2002) mengatakan secara garis besar, dalam rangka melihat dampak terhadap layanan publik, desentralisasi dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu desentralisasi politik *(political decentralization),* desentralisasi administrasi *(administrative decentralization),* dan desentralisasi fiskal *(fiscal decentralization).* Desentralisasi politik merupakan, melimpahkan kepada daerah kewenangan yang lebih besar menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan pemimpin daerah, dan standar berbagai peraturan dan kebijakan. Desentralisasi administrasi, berupa redistribusi kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya di antara berbagai tingkat pemerintahan. Kapasitas yang memadai disertai kelembagaan yang cukup baik di setiap tingkat, merupakan syarat agar hal ini bisa efektif. Desentralisasi fiskal, menyangkut kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Ketiga jenis desentralisasi ini saling berkaitan, dan untuk melihat dampaknya kepada berbagai hal, tidak bisa dilakukan evaluasi secara terpisah. Desentralisasi politik dan administrasi secara bersamaan diyakini menjadi prasyarat awal bagi peningkatan kualitas layanan publik, terutama untuk kelompok miskin. Sebab partisipasi masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pemerintah daerah hanya dapat terjadi apabila desentralisasi politik sudah berlangsung. Desentralisasi administrasi kemudian memperkuat kondisi tersebut lewat pembentukan kelembagaan yang bertanggung jawab menjalankan proses itu. Kemudian, desentralisasi fiskal menjadi bagian yang melengkapi persyaratan awal tadi, agar ada kepastian bahwa semua program dan target dapat dilaksanakan.

Desentralisasi fiskal, merupakan penyerahan kewenangan di bidang keuangan antar level pemerintahan, mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana, dan atau sumber-sumber daya ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri. Bagi daerah, desentralisasi fiskal berfungsi untuk menentukan jumlah

uang yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Suparmoko, 2002).

2.3. Desentralisasi Fiskal

Konsep desentralisasi fiskal yang selama ini dikenal dengan *money follow function* (Bahl, 1994) mensyaratkan bahwa pembagian tugas dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah akan diiringi dengan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal penerimaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dapat dibiaya dengan sumber-sumber pembiayaan yang ada.

Sejalan dengan hal tersebut kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Selain kedua kebijakan tersebut pemerintah pusat juga mengalokasikan anggran kementrian dalam upaya pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas perbantuan, (Simanjuntak, 2002; Basri, 2004; Mardiasmo, 2009).

Pemberian tanggung jawab yang semakin besar kepada daerah, harus diikuti oleh kemampuan daerah untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang semakin baik. Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhan pengeluarannya, dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas daerah, perlu upaya penguatan kemampuan pemungutan pajak dan retribusi daerah, (Suparmoko, 2002; Alisjahbana, 2000; Subiyantoro dan Rifat, 2004; Mardiasmo, 2009).

Kebijakan desentralisasi fiskal sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, diarahkan untuk: (1) meningkatkan ketahanan fiskal berkesinambung-an (*fiscal sustainability*), (2) memperkecil ketimpangan keuangan pusat dan daerah (*vertical imbalance),* (3) mengkoreksi ketimpangan kemampuan keuanganantar daerah *(horizontal imbalance)*, (4)meningkatkan akutanbilitas,

efektivitas, dan efisiensi kinerja pemerintah daerah, dan (5) meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat di sektor publik (Mahi, 2000).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur desentralisasi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab di bidang administrasi dan di bidang politik kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah, dengan diikuti perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip, *money follows function* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Tetapi mengingat desentralisasi di bidang administrasi juga berarti transfer personal (pegawai negeri sipil) yang penggajiannya menjadi tanggung jawab daerah, prinsip *money follows function*, atau sebut saja penggunaan anggaran sesuai fungsinya, tidak mungkin berlangsung. Menurut Lewis, (2001) hal ini terjadi karena dana alokasi umum (DAU) yang menjadi sumber utama pendapatan daerah, sebagian besar digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, sehingga anggaran untuk pembangunan menjadi kecil.

Siregar (2001) mengemukakan bahwa banyak daerah, pengeluaran untuk pembangunan tahun anggaran 2001 (setelah otonomi daerah/desentralisasi) lebih rendah dari pos pengeluaran yang sama tahun anggaran 2000 (sebelum desentralisasi). Sementara itu Halim (2001) ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi adalah; (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alasan yang mendasari pemikiran bahwa pengelolaan keuangan negara secara terdesentralisasi lebih baik dibanding dengan pengelolaan secara sentralistik adalah karena akan terjadi efisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Desentralisasi membuat pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi dan preferensi kebutuhan masyarakat dibanding dengan pemerintah yang terpusat (Lin dan Liu, 2000; Alm dan Bahl, 2001).

Samimi, *at al*. (2010) mengakaji tentang desentralisasi fiskal di Iran dengan menggunakan data tahun 2001-2007, dan Iimi, (2005) dengan mengunakan teknik *cross country* data periode 1997-2001, menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Secara umum, penerimaan pemerintah termasuk pemerintah daerah dapat bersumber dari pajak (*taxes*), retribusi (*user charges*) dan pinjaman (Musgrave dan Musgrave, 1991). Hal ini secara eksplisit diatur pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 22/1999. Khusus untuk pinjaman daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 telah memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kapasitas keuangan daerah untuk meminjam. Semua pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lewat dan seijin pemerintah pusat, baik itu pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Tetapi, meskipun perundang-undangan memperbolehkan daerah melakukan pinjaman, hingga beberapa tahun ke depan, hal ini belum diperkenankan oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, sumber pemerintah daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) berupa penrimaan dari restribusi, dan pajak daerah, maupun dari bagi hasil dari pajak dan bukan pajak. Pola bantuan atau sistem transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan inti dari kebijakan desentralisasi fiskal. Sistem transfer ini mempunyai arti yang sangat penting karena pengeluaran pemerintah daerah sebagian besar, atau sekitar dua per tiganya berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat. Pada masa sebelum desentralisasi, program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagian besar dilakukan dalam bentuk s*pecific grant.* Penentuan alokasi anggaran sudah ditentukan dari pemerintah pusat dengan format yang kaku (*rigid),* sehingga seringkali implementasi di lapangan banyak terkendala pada urusan administratif. Dengan desentralisasi pola penyaluran bantuan pemerintah pusat berubah menjadi *block grant,* sehingga perencanaan program, implementasi dan monitoring serta evaluasi dilakukan oleh pemerintah daerah. Bentuk *block grant* dalam kerangka desentralisasi fiskal berupa dana alokasi umum (DAU) (Simanjuntak, 2002).

Secara konseptual desentralisasi fiskal berhubungan dengan perumusan kewenangan atas sumber-sumber dana yang ada, atau akses terhadap dana transfer dan pembuatan berbagai keputusan, baik yang menyangkut pengeluaran rutin maupun pengeluaran investasi pembangunan (Braun and Grote dalam Ridyanti, 2009; Ritonga, 2002). Transfer fiskal merupakan inti dari suatu hubungan fiskal antar pemerintahan dan memiliki peran penting dalam mendukung program desentralisasi fiskal, karena pengeluaran pemerintah daerah dua per tiganya merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer berupa dana *block grant* akan memberikan pengaruh yang lebih efisien terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dibanding dengan dana transfer berupa s*pesific grant* (Simanjuntak, 2002; Stiglitz, 2000; Poque dan Sgontz, 1978).

Desentralisasi fiskal di Indonesia tentunya akan berpengaruh terhadap peranan pemerintah daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Sumber-sumber keuangan daerah yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 meliputi : (1) pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas: (a) pajak daerah, (b) restribusi daerah, (c) hasil perusahaan daerah (BUMD), (d) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (e) lain-lain pendapatan asli daerah, dan (2) dana perimbangan atau disebut juga bantuan atau transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari: (a) bagi hasil pajak dan bukan pajak, (b) dana alokasi umum (DAU), dan (c) dana alokasi khusus (DAK) (Departemen Dalam Negeri, 2001).

Pada implementasi desentralisasi fiskal pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kontribusi PAD relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari pusat. Pajak yang memberi kontribusi terbesar pada PAD masih memiliki kelemahan di daerah, karena bagian yang paling besar dari pajak, seperti pajak pendapatan dan pajak penghasilan masih didominasi oleh pemerintah pusat. Pada tingkat Provinsi terdapat hanya dua jenis pajak daerah yang diperkirakan signifikan terhadap penerimaan daerah seperti Pajak kepemilikan kendaraan bermotor dan pajak perpanjangan kendaraan bermotor, sedangkan dua jenis pajak

lain seperti pajak minyak dan pajak eksploitasi air bawah tanah memberi kontribusi yang tidak signifikan. Pada tingkat kabupaten kota terdapat tujuh jenis pajak daerah, tetapi hanya beberapa jenis pajak yang memberi kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak iklan memberi kontribusi besar di kota, sedang penerimaan penting di kabupaten yang berasal dari jenis pajak adalah pajak bahan galian tipe C (Brojonegoro, 2001; Bahl dan Lin, 1994).

Keberhasilan meningkatan penerimaan pajak dan restribusi daerah tergantung kepada badan pemungut pajak di daerah yang dikenal dengan dinas pendapatan daerah (Dispenda). Kemampuan administratif dinas tersebut akan menentukan apakah penerimaan daerah dari pajak sama besarnya dengan besarnya potensi pajak. Walaupun sulit mengharapkan besarnya penerimaan daerah sama dengan potensi pajak, tetapi diharapkan selisihnya tidak terlalu signifikan. Beberapa permasalahan yang krusial dalam hal pemungutan pajak adalah kelemahan data dan sistem informasi serta lemahnya tindakan dalam pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan. Adminitrasi harus diperbaiki mulai dari proses pendaftaran hingga proses pengumpulan. Selanjutnya tindakan yang tegas dalam mengimplementasikan undang-undang menjadi prioritas yang menjamin bahwa setiap orang mempunyai perlakuan yang sama dalam hukum dan undang-undang (Mahi, 2000; Brodjonegoro dan Vazques, 2002).

2.4. Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa keuangan adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian keuangan daerah tersebut, menekankan pada dua hal pokok yaitu tentang hak dan kewajiban daerah yang terkait dengan keuangan daerah.

Hak daerah dalam kerangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Hak daerah tersebut meliputi antara lain: (1) hak menarik pajak daerah, (2) hak untuk menarik retribusi/iuran daerah, (3) hak mengadakan pinjaman, dan (4) hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat.

Disisi lain pemerintah daerah berkewajiban melaksanaan tugas-tugas pemerintahan pusat sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pada masa sentralisasi, keuangan daerah didominasi oleh transfer keuangan dari pusat melalui mekanisme *block grant* dalam bentuk subsidi daerah otonomi (SDO), instruksi presiden (inpres), dan daftar isian proyek (DIP). Konstribusi PAD terhadap keuangan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi penerimaan daerah dari dinas, laba bersih dari BUMD, kurang berperan dalam anatomi keuangan daerah. Kecilnya konstribusi PAD terhadap total pendapatan daerah diperlemah dengan alokasi PAD yang hanya digunakan untuk biaya rutin pemerintahan daerah. Kondisi ini jelas memperlemah keberadaan pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota terhadap pusat dalam hal, pertama, hubungan kelembagaan yang sangat tergantung kepada bantuan pusat,

kedua, buruknya kualitas kinerja pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah (Chalid, 2005).

Perubahan tata pemerintahan kepada desentralisasi membawa perubahan paradigma perimbangan keuangan daerah dan pusat. Mekanisme transfer diubah menjadi sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Selain itu, diterapkan pula konsep baru dalam sistem keuangan daerah, yaitu dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan kedua konsep keuangan tersebut ditujukan untuk menutupi *insuficiency* keuangan daerah dalam membiayai pembangunan. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong keseimbangan pembangunan antara daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang kuat dan daerah yang lemah kemampuan keuangannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun l999 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, terdapat tiga komponen yang menjadi sumber penerimaan keuangan daerah yaitu, (1) dana perimbangan; (2) pendapatan asli daerah (PAD); (3) pinjaman daerah. Ketiga komponen ini dibagi berdasarkan pendapatan dan pembiayaan daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah. Adapun pinjaman daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Suparmoko (2002) mengemukakan dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah hendaknya selalu berada di depan dalam arti memberi pengarahan dan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah sedapat mungkin dapat menyediakan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta, seperti jalan raya, keamanan, dan keadilan.

2.4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), (UU Nomor. 17 tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga produk APBD merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas perbantuan tidak dicatat dalam APBD (BPKP, 2007).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan (BPKP, 2007).

Adapun fungsi APBD Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu: (1) fungsi otorisasi, anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, (2) fungsi perencanaan, anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, (3) fungsi pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (4) fungsi alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, (5) fungsi distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan (6) fungsi stabilisasi, anggaran daerah mengandung arti harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan daerah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan

2.4.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) dana perimbangan, dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perincian selanjutnya, pendapatan asli daerah terdiri atas:(1) pajak daerah (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari; (1) dana bagi hasil (2) dana alokasi umum; dan (3) dana alokasi khusus.

Pendapatan daerah, selain PAD dan dana perimbangan, adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari

lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

2.4.2.2 Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD adalah belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota yang terdiri dari atas, urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) belanja modal, (4) bunga, (5) subsidi, (6) hibah, (7) bantuan sosial, (8) belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta (9) belanja tidak terduga.

2.4.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.5.Tinjauan Studi Terdahulu

2.5.1. Peran Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian, dengan landasan teori ekonomi yaitu ketidaksempuranaan pasar, eksternalitas, skala ekonomi, resiko, dan ketidak pastian, distorsi dan distribusi, (Poque and Sgontz, 197; Stiglitz; 2000).

Penelitian tentang kebijakan fiskal telah banyak dilakukan baik di manca negara maupun di Indonesia. Beberapa hasil penelitian terdahulu, diuraikan dalam sub bab ini, dan diharapkan menunjang penelitian yang dilakukan.

Kuttner dan Posen (2002) mengkaji tentang efektivitas kebijakan fiskal di Jepang, menggunakan data periode tahun 1976-1999, dengan analisis struktural VAR, menemukan bahwa kebijakan fiskal ekspansif, baik dalam bentuk pemotongan pajak maupun dalam bentuk pengeluaran belanja pemerintah, memiliki efek stimulasi yang signifikan.

Sejalan dengan hal tersebut, Shaheen dan Paul (2009) melakukan studi tentang dampak dinamis dari guncangan kebijakan fiskal di Pakistan, menggunakan data triwulan dari tahun 1973:1-2008:4, dengan model SVAR, penulis menemukan bahwa, pertama kebijakan fiskal mampu mendorong kegiatan ekonomi melalui ekspansi pengeluaran, meningkatkan inflasi, dan defisit publik, akan tetapi menghasilkan output yang lebih rendah dalam jangka menengah. Kedua, upaya untuk mencapai konsolidasi fiskal dengan meningkatkan beban pajak tampaknya berhasil dalam jangka pendek dan menengah, tetapi kebijakan ini dapat memperlambat aktivitas ekonomi dalam jangka panjang.

Sementara itu, Mountford dan Uhlig (2005) mengkaji dampak guncangan kebijakan fiskal di Amerika Serikat, dengan menggunakan data kuartalan dari tahun 1955-2000, menggunakan model VAR, penulis menyimpulkan bahwa ekspansi fiskal yang dibiayai dengan pajak yang tinggi, maupun pemotongan pajak yang dilakukan tanpa mengurangi pengeluaran pemerintah, dapat menstimulasi perekonomian dalam jangka pendek, akan tetapi kedua jenis guncangan tersebut memiliki efek *crowding out* investasi.

Gemmell, *at al*. (2006) menganalisis dampak kebijakan fiskal di negera-negara EOCD. Dengan menggunakan model *dynamic fixed effects* (DFE) pada 16 negara-negara EOCD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak dalam pertumbuhan jangka panjang yang dapat dicapai dengan cepat (dalam beberapa tahun). Juga ditemukan bahwa dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan jangka pendek adalah signifikan.

Lebiih lanjut Ducanes, *at al*. (2006) melakukan studi tentang dampak makroekonomi atas kebijakan fiskal pada empat negara di Asia; yaitu Cina,

Bangladesh, Indonesia dan Philipina, dengan menggunakan model simulasi *structural macroeconometric*, penulis menemukan bahwa, ekspansi fiskal melalui penurunan tarif pajak memiliki multiflier efek yang jauh lebih kecil daripada melalui pengeluaran pemerintah.

Lendvai (2007) mengkaji tentang dampak kebijakan fiskal di Hungaria selama periode tahun 1997-2005 dengan menggunakan model *structural vector autoregression* (SVAR) untuk mengidentifikasi guncangan fiskal, penulis menemukan bahwa kebijakan ekspansi fiskal mempengaruhi secara signifikan terhadap konsumsi rumah tangga, dan tidak signifikan terhadap investasi.

Ramos dan Oriol (2007) mengkaji dampak jangka panjang kebijakan fiskal atas distribusi pendapatan di Inggris. Dengan menggunakan model *vector autoregression (VAR),* penulis menemukan bahwa pemotongan pajak meningkatkan output, akan tetapi peningkatan belanja publik menurunkan output. Juga ditemukan bahwa peningkatan dalam pengeluaran publik mengurangi ketimpangan pendapatan.

Claeys (2008) menganalisis dampak kebijakan fiskal di Swedia, selama kurung waktu tahun 1970-2006. Dengan menggunakan *generalised method of moments* (GMM), penulis menemukan bahwa kebijakan fiskal tidak memiliki kendala dalam merespon ketidakstabilan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran dan menaikkan pajak. Reformasi kelembagaan tidak dapat mengendalikan kenaikan belanja pemerintah, konsumsi masyarakat dan transfer sosial.

Forni, *at al*. (2008) mengkaji dampak kebijakan fiskal pada negara-negara Uni Eropa, selama periode tahun 1980-2005, dengan menggunakan model keseimbangan dinamis, menemukan bahwa belanja pegawai serta belanja barang dan jasa kurang berpengaruh terhadap konsumsi swasta, sementara pengeluaran pemerintah berupa transfer kepada rumah tangga, memberi dampak yang lebih besar dan permanen, penulis juga menemukan bahwa penurunan pajak pendapatan dan konsumsi, memiliki dampak yang lebih besar terhadap konsumsi dan output.

Park (2010) mengkaji peran kebijakan fiskal dalam *rebalancing* pertumbuhan di Asia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kebijakan fiskal dalam proses *rebalancing* di Asia. Penulis mengkaji empat negara yang

sangat berbeda wilayah di Asia, yaitu Cina, Korea, Philipina dan Singapura. Penulis menemukan bahwa kebijakan fiskal yang paling tepat dan efektif untuk *rebalancing* sangat bervariasi diantara beberapa negara, dan sangat ditentukan oleh sifat dari masing-masing negara. Cina misalnya, harus menggunakan kebijakan fiskal terutama untuk memperkuat permintaan domestik, khususnya konsumsi. Republik Korea menggunakan kebijakan fiskal untuk mempromosikan suatu keseimbangan yang lebih baik antara manufaktur. Philipina, kebijakan fiskal harus mengatasi iklim investasi yang buruk. Sementara Singapura fokus pada kebijakan fiskal untuk merangsang konsumsi.

Guimaraes (2010) mengkaji dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian India selama periode tahun 1996-2009, dengan menggunakan model VAR, menemukan bahwa kebijakan fiskal dapat memainkan peran yang cukup efektif terhadap perekonomian di India.

Galí, *at al*. (2007) dengan memperhatikan model newkeynesian penulis mengkaji dampak pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi, dan menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan konsumsi.

Nurudeen dan Abdullahi (2010) menganalisis pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria, penulis menggunakan data tahun 1977-2007, dengan menggunakan model *error corection model (ECM)*, menemukan bahwa belanja operasional dan belanja pendidikan pemerintah, berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran untuk transportasi, komunikasi dan kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Negeria. Karena itu penelitian ini merekomendasikan untuk tetap meningkatkan belanja pendidikan, dengan melakukan pengendalian secara ketat untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar dikelola dengan baik.

Tondl (2005) menganalisis dampak makroekonomi dari kebijakan fiskal di negara-negara Eropa Timur, dengan menggunakan data panel, penulis menemukan bahwa, dalam jangka pendek konsolidasi anggaran di negara-negara Eropa Timur pada tahun 1990-an, memberi dampak pada pertumbuhan output, dan pengeluaran konsumsi sensitif terhadap kenaikan pajak pendapatan. Hal tersebut mirip dengan temuan di empat negara anggota Uni Eropa (Yunani, Spanyol, Irlandia, dan Portugal).

Seok, *at al*. (2010) mengkaji kebijakan fiskal dan *crowding out*, dengan menggunakan data panel pada 24 negara di Asia, dengan menggunakan model *simple panel regression* dan *structural vector autoregression* (SVAR), menemukan bahwa, pemerintah negera-negara berkembang di Asia, cepat dan berani mengeluarkan paket stimulus fiskal yang cukup besar pada paket-paket stimulus fiskal, dimana paket stimulus fiskal tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang sehat dan bertanggung jawab memberikan ruang fiskal yang memungkinkan respon terhadap pengendalian krisis global.

Kitao (2010) mengkaji kebijakan fiskal jangka pendek dalam kaitannya dengan kesejahteraan, redistribusi, dan dampak agregat dalam jangka panjang maupun jangka pendek di Amerika Serikat. Dengan menggunakan model *general equilibrium*, penulis menemukan bahwa pemotongan pajak secara efektif memberikan insentif kepada rumah tangga untuk bekerja lebih giat dan meningkatkan output. Sementara kebijakan pemotongan pajak tidak memiliki efek insentif terhadap konsumsi, karena sebagian besar tambahan pendapatan disimpan. Penulis juga menemukan bahwa apabila kebijakan stimulus fiskal diimplementasikan dalam lingkungan resesi yang dipicu oleh penurunan produktivitas dan peningkatan risiko pengangguran, maka pemotongan pajak dapat memberi insentif untuk bekerja dan menyimpan, serta mengurangi dampak negatif dari guncangan agregat.

Costa dan Dixon (2011) mengkaji kebijakan fiskal dalam pasar persaingan tidak sempurna, dengan menggunakan *general equilibrium models*, menemukan bahwa efektifitas kebijakan fiskal tergantung pada tingkat persaingan dalam pasar. Hal tersebut disebabkan karena mark-up mendistorsi harga relatif untuk konsumsi dan liburan, serta efek multiplier meningkat pada tingkat persaingan sempurna.

Arin, *at al*. (2011) mengkaji tentang pertumbuhan tarif pajak di negara-negara Scandinavian, dengan menggunakan analisis panel data tahun 1969-2001, penulis meyimpulkan bahwa kenaikan marjinal tarif pajak memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara Afonso dan Ricardo (2009) mengkaji dampak makroekonomi terhadap kebijakan fiskal pada empat negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Italia. Penulis menggunakan model

SVAR, dengan data kuartalan, menemukan bahwa guncangan belanja pemerintah, umumnya, memiliki dampak yang kecil terhadap produk domestik bruto, dan memilik efek *crowding-out***.**

Penelitian yang sama dilakukan oleh Motlaleng (2011) menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam konteks *crowding out* atau *crowding in* dalam kasus Namibia. Penulis menggunakan data kuartalan terhadap produk domestik bruto, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, tingkat suku bunga pinjaman dan defisit anggaran pemerintah dari tahun 1990; Q1 ke 2005; Q2. Dengan menggunakan *vector error correction model (VECM),* penulis menemukan bahwa ada hubungan jangka panjang yang positif antara investasi swasta dan produk domestik bruto. Selanjutnya, ada hubungan negatif antara investasi swasta dan tingkat suku bunga pinjaman. Sementara kenaikan belanja pemerintah ditemukan adanya *crowding out* investasi swasta.

Ogbole, *at al*. (2011) menggunakan data time series 1970-2006, dengan menggunakan model ekonometrika dalam menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan dalam efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selama dan setelah periode regulasi tahun 1986, namun perbedaan itu secara statistik tidak nyata. Lebih lanjut, Adefeso dan Mobolaji (2010) menggunakan data tahun 1970-2007 dalam mengkaji kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria, penulis menemukan bahwa kebijakan moneter lebih efektif dibanding dengan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

Safdari, *at al*. (2011) menggunakan data time series tahun 1973-2008, dengan menggunakan *vector autoregressive model* (VAR) dalam mengkaji dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Iran. Penulis menemukan bahwa pertumbuhan indeks harga barang dan jasa, pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara variabel pertumbuhan pajak pendapatan dan pertumbuhan pengeluaran investasi pemerintah memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi Iran.

Allers dan Paul (2010) melakukan studi tentang model persamaan simultan atas interaksi kebijakan fiskal, penulis menggunakan data cross-sectional dari 496 kota pada tahun 2002. Penulis menemukan bahwa, pengeluaran pemerintah dan atau pajak, dapat menjelaskan perilaku saling ketergantungan fiskal antar pemerintah daerah.

Selajan dengan hal tersebut; Afonso, Gruner, dan Kolerus, (2010) mengkaji dampak pengeluaran pemerintah terhadap output selama terjadinya krisis keuangan mencakup 127 negara untuk periode 1981-2007. Dengan menggunakan analisis panel, penulis menemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada dasarnya memiliki dampak yang sama pada pertumbuhan ekonomi dengan atau tanpa krisis keuangan. Disebabkan karena pengeluaran pemerintah yang lebih besar cenderung kurang ditargetkan, sehingga kurang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Temuan tersebut sejalan dengan temuan Mehmood dan Sadiq (2010) menggunakan data time series 1976-2010, dengan *error correction model* (ECM), dalam menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan di Pakistan. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat hubungan terbalik antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ditemukan pula bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi yang efektif dan efisien dapat meningkatkan investasi swasta, perluasan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

Sementara itu, Kakar (2011) menggunakan data time series periode 1980-2009, dalam menganalisis dampak variabel fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan, ditemukan bahwa kebijakan fiskal sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Pakistan. Dalam perkembangan jangka pendek ekonomi dapat dirangsang dengan mengendalikan suku bunga dan belanja pemerintah, tetapi kebijakan ini dapat mempengaruhi kecepatan proses pertumbuhan ekonomi.

Penelitian tentang dampak sitimulus fiskal terhadap pemulihan ekonomi dilakukan oleh Hong (2010) menganalisis isu kebijakan fiskal di Korea Selatan setelah krisis, menggunakan data tahun 1961-2008. Penulis menemukan bahwa

stimulus fiskal Korea pada tahun 2008, memiliki kontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi dengan cepat, dan luar biasa besar dibandingkan dengan respon fiskal selama kemerosotan ekonomi. Penelitian ini juga menemukan bahwa, hutang fiskal Korea masih dapat dikelola, walaupun kecenderungan rasio utang terhadap PDB Korea dalam beberapa tahun terakhir terus mingkat.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Abimayu (2005) mengkaji kebijakan fiskal dan efektivitas stimulus fiskal di Indonesia, menggunakan model makro Modfi dan CGE Indorani, dengan menggunakan data tahun 1969/1970 sampai 2002. Ditemukan bahwa kebijakan stimulus fiskal di Indonesia mampu memberikan hasil yang positif dan cukup signifikan. Kebijakan stimulus fiskal, melalui penurunan tarif perpajakan dan peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 0.4 persen PDB akan menghasilkan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.4 sampai 0.8 persen, (atau pengganda pengeluaran pemerintah sekitar 1.0 sampai 2.0 kali). Hasil empiris studi untuk negara-negara berkembang menunjukkan bahwa angka pengganda dari kebijakan stimulus fiskal ini sekitar 1.5 kali. Hasil ini tentunya merupakan hasil kombinasi netto dari berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya pengganda fiskal. Di satu sisi, kondisi kapasitas produksi perekonomian di Indonesia masih belum optimal sehingga kebijakan fiskal dapat efektif. Namun demikian, di sisi lain Indonesia adalah negara yang mempunyai perekonomian terbuka dan menganut sistem nilai tukar yang mengambang bebas, sehingga kebijakan fiskal akan kurang efektif. Stimulus fiskal dari sisi penerimaan, menghasilkan pengganda yang lebih kecil dibanding dengan stimulus fiskal dari sisi pengeluaran. Dari sisi penerimaan ini, kebijakan penurunan tarif PPN lebih efektif dibandingkan dengan PPh ditinjau dari dampak pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam jangka panjang, hasilnya sebaliknya, penurunan tarif PPh lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal pada dasarnya memiliki dampak terhadap perekonomian, namun besarnya dampak dari kebijakan tersebut, berbeda antara satu negara dengan negara lain atau antar satu daerah dengan daerah lain.

Hasil Penelitian-penelitan pada negara-negara berkembang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak yang lebih besar terhadap perekonomian dibanding dengan negera-negara maju. Juga dapat disimpulan bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah pada sektor ekonomi negera-negara berkembang memiliki dapat lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibading dengan pengeluaran pemerintah pada sektor lainnya.

2.5.2. Peran Desentralisasi Fiskal dalam Perekonomian

Penelitian tentang desentralisasi fiskal telah banyak dilakukan baik di manca negara maupun di Indonesia. Beberapa hasil penelitian terdahulu, diuraikan dalam sub bab ini, dan diharapkan menunjang penelitian yang dilakukan.

Lin dan Liu (2000) mengkaji tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di China, dengan menggunakan fungsi produksi *Cobb-Douglas* sebagai dasar analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi alokasi sumber daya. Di samping reformasi perdesaan, akumulasi modal, dan sektor swasta merupakan kunci yang mendorong pertumbuhan ekonomi di China.

Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sasana (2009) yang melakukan studi tentang peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah, menggunakan pool data 35 kabupaten kota dari tahun 2001-2005. Dengan menggunakan analisis jalur, penulis menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten kota di Jawa Tengah, juga diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap tenaga kerja yang terserap pada kabupaten kota di Jawa Tengah, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu Kuncoro (2004) menganalisis pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia, menggunakan data panel 280 kabupaten kota di Indonesia peride 1998-

2002, menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan, penulis menemukan bahwa terjadi peningkatan alokasi transfer dan diikuti dengan penggalian pendapatan asli daerah yang lebih tinggi. Bagi pemerintah pusat, transfer diharapkan menjadi pendorong bagi pemerintah daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya, tetapi penggalian pendapatan asli daerah yang hanya didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian daerah.

Temuan Kuncoro mirip dengan temuan Riyanto dan Siregar (2005) menggunakan sistem persamaan simultan untuk menangkap hubungan antara blok perekonomian daerah dengan blok keuangan daerah. Penulis menyimpulkan bahwa pada awal desentralisasi fiskal, belanja rutin meningkat signifikan, sedangkan belanja pembangunan mengalami penurunan. Tetapi apabila dana perimbangan terus ditingkatkan, maka akan direspon oleh pemerintah daerah dengan memperbesar pengeluaran pembangunan karena pengeluaran rutin telah terpenuhi. Dana perimbangan berpengaruh nyata terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah.

Hal yang sama diperoleh Saefudin (2005) meneliti dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian dan kelembagaan di Provinsi Riau, menggunakan sistem persamaan simultan, dengan menggunakan *pool data* 5 kabupaten dan kota di Provinsi Riau tahun 1996-2003. Peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal dan kinerja fiskal daerah menunjukkan bahwa pada sisi penerimaan terjadi peningkatan di mana dana transfer dari pemerintah pusat memberi kontribusi besar, tetapi pada sisi pengeluaran menunjukan alokasi pengeluaran rutin meningkat lebih tinggi dibanding alokasi pengeluaran pembangunan. Penurunan alokasi pengeluaran pembangunan ditunjukkan oleh penurunan alokasi pengeluaran untuk sektor-sektor pembangunan khususnya sektor pertanian, dan pelayanan sosial umum. Kebijakan kenaikan dana alokasi umum dan bagi hasil bukan pajak, dan realokasi pengeluaran rutin kepada pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan penurunan kesenjangan antar daerah.

Sumedi (2005) meneliti dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar daerah dan kinerja perekonomian nasional dan daerah, dengan menggunakan sistem persamaan simultan, terdiri atas dua jenis model yaitu model Provinsi Jawa Barat dan model Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa pajak daerah signifikan dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kapasitas fiskal daerah, dan kinerja perekonomian baik pada skala nasional maupun di Provinsi Jawa Barat. Dampak positif kebijakan desetralisasi fiskal terhadap sektor pertanian diindikasikan dengan meningkatnya produk domestik regional bruto sektor pertanian, baik pangan maupun non-pangan, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, dan peningkatan produksi padi.

Usman (2006) meneliti dampak desentralisasi fiskal terhadap distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan, menggunakan sistem persamaan simultan, dengan *pool data* tahun 1995-2003 pada 26 provinsi di Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan ekonomi pada periode sebelum desentralisasi fiskal tidak menguntungkan kelompok miskin, namun sebaliknya kelompok kaya lebih diuntungkan. Periode sesudah desentralisasi fiskal pada awalnya menguntungkan kelompok kaya, namun tahun berikutnya menguntungkan kelompok miskin. Hasil estimasi model pada sisi pengeluaran pemerintah, menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kesejahteraan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, pemerataan pendapatan, dan penurunan tingkat kemiskinan.

Haryanto dan Ester (2009) melakukan studi tentang desentralisasi fiskal dan penciptaan stabilitas keuangan daerah, dengan menggunakan data penel seluruh provinsi di Indonesia, menulis menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan stabilitas keuangan daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa stabilitas keuangan daerah terbukti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Barbara (2008) meneliti dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah, menggunakan sistem persamaan simultan, dengan menggunakan *pool data* 13 kabupaten kota Provinsi Kalimantan Tengah 1995-2005. Peneliti meyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal terbukti

meningkatkan penerimaan daerah tetapi tidak diikuti oleh perbaikan kinerja perekonomian. Fenomena tersebut diduga karena adanya penurunan yang signifikan terhadap pengeluaran sektor luar pertanian. Padahal pengeluaran sektor luar pertanian berpengaruh signifikan dalam meningkatkan PDRB. Penurunan pengeluaran sektor luar pertanian menyebabkan berkurangnya aktivitas perekonomian yang selanjutnya berdampak pada menurunnya PDRB. Penurunan pengeluaran sektor luar pertanian juga diduga menjadi penyebab tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja di daerah, sehingga tidak terjadi peningkatan yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pakasi (2005) mengevaluasi dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian kabupaten kota di Propinsi Sulawesi Utara, dengan menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan. Model terdiri atas empat blok yaitu, blok fiskal daerah, blok permintaan agregat daerah, blok produksi dan tenaga kerja, serta blok kinerja perekonomian. Peneliti menemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berdampak terhadap meningkatnya upaya pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun peningkatan tersebut berdampak terhadap menurunnya investasi dan kinerja perekonomian daerah. Sebaliknya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sektor ekonomi dan terkait dengan sektor publik berdampak meningkatkan investasi dan perekonomian daerah.

Pardede (2004) melakukan studi desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan pendekatan Input-Output, studi yang dilakukan meliputi evaluasi dampak pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dana dekonsentrasi, investasi swasta terhadap output, pendapatan dan kesempatan kerja. Akan tetapi penelitian ini hanya meliputi dampak desentralisasi fiskal pada tahun 2001.

Panjaitan (2006) melakukan studi dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan. Model terdiri atas tiga blok yaitu, blok fiskal daerah, blok investasi dan infrastuktur, serta blok kinerja perekonomian. Peneliti menemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berhasil meningkatkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai

pengeluaran pemerintah daerah kabupaten maupun kota, namun karena kebutuhan fiskal daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah juga meningkat lebih besar, maka daerah memiliki ketergantungan yang cukup besar kepada pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Rindayati (2009) mengkaji dampak desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketahanan pangan di wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan, menemukan bahwa kebijakan fiskal daerah dari sisi penerimaan yaitu dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan berupa pajak daerah dan retribusi daerah, kurang memberi pengaruh langsung terhadap kinerja ketahanan pangan dan kemiskinan. Peningkatan pengeluaran sektor pertanian berdampak pada peningkatan PDRB sektor pertanian selanjutnya meningkatkan kinerja ketahanan pangan, dan menurunkan kemiskinan, serta meningkatkan kinerja fiskal daerah.

Masri (2010) melakukan studi tentang pengaruh kebijakan fiskal regional terhadap inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan model regresi data panel kabupaten kota tahun 2001-2008. Peneliti menemukan bahwa belanja pegawai, belanja operasional dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini terjadi karena peningkatan permintaan barang dan jasa, tidak dapat diantisipasi oleh sisi penawaran, dengan kata lain telah terjadi inflasi akibat meningkatnya sisi permintaan (*demand pull inflation*).

Feltenstein dan Iwata (2005) menggunakan data time series tahun 1952-2096, dengan model *vector autoregressive* (VAR) dalam dalam menganalisis desentralisasi dan kinerja makroekonomi Cina. Penulis menemukan bahwa desentralisasi ekonomi berhubungan positif dengan pertumbuhan output riil di Cina, namun memiliki implikasi yang kurang baik pada tingkat inflasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berhasil meningkatkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah kabupaten maupun kota, namun karena kebutuhan fiskal daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah juga meningkat lebih besar, maka daerah memiliki ketergantungan yang cukup besar kepada pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Sementara hasil penelitian di Cina diperoleh bahwa desentralisasi fiskal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi alokasi sumber daya. Di samping reformasi perdesaan, akumulasi modal, dan sektor swasta merupakan kunci yang mendorong pertumbuhan ekonomi di China.

2.5.3. Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Pertanian

Penelitian tentang kebijakan fiskal dalam kaitannya dengan pembangunan sektor pertanian telah banyak dilakukan baik di manca negara maupun di Indonesia. Beberapa hasil penelitian terdahulu, diuraikan dalam sub bab ini, dan diharapkan menunjang penelitian yang dilakukan.

Yudhoyono (2004) menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan, menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal memegang peranan penting di Indonesia dalam mendorong pembangunan pertanian, pengurangan kemiskinan dan perekonomian perdesaan. Revitalisasi pertanian dapat dijadikan penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hasil simulasi model diperoleh, bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk infrastuktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, relatif terjadi lebih besar di sektor non-pertanian.

Darsono (2008) dengan menggunakan model VECM dalam menganalisis keefektifan kebijakan fiskal terhadap kinerja sektor pertanian dengan menekankan pada agroindustri, menyimpulkan bahwa kinerja sektor pertanian sejak tahun 1970-2005 menurun, yang ditandai oleh penurunan pangsa sektor pertanian pada PDB, penyerapan dan produktivitas tenaga kerja, serta ekspor produk-produk pertanian.

Fan dan Rao (2003) mengkaji tren pengeluaran pemerintah di negara berkembang, untuk menganalisis penyebab-penyebab perubahan, dan untuk mengembangkan kerangka kerja analisis untuk menentukan dampak diferensiasi dari berbagai pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Ditemukan bahwa program penyesuaian struktural meningkatkan ukuran pengeluaran pemerintah, tapi tidak semua sektor mendapat perlakuan yang sama. Di Afrika

pemerintah menurunkan share untuk pengeluaran pada sektor pertanian, pendidikan, dan infrastruktur. Di Asia pemerintah menurunkan share belanja untuk sektor pertanian dan kesehatan. Sementara di Amerika Latin pemerintah menurunkan share untuk pengeluaran pendidikan dan infrastruktur. Dampak dari program penyesuaian struktural tersebut, mendorong pertumbuhan ekonomi di Asia dan Amerika Latin, namun tidak di Afrika. Dampak dari berbagai jenis pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika, yaitu pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian dan kesehatan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Asia investasi di bidang pertanian, pendidikan, dan pertahanan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak signifikan di Amerika Latin. Karena program penyesuaian struktural telah mendorong pertumbuhan di Asia dan Amerika Latin, namun tidak di Afrika.

Adeniyi dan Bashir (2011) meneliti dampak investasi publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Penulis menggunakan data tahun 1970-2008. Penulis menemukan bahwa pertama, pengeluaran pemerintah di bidang pertanian, pendidikan, pertahanan, dan jasa keamanan internal sebagai program penyesuaian struktural secara statistik signifikan, sementara pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, transportasi dan sektor telekomunikasi secara statistik tidak signifikan. Kedua berbagai jenis belanja memiliki dampak yang berbeda pada pertumbuhan ekonomi, yang menyiratkan potensi yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan realokasi antar sektor. Ketiga, pemerintah harus meningkatkan belanja di bidang pertanian, terutama pada investasi pertanian seperti penelitian dan pengembangan. Jenis pengeluaran ini tidak hanya menghasilkan keuntungan tinggi untuk produksi pertanian, tetapi juga memiliki dampak besar pada pengurangan kemiskinan, karena sebagian besar penduduk miskin masih tinggal di daerah pedesaan dan sumber penghidupan utama mereka adalah pertanian.

Izuchukwu (2011) menggunakan data panel tahun 1986-2007 dalam mengkaji kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di Nigeria, ditemukan bahwa sektor pertanian tetap menjadi kontributor yang signifikan bagi perekonomian Nigeria, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan output nasional. Juga ditemukan bahwa ada hubungan positif antara Produk Domestik

Bruto (PDB) dengan tabungan domestik, belanja pemerintah pada sektor pertanian dan investasi asing langsung pada sektor pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan pertanian, pengurangan kemiskinan dan perekonomian perdesaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk infrastuktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, relatif terjadi lebih besar di sektor non-pertanian.

2.5.4. Peran Investasi Pemerintah terhadap Investasi Swasta

Haroon and Nasr (2011) yang mengkaji tentang peranan investasi swasta dalam pembangunan ekonomi di Pakistan menggunakan data tahun 1986-2008 menemukan bahwa pengeluaran pembangunan pemerintah berpengaruh positip dan nyata terhadap investasi swasta di Pakistan. Juga ditemukan bahwa pajak berpengaruh negatif dan nyata terhadap investasi swasta. Sebaliknya subsidi pemerintah memiliki pengaruh positif dan nyata terhadap investasi swasta.

Temuan tersebut sejalan dengan temuan Erden and Holcombe (2006) menggunakan data panel 19 negara berkembang tahun 1980 sampi 1997 dalam menganalis keterkaitan antara investasi pemerintah dan investasi swasta pada 19 negara berkembang, dengan menggunakan analisis co-integrasi, menemukan bahwa investasi publik bersifat komplementer dengan investasi swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, 10 persen peningkatan investasi publik akan mengakibatkan peningkatan investasi swasta sekitar 2 persen. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat bunga tidak memiliki dampak signifikan. Dari perspektif kebijakan, hasil ini menunjukkan pentingnya investasi publik sebagai stimulus bagi investasi swasta di negara berkembang, dan juga menunjukkan bahwa, mungkin karena kurang berkembang lembaga keuangan atau karena peraturan keuangan, ketersediaan kredit adalah menghambat faktor investasi swasta di negara berkembang.

Temuan yang sama oleh Fatima (2012) yang meneliti dampak gabungan dari investasi publik dan swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Pakistan dalam

jangka pendek dan periode jangka. Dengan menggunakan pendekatan co-integrasi untuk periode waktu 1975-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta memiliki pengaruh positif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang serta positif namun tidak nyata dalam dalam jangka pendek. Sementara investasi pemerintah memiliki pengaruh positif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek dan panjang jangka. Fatiman juga menemukan bahwa investasi swasta memiliki efek positif terhadap perekonomian. Investasi swasta memiliki efek lebih kuat, lebih baik pada pertumbuhan dan dibanding investasi pemerintah, disebabkan karena investasi swasta lebih efisien.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi pemerintah memengang peranan penting dalam mendorong investasi swasta di negara-negara berkebang, sekaligus menunjukkan pentingnya investasi swasta mendorong pertumbuhan ekonomi.

III. KERANGKA TEORITIS

3. 1. Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan (Todaro, 2009). Ada tiga macam ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output per pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi (Bhinadi:2003).

Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya menggunakan konsep-konsep pertumbuhan ekonomi agregat. Perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi daerah menurut Ricardson, (2001) adalah titik berat dalam analisis perpindahan faktor. Analisis untuk suatu negara dapat diasumsikan dengan perekonomian tertutup, namun untuk daerah asumsi tersebut tidak berlaku. Daerah bersifat terbuka, karena kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal sangat besar. Hal ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional dan sebaliknya.

Konsep yang paling sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan daerah adalah produk domestik regional bruto (PDRB), yaitu nilai tambah bruto atau *gross value added* (*output* dikurangi *intermediate cost*) dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. Pada tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi diukur dari laju nilai produk domestik bruto (PDB), dan pada daerah merupakan laju dari nilai produk domestik regional bruto (PDRB), yang merupakan ukuran dasar dari penampilan performansi perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Nilai PDRB suatu daerah merupakan penjumlahan dari PDRB beberapa sektor perekonomian yang ada pada daerah tersebut. Sektor perekonomian

tersebut diantaranya adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, kontruksi dan bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, bank dan jasa keuangan lainnya, dan jasa-jasa lainnya.

Dari sisi penawaran agregat pertumbuhan ekonomi daerah didasarkan pada pendekatan fungsi produksi agregat yang merupakan fungsi dari teknologi, kapital (modal fisik dan finansial), dan tenaga kerja, (Dornbusch *at al*. 2008).

Siregar (2009), mengatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Akan tetapi syarat keharusan saja belum cukup. Syarat kecukupan adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut, agar memiliki daya serap lebih tinggi terhadap angkatan kerja, menyebarkan manfaat dari pertumbuhan tersebut secara lebih merata, sehingga dapat mendorong pemberdayaan kelompok miskin yang berkelanjutan.

3.1.1. Teori Pertumbuhan Solow

Teori pertumbuhan ekonomi Solow mengatakan bahwa pertumbuhan output dalam perekonomian, terkait dengan pertumbuhan dalam penggunaan input seperti modal, tenaga kerja, dan perbaikan dalam teknologi (Samuelson dan Nordhausm 2005; Dornbusch, *at al*. 2008; Hess dan Ross, 1997; Siregar, 2009).
Fungsi produksi agregat adalah,

$$Y = AK^{\alpha+\beta}L^{1-\alpha} \quad \text{.....} \quad (3.1)$$

di mana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal, L adalah tenaga kerja, dan A merupakan teknologi, maka Y akan meningkat apabila input K atau L, atau keduanya meningkat. Siregar, (2009) mengemukakan faktor penting yang mempengaruhi modal fisik adalah investasi. Output (Y) juga akan meningkat apabila terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dengan kenaikan A. Oleh karena itu pertumbuhan perekonomian kawasan dapat berasal dari pertumbuhan input dan kemajuan teknologi yang umum disebut sebagai perkembangan total faktor produktivitas.

Fungsi produksi pada persamaan (3.1) dapat ditransformasi untuk mengetahui proporsi (*share)* dari setiap input terhadap output, yang mencerminkan seberapa besar pengaruh dari setiap input terhadap pertumbuhan output. Hubungan tersebut diformulasikan:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \left[(1-\theta)\times \Delta L/L\right] + (\theta \times \Delta K/K) + \Delta A/A \quad \text{.....} \quad (3.2)$$

di mana $\Delta Y/Y$ adalah pertumbuhan ouput, (1-θ) adalah *share* tenaga kerja, $\Delta L/L$ adalah pertumbuhan tenaga kerja, θ adalah proposi modal, $\Delta K/K$ adalah pertumhan modal, dan $\Delta A/A$ adalah pertumbuhan teknologi.

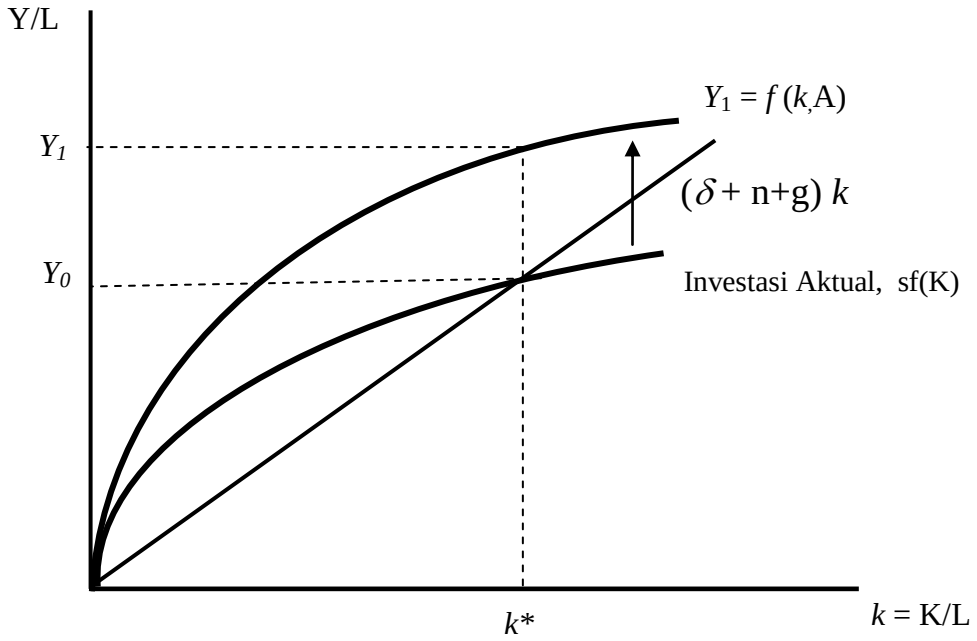

Gambar 1. Model Pertumbuhan Solow

Mankiw (2007) mengatakan bahwa asumsi fungsi produksi bersifat *constant returns to scale* output akan meningkat dengan proporsi yang sama apabila kapital dan tenaga kerja digandakan dan input-output yang baru digunakan sepenting input yang telah ada.

Menurut Solow output nasional hanya digunakan untuk dua tujuan yaitu konsumsi dan investasi. Bagian output yang digunakan untuk tujuan investasi bersumber dari tabungan. Sebagai proses akumulasi modal, satu unit investasi menghasilkan satu unit tambahan kapital baru, sedangkan kapital yang lama mengalami penyusutan. Tingkat perubahan stok kapital per unit tenaga kerja

efektif merupakan selisih antara perubahan investasi aktual dengan perubahan investasi *break-even* (yaitu investasi yang diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja dan ilmu pengetahuan serta menggantikan penyusutan kapital yang lama sehingga jumlah stok kapital per tenaga kerja efektif yang ada tetap terpelihara)

Stok kapital per tenaga kerja efektif akan berada pada posisi jalur pertumbuhan ekonomi yang berimbang (*the balance growth path)* ketika perubahan investasi aktual sama dengan perubahan investasi *break-even.* Sebagaimana ditunjukkan Gambar 1, apabila tingkat stok kapital per tenaga kerja efektif rendah, investasi aktual per unit tenaga kerja efektif lebih besar dari investasi *break-even* dan tingkat produktivitas stok kapital per tenaga kerja efektif sangat tinggi sehingga jumlahnya meningkat ke posisi stok kapital per tenaga kerja efektif keseimbangan atau laju pertumbuhannya positif. Sebaliknya pada tingkat stok kapital per tenaga kerja efektif yang tinggi, investasi aktual per unit tenaga kerja lebih kecil dari investasi *break-even* dan tingkat produktivitas stok kapital per tenaga kerja efektif sangat rendah sehingga jumlahnya menurun ke posisi stok kapital per tenaga kerja keseimbangan atau laju pertumbuhannya negatif. Dengan demikian stok kapital per tenaga kerja efektif selalu konvergen ke posisi keseimbangannya di titik k^*.

Setelah konvergensi tercapai, laju pertumbuhan stok kapital per tenaga kerja efektif mencapai nol karena pada posisi keseimbangan perubahan investasi aktual sama dengan perubahan investasi *break-even.* Pada posisi ini stok kapital total, tenaga kerja efektif dan output total tumbuh pada tingkat yang sama yaitu sebesar jumlah pertumbuhan tenaga kerja efektif dan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Stok kapital per tenaga kerja dan total output per tenaga kerja tumbuh sebesar pertumbuhan ilmu pengetahuan.

Pemikiran Solow di atas menunjukkan bahwa perekonomian senantiasa akan konvergen secara otomatis menuju pertumbuhan yang berimbang, yaitu suatu situasi dimana setiap peubah tumbuh pada tingkat yang konstan. Pada pertumbuhan yang berimbang, pertumbuhan output per tenaga kerja hanya diasumsikan ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi. Di sinilah peran penting

kemajuan teknologi dalam proses pertumbuhan ekonomi menurut pandangan Solow.

3.1.2. Teori pertumbuhan endogen

Teori pertumbuhan endogen dikembangkan untuk memperbaiki teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik. Model pertumbuhan neoklasik berargumen bahwa pertumbuhan output didorong oleh tingkat perkembangan teknologi. Tanpa perkembangan teknologi, tidak akan ada pertumbuhan jangka panjang. Tetapi karena penyebab perkembangan teknologi tidak diidentifikasikan dalam model Solow, maka hal yang mendasari pertumbuhan tidak dijelaskan. Solow menganggap teknologi sebagai faktor eksogen dalam proses proses pertumbuhan (Todaro, 2009). Dengan demikian model Solow tidak memperdulikan bagaimana mendorong kemajuan teknologi melalui proses belajar (*learning by doing*), investasi dalam penelitian dan akumulasi pengetahuan.

Untuk menggambarkan model pertumbuhan endogen digunakan model Romer, dimana model ini menjelaskan imbas teknologi yang mungkin terdapat dalam proses industrialisasi. Oleh karena itu model Romer tidak hanya merupakan model pertumbuhan endogen, tetapi juga merupakan model yang releven untuk negara-negara berkembang (Todaro, 2009).

Model Romer dimulai dengan mengasumsikan bahwa proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri. Setiap industri berproduksi dengan skala hasil yang konstan, sehingga model tersebut konsisten dengan asumsi pasar persaingan sempurna. Sampai pada tahap ini asumsinya yang digunakan sama dengan model Solow, akan tetapi berbeda dengan Solow, Romor mengasumsikan bahwa cadangan modal dalam keseluruhan perekonomian ($\overline{K}$), secara positif mempengaruhi output pada tingkat industri, sehingga terdapat kemungkinan skala hasil yang semakin meningkat (*increasing return to scale*) pada tingkat perekonomian secara keseluruhan.

Cadangan modal dalam setiap perusahaan termasuk pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian variabel modal dalam pertumbuhan agregat Solow sekarang sudah memperhitungkan unsur akumulasi pengetahuan. Tiga elemen utama dalam model Romer yaitu: (1) adanya unsur eksternalitas, sebagai akibat

kemajuan ilmu pengetahuan,(2) adanya peningkatan skala hasil yang semakin meningkat, yang menyebabkan peningkatan spesialisasi dan pembagian kerja, (3) semakin pendeknya waktu pemanfaatan ilmu pengetahuan, karena pesatnya perkembangan di sektor riset.

Secara umum model Romer dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_i = AK_i^{\alpha} L_i^{1-\alpha} \overline{K}^{\beta} \quad \text{..... (3.3)}$$

dimana: Y_i adalah output produksi perusahaan i, K_i adalah stok modal, L_i adalah tenaga kerja, dan A adalah stok pengetahuan/teknologi (*technical knowledge*) agregat. A diasumsikan mempunyai efek menyebar secara positif terhadap produksi pada setiap perusahaan.

Dengan mengasumsikan kesimetrisan antar industri untuk menyeder-hanakan masalah, sehingga industri akan menggunakan modal dan tenaga kerja pada tingkat yang sama, selanjutnya dengan menggunakan fungsi produksi agregat pada persemaan (3.1).

Dalam memperjelas model pertumbuhan endogen Romer asumsikan bahwa A bersifat konstan dan bukan meningkat sepanjang waktu, sehingga diasumsikan tidak terdapat kemajuan teknologi. Dengan bantuan matematis, hasil pertumbuhan pendapatan perkapita di dalam perekonomian akan menjadi:

$$g - n = \beta n / [a - \alpha - \beta] \quad \text{..... (3.4)}$$

dimana g adalah tingkat pertumbuhan output dan n adalah tingkat pertumbuhan populasi. Tanpa adanya kemajuan teknolodi, seperti dalam model Solow dengan skala hasil konstan $\beta=0$, maka pertumbuhan teknologi akan menjadi nol (tanpa kemajuan teknologi).

Akan tetapi Romer mengasumsikan bahwa dengan mengumpulkan ketiga faktor, termasuk eksternalitas modal maka $\beta > 0$; sehingga $g - n > 0$, dan Y/L tumbuh. Dengan demikian kita peroleh pertumbuhan endogen, bukan berasal dari kenaikan produktivitas yang ditentukan secara eksogen.

3.2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi

jalannya perekonomian, dengan tujuan agar perekonomian tidak terlalu menyimpang dari keadaan yang diinginkan dengan alat *(policy instrument variable)* berupa pajak (T), transfer pemerintah (Tr), dan pengeluaran pemerintah (G) sebagai *levels of spending and taxation* (Romer, 2001; Samuelson dan Nordhaus, 2005). Kebijakan fiskal disebut juga kebijakan anggaran *(budgetary policy)* yang dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), (Muhammad, 2004).

Kebijakan fiskal atau anggaran memiliki tiga fungsi yaitu, (1) fungsi alokasi *(allocation function),* (2) fungsi distribusi *(distribution function),* dan (3) fungsi stabilisasi *(stabilization function).* Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang sosial *(social goods),* atau proses penggunaan sumberdaya keseluruhan yang dibagi di antara barang privat *(private goods),* dan barang sosial *(social goods)* serta kombinasi barang sosial yang dipilih. Fungsi distribusi berkaitan dengan pembagian pendapatan dan kekayaan yang lebih adil dan merata kepada masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi untuk mempertahankan tingkat pekerjaan yang tinggi *(high employment),* stabilitas tingkat harga-harga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sesuai, serta berpengaruh pada neraca perdagangan dan pembayaran, (Musgrave, 1991; Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2010).

Instrumen kebijakan fiskal adalah variabel belanja pemerintah (G) atau pajak (T). Bersama-sama dengan variabel konsumsi masyarakat (C), Investasi Swasta (I) dan net ekspor (X-M), merupakan komponen yang mempengaruhi output atau pendapatan nasional (Y). Dalam keseimbangan makro ekonomi dirumuskan:

$$Y = C + I + \boldsymbol{G} + (X\text{-}M) \quad \text{.....} \quad (3.5)$$

Sementara itu Cullis dan Joness, (1992) mengatakan bahwa instrumen kebijakan fiskal yang dapat dilakukan oleh pemerintah terdiri atas instrumen belanja pemerintah dan pajak. Kedua jenis instrumen ini secara langsung berpengaruh kepada sektor riil, dalam hal ini mempengaruhi pengeluaran agregat yang berdampak pada permintaan agregat. Kebijakan belanja pemerintah berpengaruh posistif terhadap permintaan agregat dan pendapatan nasional. Sementara kebijakan pajak berpengaruh negatif terhadap permintaan agregat dan

pendapatan nasional. Besarnya pengaruh kedua kebijakan tersebut ditentukan oleh efek pengganda *(multiplier effect*), dimana besarannya tergantung pada besaran kecenderungan untuk mengkonsumsi (*marginal propensity to consume, MPC*).

Permintaan agregat dapat dinaikkan dengan cepat hanya melalui kebijakan fiskal (Romer, 2001, Dornbusch *at al*. 2008). Anggaran pemerintah *(government budget)* adalah bagian penting dalam model makroekonomi. Keynes mengatakan apabila perekonomian berada di bawah *full employment*, maka permintaan agregat dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) (McCann, 2001). Dalam pandangan Keynes, pemerintah mempunyai peran penting untuk mengatur permintaan agregat (AD), dalam rangka mempertahankan atau menjaga agar perekonomian mendekati tingkat kesempatan kerja penuh *(full employment level).*

Besaran *multiplier* pengeluaran pemerintah dapat diturunkan dari persamaan pendapatan nasional dari sisi pengeluaran:

Untuk ini kita membuat persamaan konsumsi menjadi:

$C = a + b(Y-T)$ ..... (3.6)

dimana

a = konsumsi autonomous
b = MPC
T = pajak penghasilan

Dengan mensubtitusi persamaan 3.2 ke persamaan 3.1 kita dapat menulis persamaan pendapatan nasional menjadi:

$Y = a+b(Y-T)+I+G+(X-M)$ ..... (3.7)

dengan melakukan transformasi, maka diperoleh:

$Y(1-b) = a-bT + I +G+(X-M)$ ..... (3.8)

$$Y = \frac{a - bT + I + G + (X - M)}{(1 - b)}$$

dengan melakukan difrensiasi terhadap G dan T akan diperoleh persamaan 3.7 dan persamaan 3.8.

$$\frac{\partial Y}{\partial G} = \frac{1}{(1-b)} \quad \text{..... (3.9)}$$

Persamaan 3.5 menunjukkan besaran multiplier dari pengeluaran

pemerintah terhadap pendapatan nasional, merupakan fungsi dari MPC. Jadi semakin tinggi MPC, maka *multiplier effec*-nya semakin besar.

Dengan cara yang sama diperoleh pula *multiplier effec* dari kebijakan pajak yang juga merupakan fungsi dari MPC:

$$\frac{\partial Y}{\partial T} = \frac{-b}{(1-b)} \quad \text{.....} \quad (3.10)$$

Pertanyaan yang muncul, adalah kebijakan manakah yang sebaiknya digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal. Dornbusch *at al*. (2008) mengatakan bahwa tujuan pemerintah dalam kebijakan fiskal adalah meningkatkan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan stabilisasi ekonomi. Oleh karena itu kebijakan pengeluaran pemerintah lebih efektif dibanding dengan kebijakan pajak.

Keynesian berpendapat bahwa besarnya respon para pelaku ekonomi lebih besar pada pengeluaran pemerintah dibanding dengan pemotongan pajak. Pengeluaran pemerintah berdampak langsung pada permintaan agregat dan *multiplier*-nya, melalui konsumsi dan investasi pemerintah. Sementara kebijakan pengurangan pajak bekerja secara tidak langsung, melalui pendapatan (untuk pajak pendapatan), dan investasi pada pajak industri.

Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada pengeluaran pemerintah, sehingga model yang dibangun difokuskan pada perubahan kebijakan pengeluaran pemerintah dan dampaknya terhadap kinerja perekonomian.

Kaum klasik memandang perilaku perekonomian dalam jangka panjang. Sementara Keynesian melihat perilaku perekonomian dalam jangka pendek, karena dalam jangka pendek harga-harga bersifat kaku. Apabila terjadi ekspansi fiskal dalam jangka pendek, misalnya pemerintah meningkatkan pengeluarannya atau pemerintah memotong pajak, maka dalam jangka pendek akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dari AD_1 menjadi AD_2, sehingga akan meningkatkan output dari Y_1 ke Y_2. Apabila terjadi kontraksi fiskal, misalnya pemerintah mengurangi pengeluarannya atau pemerintah meningkatkan pajak, maka dalam jangka pendek akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri dari AD_1 menjadi AD_0 seperti pada Gambar 2.

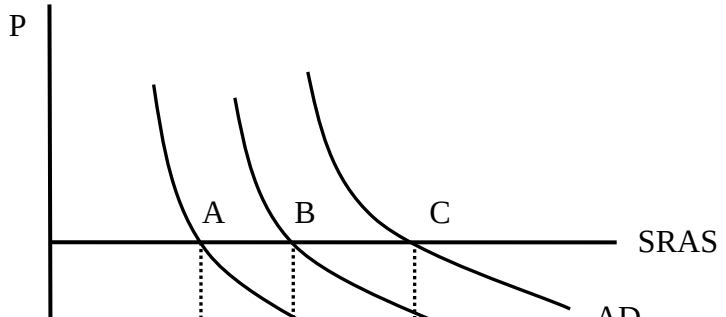

Sumber: Dornbusch *at al*., 2008; Romer, 2001.

Gambar 2. Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Jangka Pendek

Dalam jangka panjang, kebijakan ekspansi ataupun kontraksi fiskal akan mempengaruhi harga dalam jangka panjang tetapi tidak akan mempengaruhi output (Y) dalam jangka panjang. Misalkan perekonomian dimulai dalam ekuilibrium jangka panjang pada titik A, kebijakan ekspansi pemerintah menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke atas dari AD_1 menjadi AD_2, dimana perekonomian bergeser dari titik A ke titik D (output berada di atas tingkat alamiah). Ketika harga naik, output secara berangsur-angsur kembali ke tingkat alamiah, dan perekonomian bergerak dari titik D ke E.

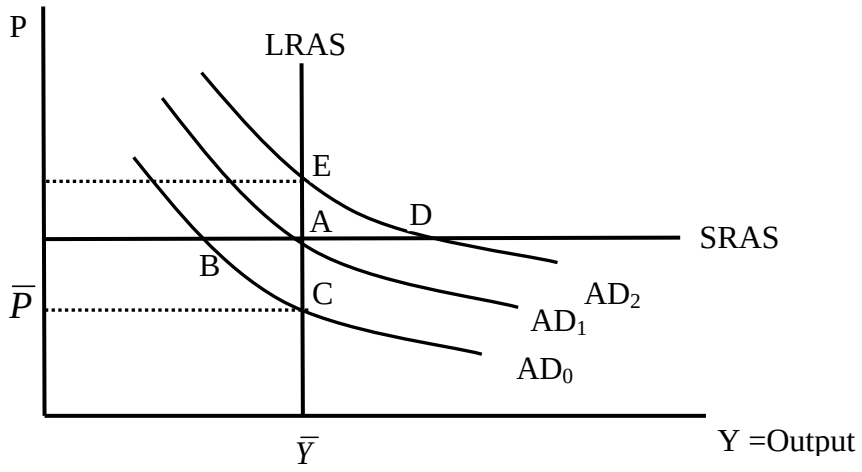

Sumber: Dornbusch *at al*. 2008; Romer, 2001.

Gambar 3. Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Jangka Panjang

Sedangkan kebijakan kontraksi pemerintah menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke bawah dari AD_1 menjadi AD_0, dimana perekonomian bergeser dari titik A ke titik B (output berada di bawah tingkat

alamiah). Ketika harga turun, perekonomian secara perlahan-lahan pulih dari resesi, perekonomian bergerak dari titik B ke C seperti pada Gambar 3.

3.3. Konsumsi dan Investasi

3.3.1. Konsumsi

Dornbusch *at al*. (2008) mengatakan bahwa konsumsi agregat sekitar 70 persen dari penerimaan agregat, dan fluktuasi konsumsi secara proporsional lebih kecil dari fluktuasi produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu konsumsi merupakan komponen terbesar dalam produk domestik regional bruto dari sisi permintaan. Konsumsi agregat meliputi semua pengeluran rumah tangga dan lembaga nirlaba untuk membeli barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Keynes membuat dugaan (*conjectur*e) tentang fungsi konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi kausal: Pertama, Keynes menduga bahwa, kecenderungan mengkonsumsi marjinal (*marginal propensity to consume*) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Kedua, Keynes mengatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*avarage prospensity to consume*), turun ketika pendapatan naik. Keynes percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia berharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin. Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting, (Mankiw, 2003).

Berdasarkan tiga dugaan ini, fungsi konsumsi Keynes ditulis:

$$C = \bar{a} + bY \quad \text{..... (3.11)}$$

dimana $\bar{a} > 0$ dan $0 < b < 1$

Persamaan fungsi konsumsi, dimana C adalah konsumsi, $\bar{a}$ adalah konstanta, b kecenderungan mengkonsumsi marjinal, dan Y adalah pendapatan disposibel.

Setelah Keynes, memperkenalkan fungsi konsumsi, beberapa ekonom mengumpulkan data dan mengkaji dugaan-dugaannya, sehingga lahir teori

konsumsi siklus hidup, teori pendapatan permanen, dan teori pilihan antar waktu.

Hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh Friedman. Menurut teori ini pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pendapatan permanen (*permanent income*) dan pendapatan sementara (*transitory income*). Pendapatan permanen adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji dan upah. Sementara pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya, (Mangkoesoebroto, 1998).

Friedman menganggap pula bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan sementara dengan pendapatan permanen, juga antara konsumsi sementara dengan konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara dengan pendapatan sementara. Sehingga MPC dari pendapatan sementara sama dengan nol, yang berarti bila konsumen menerima pendapatan sementara yang positif maka tidak akan mempengaruhi konsumsi. Demikian pula apabila konsumen menerima pendapatan sementara yang negatif, maka tidak mempengaruhi konsumsi, (Suparmoko, 1991).

Hipotesis siklus hidup, dikemukakan oleh Franco Modigliani menerangkan bahwa pola konsumsi masyarakat, mendasarkan kepada kenyataan bahwa pola penerimaan, dan pola pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya. Karena orang cenderung menerima penghasilan yang rendah pada usia muda, tinggi pada usia menengah, dan rendah pada usia tua, maka rasio tabungan akan berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka yaitu orang muda akan mempunyai tabungan negatif (*dissaving*), orang berumur menengah menabung dan membayar kembali pinjaman pada masa muda mereka, dan orang usia tua akan mengambil tabungan yang dibuatnya pada masa usia menengah.

Selanjutnya Modigliani menganggap penting peranan kekayaan (*assets*) sebagai penentu tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi kenaikan nilai kekayaan seperti karena adanya inflasi, maka nilai rumah dan tanah meningkat, karena adanya kenaikan harga surat-surat berharga, atau karena peningkatan dalam jumlah uang beredar. Sesungguhnya dalam kenyataan orang menumpuk kekayaan sepanjang hidup mereka, dan tidak hanya orang yang sudah

pensiun saja. Apabila terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka konsumsi akan meningkat atau dapat dipertahankan lebih lama. Akhirnya hipotesis siklus kehidupan ini akan berarti menekan hasrat konsumsi, menekan koefisien pengganda, dan melindungi perekonomian dari perubahan-perubahan yang tidak diharapkan, seperti perubahan dalam investasi, ekspor, maupun pengeluaran-pengeluaran lain, (Dornbusch *at al*. 2008; Snowdon dan Howard, 2005).

Pilihan antar waktu dari Irving Fisher, menganalisis bagaimana konsumen berpandangan ke depan dan rasional membuat pilihan antar waktu yaitu, pilihan meliputi periode waktu yang berbeda. Model Fisher menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi konsumen, preferensi yang mereka miliki, dan bagaimana hambatan-hambatan serta preferensi ini bersama-sama menentukan pilihan mereka terhadap konsumsi dan tabungan. Dengan kata lain konsumen menghadapi batasan atas berapa banyak yang mereka dapat belanjakan, yang disebut batas atau kendala anggaran (*budget constraint*). Ketika mereka memutuskan berapa banyak yang akan mereka konsumsi hari ini versus berapa banyak akan ditabung untuk masa depan, mereka menghadapi batasan anggaran antar waktu (*intertemporal budget constaint*), untuk mengukur sumberdaya total yang tersedia untuk konsumsi hari ini, dan dimasa yang akan datang (Mankiw, 2000; Cohen, 2009).

3.3.2. Konsumsi

Samuelson dan Nordhaus, (2005) mengatakan terdapat dua peran investasi dalam ekonomi makro. Pertama, investasi merupakan komponen pengeluaran yang cukup besar dan berubah-ubah. Oleh karena itu perubahan besar dalam investasi sangat berpengaruh pada permintaan agregat, dan akhirnya berpengaruh pada output dan kesempatan kerja. Kedua, investasi menghimpun akumulasi modal. Dengan membangun pabrik, gedung dan peralatan yang berguna, maka output potensial suatu bangsa berkembang, sehingga pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga meningkat.

Harrod Domar mengatakan, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dengan semakin banyak tabungan yang kemudian

diinvestasikan, maka semakin cepat terjadi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi secara riil, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap tabungan dan investasi tergantung dari tingkat produktivitas investasi tersebut (Todaro, 2009).

Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, sementara tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi. Walaupun apabila suatu perusahaan, memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan uang.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang cepat hanya dimungkinkan melalui investasi dan pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan semakin besar dan investasi swasta akan semakin meningkat (Jhingan, 2000).

3.4. Ekspor Impor

Salvatore, (1995) mengatakan pada dasarnya perdagangan internasional terjadi karena adanya aliran barang dari negara yang mempunyai penawaran yang berlebih (*excess supply*) ke negara yang mempunyai kelebihan permintaan (*excess demand*). Proses inilah yang menyebabkan terjadinya suatu transaksi perdagangan antara satu negara dengan negara yang lain. Tujuan dari transaksi perdagangan tersebut tidak lain adalah bagi negara pengimpor dapat memperoleh barang dengan harga yang lebih rendah dibanding harus memproduksi sendiri barang tersebut. Sedangkan keuntungan bagi negara pengekspor adalah ia dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan devisa. Selain itu, tujuan utama dari adanya perdagangan internasional ini adalah meningkatkan kesejahteraan dari kedua negara. Oleh karena itu, pada perdagangan internasional akan terjadi proses perubahan pada kurva penawaran dan permintaan yang mengakibatkan adanya

perubahan pada harga dan produksi barang

Interaksi ekonomi antar daerah dalam suatu negara dan dengan negara lain berlangsung melalui perdagangan antar daerah atau antar negara. Daerah atau negara yang memperoleh manfaat dari perdagangan tersebut adalah daerah yang nilai ekspornya lebih besar dari nilai impornya. Besar kecilnya nilai ekspor tergantung pada harga, dan jenis barang yang diekspor serta volume ekspor. Sementara itu, besarnya volume ekspor suatu daerah tergantung pada kemampuan daerah tersebut menghasilkan produk, serta tingkat kebutuhan daerah atau negara pengimpor, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan produksi.

Kerangka teoritis Keynes dalam perekonomian terbuka, dikatakan bahwa meningkatnya ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan cara yang sama seperti yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan dalam investasi swasta dan peningkatan belanja pemerintah.

Pada persamaan (3.1) terdapat variabel (X) yang menunjukkan ekspor dan variabel (M) yang menunjukkan impor daerah, maka (X-M) merupakan ekspor netto negara atau daerah. Dalam pandangan Keynes faktor yang menentukan ekspor dan impor adalah nilai tukar mata uang.

3.5. Pengangguran dan Kemiskinan

3.5.1. Pengangguran

Dalam sudut pandang makroekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan suatu masalah. Salah satu gambaran atas dampak dari tingginya tingkat pengangguran yaitu akan banyaknya sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat akan berkurang. Dalam masa-masa seperti itu, tekanan ekonomi menjalar kemana-mana sehingga mempengaruhi emosi masyarakat maupun kehidupan rumah tangga sehingga akan mengurangi kesejahteraan masyarakat, (Samuelson dan Nordhaus, 2005; Snowdon dan Howard, 2005).

Selain itu angka pengangguran berpengaruh juga terhadap standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat, akan ada masyarakat yang menderita batin karena hilangnya rasa kepercayaan diri dan kemungkinan terjadi gap atau kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Apabila permasalahan

pengangguran ini tidak segera di pecahkan, maka hal ini akan mengarah pada suatu tindakan anarkis dan kriminalitas yang mengancam ketentraman dan keamanan kehidupan bernegara.

Pengangguran amat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB). Logikanya sederhana, apabila seseorang tidak bekerja maka dia tidak akan berproduksi sehingga perhitungan output produksi dalam bagian PDB akan berkurang. Implikasinya secara makro, berdasarkan Okun's Law, ada hubungan empiris dimana kenaikan 1 persen dari angka pengangguran akan menurunkan nilai PDB hingga maksimal 2 persen, (Langdana, 2009).

Tentu logika di atas juga dapat dibalik, di mana untuk menurunkan angka pengangguran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan nilai PDRB dengan cara menggunakan instrumen fiskalnya, yaitu dengan pengurangan pajak atau penambahan anggaran belanjanya.

Keynes berpendapat bahwa dalam ekonomi pasar, penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta, memerlukan usaha serta kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Keynes pada hakikatnya berpendapat bahwa perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan campur tangan pemerintah yang aktif dalam perekonomian dalam menyelesaikan masalah ini. Salah satu bentuk campur tangan yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan kebijakan fiskal. Dalam hal ini Keynes, mengisyaratkan kebijakan fiskal yang ekspansif melalui pengurangan pajak dan penambahan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*). Peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong perusahaan-perusahaan meningkatkan produksi, yang kemudian permintaan tenaga kerja meningkat, sehingga pengangguran terbuka akan menurun, (Sukirno, 2004).

Pemerintah Indonesia sendiri mengkombinasikan kedua kebijakan fiskal ini dengan memberikan stimulus fiskal. Total stimulus fiskal pada APBN 2009 dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak krisis global mencapai 71.3 triliun rupiah atau sekitar 1.4 persen dari PDB. Jumlah stimulus fiskal itu terdiri dari penghematan pembayaran pajak (*tax saving*) sebesar 43 triliun rupiah atau

0.8 persen dari PDB. Selain itu juga terdapat subsidi dan belanja kepada dunia usaha dan pencipataan lapangan kerja, yang terdiri dari penurunan harga solar (subsidi solar) 2.8 triliun rupiah, diskon beban puncak listrik industri 1.4 triliun rupiah, tambahan belanja infrastruktur 10 triliun rupiah, dan perluasan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) sebesar 0.6 triliun rupiah, (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2010).

Untuk insentif pajak, logikanya apabila para pengusaha mendapatkan keringanan pajak, maka biaya operasional dapat ditekan sehingga perusahaan masih memiliki cukup uang untuk menggaji dan mempertahankan pekerja. Namun perlu diingat juga, perusahaan pun menghadapi masalah besar terkait penurunan permintaan barang dan jasa secara global, karena tekanan krisis dan masih adanya ekonomi biaya tinggi dalam berusaha di Indonesia, terutama terkait perizinan dan pungutan pemerintah daerah, baik yang resmi maupun liar.

2.5.2 Kemiskinan

Kemiskinan menurut Bappenas, (2008) adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi tersebut, menunjukkan bahwa kemiskinan tidak lagi dipandang hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perilaku bagi seorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakaui secara umum, meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan atau hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik perempuan maupun laki-laki.

Sejalan dengan hal tersebut Gemmel, (1992); dan Sen, (2002) melihat kemiskinan dari perspektif yang lebih luas yaitu minimnya penghasilan, tidak tersedianya akses kepada pengetahuan, sumber daya, serta layanan sosial dan kesehatan, keterasingan dari arus utama pembangunan dan ketidak mampuan memenuhi kebutuhan pokok. Dengan perspektif ini minimnya penghasilan hanyalah merupakan salah satu unsur, yang lebih mendasar adalah

ketidakmampuan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi.

Untuk mengukur kemiskinan dapat digunakan beberapa ukuran, badan pusat statisik (BPS) menggunakan tiga jenis ukuran dalam mengukur kemiskinan di Indonesia yaitu:

1. *Head Count Index* (HCI-P_0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. *Poverty Gap Index* (PGI-P_1) indeks kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Oleh karena itu semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. *Poverty Saverity Index* (PSI-P_2), indeks keparahan kemiskinan, memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Makin tinggi nilai indeks, maka makin tinggi nilai ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan:

$$\text{Pa} = \frac{1}{\text{n}} \sum_{i=1}^{q} \left[\frac{z - yi}{z} \right]^a \quad \text{..... (3.12)}$$

dimana:

a = 0,1,2,
z = Garis kemiskinan
y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yi <z.
q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
n = Jumlah penduduk

Apabila a=0, maka diperoleh *head count index* (HCI), apabila a=1, maka diperoleh *poverty gap index* (PGI), dan apabila a=2, maka diperoleh *poverty saverity index* (PSI).

Dalam penelitian ini penulis mengacu para konsep yang digunakan oleh badan pusat statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan, dimana BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan

yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

3.6. Inflasi

McConnell dan Brue, (2002); Samuelson dan Nordhaus, (2005) mengatakan hampir semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya ekonomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara dua sampai empat persen per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara dua sampai empat persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah.

Dalam pandangan Keynes , inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi kenaikan harga. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat.

Didasarkan pada faktor-faktor penyebab inflasi maka ada tiga jenis inflasi yaitu: (1) inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*), (2) inflasi desakan biaya (*cost-push inflation*), dan (3) inflasi karena pengaruh impor (*imported inflation*). Inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) atau inflasi dari sisi permintaan (*demand side inflation*) adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat (*full employment and full capacity*). Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan, sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong

kenaikan harga yang terus menerus, (Langdana, 2009).

3.7. Kinerja Sektor Pertanian

3.7.1. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Pertumbuhan output pertanian dapat dilihat dari pertumbuhan pada kontribusi PDRB sektor pertanian, dan laju pertumbuhan relatif produk netto pertanian dengan non pertanian. Jika P_p = produk netto pertanian, P_{Np} = produk netto non pertanian, dan P_N = total produk domestik regional bruto atau Y, maka hubungan tersebut dapat dijelaskan dengan persamaan (Hess dan Ross, 1997; Norton, 2004; Darsono, 2008):

$$Y = P_P + P_{PN} \quad \text{..... (3.13)}$$

Dengan mentransformasi persamaan (3.11) maka proporsi (*share)* dari setiap sektor terhadap output, yang mencerminkan seberapa besar pengaruh dari setiap sektor terhadap pertumbuhan output. Hubungan tersebut diformulasikan:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = (\Delta P_P/P_P)P_P + (\Delta P_{NP}/P_{NP})P_{NP} \quad \text{..... (3.14)}$$

Peran sektor pertanian dalam ekonomi cenderung berasosiasi dengan kombinasi tiga hal, (1) pangsa PDRB sektor non pertanian relatif lebih tinggi daripada pangsa PDRB pertanian, (2) laju pertumbuhan *output* pertanian yang relatif rendah, dan (3) laju pertumbuhan *output* non pertanian yang relatif tinggi (yang membuat suatu perbedaan positif yang besar antara pangsa PDRB non pertanian dengan pangsa PDRB pertanian).

3.7.2. Penyerapan Tenaga Kerja

Teori alokasi tenaga kerja yang lebih relevan untuk menjelaskan fenomena pasar tenaga kerja di negara berkembang, termasuk Indonesia adalah model Harris-Todaro (Model H-T). Dalam Model H-T, perekonomian dibagi atas tiga sektor (sebagai penyederhanaan) yakni sektor pertanian, sektor modern, dan sektor informal.

Asumsi model H-T: (1) pada sektor manufaktur berlaku upah minimum

yang ditentukan secara kelembagaan, (2) pada sektor pertanian berlaku fleksibilitas upah. Mengikuti Model H-T, keseimbangan alokasi tenaga kerja antar kedua sektor tersebut diperlihatkan pada Gambar 4.

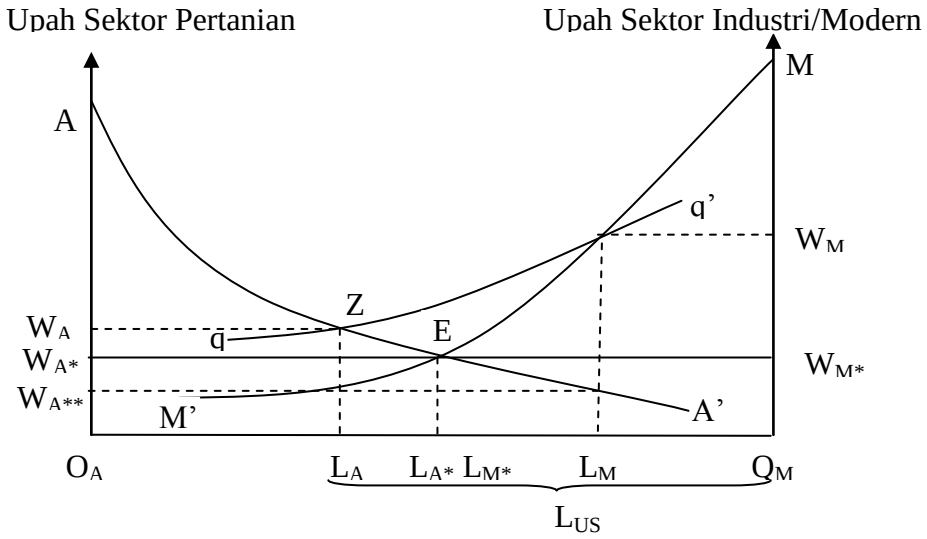

Sumber: Todaro (2009)

Gambar 4. Model Migrasi Haris Todaro

Dalam perekonomian pasar neoklasik upah ditentukan oleh mekanisme pasar dan segenap tenaga kerja akan dapat diserap. Tingkat upah keseimbangan akan tercipta bila $W_A=W_M$, dengan pembagian tenaga kerja sebanyak O_AL_{A*} untuk sektor pertanian dan $O_ML_M^*$ untuk sektor manufaktur. Akan tetapi Todaro, (2009) berasumsi bahwa tingkat upah ditentukan oleh pemerintah (bukan oleh mekanisme pasar), sehingga garis lengkungnya tidak lagi fleksibel, katakanlah sebesar yang terletak di atas garis W_A. Jika dalam perekonomian tidak ada pengangguran, maka tenaga kerja sebanyak O_ML_M akan bekerja pada sektor industri di perkotaan, sedangkan sisanya sebanyak O_AL_M akan berkecimpung dalam sektor pertanian di pedesaan $O_AW_A^{**}$. Hal ini menunjukkan bahwa upah yang diterima disektor pertanian lebih rendah dari upah pasar yang mencapai $O_AW_A^*$) Karena itu tercipta suatu kesenjangan atau selisih tingkat upah antara kota dan desa sebanyak W_M -W_A^{**}.

Apabila para pekerja di perdesaan bebas melakukan migrasi, maka walaupun di desa tersedia lapangan sebanyak O_AL_M, para tenaga kerja akan melakukan migrasi ke kota untuk mendapatkan tingkat upah yang tinggi. Apabila peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dinyatakan

dengan rasio antara penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur (L_M) dan total angkatan kerja desa (L_{US}), maka nilai peluang itu dapat dihitung dengan rumus:

$$W_A = \frac{L_M}{L_{US}}(\overline{W}_M) \quad \text{..... (3.15)}$$

Nilai peluang perolehan pekerjaan inilah yang akan menyamakan tingkat upah di perdesaan yaitu W_A. Adanya selisih tingkat upah desa-kota tersebut, mendorong terjadinya arus migrasi dari desa ke kota, hal ini terlihat pada garis qq' pada Gambar 3. Titik keseimbangan yang baru ini terlihat berada pada titik Z dimana selisih pendapatan antara kota desa sebesar W_M-W_A, jumlah tenaga kerja yang masih ada disektor pertanian adalah O_AL_A. Sedang tenaga sebesar O_ML_M ada disektor industri dengan tingkat upah sebesar W_M, dan sisanya adalah O_ML_A-O_ML_M akan menganggur atau memasuki sektor informal yang pendapatannya rendah, (Jhingan, 2004).

3.8. Kerangka Pikir

Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan (Todaro, 2009). Ada tiga macam ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output per pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi.

Kebijakan fiskal dalam pandangan Keynesian memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian. Desentralisasi fiskal di Indonesia memberi kewenangan pada pemerintah daerah berupa keleluasaan untuk mengatur penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Hal tersebut didasari pada asumsi bahwa, pemerintah daerah lebih tahu dan lebih mengenali potensi-potensi daerah untuk meningkatkan

penerimaannya. Selain itu pemerintah daerah juga diasumsikan lebih bisa secara efisien dan efektif dalam membiayai pengeluarannya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan, untuk tercapainya kesejahteraan masyarakatnya, karena mereka lebih dekat dengan rakyat.

Kebijakan fiskal pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberi stimulus terhadap perekonomian daerah secara berkesinambungan dan berkualitas. Variabel fiskal daerah meliputi; penerimaan pemerintah daerah yaitu (1) pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, dan (2) transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK), dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara pengeluaran pemerintah daerah kabupaten kota meliputi dikelompokkan ke dalam; (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) belanja modal, dan (4) belanja lain-lain.

Dalam pandangan Keynes kebijakan fiskal tersebut akan mempengaruhi pendapatan nasional dari sisi permintaan, bersama-sama dengan variabel konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Sementara dari sisi produksi mempengaruhi output masing-masing-sektor dalam perekonomian daerah atau produk domestik regional bruto (PDRB), dan penyerapan tenaga kerja kabupaten kota di provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam penelitian ini kinerja fiskal daerah diukur dengan melihat peran kebijakan fiskal dan memberikan stimulus terhadap investasi swasta, pertumbuhan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan kemiskinan. Oleh karena penelitian terlebih dahulu digambarkan pola hubungan antara kebijakan fiskal terutama belanja modal terhadap pertumbuhan PDRB, kemiskinan dan pengangguran.

Sementara kinerja fiskal sektor pertanian dapat dilihat pada peran kebijakan fiskal dalam memberikan stimulus terhadap sektor pertanian pada produk domestik regional bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, dan kesejahteraan petani.

Secara skematis, kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 5.

3.9. Hipotesis

Berdasarkan tujuan dan kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka dibuat hipotesis penelitian:

1. Kebijakan fiskal daerah terutama belanja modal diduga berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja perekonomian daerah khususnya dari segi peningkatan investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan.
2. Kebijakan fiskal terutama belanja modal sektor pertanian dan infrastruktur diduga berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan.
4. Realokasi anggaran dengan menurunkan belanja barang dan jasa serta belanja lain-lain yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lainnya, dapat meningkatkan kinerja perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

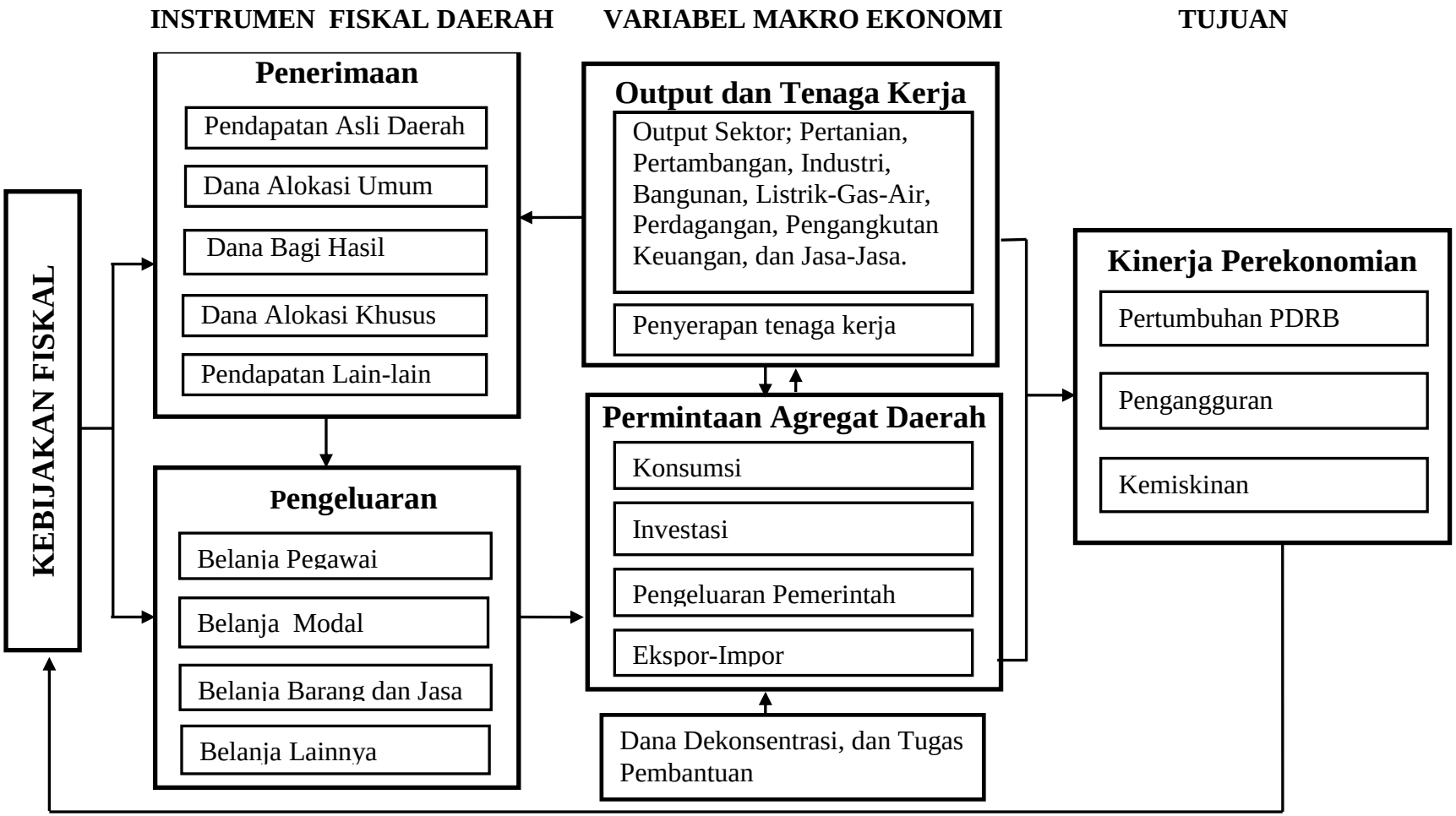

Gambar 5. Kerangka Pikir Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi Penelitian

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12' - 8° lintang selatan dan 116°48' - 122°36' bujur timur. Luas wilayahnya 62 482.54 km². Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat, dan Laut Flores di selatan.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, Provinsi Sulawesi Selatan terbagi atas 21 kabupaten dan 3 kota dengan jumlah penduduk sebanyak 8 032 551 jiwa. Dalam penelitian ini Provinsi Sulawesi Selatan dibagi ke dalam 23 kabupaten kota. Kabupaten Tana Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja dimasukkan dalam kabupaten induknya yaitu Kabupaten Tana Toraja.

4.2. Spesifikasi Model

Model merupakan suatu penjelasan dari fenomena aktual sebagai suatu sistem atau proses, sehingga fenomena aktual direpresentasikan oleh model untuk menjelaskan, memprediksi dan mengontrolnya. Model ekonometrika merupakan gambaran dari hubungan masing-masing variabel penjelas (*explanatory variables*), terhadap peubah endogen (*dependent variables*) khususnya yang menyangkut tanda dan besaran (*magnitude and sign*) dari penduga parameter, sesuai dengan harapan teoritis secara apriori.

Model yang baik haruslah memenuhi kriteria teori ekonomi (*theoritically meaningful*), kriteria statistika yang dilihat dari suatu derajat ketepatan (*goodness of fit*) yang dikenal dengan koefisien determinasi (R^2) serta nyata secara statistik (*statistically significant*), serta kriteria ekonometrika yang menetapkan apakah suatu taksiran memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan seperti *unbiasedness, consistency, sufficiency,* dan *efficiency.* Statistik D_w adalah suatu kriteria ekonometrika yang digunakan untuk menguji taksiran, yaitu menguji validitas dari asumsi *autocorrelation* (Koutsoyiannis, 1977).

Model ekonometrika dibedakan atas persamaan tunggal dan persamaan simultan. Persamaan tunggal adalah persamaan dimana peubah terikat

dinyatakan sebagai sebuah fungsi dari satu atau lebih peubah bebas, sehingga hubungan sebab akibat antara peubah terikat dan peubah bebas merupakan hubungan satu arah. Sedangkan persamaan simultan adalah suatu persamaan yang membentuk suatu sistem persamaan yang menggambarkan ketergantungan diantara berbagai peubah dalam persamaan tersebut.

Dalam bagian ini dirumuskan model ekonometrika dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan sistem persamaan simultan dengan 35 persamaan yang meliputi; 26 persamaan struktural dan 11 persamaan identitas. Persamaan struktural merupakan representasi dari peubah-peubah endogen dan peubah eksogen yang secara operasional menghasilkan tanda dan besaran nilai-nilai penduga parameter sesuai dengan harapan teoritis secara apriori.

Model sistem persamaan simultan yang dibangun dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat blok yaitu: (1) blok fiskal, (2) blok permintaan agregat, (3) blok output, dan (4) blok kinerja perekonomian. Keterkaitan antara variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 6.

I. Blok Fiskal

Blok fiskal daerah terdiri dari sub blok penerimaan daerah dan sub blok pengeluaran daerah. Blok fiskal penerimaan daerah terdiri atas 6 persamaan, masing-masing 4 persamaan struktural dan 2 persamaan identitas. Sementara blok pengeluaran daerah terdiri atas 7 persamaan, masing-masing 5 persamaan struktural dan 2 persamaan identitas.

Penerimaan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

$$PAD_{it} = PAJD_{it} + RETD_{it} + BUMD_{it} + PADL_{it} \quad \text{.....} \quad (4.1)$$

dimana:

PAD : Pendapatan asli daerah
PAJD : Pajak daerah
RETD : Retribusi daerah
BUMD : Badan usaha milik daerah
PADL : Penerimaan asli daerah lain-lain.

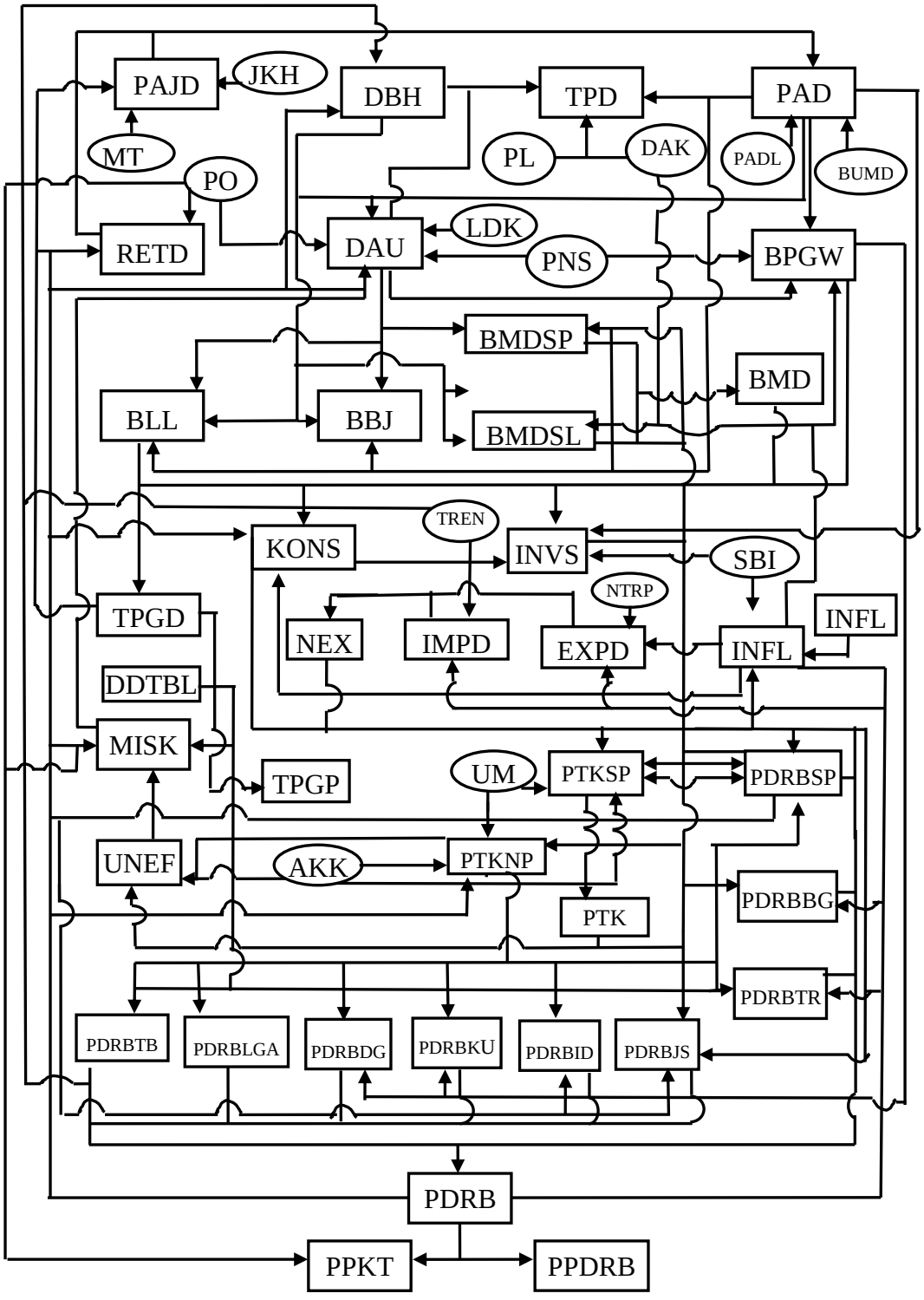

Keterangan: ▭ Variabel endogen ⬭ Variabel eksogen

Gambar 6 : Keterkaitan Antar Variabel Model Kebijakan Fiskal Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

2. Pajak Daerah

$$PAJD_{it} = a_{0+} a_1 TPGPD_{it} + a_2 MTR_{it} + a_3 JKHL_{it} + a_4 LPAJD_{it} + u_1 \quad .. \quad (4.2)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $a_1, a_2, a_3 > 0$; $0 < a_4 < 1$

dimana:

PAJD : Pajak daerah
TPGPD : Total pengeluaran pemerintah daerah
MTR : Jumlah kendaran bermotor
JKHL : Jumlah kamar hotel
LPAJD : Pajak daerah tahun sebelumnya.

3. Retribusi Daerah

$$RETD_{it} = b_0 + b_1 PDRB_{it} + b_2 TPGPD_{it} + b_3 POP_{it} + b_4 LRETD_{it} + u_2 \quad (4.3)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $b_1, b_2, b_3 > 0$; $0 < b_4 < 1$

dimana:

RETD : Retribusi daerah
PDRB : Produk domestik regional bruto
POP : Jumlah penduduk
TPGPD : Total pengeluaran pemerintah daerah
LRETD : Retribusi daerah tahun sebelumnya.

4. Dana Alokasi Umum

$$DAU_{it} = c_0 + c_1 PNS_{it} + c_2 PAD_{it} + c_3 BBJ_{it} + c_4 BLL_{it} + c_5 LDK_{it} + c_6 INFL_{it} + u_3 \quad (4.4)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $c_1, c_3, c_4, c_5, c_6 > 0$; $c_2 < 0$

dimana:

DAU : Dana alokasi umum
PNS : Jumlah pegawai negeri sipil.
PAD : Pendapatan asli daerah
BBJ : Belanja barang dan jasa
BLL : Belanja lain-lain
LDK : Luas daerah kabupaten kota
INFL : Inflasi

5. Dana Bagi Hasil

$$DBH_{it} = d_0 + d_1 PDRB_{it} + d_2 TREN_{it} + d_3 LDBH + u_4 \quad ..... \quad (4.5)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $d_1, d_2 > 0$; $0 < d_3 < 1$

dimana:

DBH : Dana bagi hasil
PDRB : Produk domestik regional bruto
TREN : Tren (tahun 1,2,3, ...,n)
LDBH : Dana bagi hasil tahun sebelumnya.

6. Total Penerimaan Daerah

$$TPD_{it} = PAD_{it} + DAU_{it} + DBH_{it} + DAK_{it} + PLD_{it} \quad \text{.....} \quad 4.6)$$

dimana:

TPD : Total penerimaan daerah
PAD : Pendapatan asli daerah
DAU : Dana alokasi umum
DBH : Dana bagi hasil
DAK : Dana alokasi khusus
PLD : Penerimaan lain daerah.

Pengeluaran Daerah

7. Belanja Pegawai

$$BPGW_{it} = e_0 + e_1 PNS_{it} + e_2 PAD_{it} + e_3 DAU_{it} + e_4 LBPGW_{it} + u_5 \quad \text{.....} \quad (4.7)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $e_1, e_2, e_3 > 0$; $0 < e_4 < 1$

dimana

BPGW : Belanja pegawai
PNS : Jumlah pegawai negeri sipil
PAD : Pendapatan asli daerah
DAU : Dana alokasi umum
LBPGW : Belanja pegawai tahun sebelumnya.

8. **Belanja Barang dan Jasa**

$$BBJ_{it} = f_0 + f_1 PAD_{it} + f_2 DAU_{it} + f_3 DBH_{it} + f_4 LBBJ_{it} + u_6 \quad \text{.....} \quad (4.8)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $f_1, f_2, f_3 > 0$; $0 < f_4 < 1$

dimana:

BBJ : Belanja barang dan jasa
PAD : Pendapatan asli daerah
DAU : Dana alokasi umum
DBH : Dana bagi hasil
LBBJ : Belanja barang dan jasa tahun sebelumnya.

9. Belanja Modal

$$BMD_{it} = BMDSP_{it} + BMDSL_{it} \quad \text{.....} \quad (4.9)$$

dimana:

BMD : Belanja modal
BMDSP : Belanja modal sektor pertanian
BMDSL : Belanja modal sektor lainnya.

10. **Belanja Modal Sektor Pertanian**

$$BMDSP_{it} = g_0 + g_1 DAK_{it} + g_2 DAU_{it} + g_3 PDRBSP_{it} + g_4 LBMDSP_{it} + u_7 \quad (4.10)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $g_1, g_2, g_3 > 0$; $0 < g_4 < 1$

dimana:

BMDSP : Belanja modal sektor pertanian
DAK : Dana alokasi khusus
DAU : Dana alokasi umum
PDRBSP : Produk domestik regional bruto sektor pertanian
LBMDSP : Belanja modal sektor pertanian tahun sebelumnya.

11. **Belanja Modal Sektor Lainnya**

$$BMDSL_{it} = h_0 + h_1 DBH_{it} + h_2 DAK_{it} + h_3 LBMDSL_{it} + u_8 \quad (4.11)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $h_1, h_2 > 0$; $0 < h_4 < 1$

dimana:

BMDISL : Belanja modal sektor lain
DBH : Dana bagi hasil
DAK : Dana alokasi khusus
LBMDSL : Belanja modal sektor lain tahun sebelumnya.

12. Belanja Lain-lain Pemerintah (BLL)

$$BLL_{it} = i_0 + i_1 DAU_{it} + i_2 DBH_{it} + i_3 PAD_{it} + i_4 LBLL_{it} + u_9 \ldots\ldots\ldots \quad (4.12)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $i_1, i_2, i_3 > 0$; $0 < i_4 < 1$

dimana:

BLL : Belanja lain-lain pemerintah
DAU : Dana alokasi umum
DBH : Dana bagi hasil
PAD : Pendapatan asli daerah
LBLL : Belanja lain-lain pemerintah tahun sebelumnya

13. Total Pengeluaran Pemerintah Daerah

$$TPGPD_{it} = BPGW_{it} + BBJ_{it} + BMD_{it} + BLL_{it} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (4.13)$$

dimana:

TPGPD : Total pengeluaran pemerintah daerah
BPGW : Belanja pegawai
BBJ : Belanja barang dan jasa
BMD : Belanja modal
BLL : Belanja lain-lain pemerintah.

II. Blok Permintaan Agregat Daerah

Blok permintaan agregat daerah terdiri dari 6 persamaan, masing- masing 4 persamaan struktural yaitu; pengeluaran konsumsi, investasi, ekspor daerah, dan

impor daerah, serta 2 persamaan identitas yaitu persamaan total pengeluaran pemerintah dan persamaan ekspor bersih.

1. Konsumsi Swasta

$$KONS_{it} = j_0 + j_1 PDRB_{it} + j_2 BBJ_{it} + j_3 BPGW_{it} + j_4 INFL_{it} + j_5 LKONS_{it} + u_{10} \quad \text{..... (4.14)}$$

parameter estimasi yang diharapkan: $k_1, k_2, k_3, k_5, > 0$; $k4 < 0$

dimana:

KONS : Konsumsi swasta
PDRB : Produk domestik regional bruto
BBJ : Belanja barang dan jasa
BPGW : Belanja pegawai
INFL : Inflasi
LKONS : Konsumsi swasta tahun sebelumnya.

2. **Investasi Swasta**

$$INVS_{it} = k_0 + k_1 BMD_{it} + k_2 PAD_{it} + k_3 KONS + k_4 LINVSW_{it} + u_{11} \text{ ..... (4.15)}$$

parameter estimasi yang diharapkan: $k_2 < 0$; dan $k_1, k_3 > 0$; $0<k_4<1$

dimana:

INVS : Investasi swasta
BMD : Belanja modal
PAD : Pendapatan asli daerah
KONS : Konsumsi
LINVS : Investasi swasta tahun sebelumnya.

3. Total Pengeluaran Pemerintah

$$TPGP_{it} = TPGPD_{it} + DDTBL_{it} \text{..... (4.16)}$$

dimana:

TPGP : Total pengeluaran pemerintah
TPGPD : Total pengeluaran pemerintah daerah
DDTBL : Dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan lainnya.

4. Ekspor Daerah

$$EXPD_{it} = l_0 + l_1 NTRP_{it} + l_2 PDRB_{it} + l_3 INFL + l_4 LEXPD_{it} + u_{12} \text{ ..... (4.17)}$$

parameter estimasi yang diharapkan: $l_1, l_3 < 0$ dan $l_2 > 0$; $0<l_4<1$

dimana:

EXPD : Ekspor daerah
NTRP : Nilai tukar rupiah
PDRB : Produk domestik regional bruto
INFL : Inflasi
LEXPD : Ekspor daerah tahun sebelumnya.

5. Impor Daerah

$IMPD_{it} = m_0 + m_1 PDRB_{it} + m_2 KONS_{it} + m_3 LIMPD_{it} + u_{13}$ ..... . (4.18)

parameter estimasi yang diharapkan: $m_1, m_2 > 0$; $0<m_3<1$

dimana:

IMPD	:	Impor daerah
PDRB	:	Produk domestik regional bruto
KONS	:	Konsumsi swasta
LIMPD	:	Impor daerah tahun sebelumnya.

6. Ekspor bersih

$NEXP = EXPD_{it} - IMPD_{it}$ ..... (4.19)

dimana:

NEXP	:	Ekspor bersih
EXPD	:	Ekspor daerah
IMPD	:	Impor daerah

III. **Blok Output dan Tenaga Kerja**

Persamaan untuk blok *output* atau PDRB dan tenaga kerja, terdiri atas tiga belas persamaan, yaitu sebelas persamaan struktural dan dua persamaan identitas. Pesamaan struktural yaitu persamaan output/PDRB masing-masing sektor dan persamaan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan non pertanian, serta dua persamaan identitas, yaitu total produk domestik regional bruto, dan penyerapan tenaga kerja.

1. Output Sektor Pertanian

$$PDRBSP_{it} = n_0 + n_1 PTKSP_{it} + n_2 BMDSP_{it} + n_3 INVS_{it} + n_4 KONS_{it} + n_5 DDTBL_{it} + n_6 LPDRBSP_{it} + u_{14}$$ ..... (3.20)

parameter estimasi yang diharapkan: $n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 > 0$; $0<n_6<1$

dimana:

PDRBSP	:	Produk domestik regional bruto sektor pertanian
PTKSP	:	Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian
BMDSP	:	Belanja modal sektor pertanian
INVS	:	Investasi swasta
KONS	:	Konsumsi swasta
DDTBL	:	Dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan lainnya
LPDRBSP	:	PDRB sektor pertanian tahun sebelumnya

2. Output Sektor Pertambangan

$$PDRBTB_{it} = o_0 + o_1 PTKNP_{it} + o_2 INVS_{it} + o_3 DDTBL_{it} + o_4 NEXP_{it} + o_5 LPDRBTB_{it} + u_{15}$$ ..... (3.21)

parameter estimasi yang diharapkan: $o_1, o_3, o_2, o_4 > 0$; $0<o_5<1$

dimana:

PDRBTB : Produk domestik regional bruto sektor pertambangan
PTKNP : Penyerapan tenaga kerja non pertanian
NEXP : Ekspor bersih
INVS : Investasi swasta
DDTBL : Dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan lainnya
LPDRBTB : PDRB sektor pertambangan tahun sebelumnya.

3. Output Sektor Industri

$$PDRBID_{it} = p_0 + p_1 PTKNP_{it} + p_2 INVS_{it} + p_3 DDTBL_{it} + p_4 BMDSL_{it} + p_5 UMP_{it} + p_6 INFL_{it} + u_{16} \quad (3.22)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $p_1, p_2, p_3, p_4 > 0$; $p_5, p_5 < 0$

dimana:

PDRBID : Produk domestik regional bruto sektor industri
PTKNP : Penyerapan tenaga kerja non pertanian
INVS : Investasi swasta
BMDSL : Belanja modal sektor lain
DDTBL : Dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan lainnya
UMP : Upah minimum provinsi
INFL : Inflasi.

4. Output Sektor Listrik Gas dan Air

$$PDRBLGA_{it} = q_0 + q_1 PTKNP_{it} + q_2 INVS_{it} + q_3 DDTBL_{it} + q_4 LPDRBLGA_{it} + u_{17} \quad (4.23)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $q_1, q_2, q_3 > 0$; $0<q_4<1$

dimana:

PDRBLGA : Produk domestik regional bruto sektor listrik gas dan air
PTKNP : Penyerapan tenaga kerja non pertanian
INVS : Investasi swasta
DDTBL : Dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan lainnya
LPDRBLGA : PDRB sektor listrik gas dan air tahun sebelumnya.

5. Output Sektor Bangunan

$$PDRBBG_{it} = r_0 + r_1 PTKNP_{it} + r_2 INVS_{it} + r_3 DDTBL_{it} + r_4 BMDSL_{it} + u_{18} \quad (3.24)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $r_1, r_2, r_3 > 0$; $r_4 < 0$.

dimana:

PDRBBG : Produk domestik regional bruto sektor bangunan
PTKNP : Penyerapan tenaga kerja non pertanian
INVS : Investasi swasta
DDTBL : Dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan lainnya
BMDSL : Belanja modal sektor lain

6. Output Sektor Perdagangan

$$PDRBDG_{it} = s_0 + s_1 PTKNP_{it} + s_2 DDTBL_{it} + s_3 INVS_{it} + s_4 INFL_{it} + u_{19} \quad (3.25)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $s_{1,}\, s_2$, $s_3 > 0$ dan $s_4 < 0$.

dimana:

PDRBDG : Produk domestik regional bruto sektor perdagangan
PTKNP : Penyerapan tenaga kerja non pertanian
INVS : Investasi swasta
DDTBL : Dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan lainnya
INFL : Inflasi.

7. Output Sektor Transportasi

$$PDRBTR_{it} = t_0 + t_1\, PTKNP_{it} + t_2\, INVS_{it} + t_3 DDTBL_{it} + t_4 INFL_{it} + u_{20} \quad \text{..... (3.26)}$$

parameter estimasi yang diharapkan: $t_{1,}\, t_2$, $t_3 > 0$ dan $t_4 < 0$

dimana:

PDRBTR : Produk domestik regional bruto sektor transportasi
PTKNP : Penyerapan tenaga kerja non pertanian
INVS : Investasi swasta
DDTBL : Dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan lainnya
INFL : Inflasi.

8. Output Sektor Keuangan

$$PDRBKU_{it} = u_0 + u_1\, PTKNP_{it} + u_2 INVS_{it} + u_3 DDTBL_{it} + u_4 INFL_{it} + u_{21} \quad \text{.. (3.27)}$$

parameter estimasi yang diharapkan: $u_{1,}\, u_2$, $u_3 > 0$ dan $u_4 < 0$

dimana:

PDRBKU : Produk domestik regional bruto sektor keuangan
PTKNP : Penyerapan tenaga kerja non pertanian
INVS : Investasi swasta
DDTBL : Dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan lainnya
INFL : Inflasi.

9. Output Sektor Jasa-jasa

$$PDRBJS_{it} = v_0 + v_1\, PTKNP_{it} + v_2 KONS_{it} + v_3 DDTBL_{it} + v_4 INVS_{it} + v_5 INFL_{it} + u_{22} \quad \text{..... (3.28)}$$

parameter estimasi yang diharapkan: $v_{1,}\, v_2$, v_3, v_4, > 0; v_5, < 0

dimana:

PDRBJS : Produk domestik regional bruto sektor jasa-jasa
PTKNP : Penyerapan tenaga kerja non pertanian
KONS : Konsumsi swasta
DDTBL : Dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan lainnya
INVS : Investasi swasta
INFL : Inflasi.

10. Total Output

$$PDRB_{it} = PDRBSP_{it} + PDRBTB_{it} + PDRBID_{it} + PDRBLGA_{it} + PDRBBG_{it} + PDRBDG_{it} + PDRBTR_{it} + PDRBKU_{it} + PDRBJS_{it} \quad \text{..... (3.29)}$$

dimana:

PDRB : Output/produk domestik regional bruto
PDRBSP : PDRB sektor pertanian
PDRBTB : PDRB sektor pertambangan
PDRBID : PDRB sektor industri
PDRBLGA: PDRB sektor listrik, gas, dan air
PDRBBG : PDRB sektor bangunan
PDRBDG : PDRB sektor perdagangan
PDRBTR : PDRB sektor transportasi dan komunikasi
PDRBKU : PDRB sektor keuangan
PDRBJS : PDRB sektor jasa-jasa

11. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

$$PTKSP_{it} = w_0 + w_1 AKK_{it} + w_2 INVS_{it} + w_3 LPTKSP_{it} + u_{23} \quad \text{.....(3.30)}$$

parameter estimasi yang diharapkan: $w_1, w_2 > 0$; $0<w_3<1$

dimana:

PTKSP : Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian
AKK : Jumlah angkatan kerja
INVS : Investasi swasta
LPTKSP : Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tahun sebelumnya.

12. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor non Pertanian

$$PTKNP_{it} = x_0 + x_1 INVS_{it} + x_2 AKK_{it} + x_3 LPTKNP_{it} + u_{24} \quad \text{.....} \quad (3.31)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $x_1, x_2 > 0$; $0<x_3<1$

dimana:

PTKNP : Penyerapan tenaga kerja non pertanian
INVS : Investasi swasta
AKK : Jumlah angkatan kerja
LPTKNP : Penyerapan tenaga kerja non pertanian tahun sebelumnya.

13. Total Penyerapan Tenaga Kerja

$$PTK_{it} = PTKSP_{it} + PTKNP \quad \text{.....} \quad (3.32)$$

dimana:

PTK : Penyerapan tenaga kerja
PTKSP : Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian
PTKNP : Penyerapan tenaga kerja non pertanian.

IV. Blok Kinerja Perekonomian

Blok kinerja perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dibagi dalam tiga sub blok yaitu (1) pengangguran, (2) kemiskinan, dan (3) inflasi.

1. Pengangguran

$UNEP_{it} = AKK_{it} - PTK_{it}$ ..... (3.33)

UNEP : Jumlah pengangguran
PTK : Penyerapan tenaga kerja
AKK : Jumlah angkatan kerja

2. Kemiskinan

$MISK_{it} = y_0 + y_1 PDRB_{it} + y_2 POP_{it} + y_3 UNEP_{it} + y_4 LMISK_{it} + u_{26}$ ...(3.34)

parameter estimasi yang diharapkan: $y_2, y_3 > 0$; $y_1 < 0$; $0<y_4<1$

dimana:

MISK : Jumlah penduduk miskin
PDRB : Produk domestik regional bruto
POP : Jumlah penduduk
UNEP : Jumlah pengangguran
LMISK : Jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya.

3. Tingkat Inflasi

$INFL_{it} = z_0 + z_1 TPGPD + z_2 NEXP_{it} + z_3 INVS_{it} + z_4 SBI_{it} + z_5 INFLK + u_{27}$. (4.35)

parameter estimasi yang diharapkan: $z_1, z_2, z_5 > 0$; $z_3, z_4 < 0$

dimana:

INFL : Tingkat inflasi
TPDPD : Total pengeluaran pemerintah daerah
NEXP : Ekspor bersih
INVS : Investasi swasta
PDRB : Produk domestik regional bruto
SBI : Suku bunga Bank Indonesia

4.3. Identifikasi Model

Identifikasi model ditentukan atas dasar ”*order condition*” sebagai syarat keharusan dan ”*rank condition*” sebagai syarat kecukupan. Menurut Koutsoyiannis (1977), rumusan identifikasi model persamaan struktural berdasarkan *order condition* ditentukan oleh:

(K – M) > (G – 1) ..... (4.36)

dimana:

K : Total peubah dalam model, yaitu peubah endogen dan peubah predetermined.
M : Jumlah peubah endogen dan eksogen yang termasuk dalam satu persamaan tertentu dalam model.

G : Total persamaan dalam model, yaitu jumlah peubah endogen dalam model.

Berdasarkan *order condition* tersebut, apabila:

(K-M) > (G-1) : maka persamaan dinyatakan teridentifikasi secara berlebih (*over identified*)
(K-M)=(G-1) : maka persamaan dinyatakan teridentifikasi secara tepat (*exactly identified*)
(K-M)<(G-1) : maka persamaan dinyatakan tidak teridentifikasi (*unidentified*)

Hasil identifikasi untuk setiap persamaan struktural haruslah *exactly identified* atau *over identified* untuk dapat menduga parameter-parameternya.

Kendati suatu persamaan memenuhi *order condition*, mungkin saja persamaan ini tidak teridentifikasi. Karena itu dalam proses identifikasi diperlukan suatu syarat perlu sekaligus syarat cukup. Hal itu dituangkan dalam *rank condition*, untuk identifikasi yang menyatakan bahwa dalam suatu persamaan teridentifikasi jika dan hanya jika dimungkinkan untuk membentuk minimal satu determinan bukan nol pada order (G-1) dari parameter struktural peubah yang tidak termasuk dalam persamaan tersebut, atau dengan kata lain kondisi rank ditentukan oleh determinan turunan persamaan struktural yang nilainya tidak sama dengan nol (Koutsoyiannis, 1977).

Dengan mengikuti prosedur identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka dari model dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat diketahui, bahwa jumlah *predetermined variables* adalah 72, sedangkan jumlah persamaan (G) adalah 35 yang terdiri dari 26 persamaan struktural dan 9 persamaan identitas sehingga K = 72, M = 10 dan G = 35, maka K – M = 72 – 10 = 62 dan G – 1 = 35 –1 = 34, maka (K – M) > (G – 1) (62>34). Oleh karena itu berdasarkan kriteria *order condition* maka persamaan dinyatakan teridentifikasi secara berlebih (*over identified)* sehingga dapat diduga parameter-parameternya.

4.4. Metode Pendugaan Model

Dari hasil identifikasi model, maka model dinyatakan *over identified*, sehingga dalam penelitian ini pendugaan model dilakukan dengan metode 2SLS (*two stage least squares*) karena metode 2SLS cocok untuk persamaan simultan

yang *over identified*, dapat digunakan pada jumlah sampel yang relatif sedikit dan tidak sensitif terhadap modifikasi (*respesifikasi*) model, baik untuk analisis struktural maupun untuk analisis simulasi dan peramalan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program software komputer SAS versi 9.0.

Untuk mengetahui dan menguji apakah variabel penjelas secara bersama-sama berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel endogen, maka pada setiap persamaan digunakan uji statistik F, dan untuk menguji apakah masing-masing variabel penjelas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel endogen, maka pada setiap persamaan digunakan uji statistik t.

4.5. Validasi Model

Untuk mengetahui apakah model cukup valid untuk membuat suatu simulasi alternatif kebijakan dan peramalan, maka perlu dilakukan suatu validasi model, dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana model tersebut dapat mewakili dunia nyata.

Dalam penelitian ini, kriteria statistik untuk validasi nilai pendugaan model ekonometrika yang digunakan adalah *root means squares error (RMSE), root means squares percent error (RMSPE)* dan *theil's inequality coefficient (U)* (Pindyck and Rubinfield, 1991). Kriteria-kriteria tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(Y_t^s - Y_t^a\right)^2} \quad \text{..... (4.37)}$$

$$\text{RMSPE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(\frac{Y_t^s - Y_t^a}{Y_t^a}\right)^2} \quad \text{..... (4.38)}$$

$$\text{U} = \frac{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(Y_t^s - Y_t^a\right)^2}}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(Y_t^s\right)^2} + \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(Y_t^a\right)^2}} \text{ . ..... (4.39)}$$

dimana:

Y_t^s : nilai hasil simulasi dasar dari variabel observasi
Y_t^a : nilai aktual variabel observasi
n : jumlah periode observasi

Statistik RMSPE digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai peubah endogen hasil pendugaan menyimpang dari alur nilai-nilai aktualnya dalam ukuran relatif (persen), atau seberapa dekat nilai dugaan itu mengikuti perkembangan nilai aktualnya.

Sedangkan nilai statistik U bermanfaat untuk mengetahui kemampuan model untuk analisis simulasi peramalan. Nilai koefisien Theil (U) berkisar antara 1 dan 0. Jika U=0 maka pendugaan model sempurna, jika U=1 maka pendugaan model naif. Untuk melihat keeratan arah (slope) antara aktual dengan hasil yang disimulasi dilihat dari nilai koefisien determinasinya (R^2). Pada dasarnya makin kecil nilai RMSPE dan U-Theil's dan makin besar nilai R^2, maka pendugaan model semakin baik.

4.6. Simulasi Model

Simulasi pada dasarnya merupakan solusi matematis (*mathematical solution*) dari berbagai kumpulan persamaan secara simultan. Dengan demikian simulasi model menunjuk kepada sekumpulan persamaan (*set of equations*). Simulasi model dilakukan dengan berbagai alasan, misalnya untuk pengujian dan evaluasi model, analisis kebijakan historis dan untuk peramalan (Pindyck dan Rubinfield, 1991).

Berdasarkan data empirik dan memperhatikan tinjauan teoritik dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka simulasi kebijakan terutama ditujukan untuk keperluan analisis kebijakan historis (*historical policy analysis*). Analisis simulasi kebijakan yang dimaksud, untuk melihat dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Oleh sebab itu, simulasi kebijakan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu; (1) simulasi kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan variabel pendapatan asli daerah, selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal, terdiri atas 2 simulasi, (2) simulasi kebijakan dengan meningkatkan variabel transfer dana dari pemerintah pusat untuk meningkatkan belanja modal, terdiri atas 2 simulasi, dan (3) simulasi kebijakan realokasi belanja pemerintah daerah, terdiri atas 1 simulasi, dan (4) simulasi

kebijakan non fiskal yaitu simulasi yang dilakukan untuk melihat dampak kenaikan investasi swasta terhadap perekonomian terdiri atas 1 simulasi.

Simulasi kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan variabel pendapatan asli daerah selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal. Simulasi ini didasarkan pada asumsi bahwa variabel-variabel pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi daerah dapat ditingkatkan. Berdasarkan data historis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kabupaten kota umumnya meningkat sekitar 5 sampai 10 persen. Oleh karena itu asumsi yang digunakan dalam simulasi ini yaitu variabel pajak dan retribusi daerah dapat ditingkatkan sampai 10 persen. Dengan meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat ditingkatkan sebesar 10 persen, maka dana tersebut cukup untuk digunakan dalam meningkatkan belanja modal pada sektor pertanian maupun non pertanian sebesar 5 persen.

Simulasi kebijakan dengan meningkatkan variabel transfer dana dari pemerintah pusat. Simulasi ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah pusat dapat meningkatkan variabel-variabel tranfer fiskal ke daerah berupa dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Data historis menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya meningkat sekitar 5 sampai 10 persen setiap tahun. Oleh karena itu asumsi yang digunakan dalam simulasi ini yaitu variabel dana bagi hasil dan dana alokasi umum dapat ditingkatkan sampai 10 persen. Dengan meningkatnya penerimaan dari dana alokasi umum 10 persen, maka dana tersebut cukup untuk digunakan dalam meningkatkan belanja modal sampai 20 persen. Demikian halnya dengan meningkatnya penerimaan dari dana alokasi khusus dan dana bagi hasil masing-masing 10 persen, maka dana tersebut cukup untuk digunakan dalam meningkatkan belanja modal sampai 10 persen.

Simulasi kebijakan realokasi belanja pemerintah daerah. Simulasi ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah dapat melakukan realokasi anggaran dengan cara menurunkan belanja lain-lain dan belanja barang dan jasa. Pemerintah daerah pada dasarnya dapat melakukan penghematan pada belanja lain seperti mengurangi biaya perjalan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja lainnya, sehingga total belanja lain-lain pemerintah daerah dapat dikurangi sampai 20 persen. Di samping belanja lain-lain pemerintah daerah juga dapat

melakukan penghematan pada belanja barang dan jasa, dengan melakukan penghematan terhadap belanja barang cetak, pengadaan, pemeliharaan rutin, listrik, telepon, sewa, dan lainnya, sehingga total belanja lain-lain pemerintah daerah dapat dikurangi sampai 15 persen. Dengan melakukan penghematan anggaran belanja lain-lain dan dan belanja barang dan jasa tersebut, maka cukup untuk digunakan dalam meningkatkan belanja modal baik pada sektor pertanian maupun non pertanian sampai 25 persen.

Simulasi kebijakan non fiskal yang terpilih adalah investasi swasta. Hal tersebut dilakukan untuk melihat dampak kenaikan investasi swasta terhadap perekonomian. Simulasi ini didasarkan pada pertimbangan teoritis bahwa apabila investasi swasta meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Asumsi yang digunakan yaitu berdasarkan data historis, dimana data historis menunjukkan bahwa investasi swasta meningkat rata-rata 5 sampai 15 persen pertahun. Oleh karena itu asumsi yang digunakan dalam simulasi ini adalah investasi swasta meningkat sebesar 10 persen.

Dalam simulasi kebijakan ini, kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan di kelompokkan dalam dua kelompok yaitu kabupaten yang berbasis pertanian dan kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Pengelompokan ini didasarkan atas data produk domestik regional bruto. Kelompok pertama yaitu kabupatan kota yang berbasis sektor pertanian terdiri atas 17 kabupaten yaitu; Kabupaten Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, dan Luwu Utara, hal tersebut disebabkan karena ke 17 kabupaten ini memiliki share produk domestik regional bruto sektor pertanian lebih dari 35 persen dari total produk domestik regional brutonya.

Kelompok kedua yaitu kabupaten kota yang berbasis non pertanian terdiri atas enam kabupaten kota yaitu; Kabupaten Luwu Timur, Pangka Je’ne Kepulauan, dan Maros, serta Kota Makassar, Pare-pare, dan Palopo. Hal mana ke enam kabupaten kota ini memiliki share produk domestik regional bruto sektor pertanian kurang dari 30 persen. Khusus Kabupaten Maros, walaupun memiliki produk domestik regional bruto sektor pertanian sekitar 35 persen, akan tetapi penulis tetap kategorikan ke dalam kabupaten yang basis non pertanian dengan

pertimbangan bahwa tren penurunan share PDRB sektor pertanian Kabupaten Maros cukup besar, mengingat kondisi geografis Kabupaten Maros yang berbatasan dengan Kota Makasar, membuat share produk domestik regional bruto sektor jasa, industri, perdagangan, dan bangunan meningkat dengan tajam, sehingga penulis memasukkan Kabupaten Moros sebagai kabupaten yang berbasis non pertanian.

V. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kondisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan berada di bagian tengah Indonesia, terletak pada garis 116˚48’ - 122˚36’ bujur timur dan antara 0˚12’ - 8˚ lintang selatan. Di sebelah utara, berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, sebelah timur dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelah selatan Laut Flores, sebelah barat Selat Makassar, dengan luas total mencapai 45 519.24 km^2. Secara administrasi, pada tahun 2009 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten kota terdiri atas 21 Kabupaten, 3 Kota, 304 Kecamatan, 2 182 Desa, dan 764 Kelurahan.

Jumlah sungai yang mengaliri wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sekitar 65 aliran sungai dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada satu sungai yakni Sungai Saddang dengan panjang 150 km, yang mengalir Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Pinrang.

Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat empat danau yaitu: Danau Tempe dan Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo, serta Danau Matana dan Towuti yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur. Adapun jumlah gunung tercatat sebanyak 7 gunung dengan gunung tertinggi adalah Gunung Rantemario dengan ketinggian 3 470 m di atas permukaan air laut. Gunung ini terletak di Kabupaten Enrekang dan Luwu.

Secara historis dan budaya Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi keragaman yang sangat tinggi. Provinsi Sulawesi Selatan pada awalnya mencakup empat etnis besar yakni Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, serta berbagai sub-etnis lainnya. Dalam perkembangannya, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pemekaran wilayah, Kabupaten Polewali Mamasa, Mamuju, dan Majene yang dominan etnis Mandar tergabung dalam provinsi baru yakni Provinsi Sulawesi Barat.

5.1. Penduduk dan Tenaga Kerja

Perkembangan jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perkembangan Penduduk Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(jiwa)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Selayar	111 458	111 961	115 908	117 860	119 811	121 749	1.54
2	Bulukumba	374 247	377 471	381 874	386 239	390 543	394 746	0.91
3	Bantaeng	167 284	168 603	170 049	171 468	172 849	174 176	0.69
4	Jeneponto	327 489	326 243	328 343	330 379	332 334	334 175	0.34
5	Takalar	244 582	246 402	249 348	252 270	255 154	257 974	0.91
6	Gowa	565 252	571 705	583 021	594 423	605 876	617 317	1.54
7	Sinjai	217 374	218 583	221 064	223 522	225 943	228 304	0.84
8	Maros	290 173	292 454	296 071	299 662	295 137	306 687	0.95
9	Pangkep	277 223	284 149	287 838	291 506	303 211	298 701	1.29
10	Barru	157 680	157 726	159 090	160 428	161 732	162 985	0.56
11	Bone	686 986	686 603	693 089	699 474	705 717	711 748	0.60
12	Soppeng	225 183	225 382	226 804	228 181	229 502	230 744	0.41
13	Wajo	363 508	370 236	373 067	375 833	378 512	381 066	0.81
14	Sidrap	247 723	244 821	246 816	248 769	250 666	252 483	0.32
15	Pinrang	334 090	334 459	338 669	342 852	346 988	351 042	0.85
16	Enrekang	178 658	180 400	182 967	185 527	188 070	190 576	1.11
17	Luwu	309 588	312 056	316 141	320 205	324 229	328 180	1.00
18	Tana Toraja	420 733	436 066	444 339	452 663	461 012	469 339	1.93
19	Luwu Utara	269 487	289 463	297 392	305 468	313 674	321 979	3.25
20	Luwu Timur	205 605	211 871	218 063	224 383	230 821	237 354	2.57
21	Makassar	1 164 380	1 198 251	1 216 746	1 235 239	1 253 656	1 271 870	1.54
22	Pare-Pare	114 933	113 696	115 008	116 309	117 591	118 842	0.57
23	Palopo	125 734	129 095	133 293	137 595	141 996	146 482	2.75
Jumlah		7 379 370	7 487 696	7 595 000	7 700 255	7 805 024	7 908 519	1.20

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Berbagai Tahun

Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat 7 908 519 jiwa. Pertumbuhan penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2004 sampai dengan 2009 rata-rata 1.20 persen per tahun, dimana Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo, merupakan kabupaten dan kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi masing-masing 3.25 persen dan 2.75 persen per tahun. Sementara Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Soppeng adalah kabupaten dengan tingkat pertumbuhan penduduk terendah, masing-masing sebesar 0.34 persen dan 0.41 persen per tahun.

Sementara perkembangan angkatan kerja kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(jiwa)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	(%)
1	Selayar	52 440	49 000	46 704	50 304	52 083	54 996	0.81
2	Bulukumba	155 835	155 674	154 808	189 806	202 798	195 722	4.27
3	Bantaeng	80 353	83 382	81 397	85 088	85 482	90 539	2.11
4	Jeneponto	140 670	141 996	126 941	140 028	156 233	150 287	1.14
5	Takalar	104 220	106 061	101 527	106 740	107 925	111 143	1.11
6	Gowa	236 365	240 619	232 524	243 126	243 021	269 388	2.33
7	Sinjai	87 867	92 581	93 967	103 225	97 043	103 782	3.02
9	Maros	112 513	119 905	113 991	119 143	120 871	120 926	1.25
8	Pangkep	108 479	110 618	114 141	114 942	128 723	124 697	2.49
10	Barru	67 046	69 078	58 025	60 797	62 018	60 736	0.19
11	Bone	291 633	309 620	290 065	291 247	323 583	324 189	1.86
12	Soppeng	94 896	106 951	106 951	111 248	104 371	105 064	1.79
13	Wajo	160 517	160 159	167 584	177 595	188 753	186 905	2.74
14	Sidrap	98 469	104 795	94 220	106 924	104 812	103 279	0.81
15	Pinrang	128 811	135 912	127 461	141 325	149 411	149 148	2.63
16	Enrekang	81 916	86 229	74 379	87 165	88 275	93 309	2.32
17	Luwu	136 348	130 468	125 827	131 911	128 674	125 932	0.21
18	Tana Toraja	146 103	158 260	154 231	198 127	194 314	212 207	7.54
19	Luwu Utara	111 155	122 307	115 237	125 556	128 371	132 708	3.23
20	Luwu Timur	87 560	88 332	86 323	96 472	98 703	106 213	3.55
21	Makassar	470 050	470 692	466 414	526 991	565 099	599 605	4.59
22	Pare-Pare	47 227	47 757	42 818	46 203	52 478	54 825	2.68
23	Palopo	48 580	50 410	49 179	58 215	64 838	63 694	5.19
	Jumlah	3 059 053	3 140 806	3 015 931	3 312 178	3 447 879	3 539 294	2.62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berbagai Tahun

Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat 3 539 294 jiwa. Angkatan kerja kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam enam tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2.62 persen per tahun. Kabupaten Tana Toraja dan Kota Palopo merupakan kabupaten dan kota yang mengalami pertumbuhan angkatan kerja tertinggi yaitu masing-masing sebesar 7.54 persen dan 5.19 persen per tahun. Sementara kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan terendah yaitu: Kabupaten Barru dan Kabupaten Luwu, masing-masing sebesar 0.19 persen dan 0.21 persen per tahun.

Selanjutnya perkembangan jumlah tenaga kerja kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(jiwa)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Selayar	48 759	41 852	40 981	43 803	46 103	49 478	0.29
2	Bulukumba	148 535	146 031	135 448	173 445	187 729	184 544	4.85
3	Bantaeng	78 075	76 845	75 421	74 797	77 519	84 069	1.54
4	Jeneponto	135 154	133 846	111 455	129 108	146 372	138 110	0.44
5	Takalar	100 100	101 289	90 339	93 540	97 395	100 868	0.15
6	Gowa	216 037	217 273	193 398	211 492	219 351	243 654	2.56
7	Sinjai	83 814	84 370	88 126	96 605	92 013	98 812	3.58
9	Maros	103 276	110 072	98 555	104 615	106 862	106 961	0.71
8	Pangkep	96 738	98 775	96 047	101 263	116 663	110 446	2.83
10	Barru	62 046	56 813	50 038	55 020	55 801	55 508	-2.11
11	Bone	272 758	283 646	257 887	263 091	296 830	306 120	2.45
12	Soppeng	90 358	98 577	78 489	98 552	96 273	95 376	1.11
13	Wajo	153 142	154 521	154 514	163 329	177 193	176 077	3.00
14	Sidrap	89 019	94 390	82 934	91 925	93 310	95 007	1.35
15	Pinrang	120 835	127 065	112 382	127 275	133 152	135 208	2.38
16	Enrekang	77 763	80 409	71 631	82 029	82 620	87 712	2.56
17	Luwu	114 270	113 430	103 828	123 453	119 957	115 932	0.29
18	Tana Toraja	138 499	147 564	131 708	187 661	183 847	201 701	9.13
19	Luwu Utara	118 810	107 546	107 317	117 233	121 697	123 826	0.84
20	Luwu Timur	63 221	77 036	77 380	85 895	86 464	90 064	8.49
21	Makassar	404 546	399 155	400 980	431 981	498 653	522 462	5.83
22	Pare-Pare	40 119	35 926	36 876	37 252	44 755	47 355	3.61
23	Palopo	43 497	39 423	39 681	46 099	64 838	55 906	5.71
	Jumlah	2 821 371	2 712 854	2 635 415	2 939 463	3 145 397	3 225 196	2.86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berbagai Tahun

Tabel 8 menunjukkan bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat 3 225 196 jiwa. Penyerapan tenaga kerja kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam enam tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2.86 persen per tahun. Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Luwu Timur mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing sebesar 9.13 persen dan 8.49 persen per tahun. Sementara kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Kabupaten Barru dengan tingkat pertumbuhan -2.11 persen per tahun.

Selanjutnya perkembangan jumlah tenaga kerja sektor pertanian kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(Jiwa)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	%
1	Selayar	33 197	34 144	27 584	26 285	26 559	26 833	-3.83
2	Bulukumba	102 210	100 024	88 072	124 217	123 104	121 991	3.87
3	Bantaeng	54 374	57 563	55 372	51 078	52 029	52 980	-0.51
4	Jeneponto	92 690	91 466	72 158	83 152	85 422	87 691	-1.08
5	Takalar	52 183	64 805	54 058	44 350	45 643	46 936	-2.01
6	Gowa	99 734	93 913	79 438	87 854	96 077	104 300	0.92
7	Sinjai	59 531	58 926	64 838	70 548	70 473	70 398	3.65
8	Maros	52 226	62 201	53 166	52 465	50 983	49 500	-1.04
9	Pangkep	51 742	48 933	44 764	53 508	52 425	51 341	-0.15
10	Barru	31 689	34 928	25 026	28 650	27 791	26 932	-3.00
11	Bone	185 567	188 030	196 523	195 599	193 006	190 412	0.52
12	Soppeng	58 161	59 798	57 290	65 859	63 055	60 251	0.72
13	Wajo	83 845	86 845	110 452	94 874	96 330	97 786	3.33
14	Sidrap	52 445	55 839	52 003	54 522	51 370	48 217	-1.61
15	Pinrang	83 156	87 150	72 760	73 724	71 298	68 872	-3.44
16	Enrekang	59 343	60 008	56 951	64 156	65 142	66 128	2.29
17	Luwu	90 041	89 146	81 289	93 242	87 566	81 890	-1.81
18	Tana Toraja	114 084	120 328	107 143	160 931	163 552	166 172	9.13
19	Luwu Utara	76 355	77 267	80 566	85 255	87 232	89 208	3.37
20	Luwu Timur	57 601	53 376	53 721	51 086	53 122	55 158	-0.85
21	Makassar	6 352	9 731	12 834	7 981	10 611	13 240	21.69
22	Pare-Pare	3 745	2 510	2 910	2 280	2 534	2 787	-5.12
23	Palopo	13 124	12 247	10 503	9 361	8 391	7 420	-8.69
	Jumlah	1 513 395	1 549 178	1 459 421	1 580 977	1 583 715	1 586 443	0.97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berbagai Tahun

Tabel 9 menunjukkan bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat 1 586 443 jiwa. Pertumbuhan jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam enam tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0.97 persen per tahun. Terdapat sembilan kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan jumlah penyerapan tenaga kerja yang positif, dan 14 kabupaten kota mengalami pertumbuhan negatif. Kota makassar, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing sebesar persen 21.69 dan 9.13 persen per tahun. Sementara kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan negatif terbesar yaitu Kota Palopo dan Kota Pare-pare dengan tingkat pertumbuhan -8.69 dan -5.12 persen per tahun.

Kemudian perkembangan jumlah tenaga kerja non pertanian kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Non Pertanian Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(Jiwa)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	(%)
1	Selayar	15 562	7 708	13 397	17 518	19 544	22 645	9.10
2	Bulukumba	46 325	46 007	47 376	49 228	64 625	62 553	7.01
3	Bantaeng	23 701	19 282	20 049	23 719	25 490	31 089	6.23
4	Jeneponto	42 464	42 380	39 297	45 956	60.950	50.419	3.75
5	Takalar	47 917	36 484	36 281	49 190	51 752	53 932	2.51
6	Gowa	116 303	123 360	113 960	123 638	123 274	139 354	3.96
7	Sinjai	24 283	25 444	23 288	26 057	21 540	28 414	3.40
8	Maros	51 050	47 871	45 389	52 150	55 879	57 461	2.52
9	Pangkep	44 996	49 842	51 283	47 755	64 238	59 105	6.27
10	Barru	20 357	21 885	25 012	26 370	28 010	28 576	8.07
11	Bone	87 191	95 616	61 364	67 492	103 824	115 708	6.54
12	Soppeng	32 197	38 779	21 199	32 693	33 218	35 125	1 82
13	Wajo	69 297	67 676	44 062	68 455	80 863	78 291	2.60
14	Sidrap	36 574	38 551	30 931	37 403	41 940	46 790	5 59
15	Pinrang	37 679	39 915	39 622	53 551	61 854	66 336	15.21
16	Enrekang	18 420	20 401	14 680	17 873	17 478	21 584	3.44
17	Luwu	24 229	24 284	22 539	30 211	32 391	34 042	8.10
18	Tana Toraja	24 415	27 236	24 565	26 730	20 295	35 529	9.10
19	Luwu Utara	27 403	30 279	26 751	31 978	34 465	34 618	5.27
20	Luwu Timur	20 672	23 660	23 659	34 809	33 342	34 906	13.77
21	Makassar	398 194	389 424	388 146	424 000	488 042	509 222	5.58
22	Pare-Pare	36 374	33 416	33 966	34 972	42 221	44 568	4.51
23	Palopo	30 373	27 176	29 178	36 738	47 161	48 486	11.93
	Jumlah	1 275 976	1 163 676	1 175 994	1 358 486	1 552 396	1 638 753	5.69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berbagai Tahun

Tabel 10 menunjukkan bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja non pertanian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat 1 638 753 jiwa. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja non pertanian kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam enam tahun terakhir rata-rata sebesar 5.69 persen per tahun. Semua kabupaten kota mengalami pertumbuhan yang positif. Terdapat tiga kabupaten dan kota yang mengalami pertumbuhan di atas 10 persen, yaitu Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo masing-masing sebesar 15.21 persen dan 13.77 persen per tahun. Sementara dua kabupaten yang mengalami pertumbuhan di bawah 3 persen per

tahun, yaitu Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Takalar masing-masing sebesar 1.82 persen dan 2.51 persen per tahun.

Perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan non pertanian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Gambar 7.

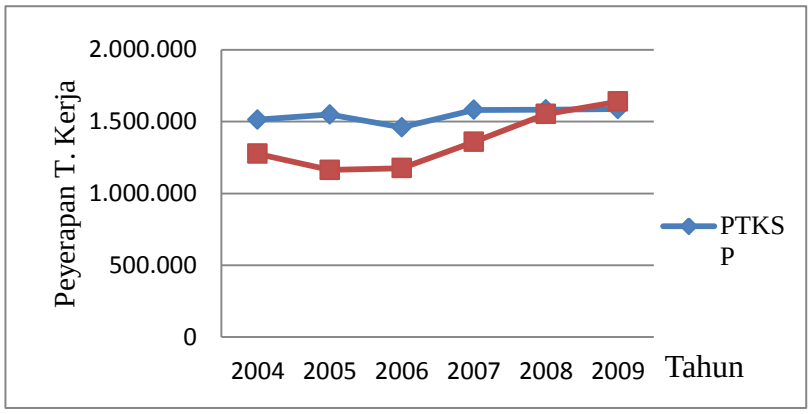

Gambar 7. Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004- 2009

Gambar 7 menunjukkan bahwa, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Sementara penyerapan tenaga kerja non pertanian menunjukkan penurunan pada Tahun 2005 dan tahun 2006, namun sejak tahun 2007 penyerapan tenaga kerja pada non pertanian meningkat, dan tahun 2009 penyerapan tenaga kerja non pertanian sudah lebih besar dari pada sektor pertanian.

5.2. Kondisi Fiskal Daerah

Kondisi fiskal daerah pada dasarnya terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah**.**

5.2.1. Penerimaan Daerah

Struktur penerimaan fiskal daerah kabupaten kota di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan terdisi atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya, (2) transfer dari pemerintah pusat, terdiri atas: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), dan (3) pendapatan lain daerah.

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	%
1	Selayar	2 989	4 607	5 571	5 696	6 127	9 071	40.69
2	Bulukumba	9 032	7 621	9 523	10 598	15 333	15 185	13.62
3	Bantaeng	5 478	4 090	5 142	4 419	5 930	6 046	2.08
4	Jeneponto	4 066	4 435	5 028	6 485	4 935	5 573	7.41
5	Takalar	4 099	4 554	5 042	5 600	5 992	8 263	20.32
6	Gowa	15 564	15 275	20 060	13 083	14 598	13 613	-2.51
7	Sinjai	9 590	8 400	9 603	7 906	7 590	7 460	-4.44
8	Maros	9 434	9 724	10 355	12 169	14 200	13 549	8.72
9	Pangkep	21 104	21 206	20 495	19 342	21 042	24 663	3.37
10	Barru	7 855	5 649	7 549	5 315	6 590	6 449	-3.58
11	Bone	13 876	12 347	11 875	27 317	24 828	35 899	31.74
12	Soppeng	4 772	4 926	6 330	6 359	5 319	5 791	4.27
13	Wajo	10 629	15 031	13 920	10 176	11 135	12 177	2.91
14	Sidrap	10 631	10 014	11 121	11 013	14 253	15 926	9.96
15	Pinrang	7 243	8 616	11 351	7 867	8 954	9 651	6.65
16	Enrekang	8 208	7 496	8 811	6 568	8 176	11 199	7.29
17	Luwu	7 926	7 239	6 566	7 609	11 337	11 186	8.23
18	Tana Toraja	12 821	10 010	14 049	11 178	10 923	8 758	-6.34
19	Luwu Utara	12 732	8 745	7 890	6 486	6 436	7 949	-7.51
20	Luwu Timur	5 255	7 123	11 044	15 258	16 343	24 957	74.98
21	Makassar	66 733	71 527	67 923	57 728	63 136	67 718	0.30
22	Pare-Pare	13 297	13 526	13 383	10 851	12 199	12 758	-0.81
23	Palopo	7 371	9 347	8 707	8 066	8 895	8 033	1.80
	Jumlah	270 704	271 505	291 335	277 088	304 272	341 872	5.26

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat 314 098 juta rupiah. Pendapatan asli daerah kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 5.26 persen per tahun selama enam tahun terakhir. Terlihat pula bahwa PAD kabupaten kota mengalami penurunan tahun 2007, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2008 dan tahun 2009. Walaupun demikian terdapat 6 kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang negatif masing-masing adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Barru, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, dan

Kota Pare-pare. Sementara Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Selayar, dan Kabupaten Bone memiliki pertumbuhan penerimaan PAD yang cukup tinggi masing-masing 74.98 persen dan 40.69 persen serta 31.74 persen per tahun.

Perkembangan pajak daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	(%)
1	Selayar	542	541	486	583	689	828	10.56
2	Bulukumba	2 343	1 671	2 233	2 531	3 422	3 161	6.98
3	Bantaeng	599	622	586	510	585	629	1.00
4	Jeneponto	796	852	764	614	705	672	-3.10
5	Takalar	514	678	708	677	668	688	6.77
6	Gowa	2 946	3 900	6 444	2 830	3 076	3 943	6.77
7	Sinjai	1 073	886	756	915	893	965	-2.01
8	Maros	4 992	4 467	3 977	4 013	3 691	3 861	-4.53
9	Pangkep	12 169	13 151	10 963	10 245	10 617	11 609	-0.92
10	Barru	3 058	1 058	868	900	858	802	-14.75
11	Bone	2 877	2 787	2 342	2 543	2 459	2 424	-3.15
12	Soppeng	1 478	1 034	970	1 063	1 062	987	-6.64
13	Wajo	2 312	2 378	1 854	1 564	1 497	1 523	-6.83
14	Sidrap	2 312	1 710	1 493	1 410	1 344	1 366	-8.18
15	Pinrang	2 182	2 245	1 736	1 470	1 521	1 402	-7.15
16	Enrekang	2 400	2 192	939	710	700	645	-14.63
17	Luwu	3 194	2 917	1 049	972	1 313	2 052	-7.15
18	Tana Toraja	2 546	2 108	5 304	1 218	1 262	1 226	-10.37
19	Luwu Utara	1 251	1 394	1 341	1 226	1 226	1 248	-0.04)
20	Luwu Timur	853	1 398	1 372	1 632	1 692	8 147	171.11
21	Makassar	43 068	45 215	43 756	35 107	41 994	44 960	0.88
22	Pare-Pare	2 132	2 050	1 726	1 481	1 556	1 850	-2.65
23	Palopo	1 206	2 197	1 319	1 897	1 829	1 764	9.25
	Jumlah	96 841	97 452	92 984	76 110	84 661	96 952	0.02

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Pajak daerah kabupaten kota merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan daerah, dan termasuk dalam komponen pendapatan asli daerah. Pajak daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat 96 752 juta rupiah. Tabel 12 menunjukkan bahwa pajak daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan rata-rata besar 0.02 persen per tahun selama enam tahun terakhir. Terdapat delapan kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan pajak daerah yang positif.

Kabupaten Luwu Timur dan Selayar merupakan dua kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi masing-masing sebesar 171.11 persen dan 10.56 persen per tahun. Sementara 15 kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan yang negatif. Terlihat pula bahwa pajak daerah mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2006 dan 2007, namun kembali mengalami peningkat pada tahun 2008 dan 2009.

Perkembangan retribusi daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Selayar	927	1 063	889	760	1 069	1 335	8.81
2	Bulukumba	4 903	4 837	3 891	5 032	5 169	4 768	-0.55
3	Bantaeng	1 595	1 420	1 489	1 559	1 464	1 233	-4.54
4	Jeneponto	1 568	1 882	1 723	1 940	1 908	1 861	3.73
5	Takalar	1 860	2 024	1 496	2 349	2 209	2 544	7.35
6	Gowa	7 393	8 870	9 235	8 371	9 571	7 274	-0.32
7	Sinjai	2 876	3 091	2 775	2 618	2 681	2 779	-0.68
8	Maros	3 472	3 356	3 059	2 566	6 969	5 616	12.35
9	Pangkep	4 629	4 705	3 643	2 124	2 982	4 665	0.16
10	Barru	1 740	1 675	1 164	1 166	1 373	1 004	-8.46
11	Bone	8 610	6 240	6 560	12 560	7 597	10 556	4.52
12	Soppeng	2 802	3 081	3 088	2 636	2 945	3 286	3.46
13	Wajo	4 874	6 572	4 292	4 385	3 618	4 437	-1.79
14	Sidrap	3 233	5 482	5 666	4 753	9 470	9 080	36.17
15	Pinrang	3 471	3 915	3 231	3 968	4 610	4 418	5.46
16	Enrekang	1 408	1 286	1 979	2 033	3 391	2 972	22.22
17	Luwu	2 817	2 573	3 079	4 002	4 314	5 423	18.50
18	Tana Toraja	6 386	5 562	5 393	6 186	6 736	5 667	-2.25
19	Luwu Utara	5 633	5 347	4 130	3 612	3 649	3 576	-7.30
20	Luwu Timur	1 892	2 612	2 516	3 488	4 480	7 438	58.63
21	Makassar	19 277	22 564	20 826	19 667	17 070	17 180	-2.18
22	Pare-Pare	7 995	9 267	8 322	6 903	7 934	8 119	0.31
23	Palopo	5 766	6 899	6 864	5 841	5 990	4 925	-2.92
	Jumlah	105 124	114 322	105 309	108 519	117 201	120 157	2.86

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Retribusi daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat 120 157 juta rupiah. Retribusi daerah kabupaten kota di Provinsi

Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan rata-rata besar 2.86 persen per tahun selama enam tahun terakhir, namun demikian terdapat sembilan kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan retribusi daerah yang negatif. Terlihat bahwa retribusi daerah mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2006, namun secara perlahan kembali mengalami peningkat pada tahun 2007, 2008 dan 2009.

Perkembangan penerimaan dari PAD kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2004-2009 dapat diringkas seperti terlihat pada Gambar 8.

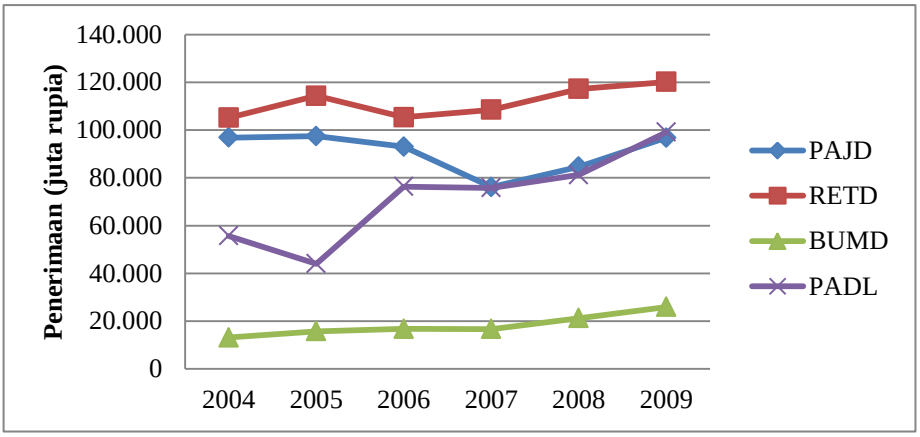

Gambar 8. Perkembangan Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004- 2009

5.2.1.2. Tranfer Dana dari Pemerintah Pusat

Transfer dana dari pemerintah pusat terdiri atas tiga jenis yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penerimaan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari DAU dapat dilihat pada Tabel 14.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer fiskal dari pemerintah pusat, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah di Indonesia, menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 2.84 persen per tahun. Tercatat bahwa jumlah dana alokasi umum kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 sebesar 3 215 868 juta rupiah. DAU merupakan variabel penerimaan terbesar kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan terbesar dalam enam tahun terkhir. Tabel 15 menunjukkan bahwa peningkatan

DAU terbesar terjadi pada tahun 2006, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Terdapat tiga kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan DAU yang cukup besar yaitu Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo masing-masing sebesar 12.52 persen, 13.04 persen dan 9.94 persen per tahun.

Tabel 14. Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Selayar	85 004	85 292	102 541	104 451	111 004	106 524	5.06
2	Bulukumba	140 611	137 029	138 649	159 852	166 425	156 380	2.24
3	Bantaeng	86 008	87 750	102 177	99 325	102 893	96 030	2.33
4	Jeneponto	114 993	116 720	137 666	134 848	135 629	127 606	2.19
5	Takalar	108 525	106 875	133 580	126 840	134 951	123 332	2.73
6	Gowa	177 259	161 307	196 291	182 404	191 344	183 990	0.76
7	Sinjai	107 555	104 252	159 960	122 724	130 067	121 889	2.67
8	Maros	126 864	123 394	146 518	137 406	142 973	133 551	1.05
9	Pangkep	121 105	118 037	132 617	127 942	149 327	140 386	3.18
10	Barru	103 705	98 791	117 525	110 139	114 035	106 597	0.56
11	Bone	208 422	198 254	250 821	237 450	242 271	224 523	1.55
12	Soppeng	118 486	117 879	152 196	140 474	145 400	135 371	2.85
13	Wajo	132 595	124 089	152 945	146 986	153 967	148 978	2.47
14	Sidrap	115 958	112 032	139 467	127 451	135 791	129 497	2.34
15	Pinrang	130 201	127 798	162 338	150 738	156 059	147 277	2.62
16	Enrekang	107 450	98 135	117 221	110 623	115 518	111 251	0.71
17	Luwu	127 533	116 477	149 192	139 135	145 775	142 839	2.40
18	Tana Toraja	158 303	152 309	187 993	174 220	181 433	169 773	1.45
19	Luwu Utara	84 505	88 680	134 699	129 077	139 051	137 395	12.52
20	Luwu Timur	58 196	66 730	107 107	104 203	110 375	96 150	13.04
21	Makassar	241 719	228 200	288 231	280 481	294 631	273 225	2.61
22	Pare-Pare	95 569	89 128	105 463	99 992	104 536	100 165	0.96
23	Palopo	68 890	83 347	99 035	97 269	103 605	103 139	9.94
	Jumlah	2 819 456	2 745 754	3 414 231	3 244 076	3 407 061	3 215 868	2.81

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 15.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang juga merupakan dana transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, merupakan pembagian atas pajak dan

sumberdaya alam yang diperoleh dari daerah tersebut. Penerimaan DBH kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 4.44 persen per tahun. Tabel 16 menunjukkan bahwa jumlah DBH kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 sebesar 450 797 juta rupiah. Berbeda dengan DAU, DBH menunjukkan bahwa sebagian kabupaten kota mengalami peningkatan dana DBH yang cukup besar (di atas 10 persen) seperti Kabupaten Luwu Timur, Maros, Jeneponto, Sinjai dan Tana Toraja, namun sebagian kabupaten kota mengalami penurunan penerimaan DBH, seperti Kabupaten Gowa, Bone, Luwu, Luwu Utara, Kota Makassar, dan Palopo.

Tabel 15. Perkembangan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Selayar	11 025	12 768	13 669	12 861	14 267	14 693	6.65
2	Bulukumba	13 213	14 285	13 985	12 375	13 096	14 042	1.26
3	Bantaeng	11 520	12 365	13 104	9 557	12 420	13 214	2.94
4	Jeneponto	11 455	12 343	14 509	9 569	26 136	24 388	22.58
5	Takalar	12 258	12 360	10 790	17 486	17 127	15 785	5.76
6	Gowa	13 431	15 405	17 439	12 586	12 765	12 429	-1.49
7	Sinjai	10 023	12 586	13 101	9 139	16 707	15 060	10.05
8	Maros	11 777	12 526	17 316	17 536	19 423	24 132	20.98
9	Pangkep	8 763	10 845	13 130	7 414	12 339	11 149	5.45
10	Barru	12 024	11 778	10 888	7 154	10 521	16 552	7.53
11	Bone	26 049	20 839	20 085	20 955	20 272	20 877	-3.97
12	Soppeng	12 072	13 341	13 507	9 238	13 627	15 239	5.25
13	Wajo	24 891	43 654	35 807	28 530	28 493	29 585	3.77
14	Sidrap	16 514	24 561	19 133	21 156	20 715	20 813	5.21
15	Pinrang	14 245	14 481	11 516	14 546	15 334	14 486	0.34
16	Enrekang	11 753	10 734	17 597	12 046	14 831	14 353	4.42
17	Luwu	10 095	9 220	12 103	8 772	8 587	7 914	-4.32
18	Tana Toraja	11 973	13 214	13 208	10 095	13 847	18 230	10.45
19	Luwu Utara	16 453	16 793	15 699	14 144	16 673	15 281	-1.43
20	Luwu Timur	29 541	38 746	35 967	25 091	41 885	58 449	19.57
21	Makassar	61 045	63 058	51 844	49 645	54 267	54 102	-2.28
22	Pare-Pare	9 031	10 664	11 230	9 145	9 203	10 650	3.59
23	Palopo	9 794	11 432	12 872	12 188	10 158	9 374	-0.86
	Jumlah	368 945	417 994	408 499	351 232	422 694	450 797	4.44

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 16.

Penerimaan DAK kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 42.10 persen per tahun. Tabel 18 menunjukkan bahwa jumlah DAK kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 sebesar 530 655 juta rupiah. Tabel 16 menunjukkan bahwa semua kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan DAK yang cukup besar, terdapat dua kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan DAK di atas 100 persen per tahun, yaitu Kabupaten Luwu Timur dan Kota Pare-Pare, masing-masing sebesar 108.79 persen dan 107.18 persen per tahun.

Tabel 16. Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Selayar	9 468	7 486	15 044	19 732	21 706	23 309	29.24
2	Bulukumba	7 366	9 148	16 148	21 869	25 048	29 588	60.34
3	Bantaeng	6 887	8 332	15 403	19 158	21 181	19 170	35.67
4	Jeneponto	6 895	9 162	16 459	19 870	22 649	20 222	38.66
5	Takalar	10 386	9 557	15 968	21 610	26 022	23 787	25.81
6	Gowa	7 883	9 888	17 592	24 440	27 466	20 883	32.98
7	Sinjai	7 609	8 947	18 440	25 833	28 321	22 261	38.51
8	Maros	9 523	9 628	18 146	23 848	28 237	24 079	30.57
9	Pangkep	7 302	9 226	17 679	20 150	24 619	25 621	50.18
10	Barru	9 680	8 353	14 608	17 778	20 754	22 513	26.52
11	Bone	7 970	10 293	18 159	27 788	32 471	33 223	63.38
12	Soppeng	7 342	9 201	13 867	19 266	21 082	22 582	41.51
13	Wajo	6 754	10 116	16 783	21 590	25 432	28 079	63.15
14	Sidrap	7 899	9 929	15 286	20 950	24 254	23 689	39.98
15	Pinrang	10 299	10 402	18 300	20 011	23 715	20 773	20.34
16	Enrekang	8 691	7 938	15 074	17 873	20 354	20 118	26.30
17	Luwu	11 703	10 689	18 682	25 181	28 652	25 996	24.43
18	Tana Toraja	8 244	9 186	16 805	22 120	26 047	27 810	47.47
19	Luwu Utara	4 314	7 264	15 499	26 897	25 812	20 728	76.09
20	Luwu Timur	3 138	8 518	13 434	21 186	23 380	20 204	108.79
21	Makassar	4 279	3 250	8 248	4 101	9 156	18 214	65.13
22	Pare-Pare	2 949	5 660	16 552	15 566	18 760	18 754	107.18
23	Palopo	4 314	8 593	14 232	15 413	18 442	19 052	68.32
	Jumlah	170 893	197 516	366 404	472 237	543 560	530 655	42.10

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Ringkasan perkembangan penerimaan daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2004-2009 dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9 menunjukkan bahwa penerimaan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Peningkatan yang cukup besar pada DAU terjadi pada tahun 2006, dan selanjutnya mengalami fluktuasi. Sementara jenis penerimaan lainnya kelihatannya cukup stabil dari tahun ke tahun dengan tingkat penerimaan yang relatif hampir sama.

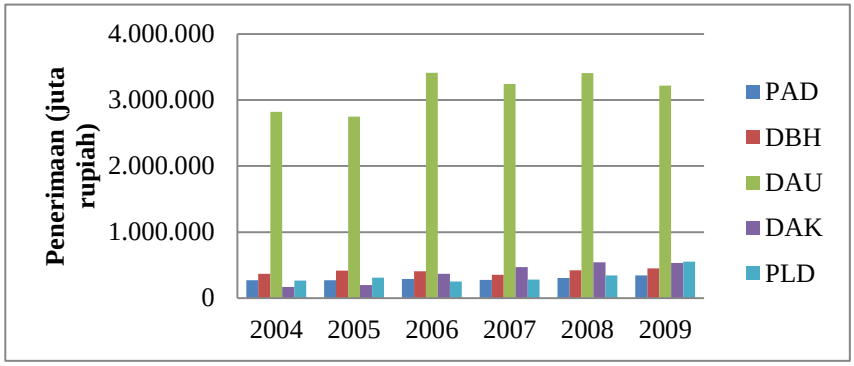

Gambar 9. Perkembangan Penerimaan Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004- 2009

Sementara *share* masing-masing jenis penerimaan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 10 menunjukkan bahwa pada tahun 2009, penerimaan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan 82 persen bersumber dari transfer fiskal dari pemerintah pusat sebesar, 63 persen DAU, 10 persen DAK dan 9 persen dana bagi hasil. Sementara penerimaan daerah dari PAD hanya sebesar 7 persen terdiri atas: 2 persen dari pajak daerah, 2 persen dari retribusi daerah, 2 persen dari pendapatan asli daerah lainnya dan 1 persen dari keuntungan perusahaan daerah.

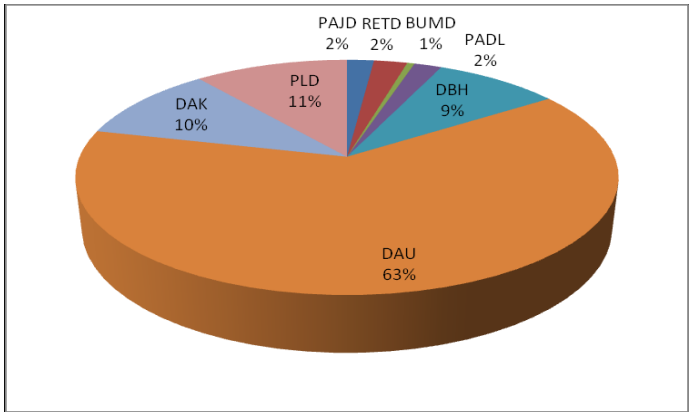

Gambar 10. Share Penerimaan Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009

5.2.2. Pengeluaran Daerah

Dalam penelitian ini pengeluaran daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dibagi ke dalam 4 jenis pengeluaran/belanja yaitu; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lain-lain.

5.2.2.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan komponen pengeluaran terbesar yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Selatan.

Tabel 17. Perkembangan Belanja Pegawai Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Selayar	47 193	47 090	46 098	58 846	78 613	76 970	12.62
2	Bulukumba	120 490	110 845	104 828	123 002	124 324	140 312	3.29
3	Bantaeng	50 725	50 483	48 382	61 102	67 706	72 784	8.70
4	Jeneponto	79 801	75 323	73 430	86 315	104 663	116 555	9.21
5	Takalar	80 444	79 879	72 324	98 050	102 887	92 292	2.95
6	Gowa	136 026	124 752	110 051	140 415	157 642	164 445	4.18
7	Sinjai	77 529	73 490	70 003	83 304	92 228	98 221	5.34
8	Maros	87 282	87 249	84 482	85 171	104 041	95 725	1.93
9	Pangkep	88 879	83 398	80 101	103 391	110 703	120 352	7.08
10	Barru	65 101	61 802	57 756	65 164	63 636	77 988	3.96
11	Bone	181 578	166 311	158 545	162 144	181 060	202 810	2.34
12	Soppeng	97 393	89 090	88 656	95 526	103 142	113 367	3.28
13	Wajo	98 653	92 503	85 055	111 422	117 975	141 810	8.75
14	Sidrap	93 808	89 046	82 417	97 240	97 914	110 477	3.55
15	Pinrang	95 092	88 855	80 246	112 840	123 940	111 537	3.46
16	Enrekang	63 140	57 667	56 663	64 740	72 400	71 181	2.55
17	Luwu	85 323	77 926	75 846	80 331	107 907	109 158	5.59
18	Tana Toraja	126 065	125 746	112 707	107 100	141 513	145 883	3.14
19	Luwu Utara	62 665	61 384	55 519	83 433	87 465	98 924	11.57
20	Luwu Timur	31 660	36 996	39 374	54 446	69 256	80 855	31.08
21	Makassar	244 687	229 018	214 992	260 249	281 446	316 128	5.84
22	Pare-Pare	63 143	60 290	57 999	66 954	75 883	81 032	5.67
23	Palopo	54 706	58 846	49 451	71 194	67 365	78 527	8.71
	Jumlah	2 131 382	2 027 989	1 904 926	2 272 402	2 533 709	2 717 335	5.50

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Tabel 17 menunjukkan bahwa jumlah belanja pegawai pada tahun 2009 tercatat sebesar 2 717 335 juta. Perkembangan belanja pegawai kabupaten kota di

Provinsi Sulawesi Selatan selama enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 5.50 persen per tahun. Terdapat tiga kabupaten yang mengalami peningkatan belanja pegawai yang cukup besar (di atas 10 persen) yaitu Kabupaten Luwu Timur 31.08 persen per tahun, Kabupaten Selayar 12. 62 persen per tahun, dan Kabupaten Luwu Utara sebesar 11.57 persen per tahun. Sementara kabupaten dengan tingkat pertumbuhan belanja pegawai yang cukup rendah (dibawah tiga persen per tahun) adalah masing-masing; Kabupaten Maros 1.93 persen, Kabupaten Bone, 2.34 persen, Kabupaten Enrekang 2.55 persen, dan Kabupaten Takalar sebesar 2.95 persen per tahun.

5.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan jenis pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan.

Tabel 18. Perkembangan Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Selayar	13 682	11 876	14 761	23 282	47 465	40 849	39.71
2	Bulukumba	14 894	11 704	16 822	30 475	38 974	39 515	33.06
3	Bantaeng	15 538	16 949	18 361	28 018	32 111	35 480	25.67
4	Jeneponto	15 392	17 446	19 407	27 125	28 932	22 754	9.57
5	Takalar	18 578	19 207	30 256	38 854	42 334	37 956	20.86
6	Gowa	24 384	25 964	36 896	35 287	46 661	39 532	12.42
7	Sinjai	18 734	14 370	19 363	28 371	32 033	28 495	10.42
8	Maros	18 041	18 498	21 621	30 548	29 648	34 649	18.41
9	Pangkep	12 700	15 973	17 004	20 876	27 927	25 708	20.49
10	Barru	9 106	11 659	23 745	18 592	20 744	27 820	41.11
11	Bone	16 562	18 933	24 747	63 582	38 209	55 351	46.84
12	Soppeng	13 782	16 318	23 114	27 332	38 581	29 813	23.26
13	Wajo	18 010	15 943	17 262	27 090	36 547	38 582	22.85
14	Sidrap	11 507	14 050	16 282	30 060	31 498	34 630	40.19
15	Pinrang	18 159	19 675	24 437	31 940	26 384	30 140	13.20
16	Enrekang	12 052	11 007	16 691	19 266	24 292	27 855	26.23
17	Luwu	16 910	15 444	20 611	32 715	28 024	28 446	13.64
18	Tana Toraja	20 667	25 231	32 399	29 018	30 417	33 351	12.28
19	Luwu Utara	23 029	25 779	33 842	34 768	42 000	50 233	23.63
20	Luwu Timur	9 529	14 566	16 328	28 898	41 149	42 824	69.88
21	Makassar	87 443	91 059	100 175	95 212	105 425	119 471	7.33
22	Pare-Pare	23 440	19 986	24 822	29 409	26 975	35 746	10.50
23	Palopo	9 753	15 235	30 419	23 874	35 346	22 458	26.05
	Jumlah	441 890	466 871	599 363	754 601	851 677	881 658	19.90

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Tabel 18 menunjukkan bahwa jumlah belanja barang dan jasa pada tahun 2009 tercatat sebesar 881 658 juta. Perkembangan belanja barang dan jasa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama enam tahun terakhir menujukkan peningkatan yang cukup besar, rata-rata sebesar 19.90 persen per tahun. Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Bone merupakan dua kabupaten yang memiliki pertumbuhan belanja barang dan jasa yang cukup besar masing-masing meningkat sebesar 69.88 persen dan 46.84 persen per tahun, dan hanya dua kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan belanja barang dan jasa yang kurang dari 10 persen per tahun yaitu; Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto, masing-masing sebesar 7,33 persen dan 9,57 persen per tahun.

5.2.1.3. Belanja Modal

Dalam penelitian ini belanja modal dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu, belanja modal sektor pertanian, dan belanja modal sektor lainnya.

Tabel 19. Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	(%)
1	Selayar	32 137	25 784	33 554	64 506	46 031	68 607	22.70
2	Bulukumba	25 363	19 514	26 254	59 597	86 555	55 896	24.08
3	Bantaeng	33 247	32 291	51 230	61 652	51 870	43 678	6.27
4	Jeneponto	31 046	44 006	57 278	67 610	65 511	52 380	13.74
5	Takalar	15 130	19 867	34 596	50 860	79 475	52 925	49.96
6	Gowa	36 744	35 065	61 908	60 696	45 293	68 563	17.32
7	Sinjai	36 030	30 610	71 348	81 880	93 912	55 500	10.81
8	Maros	28 604	27 777	43 850	67 113	101 454	97 110	47.90
9	Pangkep	28 614	27 200	41 161	60 434	99 920	82 415	37.61
10	Barru	62 872	38 752	36 040	84 188	70 658	93 774	9.83
11	Bone	47 350	44 704	78 603	115 588	97 490	86 923	16.72
12	Soppeng	14 003	21 469	49 561	56 510	60 542	48 270	48.94
13	Wajo	9 447	46 405	38 809	104 347	107 540	87 766	165.81
14	Sidrap	38 619	38 544	55 749	84 311	100 768	83 879	23.44
15	Pinrang	30 460	33 824	59 452	52 259	60 736	57 776	17.94
16	Enrekang	45 063	41 156	53 251	91 946	87 695	76 291	13.86
17	Luwu	42 362	38 689	63 719	57 153	48 632	44 772	1.14
18	Tana Toraja	36 804	26 662	38 223	63 614	64 395	58 839	11.97
19	Luwu Utara	22 796	22 611	66 008	59 128	59 239	45 529	19.95
20	Luwu Timur	26 997	56 796	81 208	105 702	161 783	214 467	138.88
21	Makassar	48 306	45 213	70 978	54 969	66 504	57 751	3.91
22	Pare-Pare	25 898	29 310	46 612	66 453	60 938	64 033	29.45
23	Palopo	19 065	27 321	34 305	54 990	73 506	47 461	29.79
	Jumlah	736 955	773 568	1 193 696	1 625 536	1 790 446	1 644 604	24.63

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia berbagai tahun

Tabel 19 menunjukkan bahwa jumlah belanja modal pada tahun 2009 tercatat sebesar 1 644 604 juta. Perkembangan belanja modal kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup besar rata-rata sebesar 24.63 persen per tahun. Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu Timur adalah dua kabupaten yang memiliki pertumbuhan belanja modal yang sangat besar (di atas 100 persen) masing-masing meningkat sebesar 165.81 persen dan 138.88 persen per tahun, namun terdapat empat kabupaten kota yang tingkat pertumbuhan modalnya relatif kecil (dibawah 10 persen) yaitu Kabupaten Luwu, Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Barru, berturut-turut sebesar 1.14 persen, 3.91 persen 6.27 persen, dan 9.83 persen per tahun.

5.2.1.3.1 Belanja Modal Sektor Pertanian

Perkembangan belanja modal sektor pertanian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Perkembangan Belanja Modal Sektor Pertanian Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	(%)
1	Selayar	5 056	5 202	6 351	8 164	7 213	7 084	8.02
2	Bulukumba	8 432	7 912	11 232	9 059	9 668	7 258	-2.78
3	Bantaeng	5 140	6 112	8 759	9 174	7 254	7 279	8.33
4	Jeneponto	6 317	8 190	10 300	8 149	8 540	7 687	4.34
5	Takalar	4 713	6 891	6 923	7 616	7 356	7 164	10.40
6	Gowa	12 493	10 520	11 730	7 624	6 509	6 821	-9.08
7	Sinjai	6 674	6 453	10 930	8 417	7 577	6 645	-0.09
8	Maros	7 898	7 657	5 812	7 711	8 980	5 636	-5.73
9	Pangkep	5 196	6 897	8 520	6 062	10 541	9 467	16.44
10	Barru	8 965	6 405	7 164	9 666	9 348	5 531	-7.66
11	Bone	9 298	9 756	11 710	9 200	7 132	7 887	-3.03
12	Soppeng	5 958	7 472	10 176	7 264	20 914	15 563	32.24
13	Wajo	2 724	5 717	7 497	9 390	6 950	5 123	17.62
14	Sidrap	8 904	7 391	9 797	7 157	7 192	7 264	-3.68
15	Pinrang	9 296	9 984	12 537	8 719	9 274	8 334	-2.07
16	Enrekang	5 346	8 449	7 188	6 103	7 561	8 756	12.76
17	Luwu	8 453	8 701	11 881	9 458	7 546	7 726	-1.72
18	Tana Toraja	6 921	6 094	8 908	1 893	8 264	8 087	3.37
19	Luwu Utara	6 177	6 656	8 902	6 826	10 363	8 971	9.05
20	Luwu Timur	2 449	2 534	5 221	10 783	8 639	10 180	63.15
21	Makassar	3 816	4 218	8 115	4 035	5 226	5 222	7.37
22	Pare-Pare	2 420	2 995	4 415	4 380	3 300	2 616	1.62
23	Palopo	1 417	3 211	6 106	6 961	7 602	7 912	91.70
	Jumlah	151 060	155 416	200 174	173 813	192 949	174 211	3.07

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Tabel 20 menunjukkan bahwa jumlah belanja modal pada tahun 2009 tercatat sebesar 174 211 juta. Perkembangan belanja modal sektor pertanian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 3.07 persen per tahun. Terdapat 14 kabupaten yang mengalami pertumbuhan positif dalam belanja modal sektor pertanian, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Soppeng mengalami pertumbuhan yang cukup besar, berturut-turut sebesar 91.70 persen, 63.15 persen, dan 32.24 persen per tahun. Sementara 10 Kabupaten kota yang mengalami penurunan belanja modal pada sektor pertanian. Kabupaten Gowa dan Kabupaten Barru merupakan dua kabupaten yang mengalami pertumbuhan negatif terbesar berturut-turut sebesar -9.08 persen, dan -7.66 persen per tahun.

5.2.1.3.2 Belanja Modal Sektor Lain

Belanja modal sektor lain merupakan jenis pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk investasi jangka panjang terutama dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah, diluar sektor pertanian. Perkembangan belanja modal sektor lain kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21 menunjukkan bahwa jumlah belanja modal sektor lain pada tahun 2009 tercatat sebesar 1 470 393 juta. Perkembangan belanja modal sektor lain kabupaten kota di Provinsi Selatan selama enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 54.68 persen per tahun. Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Maros merupakan empat kabupaten dengan pertumbuhan belanja modal sektor lain yang cukup besar (di atas 100 persen) berturut-turut sebesar 467,79 persen, 292,12 persen, 142,09 persen, 141,25 persen, per tahun. Terdapat pula dua kabupaten dengan tingkat pertumbuhan belanja modal yang cukup rendah (di bawah 10 persen) yaitu Kabupaten Luwu dan Kota Makassar, berturut-turut sebesar 3,71 persen, dan 7,43 persen per tahun.

Tabel 21. Perkembangan Belanja Modal Sektor Lainnya Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Selayar	27 081	20 582	27 203	56 342	38 819	61 522	50.72
2	Bulukumba	16 932	11 602	15 022	50 538	76 888	48 638	81.11
3	Bantaeng	28 107	26 178	42 470	52 479	44 616	36 399	11.9
4	Jeneponto	24 728	35 815	46 978	59 461	56 971	44 694	32.32
5	Takalar	10 417	12 976	27 673	43 245	72 119	45 761	142.09
6	Gowa	24 251	24 545	50 178	53 072	38 784	61 741	68.78
7	Sinjai	29 355	24 157	60 418	73 463	86 335	48 856	26.52
8	Maros	20 705	20 120	38 038	59 402	92 473	91 474	141.25
9	Pangkep	23 418	20 304	32 641	54 373	89 378	72 949	84.47
10	Barru	53 908	32 347	28 876	74 522	61 311	88 243	25.21
11	Bone	38 052	34 947	66 893	106 387	90 358	79 035	43.06
12	Soppeng	8 045	13 998	39 385	49 247	39 627	32 708	136.6
13	Wajo	6 723	40 689	31 312	94 958	100 590	82 643	467.79
14	Sidrap	29 715	31 153	45 952	77 155	93 576	76 615	63.75
15	Pinrang	21 164	23 840	46 914	43 541	51 463	49 442	56.3
16	Enrekang	39 717	32 707	46 063	85 843	80 134	67 536	28.14
17	Luwu	33 909	29 989	51 838	47 694	41 086	37 046	3.71
18	Tana Toraja	29 883	20 567	29 316	61 721	56 131	50 753	27.9
19	Luwu Utara	16 619	15 956	57 105	52 302	48 875	36 558	48.67
20	Luwu Timur	24 549	54 263	75 988	94 920	153 144	204 287	292.12
21	Makassar	44 491	40 995	62 864	50 935	61 278	52 529	7.43
22	Pare-Pare	23 478	26 315	42 197	62 072	57 639	61 416	64.3
23	Palopo	17 648	24 111	28 199	48 029	65 903	39 548	51.1
	Jumlah	592 895	618 156	993 523	1 451 701	1 597 498	1 470 393	54.68

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Untuk melihat distribusi belanja modal kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009, dapat dilihat pada Gambar 11.

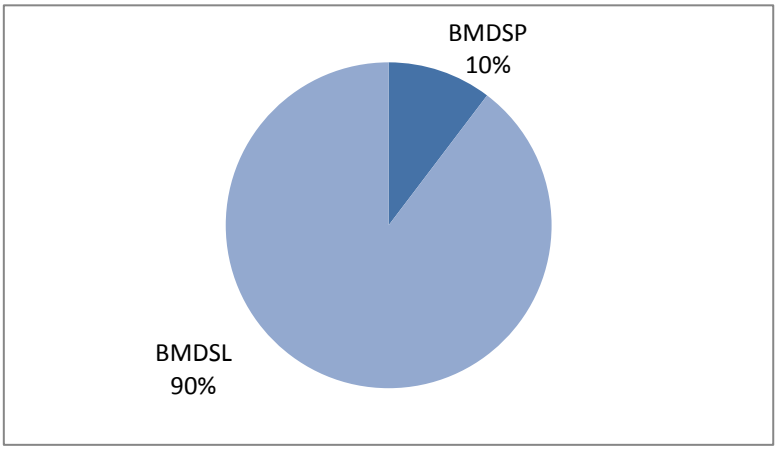

Gambar 11. Share Masing-masing Belanja Modal Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009

Gambar 11 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009, mengalokasikan rata-rata belanja modal pada sektor lainnya sebesar 89 persen. Sementara sektor pertanian yang menyumbang PDRB rata-rata 30 persen, dan menyerap tenaga kerja rata-rata 50 persen per tahun hanya mendapat belanja modal sebesar 10 persen per tahun.

5.2.1.4. Belanja Lain-lain

Belanja lain-lain yang dimaksud dalam penelitian ini adalah belanja pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan diluar belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Perkembangan belanja lain-lain pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Perkembangan Belanja Lain-Lain Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(juta rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Selayar	18 819	23 823	29 941	18 999	19 084	19 128	0.33
2	Bulukumba	23 908	25 733	19 208	8 758	11 521	10 818	-10.95
3	Bantaeng	11 515	13 196	13 813	9 144	13 019	8 974	-4.41
4	Jeneponto	15 350	13 029	18 819	11 836	15 683	12 396	-3.85
5	Takalar	20 169	15 982	19 266	9 259	7 373	11 434	-8.66
6	Gowa	23 871	28 346	21 885	15 614	8 959	11 479	-10.38
7	Sinjai	12 857	13 193	22 656	11 547	11 957	8 929	-6.11
8	Maros	30 371	20 946	37 305	24 142	15 251	12 296	-11.90
9	Pangkep	32 731	38 726	34 237	7 896	11 428	17 667	-9.21
10	Barru	9 892	18 071	3 380	9 783	8 631	6 620	-6.62
11	Bone	26 848	34 127	65 061	31 142	35 661	27 445	0.45
12	Soppeng	13 749	17 545	18 984	12 392	18 140	14 063	0.46
13	Wajo	34 195	15 583	18 689	17 060	19 482	14 650	-11.43
14	Sidrap	31 296	31 018	32 032	23 210	25 631	23 776	-4.81
15	Pinrang	18 210	16 458	19 276	14 228	16 300	14 544	-4.03
16	Enrekang	20 426	18 655	19 258	6 907	10 475	22 259	1.80
17	Luwu	21 736	19 852	28 127	16 298	18 902	17 547	-3.86
18	Tana Toraja	22 977	22 433	32 272	31 671	12 363	12 072	-9.49
19	Luwu Utara	21 761	25 558	9 760	11 801	14 104	13 525	-7.57
20	Luwu Timur	6 792	17 140	15 902	14 175	11 613	20 507	40.39
21	Makassar	48 425	54 723	69 625	29 692	30 667	23 180	-10.43
22	Pare-Pare	23 416	9 503	10 520	5 398	8 941	5 526	-15.28
23	Palopo	10 707	12 667	16 024	4 683	8 434	8 309	-4.48
	Jumlah	500 021	506 307	576 038	345 645	353 619	337 143	-6.52

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berbagai Tahun

Tabel 22 menunjukkan bahwa jumlah belanja lain-lain pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat sebesar 337 143 juta. Perkembangan belanja lain-lain kabupaten kota di Provinsi Selatan selama enam tahun terakhir menunjukkan penurunan rata-rata sebesar -6.52 persen per tahun. Terdapat sembilan belas kabupaten kota yang mengalami penurunan belanja lain-lain, dan terdapat enam kabupaten kota yang mengalami penurunan belanja lain-lain di bawah 10 persen. Akan tetapi masih terdapat empat kabupaten yang mengalami peningkatan belanja lain-lain masing-masing: adalah Kabupaten Selayar, Bone, Soppeng dan Enrekang.

Untuk melihat share masing-masing belanja pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, dapat dilihat pada Gambar 12.

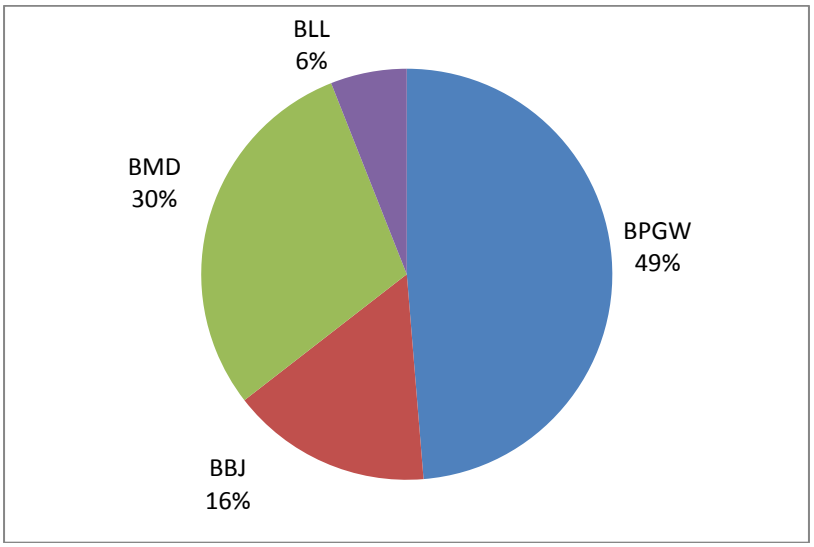

Gambar 12. Share Pengeluaran Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009

Gambar 12 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009, mengalokasikan rata-rata APBD masing-masing 49 persen untuk belanja pegawai, 29 persen untuk belanja modal, 16 persen untuk belanja barang dan jasa, dan sisanya 6 persen untuk belanja lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana APBD yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sangat terbatas, sehingga separuh dari APBD digunakan untuk membayar pegawai.

5.3. Kondisi Perekonomian

Pada bagian ini akan diuraikan kondisi perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perkembangan pengangguran, dan perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

5.3.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Perkembangan PDRB Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(milyar rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	(%)
1	Selayar	317.24	329.61	347.97	370.40	397.33	428.67	7.02
2	Bulukumba	1 216.72	1 271.23	1 352.30	1 424.82	1 539.67	1 639.31	6.95
3	Bantaeng	521.58	544.27	572.02	602.74	643.33	690.41	6.47
4	Jeneponto	680.89	688.89	716.24	745.30	788.38	830.78	4.40
5	Takalar	635.05	670.48	710.11	752.98	799.56	852.21	6.84
6	Gowa	1 294.78	1 369.10	1 453.59	1 543.57	1 650.32	1 782.16	7.53
7	Sinjai	757.12	796.69	845.35	891.29	957.71	1 024.93	7.07
8	Maros	853.29	879.86	918.01	960.02	1 013.91	1 077.48	5.25
9	Pangkep	1 758.99	1 857.73	1 967.63	2 088.10	2 237.50	2 369.17	6.94
10	Barru	524.30	550.22	577.19	605.71	647.78	685.03	6.13
11	Bone	2 209.96	2 305.16	2 442.41	2 589.30	2 776.66	2 985.92	7.02
12	Soppeng	869.50	894.32	953.61	1 004.85	1 082.81	1 156.50	6.60
13	Wajo	1 731.53	1 834.82	1 938.62	2 052.42	2 204.40	2 316.83	6.76
14	Sidrap	1 035.49	1 120.90	1 198.90	1 264.33	1 368.32	1 459.40	8.19
15	Pinrang	1 787.71	1 895.72	1 973.87	2 075.24	2 214.90	2 384.28	6.67
16	Enrekang	545.84	578.15	599.95	630.60	671.53	716.02	6.24
17	Luwu	1 173.63	1 257.71	1 326.99	1 400.34	1 480.65	1 581.66	6.95
18	Tana Toraja	968.82	1 005.45	1 057.92	1 114.50	1 194.53	1 265.16	6.12
19	Luwu Utara	990.41	1 076.47	1 158.34	1 237.40	1 356.83	1 450.44	9.29
20	Luwu Timur	3 806.15	4 018.28	4 293.87	4 540.57	4 429.72	4 250.55	2.34
21	Makassar	9 791.71	10 492.54	11 341.85	12 261.35	13 551.83	14 798.19	10.23
22	Pare-Pare	502.37	532.39	569.46	609.22	655.26	707.25	8.16
23	Palopo	609.77	656.86	698.37	743.97	799.33	862.19	8.28
	Jumlah	34 582.85	36 626.85	39 014.57	41 509.02	44 462.26	47 314.54	7.36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berbagai Tahun

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan salah satu tolok ukur utama perekonomian suatu negara atau daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara atau daerah dapat diukur dari sisi konsumsi dan produksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari

sisi produksi dapat dilihat dengan menjumlahkan output pada seluruh sektor yang ada dalam perekonomian suatu negara atau daerah.

Tabel 23 menunjukkan bahwa jumlah PDRB kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat sebesar 47 314.54 milyar rupiah. Perkembangan PDRB kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 7.36 persen per tahun. Semua kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, mengalami pertumbuhan PDRB, dimana Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan PDRB terbesar, masing-masing 10.23 persen dan 9.29 persen per tahun. Hanya terdapat dua kabupaten yang mengalami pertumbuhan PDRB di bawah 5 persen per tahun, yaitu Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Jeneponto, masing-masing sebesar 2.34 persen dan 4.40 persen per tahun.

Distribusi PDRB kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 13.

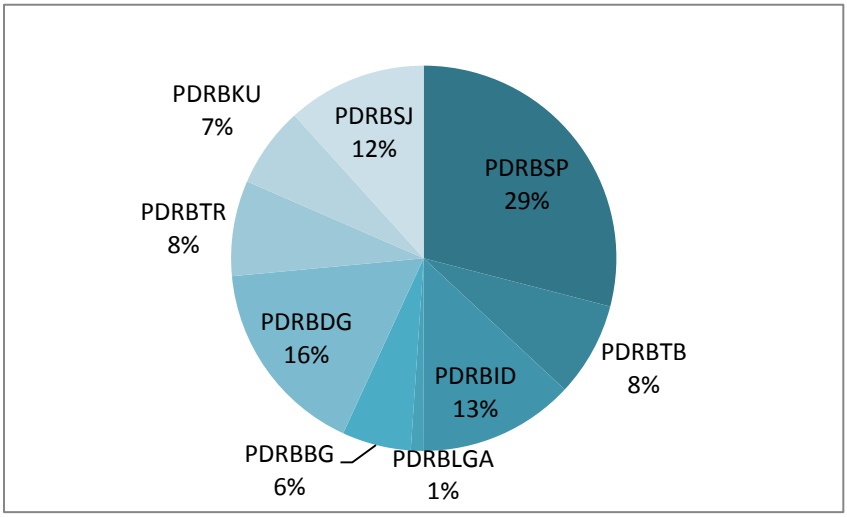

Gambar 13. Share Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009

Gambar 13 menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memegang peranan penting terhadap perekonomi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana sektor pertanian menyumbang 29 persen terhadap PDRB. Selain sektor pertanian sektor perdagangan, industri, dan jasa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, berturut-turut sebesar 16 persen, 13 persen, dan 12 persen .

5.3.2. Perkembangan Pengangguran

Perkembangan pengangguran kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Perkembangan Jumlah Pengangguran Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(jiwa)

No	Kab/Kota	Tahun						Rata-Rata (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Selayar	3 681	7 148	5 723	6 501	5 980	5 518	11.38
2	Bulukumba	7 300	9 643	19 360	16 361	15 069	11 178	7.52
3	Bantaeng	2 278	6 537	5 976	10 291	7 963	6 470	7.76
4	Jeneponto	5 516	8 150	15 486	10 920	9 861	12 177	7.35
5	Takalar	4 120	4 772	11 188	13 200	10 530	10 275	8.47
6	Gowa	20 328	23 346	39 126	31 634	23 670	25 734	11.24
7	Sinjai	4 053	8 211	5 841	6 620	5 030	4 970	6.01
8	Maros	9 237	9 833	15 436	14 528	14 009	13 965	10.88
9	Pangkep	11 741	11 843	18 094	13 679	12 060	14 251	11.68
10	Barru	5 000	12 265	7 987	5 777	6 217	5 228	11.19
11	Bone	18 875	25 974	32 178	28 156	26 753	18 069	8.24
12	Soppeng	4 538	8 374	9 679	12 696	8 098	9 688	8.34
13	Wajo	7 375	5 638	13 070	14 266	11 560	10 828	5.98
14	Sidrap	9 450	10 405	11 286	14 999	11 502	8 272	10.75
15	Pinrang	7 976	8 847	15 079	14 050	16 259	13 940	9.12
16	Enrekang	4 153	5 820	2 748	5 136	5 655	5 597	5.64
17	Luwu	10 078	17 038	21 999	8 458	8 717	10 000	9.84
18	Tana Toraja	7 604	10 696	22 523	10 466	10 467	10 506	7.03
19	Luwu Utara	9 510	14 761	7 920	8 323	6 674	8 882	7.67
20	Luwu Timur	7174	11 296	8 943	10 577	12 239	16 149	11.65
21	Makassar	65 504	71 537	65 434	95 010	66 446	77 143	14.30
22	Pare-Pare	7 108	11 831	5 942	8 951	7 723	7 470	16.90
23	Palopo	5 083	10 987	9 498	12 116	9 286	7 788	16.49
	Jumlah	237 682	427 952	370 516	372 715	311 768	314 098	10.48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berbagai Tahun

Tabel 24 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat 314 098 jiwa. Semua kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan jumlah pengangguran yang positif selama enam tahun terakhir, bahkan 10 kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan jumlah pengangguran di atas 10 persen per tahun. Perkembangan jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 1995 dan secara perlahan mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Kota Pare-Pare dan Kota Palopo merupakan kota yang memiliki tingkat pertumbuhan jumlah pengangguran rata-rata yang cukup tinggi yaitu 16.90 dan 16.49 persen per tahun. Sementara Kabupaten Wajo dan Kabupaten Enrekang merupakan dua kabupaten yang mengalami pertumbuhan jumlah pengangguran yang paling rendah masing-masing sebesar 5.64 dan 5.98 persen per tahun.

5.3.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009

(jiwa)

No	Kab/Kota	Tahun						Tumbuh (%)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Selayar	24 721	25 400	24 200	23 800	22 163	19 800	-3.98
2	Bulukumba	53 143	47 500	53 100	52 300	47 802	41 100	-4.53
3	Bantaeng	17 096	17 700	21 100	20 700	18 910	17 200	0.12
4	Jeneponto	74 635	77 300	82 500	81 100	74 709	68 200	-1.72
5	Takalar	31 771	37 300	35 300	34 700	32 354	28 300	-2.19
6	Gowa	94 341	97 700	85 400	83 900	77 492	67 000	-5.80
7	Sinjai	30 063	31 300	35 000	30 800	28 763	25 800	-2.84
8	Maros	68 360	60 000	59 800	59 900	54 748	49 800	-5.43
9	Pangkep	61 793	64 100	68 900	69 300	64 766	57 400	-1.42
10	Barru	17 960	18 600	22 100	23 400	21 818	18 500	0.60
11	Bone	107 582	114 200	130 900	131 600	122 442	107 300	-0.05
12	Soppeng	10 358	10 700	12 700	12 400	25 750	22 800	24.02
13	Wajo	35 115	36 400	43 300	42 600	38 457	33 800	-0.75
14	Sidrap	20 041	20 800	20 200	19 900	19 151	16 900	-3.13
15	Pinrang	29 534	30 600	36 400	35 800	33 484	30 300	0.52
16	Enrekang	38 108	39 500	42 600	41 900	38 573	34 200	-2.05
17	Luwu	57 552	58 700	64 000	67 800	63 030	55 200	-0.82
18	Tana Toraja	78 004	81 100	91 300	89 800	84 734	75 200	-0.72
19	Luwu Utara	39 808	42 300	43 300	42 600	57 653	52 500	6.38
20	Luwu Timur	30 031	27 100	24 900	22 900	25 344	21 000	-6.01
21	Makassar	71 609	74 300	88 400	69 900	67 196	69 700	-0.53
22	Pare-Pare	7 896	7 800	9 100	8 800	8 349	7 700	-0.5
23	Palopo	14 145	14 600	16 682	17 400	18 204	17 300	4.46
	Jumlah	1 013 666	1 035 000	1 111 182	1 083 300	1 045 892	937 000	-1.51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berbagai Tahun

Jumlah penduduk miskin kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 tercatat 937 000 jiwa. Terdapat 18 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan jumlah penduduk miskin selama enam tahun terakhir, dan hanya 5 kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk miskin.

Tabel 25 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 1 111 182 jiwa, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2008 dan Tahun 2009.

5.4. Deskripsi Perekonimian Kabupaten Kota

Pada bagian ini digambar kondisi fiskal dan perekonomian daerah terutama dilihat dari pengeluaran pemerintan daerah, produk domestik regional

bruto, pengangguran, dan kemiskinan, seperti terlihat pada Gambar 14.

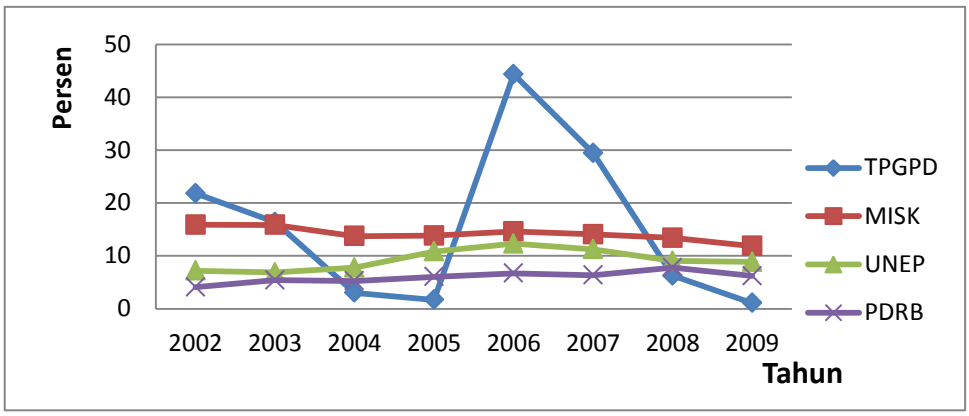

Gambar 14. Hubungan antara Pertumbuhan APBD dengan Kemiskinan, Pengangguran, dan PDRB

Gambar 14 menunjukkan total pengeluaran pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami tren pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan total pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2006, ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Peningkatan total pengeluaran pemerintah ini sejalan dengan peningkatan PDRB kabupaten kota, walaupun pertumbuhan PDRB terlihat lebih stabil dari tahun ke tahun.

Sementara apabila kita membandingkan antara total pengeluaran pemerintah daerah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran, menunjukkan bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah daerah terhadap penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, masih sangat rendah. Hal tersebut terlihat pada tahun 2006, dimana tingkat pengeluaran pemerintah meningkat sampai mencapai 45 persen, namun disisi lain kemiskinan dan pengangguran tetap meningkat.

5.4.1. Belanja Modal terhadap Kemiskinan dan Pengangguran

Pada bagian ini ditujukkan keterkaitan antara belanja modal dengan tingkat kemiskikan dan pengangguran, sepeti terlihat pada Gambar 15.

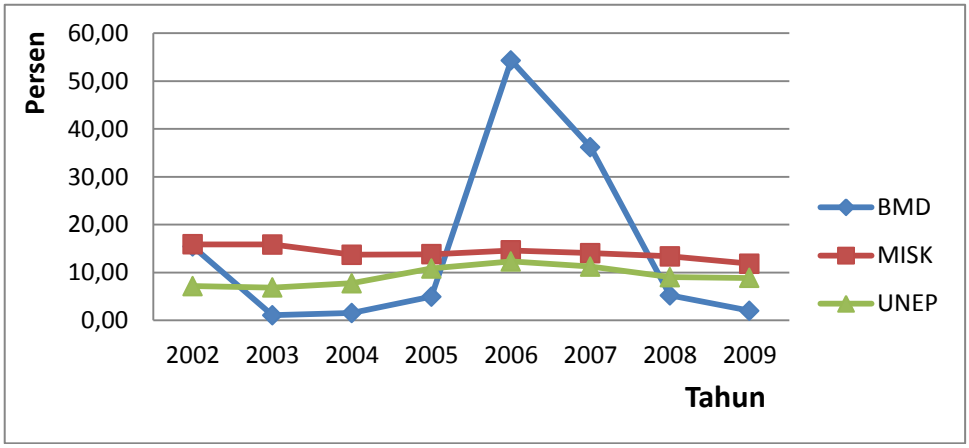

Gambar15. Hubungan antara Pertumbuhan Belanja Modal dengan Kemiskinan dan Pengangguran

Gambar 15 menunjukkan bahwa belanja modal kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami tren pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan Belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2006, ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Peningkatan belanja modal mencapai di atas 50 persen.

Kalau kita hubungkan antara belanja modal dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan, peningkatan belanja modal yang cukup besar pada tahun 2006 tidak diikuti oleh menyerap tenaga kerja yang cukup besar, hal mana pada saat belanja modal yang cukup tinggi tidak dapat mengurangi angka pengangguran, bahkan terjadi sebaliknya tingkat pengangguran meningkat, yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2006. Akan tetapi pada tahun 2007 sampai tahun 2009 menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal sudah seiring dengan turunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan,

5.4.1. Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan dan Pengangguran

Secara teoritis, bahwa apabila PDRB meningkat, maka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan. Gambar 16 menunjukkan bahwa PDRB kabupaten kota di Provinsi Sulawesi menunjukkan tren peningkatan rata-rata di atas 5 persen per tahun. Kecuali pada tahun 2002.

Apabila dikaitkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran, maka pertumbuhan PDRB tersebut belum dapat dikatakan berkualitas. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2006, terlibat bahwa pada saat pertumbuhan PDRB di atas 6 persen, maka angka kemiskinan meningkat di atas 14 persen. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2003 sampai tahun 2006.

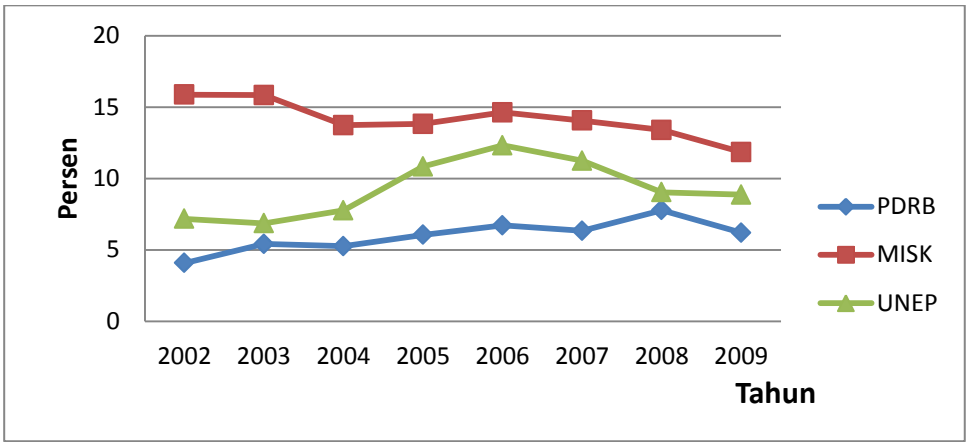

Gambar 16. Hubungan antara PDRB dengan Kemiskinan dan Pengangguran

Kabupaten Bone, Wajo, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Pangkep, Barru, dan Kota Palopo pada periode 2006-2007, tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi, yang sayangnya tidak diikuti dengan turunnya kemiskinan. Yang terjadi malah angka kemiskinan meningkat. Tingkat kesempatan kerja yang menurun, berimbas pada tingginya angka pengangguran terbuka menjadi salah satu faktor mengapa Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo gagal mengurangi jumlah penduduk miskinnya. Akan tetapi memasuki tahun 2007 sampai tahun 2009 pertumbuhan PDRB kabupaten kota mulai menunjukkan dampak yang membaik terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran.

VI. ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH

Pada bagian ini, penulis menganalisis pola hubungan antara variabel fiskal terutama belanja modal dengan pertumbuhan PDRB, belanja modal dengan kemiskinan, dan belanja modal dengan pengangguran kabupaten kota. Hal ini menarik karena dengan gambaran ini memungkinkan untuk mengetahui posisi masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Di samping itu juga akan diuraikan dianalisis pola hubungan PDRB dengan kemiskinan dan PDRB dengan pengangguran masing-masing kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pola hubungan yang dimaksud dibuat dalam dua periode yaitu periode yaitu tahun 2001-2005 (sebelum diberlakukannya revisi Undang Undang Otonomi Daerah) dan periode tahun 2006-2009 (setelah diberlakukannya revisi Undang Undang Otonomi Daerah).

6.1. Analisis Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Pola hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan belanja modal dengan persentase rata-rata pertumbuhan produk domestik regional bruto menunjukkan angka positif namun tidak nyata yaitu 0.193 pada periode tahun 2001-2005 dan 0.180 untuk periode tahun 2006-2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat mendorong pertumbuhan PDRB di daerahnya.

Untuk jelasnya pola hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan belanja modal dengan persentase rata-rata pertumbuhan produk domestik regional bruto dapat dilihat pada Gambar 17 dan 18.

Gambar 17 dan 18 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2001-2005 hanya ada empat kabupaten kota yang berada pada kuadran I pada kondisi terbaik, empat berada di kuadran II, tujuh berada di kuadran IV, dan enam berada pada kuadran III kondisi terburuk. Sementara pada periode tahun 2006-2009 terjadi pergeseran, dimana terdapat 6 kabupaten kota berada pada kuadran I kondisi terbaik, empat di kuadran II, enam pada kuadran IV, dan 6 pada kuadran III kondisi terburuk.

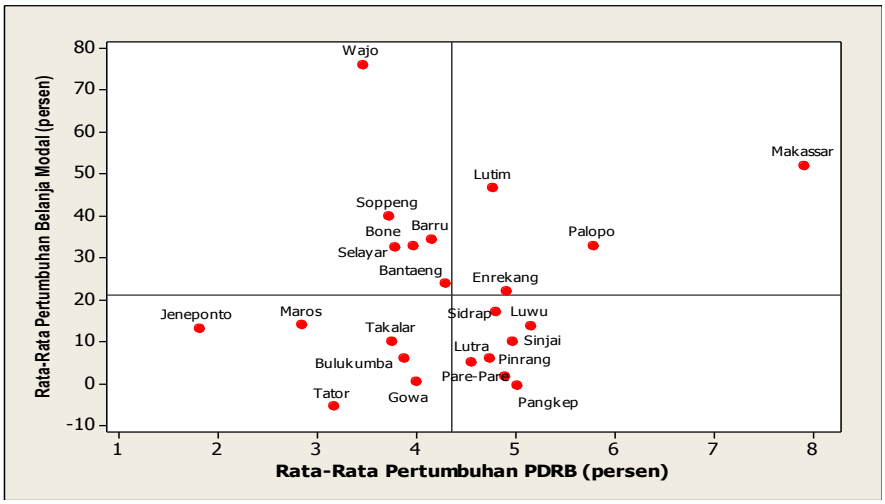

Gambar 17. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Rata-rata Belanja Modal dengan Pertumbuhan Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2001-2005

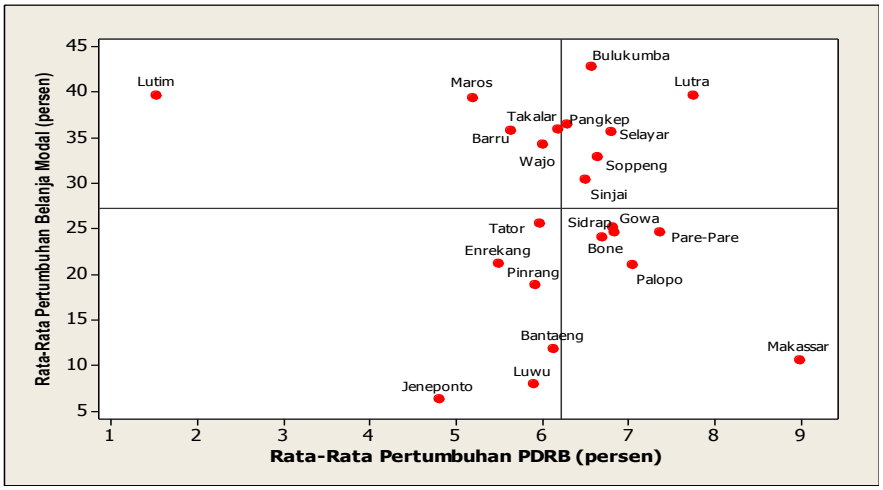

Gambar 18. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Rata-rata Belanja Modal dengan Pertumbuhan Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2006-2009

Kuadran III, dengan kondisi terburuk meliputi enam kabupaten yaitu Jeneponto, Luwu, Bantaeng, Pinrang, Enrekang dan Tana Toraja. Jika membandingkan rata-rata pertumbuhan belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan PDRB periode tahun 2001-2005 dan periode tahun 2006-2009, maka terdapat dua kabupaten yang konsisten berada pada kuadran III, yaitu Kabupaten Jeneponto dan Tana Toraja, dan tidak satupun kabupaten kota yang konsisten berada pada kondisi terbaik di Kuadran I.

Kabupaten Jeponto dan Kabupaten Tana Toraja adalah dua kabupaten dengan tingkat pendapatan perkapita yang relatif kecil dibanding dengan kabupaten lain dengan jumlah penduduk cukup besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua kabupaten tersebut memiliki keterbatasan belanja modal dalam membangun infrastruktur, sehingga investor swasta kurang tertarik, akibatnya membuat pertumbuhan PDRB kedua kabupaten tersebut relatif kecil dibanding dengan kabupaten lainnya.

Sementara Kota Makassar yang sebelumnya berada pada kuadran I bergeser ke kuadran IV menujukkan bahwa pertumbuhan PDRB di Kota Makassar lebih banyak didorong oleh investasi swasta mengingat keberadaan kota makassar, sebagai ibu kota provinsi dengan infrastuktur yang cukup bangus, dibanding daerah lainnya.

Pada sisi lain Kabupaten Luwu Timur sebagai satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki perusahaan tambang yang cukup besar dimana total PDRB lebih 80 persen disumbangkan oleh sektor pertambangan. bergeser dari kuadran I ke kuadran II. Pergeseran disebabkan karena pertumbuhan PDRB sektor pertambangan relatif tetap.

6.2. Analisis Belanja Modal terhadap Kemiskinan

Pola hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan belanja modal dengan persentase rata-rata penduduk miskin menunjukkan angka negatif dan nyata pada periode tahun 2001-2005 yaitu -0.370, dan negatif tidak nyata pada untuk periode tahun 2006-2009 yaitu -0.047. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada periode tahun 2006-2009 turun di banding pada periode tahun 2001-2005. Dalam arti bahwa belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah pada peride 2006-2009 kurang berpihak kepada penduduk miskin dibanding periode tahun 2001-2005.

Untuk jelasnya pola hubungan persentase rata-rata pertumbuhan belanja modal dengan persentase rata-rata penduduk miskin dapat dilihat pada Gambar 19 dan 20.

Gambar 19 dan 20 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2001-2005, terdapat tujuh kabupaten kota yang berada pada kuadran II, tiga berada di

kuadran I, delapan berada di kuadran IV, dan empat berada di kuadran III. sementara pada periode tahun 2006-2009 terjadi pergeseran, dimana terdapat sebelas kabupaten kota berada pada kuadran II, tujuh pada I, tiga pada kuadran III, dan hanya dua pada kuadran IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam era otonomi daerah dewasa ini, keberpihakan pemerintah daerah terhadap kemiskinan pada masing-masing kabupaten kota, cukup bervariasi, dan cenderung tidak konsisten.

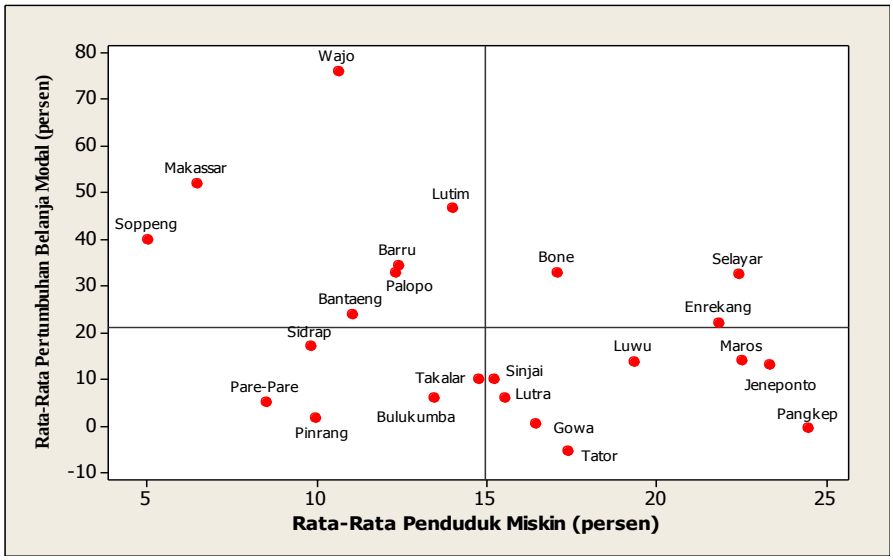

Gambar 19. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Rata-rata Belanja Modal dengan Rata-rata Penduduk Miskin Tahun 2001-2005

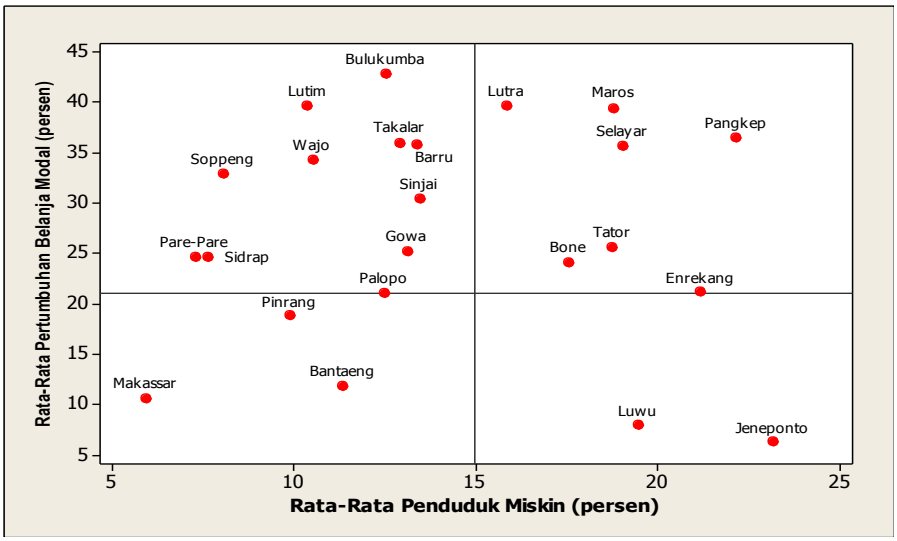

Gambar 20. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Rata-rata Belanja Modal dengan Rata-rata Penduduk Miskin Tahun 2006-2009

Apabila kita membandingkan persentase rata-rata pertumbuhan belanja modal dengan persentase rata-rata penduduk miskin periode tahun 2001-2005 dan periode tahun 2006-2009, maka dua kabupaten yaitu Jeneponto, dan Luwu konsisten berada pada kuadran IV, sedang lima kabupaten lainnya bergeser yaitu Kabupaten Maros, Pangkep, Luwu Utara, dan Tana Toraja bergeser ke kuadran I, Kabupaten Gowa, Sinjai ke kuadran II. Sementara kabupaten kota yang konsisten berada pada kondisi terbaik pada kuadran II yaitu Kabupaten Wajo, Luwu Timur, Soppeng, Barru, dan Kota Palopo.

Pada periode 2006-2009 terdapat tujuh kabupaten kota yang berada pada kuadran I yaitu Kabupaten Pangkep, Enrekang, Maros Selayar, Tana Toraja, Bone, dan Luwu Itara. Kondiri pada kuadran I menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan belanja modal yang dikeluarkan oleh kebupaten kota yang bersangkutan cukup tinggi dibanding dengan kabupaten lainnya, namun tingkat kemiskinan di daerah tersebut tetap tinggi. Dengan demikian pola hubungan antara belanja modal dan kemiskinan sangat rendah di daerah ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja modal yang dikeluarkan kurang menyentuh pada kantong-kantong kemiskinan di daerah tersebut, dan sekaligus menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah daerah terhadap penduduk miskinan di daerahnya relatif rendah.

6.3. Analisis Belanja Modal terhadap Pengangguran

Pola hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan belanja modal dengan persentase rata-rata pengangguran, menunjukkan angka negatif dan tidak nyata pada periode tahun 2001-2005 yaitu -0.040, dan -0.068 untuk periode tahun 2006-2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kurang dapat menurunkan pengangguran yang ada di daerahnya.

Untuk jelasnya pola hubungan persentase rata-rata pertumbuhan belanja modal dengan persentase rata-rata pengangguran dapat dilihat pada Gambar 21 dan 22.

Gambar 21 dan 22 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2001-2005 terdapat lima kabupaten kota yang berada pada kuadran II, lima berada di kuadran

I, tujuh berada di kuadran IV, dan enam berada di kuadran III. Sementara pada periode tahun 2006-2009 terjadi pergeseran, dimana terdapat delapan kabupaten kota berada pada kuadran II, sepuluh pada I, empat pada kuadran III, dan hanya satu pada kuadran IV.

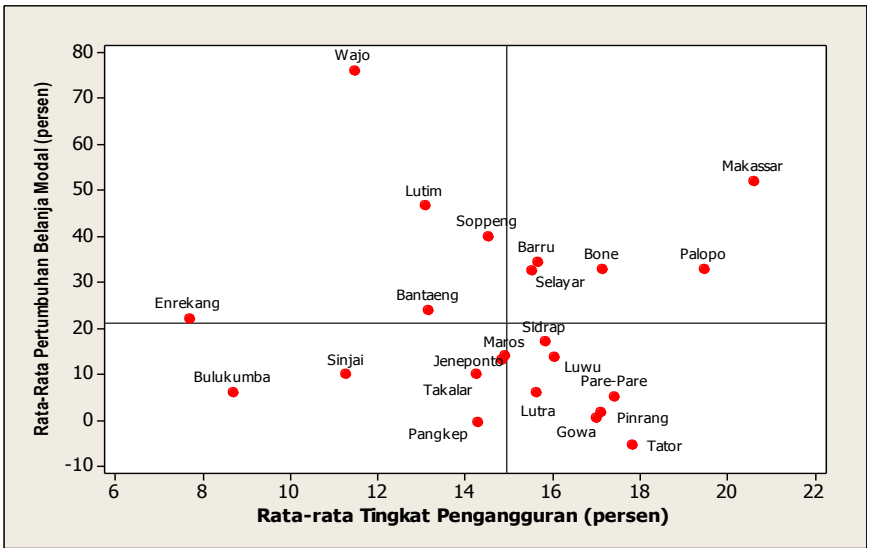

Gambar 21. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Rata-rata Belanja Modal dengan Rata-rata Pengangguran Tahun 2001-2005

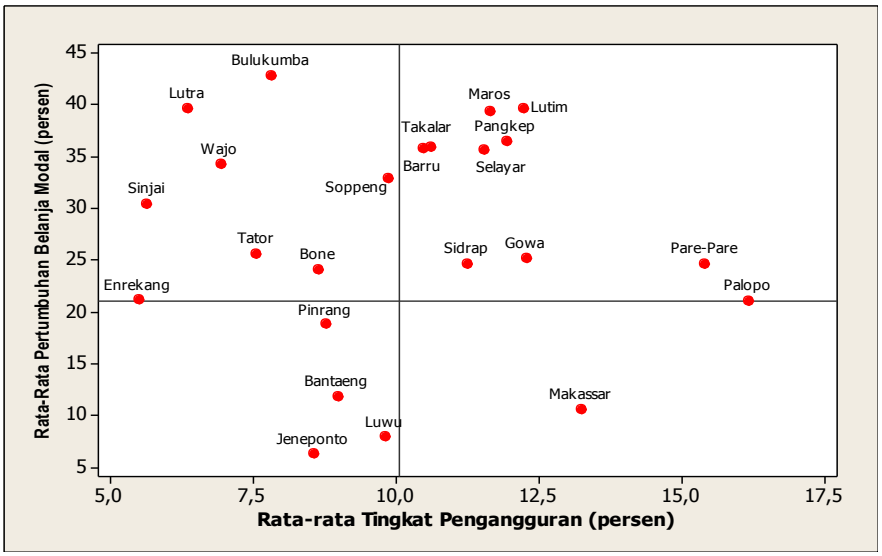

Gambar 22. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Rata-rata Belanja Modal dengan Rata-rata Pengangguran Tahun 2006-2009

Kuadran IV, dengan kondisi terburuk yaitu hanya Kota Makassar pada periode tahun 2006-2009, hal ini mungkin disebabkan karena Kota Makassar

sebagai ibukota provinsi, sehingga tidak sedikit penduduk yang mengadu nasib mencari pekerjaan di Kota Makassar, mengakibatkan pengangguran di Kota Makassar cukup tinggi. Sementara tiga kabupaten yang konsisten berada pada kondisi terbaik pada kuadran II yaitu Kabupaten Wajo, Soppeng, Enrekang.

Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi dibanding dengan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mencari pekerjaan di kota. Mengingat ketiga daerah itu adalah merupakan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkep adalah tiga kabupaten yang berlokasi sangat dekat dengan Kota Makassar. Semenatara Kabupaten Luwu Timur adalah satu-satunya kabupaten yang memiliki lokasi pertambangan yang cukup besar.

6.4. Analisis Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan

Pola hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan PDRB dengan persentase rata-rata penduduk miskin menunjukkan angka negatif dan nyata pada periode tahun 2001-2005 yaitu -0.396, dan angka negatif tidak nyata untuk periode tahun 2006-2009 yaitu -0.249. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB kabupaten kota kualitasnya menurun pada peride 2006-2009 dibanding dengan peride 2001-2005, dalam arti bahwa pertumbuhan PDRB pada tahun 2006-2009 kurang berkualitas, dalam arti bahwa pertumbuhan yang ada lebih banyak dinikmati oleh goloangan menengah ke atas.

Untuk melihat pola hubungan persentase rata-rata pertumbuhan PDRB dengan persentase rata-rata penduduk miskin tahun 2001-2005 dan 2006-2009 dapat dilihat pada Gambar 23 dan 24.

Gambar 23 dan 24 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2001-2005 terdapat enam kabupaten kota yang berada pada kuadran II, lima berada di kuadran I, enam berada di kuadran IV, dan enam berada di kuadran III. Sementara pada periode tahun 2006-2009 terjadi pergeseran, dimana terdapat delapan kabupaten kota berada pada kuadran II, empat pada I, lima pada kuadran III, dan lima pada kuadran IV.

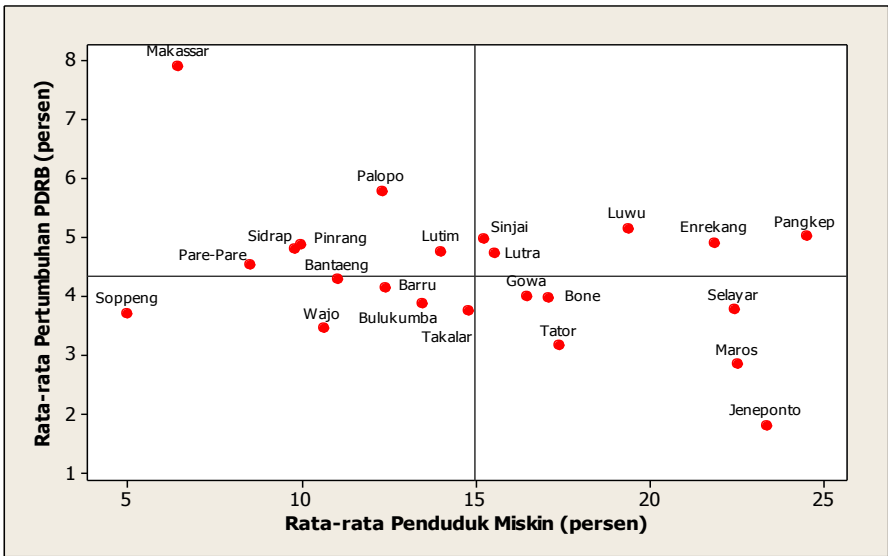

Gambar 23. Pola hubungan Pertumbuhan Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto dengan Tingkat Rata-rata Kemiskinan Tahun 2001-2005.

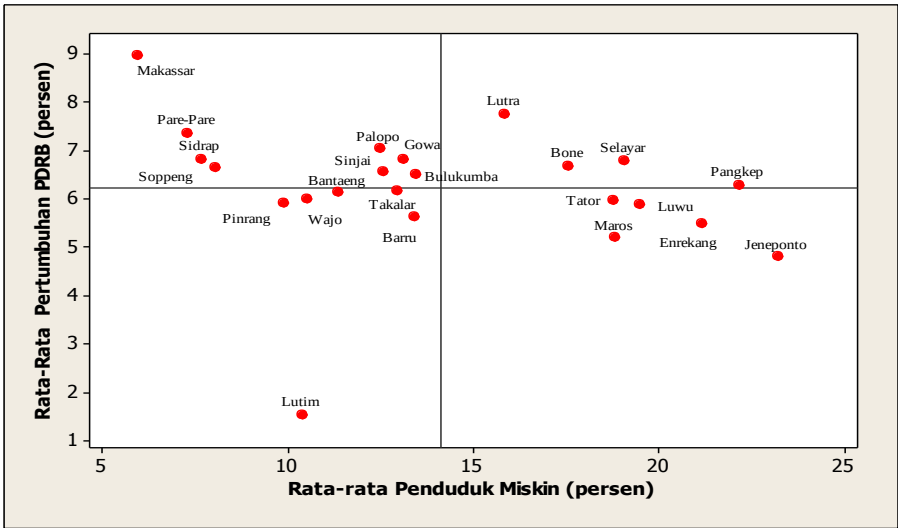

Gambar 24. Pola hubungan Pertumbuhan Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto dengan Tingkat Rata-rata Kemiskinan Tahun 2006-2009

Jika membandingkan antara persentase rata-rata pertumbuhan PDRB dengan persentase rata-rata penduduk miskin tahun 2001-2005 dan periode tahun 2006-2009, maka tiga kabupaten yaitu Jeneponto, Tana Toraja, dan Maros konsisten berada pada kuadran IV, tiga kabupaten yang sebelumnya berada pada kuadran IV, yaitu Kabupaten Selayar, Bone, dan Gowa bergeser ke kuadran I, dan dua kabupaten yaitu Luwu dan Enrekang yang sebelumnya berada pada kuadran I bergeser ke kuadran IV. Sementara kabupaten kota yang konsisten berada pada

kondisi terbaik pada kuadran II yaitu Kota Makassar, Pare-Pare, Palopo, serta Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pada periode tahun 2006-2009 terdapat empat kabupaten yang berada pada kuandran I yaitu Kabupaten Pangkep, Selayar, Bone dan Luwu Utara, hal tersebut menunjukkan bahwa keempat kabupatan tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada empat kabupaten tersebut kurang berkualitas, dalam arti hanya bertumpuh pada golongan menengah keatas. Dikatakan demikian karena kondisi pada kuandran I menunjukkan pertumbuhan PDRB yang relatif tinggi namun tingkat kemiskinan juga cukup tinggi.

6.5. Analisis Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pengangguran

Pola hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan PDRB dengan persentase rata-rata pengangguran menunjukkan angka negatif dan tidak nyata pada periode tahun 2001-2005 yaitu -0.304 dan -0.115 pada periode tahun 2006-2009. Hal tersebut menujukkan bahwa pertumbuhan PDRB kabupaten kota belum sepenuhnya dapat menurunkan angka pengangguran yang ada di daerah tersebut.

Untuk jelasnya pola hubungan persentase rata-rata pertumbuhan PDRB dengan persentase rata-rata pengangguran dapat dilihat pada Gambar 25 dan 26.

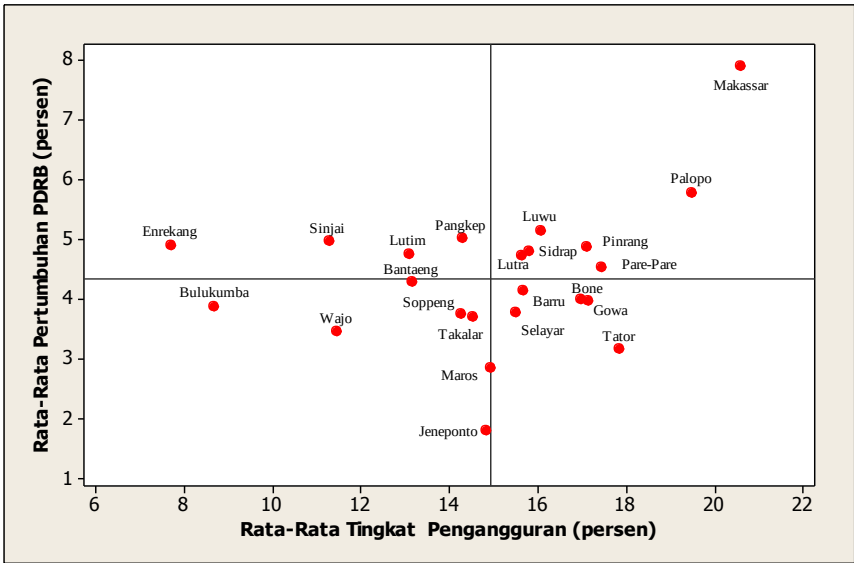

Gambar 25. Pola hubungan Pertumbuhan Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto dengan Tingkat Rata-rata Pengangguran Tahun 2001-2005

Gambar 25 dan 26 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2001-2005 terdapat lima kabupaten kota yang berada pada kuadran II, tujuh berada di kuadran I, lima berada di kuadran IV, dan enam berada di kuadran III. Sementara pada periode tahun 2006-2009 terjadi pergeseran, dimana terdapat enam kabupaten kota berada pada kuadran II, delapan pada I, enam pada kuadran III, dan tiga pada kuadran IV.

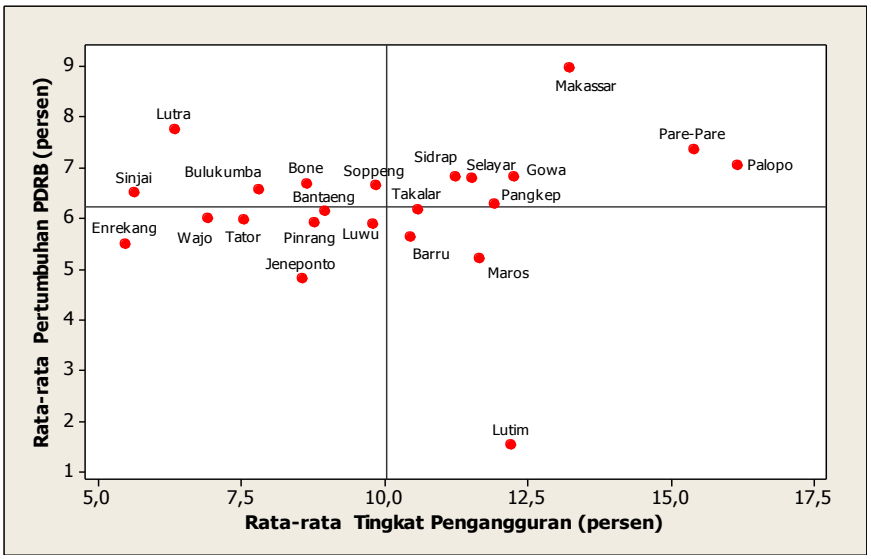

Gambar 26. Pola hubungan Pertumbuhan Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto dengan Tingkat Rata-rata Pengangguran Tahun 2006-2009

Jika membandingkan antara persentase rata-rata pertumbuhan PDRB dengan persentase rata-rata pengangguran tahun 2001-2005 dan periode tahun 2006-2009, maka hanya satu kabupaten yaitu Barru yang konsisten berada pada kuadran IV, empat kabupaten yang sebelumnya berada pada kuadran IV yaitu Kabupaten Gowa, Selayar, bergeser ke kuadran I, Tana Toraja bergeser ke kuadran ke III, sementara Kabupaten Bone bergeser ke kuadran ke II. Selanjutnya hanya satu kabupaten yang konsisten berada pada kondisi terbaik di kuadran II yaitu Kabupaten Sinjai.

Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare adalah tiga kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan juga memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di ketiga kota tersebut mendorong para pencari kerja untuk melakukan migrasi ke kota tersebut, untuk mendapatkan

penghasilan yang lebih tinggi pada sektor industri di perkotaan. Hal tersebut wajar mengingat secara teoritis, Todaro (2009) mengatakan bahwa pada dasarnya sektor industri atau modern di perkotaan memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibanding dengan sektor pertanian di perdesaan, sehingga mendorong para pencari kerja di perdesaan untuk melakukan migrasi ke perkotaan.

VII. HASIL ESTIMASI MODEL DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini telah mengalami beberapa kali modifikasi, karena ditemukan beberapa hasil dugaan yang tidak konsisten dengan teori, dan beberapa dugaan parameter yang tidak nyata. Sehingga akhirnya didapatkan model dengan hasil pendugaan parameter, yang cukup representatif untuk menggambarkan fenomena yang ada pada kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil estimasi model dengan menggunakan metode ekonometrika 2SLS (*two stege least square*) diperoleh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variabel endogen dalam model, dimana terdapat 26 persamaan struktural. Hasil analisis terhadap variabel endogen akan diuraikan satu persatu dalam bab ini.

7.1. Hasil Estimasi Model Ekonometrika

Hasil estimasi model ekonometrika yang terdiri atas 4 blok secara keseluruhan menunjukkan hasil yang cukup baik. Nilai koefisien determinasi (R^2) masing-masing persamaan struktural dalam model relatif tinggi, yaitu 25 persamaan memiliki koefisien determinasi (R^2) di atas 0.50 dan hanya satu persamaan yang memiliki nilai koefisien determinasi (R^2) dibawah 0.50. Di samping itu sebagian variabel penjelas (*explanatory variable*) yang digunakan memiliki pengaruh nyata terhadap variabel endogen, dimana pada umumnya memiliki tanda yang sesuai dengan teori atau hipotesis yang dikemukakan. Walaupun ada beberapa variabel penjelas yang tandanya tidak sesuai dengan teori, namun pengaruhnya tidak nyata secara statistik.

Nyata atau tidaknya pengaruh variabel penjelas secara individu terhadap variabel endogennya, diuji dengan menggunakan uji t pada taraf nyata (α) tertentu. Dalam studi ini taraf nyata yang digunakan adalah 10 persen. Sementara untuk mengetahui nyata atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atas variabel penjelas terhadap variabel endogen, digunakan uji F. Secara bersama-sama variabel penjelas dapat menjelaskan variabel endogennya secara nyata yang ditujukkan dengan nilai (Prob>F), semua persamaan memiliki probabilitas (0.0001), dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Keragaan Umum Model Kebijakan Fiskal Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Variabel	R^2	R Adj	Fhitung	Prob>F	Dw
1	PAJD	0.96158	0.96042	832.09	0.0001	1.88932
2	RETD	0.89996	0.89695	299.11	0.0001	1.91402
3	DAU	0.91648	0.91265	239.57	0.0001	1.31723
4	DBH	0.84407	0.84058	241.79	0.0001	1.75737
5	BPGW	0.94654	0.94494	588.76	0.0001	1.16491
6	BBJ	0.87758	0.87390	238.36	0.0001	1.87487
7	BMDSP	0.34034	0.32050	17.15	0.0001	2.08987
8	BMDSL	0.65960	0.65198	86.55	0.0001	2.14417
9	BLL	0.50885	0.49408	34.45	0.0001	1.74912
10	KONS	0.99649	0.99636	7499.55	0.0001	1.96019
11	INVS	0.97948	0.97886	1586.91	0.0001	2.11001
12	EXPD	0.99372	0.99353	5260.21	0.0001	1.67149
13	IMPD	0.99452	0.99439	8099.41	0.0001	1.39938
14	PDRBSP	0.99596	0.99577	5379.05	0.0001	1.85848
15	PDRBTB	0.99686	0.99675	8393.12	0.0001	2.15968
16	PDRBID	0.84384	0.83669	117.98	0.0001	1.86304
17	PDRBLGA	0.99716	0.99707	11664.2	0.0001	2.01421
18	PDRBBG	0.98485	0.98440	2162.13	0.0001	1.87058
19	PDRBDG	0.99087	0.99060	3609.91	0.0001	1.66574
20	PDRBTR	0.98977	0.98946	3215.55	0.0001	1.85837
21	PDRBKU	0.99312	0.99292	4802.20	0.0001	1.99711
22	PDRBJS	0.97282	0.97179	944.82	0.0001	1.63441
23	PTKSP	0.96816	0.96745	1358.40	0.0001	1.81021
24	PTKNP	0.99149	0.99130	5205.17	0.0001	1.39694
25	MISK	0.97018	0.96928	1081.79	0.0001	1.55327
26	INFL	0.85736	0.85195	158.68	0.0001	1.32786

7.2. Kerangka Blok Fiskal Daerah

Dalam penelitian ini, blok fiskal daerah dibagi ke dalam dua sub blok yaitu sub blok penerimaan pemerintah daerah, dan sub blok pengeluaran pemerintah daerah.

7.2.1. Penerimaan Pemerintah Daerah

Penerimaan pemerintah daerah terdiri dari atas pendapatan asli daerah, dana transfer, dan penerimaan lain daerah. Pendapatan asli daerah terdiri atas; pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya. Sementara dana transfer terdiri atas; dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus. Dalam model ini penerimaan daerah, yang dimasukkan sebagai persamaan struktural yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil.

7.2.1.1. Pajak Daerah

Hasil pendugaan model persamaan pajak daerah sebagai sumber utama penerimaan daerah dalam era otonomi dewasa ini, menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9604. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas, total pengeluaran pemerintah daerah, jumlah kendaraan bermotor, jumlah kamar hotel, dan pajak daerah tahun sebelumnya secara bersama-sama dapat menjelaskan 96.04 persen fluktuasi variabel pajak daerah pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 832.09, dapat dilihat pada Tabel 27.

Jumlah kamar hotel berpengaruh positif dan nyata terhadap pajak daerah. Koefisien elastisitas jumlah kamar hotel terhadap pajak daerah sebesar 0.173 dalam jangka pendek dan 1.168 dalam jangka panjang. Artinya peningkatan jumlah kamar hotel sebesar 10 persen akan meningkatkan pajak daerah sebesar 1.720 persen dalam jangka pendek dan 11.68 persen dalam jangka panjang. Temuan ini cukup wajar, karena secara teoritis pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan pajak dalam bentuk pajak hotel. Jadi meningkatnya jumlah kamar hotel, merupakan potensi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaannya.

Total pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap pajak daerah. Koefisien elastisitas total pengeluaran pemerintah daerah terhadap pajak daerah sebesar 0.1859 dalam jangka pendek dan 1.256 dalam jangka panjang. Artinya peningkatan total pengeluaran pemerintah daerah sebesar 10 persen akan meningkatkan pajak daerah sebesar 1.859 persen dalam jangka pendek, dan 12.56 persen dalam jangka panjang. Temuan ini cukup wajar, karena secara teoritis apabila pengeluaran pemerintah daerah meningkat, maka tentunya harus diimbangi dengan meningkatnya penerimaan, guna menghindari defisit anggaran yang terlalu besar. Artinya ketika terjadi kenaikan pengeluaran, maka ada tekanan pada pemerintah daerah untuk menggali potensi pajak yang ada di daerahnya.

Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap pajak daerah. Koefisien elastisitas jumlah kendaraan bermotor terhadap pajak

daerah sebesar 0.0143 dalam jangka pendek dan 0.097 dalam jangka panjang. Artinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor sebesar 10 persen akan meningkatkan pajak daerah sebesar 0.143 persen dalam jangka pendek dan 0.87 persen dalam jangka panjang. Hal tersebut wajar karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa pungutan pajak untuk kendaraan bermotor diberikan kepada pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten kota hanya diberikan kewenangan untuk memungut pajak parkir.

Pajak daerah tahun sebelumnya berpengaruh positif dan nyata terhadap pajak daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada dasarnya menginginkan bahwa, pajak yang dipungut pada tahun berjalan tidak lebih rendah dari pada pajak yang dipungut pada tahun sebelumnya.

7.2.1.2. Retribusi Daerah

Hasil pendugaan model persamaan retribusi daerah sebagai sumber utama penerimaan daerah dalam era otonomi dewasa ini, menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.8970. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas produk domestik regional bruto, total pengeluaran pemerintah daerah, jumlah populasi, dan retribusi daerah tahun sebelumnya secara bersama-sama dapat menjelaskan 89.70 persen fluktuasi variabel retribusi daerah pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 299.11, dapat dilihat pada Tabel 27.

Total pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap retribusi daerah. Koefisien elastisitas total pengeluaran pemerintah daerah terhadap retribusi daerah adalah 0.2706 dalam jangka pendek dan 1.604 dalam jangka panjang. Artinya peningkatan total pengeluaran pemerintah daerah sebesar 10 persen akan meningkatkan retribusi daerah sebesar 2.706 persen dalam jangka pendek dan 16.04 persen dalam jangka panjang. Temuan ini menujukkan bahwa ketika terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah, maka ada tekanan yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan dari retribusi daerahnya.

Produk domestik regional bruto memiliki tanda positif namun tidak berpengaruh nyata terhadap retribusi daerah. Koefisien elastisitas produk domestik regional bruto terhadap retribusi daerah adalah 0.0120 dalam jangka pendek dan 0.071 dalam jangka panjang. Artinya peningkatan produk domestik regional bruto sebesar 10 persen akan meningkatkan retribusi daerah sebesar 0.126 persen dalam jangka pendek dan 0.71 persen dalam jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi potensi ekonomi suatu daerah, maka potensi untuk memungut retribusi daerah semakin besar.

Jumlah populasi berpengaruh positif, namun tidak nyata terhadap penerimaan retribusi daerah. Koefisien elastisitas jumlah populasi terhadap retribusi daerah adalah 0.0019 dalam jangka pendek dan 0.011 dalam jangka panjang. Artinya peningkatan produk domestik regional bruto sebesar 10 persen akan meningkatkan retribusi daerah sebesar 0.019 persen dalam jangka pendek dan 0.11 persen dalam jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah oleh pemerintah daerah meningkat relatif kecil seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut.

Retribusi daerah tahun sebelumnya berpengaruh positif dan nyata terhadap retribusi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada dasarnya menginginkan retribusi daerah yang dipungut pada tahun berjalan, tidak lebih rendah dari pada retribusi daerah yang dipungut pada tahun sebelumnya.

7.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Hasil pendugaan model persamaan dana alokasi umum sebagai sumber utama penerimaan daerah dalam era otonomi dewasa ini, menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9127. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas yaitu jumlah pegawai negeri sipil, pendapatan asli daerah, belanja barang dan jasa, belanja lain-lain, luas daerah, serta inflasi, secara bersama-sama dapat menjelaskan 91.27 persen fluktuasi variabel dana alokasi umum pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 239.57, dapat dilihat pada Tabel 27.

Jumlah pegawai negeri sipil, belanja barang dan jasa, belanja lain-lain, luas daerah kabupaten kota, serta inflasi, berpengaruh positif dan nyata terhadap dana

alokasi umum. Koefisien elastisitas jangka pendek jumlah pegawai negeri sipil, belanja barang dan jasa, belanja lain-lain, luas daerah kabupaten kota, serta inflasi, berturut-turut sebesar 0.5770, 0.1030, 0.0782, 0.0180, dan 0.0497. Artinya apabila jumlah pegawai negeri sipil, belanja barang dan jasa, belanja lain-lain, luas daerah kabupaten kota, serta inflasi, meningkat masing-masing sebesar 10 persen, maka dana alokasi umum akan meningkat masing-masing sebesar 5.770 persen dan 1.030 persen, 0.782 persen, 0.180 persen, dan 0.497 persen dalam jangka pendek. Temuan ini pada dasarnya sesuai dengan formulasi dana alokasi umum dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Tabel 27 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan Daerah

Peubah	Estimasi	Prob>[T]	Elastisitas		F-hitung	Adj R-Sq
			J. Pendek	J. Panjang		
Persamaan Pajak Daerah (PAJD)						
Intercept	-894.889	0.1038	-			
TPGPD	0.003597	0.2345	0.1859	1.256		
MTR	0.000999	0.7917	0.0143	0.097	832.09	0.9604
JMKH	1.697810	0.0011	0.1730	1.168		
LPAJD	0.851925	<.0001	-			
Persamaan Retribusi Daerah (RETD)						
Intercept	-506.919	0.2206	-			
PDRB	0.000033	0.7120	0.0120	0.071		
TPGPD	0.006649	0.0304	0.2706	1.604	299.11	0.8970
POP	0.000028	0.9815	0.0019	0.011		
LRETD	0.831304	<.0001	-	-		
Persamaan Dana Alokasi Umum (DAU)						
Intercept	30475.51	<.0001	-			
PNS	13.6966	<.0001	0.5770	-		
PAD	-0.53122	0.0341	-0.0491	-		
BBJ	0.485651	0.0031	0.1030	-	239.57	0.9127
BLL	0.562410	0.0075	0.0782	-		
LDK	1.234813	0.0431	0.0180	-		
INFL	8.802526	0.0173	0.0497	-		
Persamaan Dana Bagi Hasil (DBH)						
Intercept	2751.065	0.0152	-			
PDRB	0.000693	0.0294	0.0697	0,376	241.79	0.8406
TREN	23.8373	0.9149	0.0048	0,026		
LDBH	0.814383	<.0001	-			

Pendapatan asli daerah memiliki tanda negatif dan berpengaruh nyata terhadap dana alokasi umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah meningkat, maka dana alokasi umum yang diberikan kepada daerah tersebut akan menurun. Temuan ini pada dasarnya sesuai formulasi dana alokasi umum dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat memilih untuk tidak berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dari pajak atau retribusi, dan lebih memilih untuk bergantung pada dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Temuan ini sejalan dengan temuan Pakasi (2005) di Sulawesi Utara, dan Saeduddin (2005) di Riau.

7.2.1.4. Dana Bagi Hasil

Hasil pendugaan model persamaan dana bagi hasil menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.8406. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas produk domestik regional bruto, tren, dan dana bagi hasil tahun sebelumnya, secara bersama-sama dapat menjelaskan 84.06 persen fluktuasi variabel dana bagi hasil tahun berjalan, pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 241.79, dapat dilihat pada Tabel 27.

Produk domestik regional bruto memiliki tanda positif dan nyata terhadap dana bagi hasil. Koefisien elastisitas produk domestik regional bruto terhadap dana bagi hasil sebesar 0.0697 dalam jangka pendek dan 0.376 jangka panjang. Artinya peningkatan produk domestik regional bruto sebesar 10 persen akan meningkatkan dana bagi hasil sebesar 0.697 persen dalam jangka pendek dan 3.76 persen dalam jangka panjang. Secara teortis peningkatan produk domestik regional bruto di suatu daerah menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah tersebut meningkat, berarti potensi penerimaan pemerintah pusat dari daerah tersebut juga ikut meningkat yang berdampak pada meningkatnya dana bagi hasil yang dialokasi ke daerah tersebut. Temuan ini sejalan dengan temuan Sumedi (2005) di Jawa Barat, dan Panjaitan (2006) di Sumatera Utara.

Tren berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap dana bagi hasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana bagi hasil yang diberikan kepada daerah memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Dana bagi hasil tahun sebelumnya berpengaruh positif dan nyata terhadap dana bagi hasil tahun berjalan. Hal ini berarti bahwa perolehan dana bagi hasil tahun berjalan setidaknya harus lebih besar atau sama dengan dana bagi hasil tahun sebelumnya.

7.2.2. Pengeluaran Pemerintah Daerah

Dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah daerah kabupaten kota dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lain-lain. Khusus untuk belanja modal, dibagi lagi menjadi dua yaitu belanja modal sektor pertanian dan belanja modal sektor lainnya.

7.2.2. 1. Belanja Pegawai

Hasil pendugaan model persamaan belanja pegawai menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.9449. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas jumlah pegawai negeri sipil, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja pegawai tahun sebelumnya secara bersama-sama dapat menjelaskan 94.49 persen fluktuasi variabel belanja pegawai pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 588.76, dapat dilihat pada Tabel 28.

Jumlah pegawai negeri sipil berpengaruh positif dan nyata terhadap belanja pegawai. Koefisien elastisitas jumlah pegawai negeri sipil terhadap belanja pegawai sebesar 0.2920 dalam jangka pendek dan 0.450 dalam jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila jumlah pegawai negeri sipil meningkat 10 persen maka belanja pegawai akan meningkat 2.920 persen dalam jangka pendek dan 4.50 persen dalam jangka panjang. Hal ini logis, karena dengan bertambahnya pegawai negeri sipil, maka secara otomatis belanja gaji pegawai negeri sipil akan bertambah.

Dana aloksi umum berpangaruh positif namun tidak nyata terhadap belanja pegawai. Koefisien elastisitas dana alokasi umum terhadap belanja pegawai sebesar 0.5108 dalam jangka pendek dan 0.787 dalam jangka panjang. Artinya apabila dana alokasi umum meningkat sebesar 10 persen, maka belanja pegawai akan meningkat sebesar 5.108 persen dalam jangka pendek dan 7.87 persen dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan formulasi dana alokasi umum, bahwa semakin besar jumlah pegawai negeri sipil, maka semakin besar jumlah dana alokasi umum yang harus dialokasikan kepada daerah tersebut.

Tabel 28 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Pengeluaran Pemerintah Daerah

Peubah	Estimasi	Prob>[T]	Elastisitas		F-hitung	Adj R-Sq
			J. Pendek	J. Panjang		
Persamaan Belanja Pegawai (BPGW)						
Intercept	-18.8553	0.9965	-			
PNS	4.759793	0.0045	0.2920	0.450		
PAD	0.350788	0.0069	0.0472	0.073	588.76	0.9449
DAU	0.350788	0.1254	0.5108	0.787		
LBPGW	0.350788	<.0001	-	-		
Persamaan Barang dan Jasa (BBJ)						
Intercept	353.7153	0.8804	-			
PAD	0.250704	0.0141	0.1092	0.393		
DAU	0.040235	0.0455	0.1897	0.684	238.36	0.8739
DBH	0.087965	0.2874	0.0533	0.192		
LBBJ	0.722516	<.0001	-			
Persamaan Belanja Modal Sektor Pertanian (BMDSP)						
Intercept	3128.957	<.0001	-			
DAK	0.027119	0.3312	0.0595	0,107		
DAU	0.000922	0.8371	0.0167	0,030	17.15	0.3205
PDRBSP	0.001142	0.0836	0.0811	0,145		
LBMDSP	0.441545	<.0001	-	-		
Persamaan Belanja Modal Sektor Lain (BMDSL)						
Intercept	-8386.77	0.0570	-	-		
DBH	0.634638	<.0001	0.2284	0.488	86.55	0.6520
DAK	1.385087	<.0001	0.4706	1.005		
LBMDSL	0.531635	<.0001	-	-		
Persamaan Belanja Lain-Lain (BLL)						
Intercept	1438.420	0.6019	-	-		
DAU	0.034405	0.1458	0.2476	0.511		
DBH	0.135642	0.1558	0.1254	0.259	34.35	0.4933
PAD	0.019118	0.8597	0.0127	0.026		
LBLL	0.515788	<.0001	-	-		

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap belanja pegawai. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah meningkat, maka belanja pegawai akan meningkat. Koefisien elastisitas pendapatan asli daerah terhadap belanja pegawai sebesar 0.0472 dalam jangka pendek dan dan 0.073 dalam jangka panjang. Artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat 10 persen, maka belanja pegawai akan meningkat 0.472 persen dalam jangka pendek dan 0.73 persen dalam jangka panjang. Temuan ini sangat logis mengingat dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, maka akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan pegawainya.

Belanja pegawai tahun sebelumnya berpengaruh positif dan nyata terhadap belanja pegawai tahun berjalan. Hal ini berarti bahwa belanja pegawai tahun

berjalan setidaknya harus lebih besar atau sama dengan belanja pegawai tahun sebelumnya agar kesejahteraan pegawai tidak mengalami penurunan.

7.2.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Hasil pendugaan model persamaan belanja barang dan jasa menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.8739. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan belanja barang dan jasa tahun sebelumnya secara bersama-sama dapat menjelaskan 87.39 persen, fluktuasi variabel belanja barang dan jasa pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 238.36, dapat dilihat pada Tabel 28.

Hasil pendugaan model menunjukkan bahwa tiga variabel yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja barang dan jasa tahun sebelumnya, berpengaruh positif dan nyata terhadap belanja barang dan Jasa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara dana bagi hasil berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap belanja barang dan jasa. Koefisien elastisitas jangka pendek pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja barang dan jasa adalah masing-masing sebesar 0.1092, 0.1897, dan 0.0533. Sementara koefisien elastisitas jangka panjang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja barang dan jasa adalah masing-masing sebesar 0.393, 0.684, dan 0.192 dalam jangka panjang. Artinya apabila pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil mengalami kenaikan sebesar 10 persen, maka belanja barang dan jasa akan meningkat masing masing sebesar 1.092 persen, 1.897 persen, dan 0.533 persen dalam jangka pendek, dan 3.93 persen, 6.84 persen, dan 1.92 persen dalam jangka panjang.

Temuan tersebut wajar, mengingat dengan meningkatnya penerimaan pemerintah daerah, baik dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, maupun dana bagi hasil akan mendorong pemerintah daearh untuk meningkatkan pengeluarannya termasuk di dalamnya belanja barang barang dan jasa.

7.2.2.3. Belanja Modal Sektor Pertanian

Hasil pendugaan model persamaan belanja modal sektor pertanian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.3205. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas dana alokasi khusus, dana alokasi umum, produk domestik regional bruto sektor pertanian, dan belanja modal sektor pertanian tahun sebelumnya, secara bersama-sama dapat menjelaskan 32.05 persen, fluktuasi variabel belanja modal sektor pertanian tahun berjalan pada taraf nyata (α) 0.0001 yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 17.15, seperti terlihat pada Tabel 28.

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto sektor pertanian berpengaruh positif dan nyata terhadap belanja modal sektor pertanian. Koefisien elastisitas PDRB sektor pertanian terhadap belanja modal sektor pertanian sebesar 0.0811 dalam jangka pendek, dan sebesar 0.145 dalam jangka panjang. Artinya peningkatan produk domestik regional bruto sektor pertanian sebesar 10 persen akan meningkatkan belanja modal sektor pertanian sebesar 0.811 persen dalam jangka pendek dan 1.45 persen dalam jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah kabupeten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada sektor pertanian meningkat seiring dengan meningkatnya PDRB sektor pertanian.

Dana alokasi khusus memiliki tanda positif namun tidak berpengaruh nyata terhadap belanja modal sektor pertanian. Koefisien elastisitas dana alokasi khusus terhadap belanja modal sektor pertanian sebesar 0.0595 dalam jangka pendek dan sebesar 0.107 dalam jangka panjang. Artinya peningkatan dana alokasi khusus sebesar 10 persen akan meningkatkan belanja modal sektor pertanian sebesar 0.595 persen dalam jangka pendek dan 1.07 persen dalam jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi khusus sebagai transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah yang ditujukan untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional berpengaruh positip terhadap belanja modal sektor pertanian. Kondisi ini sangat logis, mengingat sektor pertanian khususnya tanaman pangan merupakan prioritas

nasional, dan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penghasil pangan terbesar di kawasan timur Indonesia.

Dana alokasi umum memiliki tanda positif namun tidak berpengaruh nyata terhadap belanja modal sektor pertanian. Koefisien elastisitas dana alokasi umum terhadap belanja modal sektor pertanian sebesar 0.0167 dalam jangka pendek dan 0.030 dalan jangka panjang. Artinya peningkatan dana alokasi umum sebesar 10 persen akan meningkatkan belanja modal sektor pertanian sebesar 0.167 persen dalam jangka pendek dan 0.37 persen dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi umum yang dialokasi untuk sektor pertanian relatif sangat kecil. Hal tersebut cukup wajar mengingat dana alokasi umum yang dialokasikan ke daerah lebih banyak dibelanjakan untuk belanja pegawai di daerah.

Belanja modal sektor pertanian tahun sebelumnya berpengaruh positif dan nyata terhadap belanja modal sektor pertanian tahun berjalan. Hal ini berarti bahwa belanja modal sekor pertanian tahun berjalan setidaknya harus lebih besar atau sama dengan belanja modal sektor pertanian tahun sebelumnya.

7.2.2.4. Belanja Modal Sektor Lainnya

Hasil pendugaan model persamaan belanja modal sektor lain menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.6520. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan belanja modal sektor lain tahun sebelumnya, secara bersama-sama dapat menjelaskan 65.20 persen fluktuasi variabel belanja modal sektor lain pada taraf nyata (α) 0.0001 ditunjukkan oleh F dengan nilai 86.55, dapat dilihat pada Tabel 28.

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa ketiga variabel yang ada yaitu dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan belanja modal sektor lain tahun sebelumnya memiliki tanda yang positif dan berpengaruh nyata terhadap belanja modal sektor lain. Koefisien elastisitas jangka pendek dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal sektor lain, berturut-turut adalah 0.2284 dan 0.4706. Sementara koefisien elastisitas jangka panjang dana bagi hasil, dan

dana alokasi khusus terhadap belanja modal sektor lain, berturut-turut adalah 0.488 dan 1.005. Artinya peningkatan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebesar 10 persen akan meningkatkan belanja modal sektor lain berturut-turut sebesar 2.284 persen, 4.706 persen dalam jangka pendek dan 4.88 persen, 10.05 persen dalam jangka panjang.

Secara teoritis apabila penerimaan meningkat, maka ada kecenderungan pengeluaran akan meningkat. Oleh karena itu dengan meningkatnya penerimaan pemerintah daerah dari dana bagi hasil dan dana alokasi khusus, maka belanja modal sektor lain seperti pembangunan sarana jalan, jembatan, dan lainnya akan meningkat.

7.2.2.5. Belanja Lain-Lain

Hasil pendugaan model persamaan belanja lain-lain menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.4933. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas dana alokasi umum, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, dan belanja lain-lain pemerintah tahun sebelumnya secara bersama-sama dapat menjelaskan 49.33 persen, fluktuasi variabel belanja lain-lain pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 34.35, dapat dilihat pada Tabel 30.

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa semua variabel memiliki tanda positif, dan sesuai harapan, namun hanya variabel belanja lain-lain pemerintah tahun sebelumnya yang berpengaruh nyata terhadap belanja lain-lain tahun berjalan. Koefisien elastisitas jangka pendek dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja lain-lain tahun berjalan berturut-turut adalah 0.2476, 0.1254, dan 0.0127. Sementara koefisien elastisitas jangka panjang dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja lain-lain tahun berjalan berturut-turut adalah 0.511, 0.259, dan 0.026. Artinya peningkatan dana alokasi umum, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah sebesar 10 persen akan meningkatkan belanja lain-lain tahun berjalan berturut-turut sebesar 2.476 persen, 1.254 persen, dan 0.127 dalam jangka pendek dan 5.11 persen, 2.59 persen, dan 0.26 persen dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Selatan belum dapat

menekan belanja lain-lain mereka apabila penerimaan mereka peningkat.

7.3. Kerangka Blok Permintaan Agregat

Dalam penelitian ini blok permintaan agregat terdiri atas, pengeluaran konsumsi swasta, investasi swasta, ekspor dan impor daerah, serta pengeluaran pemerintah. Khusus tentang pengeluaran pemerintah telah dijelaskan dalam sub bahasan blok fiskal sehingga tidak dijelaskan lagi dalam pokok bahasan ini. Hasil estimasi model blok permintaan agregat dapat dilihat pada Tabel 29.

7.3.1. Konsumsi Swasta

Hasil pendugaan model persamaan konsumsi swasta menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9964. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas produk domestik regional bruto, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, inflasi, dan konsumsi swasta tahun sebelumnya, secara bersama-sama dapat menjelaskan 99.64 persen fluktuasi variabel konsumsi swasta pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 7499.55, dapat dilihat pada Tabel 29.

Hasil pendugaan model terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi swasta, yaitu produk domestik regional bruto, memiliki tanda positif dan berpengaruh nyata terhadap konsumsi swasta. Koefisien elastisitas produk domestik regional bruto terhadap konsumsi swasta sebesar 0.0612 dalam jangka pendek dan 0.889 dalam jangka panjang. Artinya peningkatan produk domestik regional bruto sebesar 10 persen akan meningkatkan konsumsi masyarakat sebesar 0.612 persen, dalam jangka pendek dan 8.89 persen dalam jangka panjang. Produk domestik regional bruto di suatu daerah menunjukkan potensi ekonomi suatu daerah, dan sekaligus menunjukkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Secara teoritis apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka akan mendorong konsumsi masyarakat meningkat.

Tabel 29 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Permintaan Agregat Daerah

Peubah	Estimasi	Prob>[T]	Elastisitas		F-hitung	Adj R-Sq
			J. Pendek	J. Panjang		
Persamaan Konsumsi Swasta (KONS)						
Intercept	-58432.8	0.0352	-	-	7499.55	0.9964
PDRB	0.034252	0.0553	0.0612	0.889		
BBJ	0.021192	0.9807	0.0006	0.100		
BPGW	0.304371	0.3368	0.0303	0.904		
INFL	34.36591	0.1355	0.027	0.335		
LKONS	0.993811	<.0001	-	-		
Persamaan Investasi Swasta (INVS)						
Intercept	-56197,4	0.0166	-		1586.91	0.9789
BMD	0,325015	0.4026	0.0548	0.391		
PAD	-4,27491	0.0490	-0.1616	-1.152		
KONS	0,166592	0.0001	0.4932	3.515		
LINVS	0,859675	<.0001	-	-		
Persamaan Ekspor Daerah (EXPD)						
Intercept	885709.3	0.0056	-		5260.21	0.9935
NTRP	-112.862	0.0030	-1.3457	-12,028		
PDRB	0.152388	<.0001	0.3322	2,969		
INFL	97.14248	0.2040	0.0925	0,827		
LEXPD	0.888123	<.0001	-	-		
Persamaan Impor Daerah (IMPD)						
Intercept	-27584,5	0.2989	-		8099.41	0.99439
PDRB	0,004562	0.9227	0,0128	0,318		
KONS	0,208677	0.0300	0,3265	0.815		
LIMPD	0,959934	<.0001	-	-		

Konsumsi swasta tahun sebelumnya menunjukkan tanda positif dan berpengaruh nyata terhadap konsumsi swasta tahun berjalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku konsumsi masyarakat tahun berjalan cenderung mengikuti pola konsumsi tahun sebelumnya.

7.3.2. Investasi Swasta

Hasil pendugaan model persamaan investasi swasta menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9789. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas belanja modal, pendapatan asli daerah, konsumsi swasta, dan investasi swasta tahun sebelumnya, secara bersama-sama dapat menjelaskan 97.89 persen fluktuasi variabel investasi swasta tahun berjalan, pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 1586.91, dapat dilihat pada Tabel 29.

Belanja modal pemerintah, berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap investasi swasta. Koefisien elastisitas belanja modal terhadap investasi swasta sebesar 0.0548 dalam jangka pendek dan sebesar 0.391 dalam jangka panjang. Artinya setiap 10 persen kenaikan belanja modal pemerintah daerah akan meningkatkan investasi swasta di daerah tersebut 0.548 persen dalam jangka pendek dan 3.91 persen dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam

membangun infrastruktur di daerah, akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Temuan ini sejalan dengan temuan Erden and Holcombe (2006) pada 19 negara berkembang dan temuan Haroon and Nasr (2011) di Pakistan.

Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan nyata terhadap investasi swasta. Koefisien elastisitas pendapatan asli daerah terhadap investasi swasta sebesar -0.1616 dalam jangka pendek dan sebesar -1.152 dalam jangka panjang. Artinya setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 10 persen, maka akan menurunkan investasi swasta 1.616 persen dalam jangka pendek dan 11.52 persen dalam jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah meningkat, maka investasi swasta akan turun. Dengan demikian pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menggali potensi penerimaan dari pajak dan retribusi daerah agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Konsumsi swasta berpengaruh positif dan nyata terhadap investasi swasta. Koefisien elastisitas konsumsi swasta terhadap investasi swasta adalah 0.4932 dalam jangka pendek dan 3.515 dalam jangka panjang. Artinya apabila konsumsi swasta meningkat 10 persen, maka investasi swasta akan meningkat 4.932 persen dalam jangka pendek dan 35.15 persen dalam jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan konsumsi swasta akan meningkatkan investasi swasta. Kondisi ini cukup wajar mengingat para investor secara teoritis cenderung menanamkan modalnya di daerah konsumen.

Investasi swasta tahun sebelumnya menunjukkan tanda positif dan berpengaruh nyata terhadap investasi swasta tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa para investor cenderung mengikuti pola investasi tahun sebelumnya.

7.3.3. Ekspor Daerah

Hasil pendugaan model persamaan ekspor daerah menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9935. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas nilai tukar rupiah, produk domestik regional bruto, inflasi, dan ekspor daerah tahun sebelumnya, secara bersama-sama dapat menjelaskan 99.35 persen fluktuasi variabel ekspor daerah pada taraf nyata (α)

0.0001, ditunjukkan oleh F dengan nilai 5260.21, dapat dilihat pada Tabel 29.

Produk domestik regional bruto memiliki tanda positif dan berpengaruh nyata terhadap ekspor daerah. Koefisien elastisitas produk domestik regional bruto terhadap ekspor daerah sebesar 0.3322 dalam jangka pendek dan sebesar 2.969 dalam jangka panjang. Artinya setiap 10 persen kenaikan produk domestik regional bruto, akan menaikkan ekspor daerah sebesar 3.322 persen dalam jangka pendek dan 29.69 persen dalam jangka panjang. Produk domestik regional bruto di suatu daerah menunjukkan potensi ekonomi daerah tersebut. Secara teoritis apabila produk domestik regional bruto meningkat, maka akan mendorong ekspor daerah meningkat.

Nilai tukar rupiah, berpengaruh negatif dan nyata terhadap ekspor daerah. Koefisien elastisitas nilai tukar rupiah terhadap ekspor daerah adalah elastis sebesar -1.3457 dalam jangka pendek dan sebesar -12.028 dalam jangka panjang. Artinya setiap 10 persen penurunan nilai tukar rupiah, akan menaikkan ekspor daerah sebesar 13.457 persen dalam jangka pendek dan 120.28 persen dalam jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah sangat responsif terhadap ekspor daerah baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Secara teoritis apabila nilai tukar rupiah menguat terhadap mata uang asing, maka ekspor akan turun, dan sebaliknya apabila nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing, maka ekspor akan meningkat.

Ekspor daerah tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap ekspor daerah tahun berjalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekspor daerah tahun berjalan berperilaku mengikuti pola ekspor daerah tahun sebelumnya.

7.3.4. Impor Daerah

Hasil pendugaan model persamaan impor daerah, menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9938. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas produk domestik regional bruto, konsumsi swasta, dan impor daerah tahun sebelumnya, secara bersama-sama dapat menjelaskan 99.44 persen, fluktuasi impor daerah pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 8099.41, dapat dilihat pada Tabel 29.

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa semua variabel memiliki tanda

sesuai harapan, dua variabel berpengaruh positif dan nyata terhadap impor daerah, yaitu konsumsi swasta dan impor daerah tahun sebelumnya. Koefisien elastisitas produk domestik regional bruto, dan konsumsi swasta terhadap impor daerah adalah 0.0444, dan 0.0256 dalam jangka pendek dan 0.318 dan 0.815 dalam jangka panjang. Artinya setiap 10 persen peningkatan produk domestik regional bruto, dan konsumsi swasta, akan menaikkan impor daerah sebesar 0.444 persen, 0.256 persen dalam jangka pendek dan 3.18 persen, 8.15 persen dalam jangka panjang. Secara teoritis apabila produk domestik regional bruto meningkat, maka kesejahteraan masyarakat meningkat. Oleh karena itu masyarakat cenderung untuk meningkatkan konsumsinya termasuk produk-produk impor.

7.4. Kerangka Blok Output dan Penyerapan Tenaga Kerja

7.4.1. Kerangka Blok Output Daerah

Dalam penelitian ini output daerah dibagi dalam sembilan sektor, masing-masing adalah sektor; pertanian, pertambangan, industri, listrik gas dan air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan, dan jasa-jasa. Hasil pendugaan model terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi output/PDRB masing-masing sektor dapat dilihat pada Tabel 30.

7.4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian

Hasil pendugaan model persamaan produk domestik regional bruto sektor pertanian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9958. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, belanja modal sektor pertanian, investasi swasta, konsumsi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, dan produk domestik regional bruto sektor pertanian tahun sebelumnya secara bersama-sama dapat menjelaskan 99.58 persen fluktuasi variabel produk domestik regional bruto sektor pertanian tahun berjalan pada taraf nyata (α) 0.000, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 5379.04, dapat dilihat pada Tabel 30.

Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, menunjukkan angka positif namun

tidak nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor pertanian. Koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor pertanian adalah 0.0003 dalam jangka pendek dan 0.0004 dalam jangka panjang. Artinya setiap 10 persen kenaikan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, akan menaikkan PDRB sektor pertanian sebesar 0.003 persen dalam jangka pendek dan 0.004 persen dalam jangka panjang. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa minat dari para pencari kerja untuk bekerja pada sektor pertanian sangat kecil. Hal tersebut wajar karena secara teortis upah padah sektor pertanian lebih rendah dari pada upah padan sektor lainnya.

Belanja modal sektor pertanian, menunjukkan angka positif terhadap produk domestik regional bruto sektor pertanian. Koefisien elastisitas belanja modal sektor pertanian adalah 0.0011 dalam jangka pendek dan 0.016 dalam jangka panjang. Artinya setiap 10 persen kenaikan belanja modal sektor pertanian, akan menaikkan PDRB sektor pertanian sebesar 0.011 persen dalam jangka pendek dan 0.16 persen dalam jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pertanian masih rendah. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten kota selayaknya lebih berpihak padak sektor pertanian dengan meningkatkan belanja modal pada sektor pertanian, mengingat sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan masih memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan temuan Fan dan Rao (2003), untuk negara Asia dan Amerika Laitin, serta Ogundipe dan Adeniyi (2011) di Nigeria.

Investasi swasta, menunjukkan tanda positf namun tidak berpengaruh nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor pertanian. Koefisien elastisitas investasi swasta adalah 0.0040 adalah jangka pendek dan 0.058 dalam jangka panjang. Artinya setiap 10 persen kenaikan investasi swasta, akan menaikkan PDRB sektor pertanian sebesar 0.040 persen dalam jangka pendek dan 0.56 persen dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan minat para investasi swasta untuk menanamkan modalnya pada sektor pertanian relatif sangat kecil. Hal tersebut sangat wajar mengingat tingkat pengembalian modal pada sektor pertanian membutuhkan waktu yang cukup panjang dan relatif lebih kecil dibanding sektor lainnya.

Konsumsi swasta, menunjukkan tanda positif namun tidak berpengaruh nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor pertanian. Koefisien elastisitas konsumsi swasta terhadap produk domestik regional bruto sektor pertanian adalah 0.0137 dalam jangka pendek dan 0.200 dalam jangka panjang. Artinya setiap 10 persen kenaikan konsumsi swasta, akan menaikkan PDRB sektor pertanian sebesar 0.137 persen dalam jangka pendek dan 2.00 persen dalam jangka panjang. Peningkatan konsumsi masyarakat secara teoritis akan mendorong naiknya harga produk termasuk di dalamnya produk pertanian. Dengan naiknya harga produk pertanian, mendorong petani untuk meningkatkan produksinya. Dengan demikian peningkatkan konsumsi masyarakat akan mendorong meningkatnya produksi sektor pertanian.

Dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya menunjukkan angka negatif namun tidak berpengaruh nyata terhadap PDRB Sektor Pertanian. Hasil ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Sehingga program pembangunan pertanian dari provinsi dan pusat saling tumpang tindih dengan program pemerintah daerah kabupaten kota.

Produk domestik regional bruto sektor pertanian tahun sebelumnya berpengaruh positif dan nyata terhadap PDRB sektor pertanian tahun berjalan. Hal tersebut sangat wajar mengingat para petani cenderung mempertahankan usahataninya.

7.4.1.2. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertambangan

Hasil pendugaan model persamaan produk domestik regional bruto sektor pertambangan menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9965. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian, investasi swasta dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, ekspor bersih, dan produk domestik regional bruto sektor pertambangan tahun sebelumnya, secara bersama-sama dapat menjelaskan 99.65 persen fluktuasi variabel produk domestik regional bruto sektor pertambangan pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F

dengan nilai 7718.28, dapat dilihat pada Tabel 30.

Penyerapan tenaga kerja non pertanian berpengaruh negatif dan tidak nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor pertambangan. Hal ini wajar, mengingat sektor pertambangan merupakan sektor yang padat modal. Karena itu peningkatan PDRB sektor pertambangan tidak menjamin meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertambangan.

Investasi swasta berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap PDRB sektor pertambangan. Koefisien elastisitas investasi swasta adalah 0.0166 dalam jangka pendek dan 0.781 dalam jangka panjang. Artinya setiap 10 persen kenaikan investasi swasta, akan menaikkan PDRB sektor pertambangan sebesar 0.166 persen dalam jangka pendek dan 7.81 persen dalam jangka panjang.

Dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan lainnya menunjukkan angka positif namun tidak berpengaruh nyata terhadap PDRB sektor pertambangan. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya akan meningkatkan PDRB pada sektor pertambangan. Koefisien elastisitas dana dekonsentrasi tugas pembantuan terhadap PDRB sektor pertambangan 0.0169 dalam jangka pendek dan 0.795 dalam jangka panjang. Artinya setiap 10 persen kenaikan dana dekonsentrasi tugas pembantuan akan menaikkan PDRB sektor pertambangan sebesar 0.169 persen dalam jangka pendek dan 7.97 persen dalam jangka panjang. Temuan tersebut secara teoritis wajar karena dana dekonsentrasi dan tugas berbantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur di daerah. Oleh karena itu dengan adanya perbaikan infrastruktur akan mendorong peningkatan produktivitas bagi perusahaan-perusahaan tambang yang ada di daerah.

Ekspor bersih berpengaruh positif dan nyata terhadap PDRB sektor pertambangan, yang berarti bahwa penambahan ekspor bersih akan meningkatkan PDRB sektor pertambangan. Koefisien elastisitas ekspor bersih terhadap PDRB sektor pertambangan adalah 0.0187 dalam jangka pendek dan 0.880 dalam jangka panjang. Artinya setiap 10 persen kenaikan ekspor bersih akan menaikkan PDRB sektor pertambangan sebesar 0.187 persen dalam jangka pendek dan 8.80 persen dalam jangka panjang. Temuan ini wajar mengingat

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki satu perusahaan tambang nikel yang cukup besar, dan hampir semua hasil produksinya di eskpor ke luar negeri.

Produk domestik regional bruto sektor pertambangan tahun sebelumnya berpengaruh positif dan nyata terhadap PDRB sektor pertambangan tahun berjalan. Hal tersebut sangat wajar mengingat para investor yang sudah menanamkan modalnya pada sektor pertambangan akan cenderung mempertahankan investasinya.

7.4.1.3. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri

Hasil pendugaan model persamaan produk domestik regional bruto sektor industri menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.8377. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, belanja modal sektor lainnya, upah minimum provinsi, dan inflasi secara bersama-sama dapat menjelaskan 83.67 persen, fluktuasi variabel produk domestik regional bruto sektor industri pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 117.98, dapat dilihat pada Tabel 30.

Penyerapan tenaga kerja non pertanian berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor industri. Koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja non pertanian adalah 0.37187 dalam jangka pendek. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila tenaga kerja non pertanian meningkat 10 persen, maka PDRB sektor industri meningkat sebesar 3.7187 persen. Temua ini wajar karena secara teortis apabila penyerapan tenaga kerja meningkat, maka produksi akan meningkat.

Investasi swasta, berpengaruh positif dan nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor industri. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila investasi swasta meningkat, maka PDRB sektor industri akan meningkat. Koefisien elastisitas investasi swasta adalah 0.4577 dalam jangka pendek. Berarti apabila investasi swasta meningkat 10 persen, maka PDRB sektor industri meningkat sebesar 4.577 persen. Temua ini wajar karena secara teortis apabila investasi swasta meningkat, maka produksi akan meningkat.

Dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya menunjukkan angka

positif dan berpengaruh nyata terhadap PDRB sektor industri. Koefisien elastisitas jangka pendek dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya adalah 0.2121. Berarti apabila dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya meningkat 10 persen, maka PDRB sektor industri meningkat sebesar 2.121 persen dalam jangka pendek.

Belanja modal sektor lainnya berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor industri. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila belanja modal sektor lainnya meningkat, maka PDRB sektor industri akan meningkat. Koefisien elastisitas jangka pendek belanja modal sektor lainnya adalah 0.0993. Berarti apabila belanja modal sektor lainnya meningkat 10 persen, maka PDRB sektor industri meningkat sebesar 0.993 persen. Temuan tersebut secara teoritis wajar karena dana belanja modal sektor lainnya pada dasarnya belanja yang dieperuntukkan untuk memperbaiki infrastruktur di daerah. Oleh karena itu dengan adanya perbaikan infrastruktur akan mendorong peningkatan produktivitas bagi perusahaan-perusahaan industri yang ada di daerah.

Upah minimum provinsi, berpengaruh negatif dan tidak nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor industri. Dengan demikian apabila upah minimum provinsi meningkat, maka PDRB sektor industri akan berkurang. Koefisien elastisitas jangka pendek upah minimum provinsi adalah -0.0796. Berarti apabila upah minimum provinsi meningkat 10 persen, maka PDRB sektor industri turun sebesar 0.796 persen. Temuan ini sangat wajar, karena secara teoritis apabila upah meningkat maka para pengusaha cenderung untuk mengurangi tenaga kerjanya yang dianggap tidak produktif.

Produk domestik regional bruto sektor industri tahun sebelumnya, berpengaruh positif dan nyata terhadap PDRB sektor industri tahun berjalan. Hal tersebut sangat wajar mengingat para investor yang sudah menanamkan modal pada sektor industri cenderung meningkatkan investasinya.

Tabel 30 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Output Daerah

Persamaan PDRB Sektor Pertanian (PDRBSP)						
Peubah	Estimasi	Prob>[T]	Elastisitas		F-hitung	Adj R-Sq
			J. Pendek	J. Panjang		
Intercept	-509.331	0.9489	-		5379.04	0.99577
PTKSP	0.002354	0.9741	0.0003	0.004		

BMDSP	0.079091	0.9447	0.0011	0.016		
INVS	0.006360	0.6668	0.0040	0.058		
KONS	0.007406	0.5017	0.0137	0.200		
DDTBL	-0.024790	0.3978	-0.0029	-0.042		
LPDRBSP	0.931768	<.0001	-	-		
Persamaan PDRB Sektor Tambang (PDRBTB)						
Intercept	4165.460	0.5034	-			
PTKNP	-0.187590	0.2577	-0.06898	-0.920		
INVS	0.008108	0.6239	0.01658	0.781	7718.28	0.99646
DDTBL	0.044087	0.2646	0.01688	0.795		
NEXP	0.048805	0.0189	0.01868	0.880		
LPDRBTB	0.978771	<.0001	-	-		
Persamaan PDRB Sektor Industri (PDRBID)						
Intercept	3107.836	0.9792	-	-		
PTKNP	1.461541	0.1194	0.37187	-		
INVS	0.305956	0.0017	0.45920	-		
DDTBL	0.796363	0.0009	0.21093	-	117.98	0.83669
BMDSL	0.480399	0.6631	0.09929	-		
UMP	-0.089830	0.6773	-0.24242	-		
INFL	34.93782	0.6052	0.12121	-		
Persamaan PDRB Listrik. Gas dan Air (PDRBLGA)						
Intercept	-997.7550	0.0174	-			
PTKNP	0.008217	0.4622	0.0282	0.12223		
INVS	0.014008	<.0001	0.2870	1.24464	11664.2	0.9971
DDTBL	0.012725	0.0037	0.0454	0.19704		
LPDRBLGA	0.769387	<.0001	-	-		
Persamaan PDRB Bangunan (PDRBBG)						
Intercept	9524.944	0.0764	-	-		
PTKNP	0.042254	0.6670	0.02748	-		
INVS	0.205493	<.0001	0.74305	-	2162.13	0.9844
DDTBL	0.184136	<.0001	0.12464	-		
BMDSL	0.002987	0.9722	0.00160	-		
Persamaan PDRB Perdagangan (PDRBDG)						
Intercept	-23241.6	0.1864	-	-		
PTKNP	0.72201	0.0080	0.1576	-		
DDTBL	0.84554	<.0001	0.1922	-	3609.91	0.9906
INVS	0.59966	<.0001	0.7280	-		
INFL	2.42379	0.8974	0.0074	-		
Persamaan PDRB Transportasi (PDRBTR)						
Intercept	-36194.90	0.0007	-	-		
PTKNP	0.452899	0.0052	0.2005	-		
INVS	0.328033	<.0001	0.8076	-	3215.55	0.9895
DDTBL	0.483506	<.0001	0.2229	-		
INFL	6.352968	0.5700	0.0362	-		
Persamaan PDRB Keuangan (PDRBKU)						
Intercept	-7047.39	0.1955	-	-		
PTKNP	0.539378	<.0001	0.2932	-		
INVS	0.199153	<.0001	0.6019	-	4802.20	0.99292
DDTBL	0.250975	<.0001	0.1420	-		
INFL	3.834177	0.5103	0.0268	-		
Persamaan PDRB Jasa-Jasa (PDRBJS)						
Intercept	31367.64	0.0117	-	-		
PTKNP	1.465487	<.0001	0.43720	-		
KONS	0.060057	0.0006	0.29495	-	944.82	0.97179
DDTBL	0.125627	0.0069	0.03901	-		
INVS	0.042223	0.0903	0.07000	-		
INFL	0.727640	0.9534	0.00279	-		

7.4.1.4. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Listrik Gas dan Air

Hasil pendugaan model persamaan produk domestik regional bruto sektor listrik gas dan air menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2)

sebesar 0.9971. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, dan produk domestik regional bruto sektor listrik gas dan air tahun sebelumnya secara bersama-sama dapat menjelaskan 99.71 persen fluktuasi variabel produk domestik regional bruto sektor listrik gas dan air pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 11664.2, dapat dilihat pada Tabel 30.

Hasil estimasi model juga menunjukkan bahwa semua variabel memiliki tanda yang sesuai harapan, dan hanya satu variabel yang tidak berpengaruh nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor listrik gas dan air, yaitu penyerapan tenaga kerja non pertanian. Koefisien elastisitas jangka pendek penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan lainnya, berturut-turut adalah 0.0281, 0.2870, dan 0.0454. Sementara koefisien elastisitas jangka panjang penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, berturut-turut adalah 0.1222, 1.2334, dan 0.1970. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja non pertanian, dan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan lainnya, tidak responsif terhadap produk domestik regional bruto sektor listrik gas dan air baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sementara investasi swasta tidak responsif dalam jangka pendek namun cukup responsif dalam jangka panjang terhadap produk domestik regional bruto sektor listrik gas. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan meningkatkan investasi swasta maka kebutuhan akan tenaga listrik semakin besar dalam jangka panjang.

Produk domestik regional bruto sektor listrik gas dan air tahun sebelumnya, berpengaruh positif dan nyata terhadap PDRB sektor listrik gas dan air tahun berjalan. Hal tersebut wajar mengingat investasi listrik yang

sudah dibangun cenderung ditingkatkan kapasitasnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat akan listrik.

7.4.1.5. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Bangunan

Hasil pendugaan model persamaan produk domestik regional bruto sektor bangunan menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9844. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas; tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, serta belanja modal sektor lainnya secara bersama-sama dapat menjelaskan 98.44 persen, fluktuasi variabel produk domestik regional bruto sektor bangunan pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 2162.13, dapat dilihat pada Tabel 30.

Hasil estimasi model juga menunjukkan bahwa variabel investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, berpengaruh positif dan nyata terhadap PDRB sektor bangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, meningkat, maka PDRB sektor bangunan akan meningkat. Koefisien elastisitas jangka pendek investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya terhadap PDRB sektor bangunan, berturut-turut sebesar 0.7431 dan 0.1246. Berarti apabila investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya meningkat sebesar 10 persen, maka PDRB sektor bangunan meningkat masing-masing sebesar 7.427 persen, 1.262 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan sektor bangunan didaerahnya, dan sekaligus menunjukkan bahwa dana dekonsentrasi tugas pembantuan diperluhan dalam mendorong PDRB sektor bangunan.

Penyerapan tenaga kerja non pertanian dan belanja modal sektor lainnya berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap PDRB sektor bangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, apabila penyerapan tenaga kerja non pertanian, dan belanja modal sektor lainnya meningkat, maka PDRB sektor bangunan akan meningkat. Koefisien elastisitas jangka pendek penyerapan tenaga kerja non pertanian dan belanja modal sektor lainnya berturut-turut adalah 0.02746 dan 0.00160. Artinya apabila penyerapan tenaga kerja non pertanian dan belanja modal sektor lainnya meningkat 10 persen, maka PDRB sektor bangunan meningkat masing-masing sebesar 0.264 persen dan 0.016 persen dalam

jangka pendek. Temuan ini logis, karena secara teoritis peningkatan penyerapan tenaga kerja non pertanian akan mendorong peningkatan pertumbuhan PDRB sektor bangunan.

7.4.1.6. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan

Hasil pendugaan model persamaan produk domestik regional bruto sektor perdagangan menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9906. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas; penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, serta inflasi secara bersama-sama dapat menjelaskan 99.06 persen fluktuasi variabel produk domestik regional bruto sektor perdagangan pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 3609.91, dapat dilihat pada Tabel 30.

Hasil estimasi model juga menunjukkan bahwa variabel penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, berpengaruh positif dan nyata serta sesuai harapan terhadap PDRB sektor perdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, meningkat maka PDRB sektor perdagangan akan meningkat. Koefisien elastisitas jangka pendek penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dan dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya terhadap PDRB sektor perdagangan, berturut-turut sebesar 0.1576, 0.7280, dan 0.1922. Berarti apabila penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya meningkat sebesar 10 persen, maka PDRB sektor perdagangan meningkat masing-masing sebesar 1.576 persen, 7.28 persen, dan 1.922 persen. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan tenaga kerja, investasi swasta, serta dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan mendorong peningkatkan PDRB pada sektor perdagangan.

Inflasi berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap PDRB sektor perdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, apabila inflasi meningkat maka PDRB sektor perdagangan meningkat, dan hal ini cukup wajar karena

inflasi pada kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2004-2009 merupakan inflasi moderat dalam arti berada pada kisaran satu digit.

7.4.1.7. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Transportasi dan Komunikasi

Hasil pendugaan model persamaan produk domestik regional bruto sektor transportasi dan komunikasi menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9895. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, dan inflasi, secara bersama-sama dapat menjelaskan 98.95 persen, fluktuasi variabel produk domestik regional bruto sektor transportasi dan komunikasi pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 3215.55, dapat dilihat pada Tabel 30.

Hasil estimasi model juga menunjukkan bahwa semua variabel yaitu penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, memiliki tanda positif dan sesuai harapan serta berpengaruh nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor transportasi dan komunikasi. Koefisien elastisitas jangka pendek penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian, investasi swasta, dan dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya terhadap produk domestik regional bruto sektor transportasi dan komunikasi, berturut-turut adalah 0.2005, 0.8076, dan 0.2229. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, meningkat masing-masing sebesar 10 persen, maka produk domestik regional bruto sektor transportasi dan komunikasi, meningkat masing-masing sebesar 2.01 persen, 8.076 persen, dan 2.229 persen dalam jangka pendek.

Temua ini sejalan dengan teori Solow bahwa meningkatan penyerapan tenaga kerja, investasi swasta serta, serta dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan akan mendorong pertumbuhan pada sektor transportasi dan komunikasi.

7.4.1.8. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Keuangan

Hasil pendugaan model persamaan produk domestik regional bruto sektor keuangan menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9929. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, dan inflasi, secara bersama-sama dapat menjelaskan 99.29 persen, fluktuasi variabel produk domestik regional bruto sektor keuangan pada taraf nyata (α) 0.0001 yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 4802.20, dapat dilihat pada Tabel 30.

Hasil estimasi model juga menunjukkan bahwa semua variabel memiliki tanda sesuai harapan kecuali inflasi namun tidak berpengaruh nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor keuangan. Variabel penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya berpengaruh positif dan nyata terhadap PDRB sektor keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dan dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya meningkat, maka PDRB sektor keuangan akan meningkat.

Koefisien elastisitas jangka pendek penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya terhadap produk domestik regional bruto sektor keuangan, berturut-turut adalah 0.2932, 0.6019, dan 0.1420. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dan dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, meningkat masing-masing sebesar 10 persen, maka produk domestik regional bruto sektor keuangan, meningkat masing-masing sebesar 2.932 persen, 6.019 persen, dan 1.42 persen dalam jangka pendek. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa investasi swasta memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan produk domestik regional bruto pada sektor keuangan, dan secara teoritis bahwa investasi akan tumbuah kalau ditopang oleh lembaga keuangan.

7.4.1.9. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Jasa-jasa

Hasil pendugaan model persamaan produk domestik regional bruto sektor jasa menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9751. Hal

tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas; penyerapan tenaga kerja non pertanian, konsumsi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, investasi swasta, dan inflasi, secara bersama-sama dapat menjelaskan 97.18 persen fluktuasi variabel produk domestik regional bruto sektor jasa-jasa pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 944.82, dapat dilihat pada Tabel 30.

Hasil estimasi model juga menunjukkan bahwa semua variabel memiliki tanda sesuai harapan, dan empat variabel berpengaruh nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor jasa, yaitu penyerapan tenaga kerja non pertanian, konsumsi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, serta investasi swasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila penyerapan tenaga kerja non pertanian, konsumsi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, dan investasi swasta, meningkat maka PDRB sektor jasa akan meningkat.

Koefisien elastisitas jangka pendek penyerapan tenaga kerja non pertanian, konsumsi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, dan investasi swasta, berturut-turut adalah 0.4372, 0.2950, 0.0390, dan 0.0700. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila penyerapan tenaga kerja non pertanian, konsumsi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, dan investasi swasta, meningkat masing-masing sebesar 10 persen, maka produk domestik regional bruto sektor jasa, akan meningkat masing-masing sebesar 4.372 persen, dan 2.950 persen, dan 0.390 persen, dan 0.70 persen. Temua ini sejalan dengan teori Solow bahwa meningkatan penyerapan tenaga kerja, investasi swasta serta, serta dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan akan mendorong pertumbuhan pada sektor transportasi dan komunikasi.

Sementara inflasi menunjukkan angka positif namun tidak berpengaruh nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor jasa. Koefisien elastisitas jangka pendek inflasi adalah 0.0028. Artinnya apabila inflasi meningkat masing-masing sebesar 10 persen, maka produk domestik regional bruto sektor jasa naik sebesar 0.028 persen.

Kalau kita perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produk domestik regional bruto, pada semua sektor, kita melihat bahwa investasi swasta memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan produk domestik regional bruto. Dikatakan demikian karena dari sembilan sektor yang dikaji, investasi swasta, berpengaruh nyata dan positif terhadap tujuh sektor. Sementara dua sisanya walaupun tidak berpengaruh nyata, tetapi tetap berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto. Oleh karena itu untuk meningkatkan PDRB kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka pemerintah daerah harus dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, dalam upaya untuk mendorong para investor untuk menanamkan modal di daerah ini. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah adalah dengan memperbaiki infrastruktur yang ada, dengan cara lebih mengutamakan belanja modal. Hal ini penting karena dalam model sebelumnya terlihat bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap investasi swasta.

Disamping investasi swasta, variabel yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan PDRB adalah dana dekonstrasi, tugas pembantuan, dan pengeluran lain dari pemerintah yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi, masih menjadi suatu kebutuhan dalam mendorong pertumbuhan produk domestik regional bruto kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Temuan ini sekaligus memperkuat teori pertumbuhan ekonomi Solow, bahwa penambahan tenaga kerja dan modal (investasi swasta dan pemerintah) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

7.4.2. Kerangka Model Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam penelitian ini penyerapan tenaga kerja dibagi dalam dua sektor yaitu sektor pertanian dan non pertanian. Hasil pendugaan model terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan non pertanian dapat dilihat pada Tabel 31.

7.4.2.1. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Hasil pendugaan model persamaan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9675. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas; jumlah angkatan kerja, investasi swasta, dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tahun sebelumnya, secara bersama-sama dapat menjelaskan 96.75 persen, fluktuasi variabel penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tahun berjalan pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 1358.40, dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Hasil Estimasi Model Penyerapan Tenaga Kerja

Peubah	Estimasi	Prob>[T]	Elastisitas		F-hitung	Adj R-Sq
			J. Pendek	J. Panjang		
Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian (PTKSP)						
Intercept	-1167.51	0.4111	-	-	1358.40	0.9675
AKK	0.052376	0.0161	0.1100	2.1587		
INVS	-0.00652	0.0280	-0.0324	-0.6350		
LPTKSP	0.949041	<.0001	-	-		
Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja Non Pertanian (PTKNP)						
Intercept	-624.69	0.6673	-	-	5205.17	0.9913
INVS	0.017133	<.0001	0.0953	0.6122		
AKK	0.050626	0.0011	0.1191	0.7650		
LPTKNP	0.844376	<.0001	-	-		

Hasil estimasi model juga menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tahun sebelumnya, berpengaruh positif dan nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tahun berjalan. Koefisien elastisitas jumlah angkatan kerja adalah 0.110 dalam jangka pendek dan 2.1587 dalam jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila angkatan kerja, meningkat 10 persen, maka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian meningkat sebesar 1.10 persen dalam jangka pendek dan 21.587 persen dalam jangka panjang. Hasil tersebut sesuai dengan teori bahwa apabila angkatan kerja meningkat, maka mereka dapat memilih bekerja pada sektor peratanin dengan upah rendah dibanding mereka menganggur.

Investasi swasta, berpengaruh negatif dan nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila investasi swasta meningkat, maka penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian akan turun. Koefisien elastisitas investasi swasta adalah -0.0324 dalam jangka pendek, dan -0.6350 dalam jangka panjang. Hal tersebut

menunjukkan bahwa apabila investasi swasta meningkat sebesar 10 persen, maka penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian turun sebesar 0.324 persen dalam jangka pendek, dan turun 6.350 persen dalam jangka panjang. Hal ini cukup wajar mengingat para investor umumnya menanamkan modalnya di luar sektor pertanian, sehingga dengan meningkatnya investasi swasta, maka secara otomatis lapangan kerja luar sektor pertanian akan meningkat, yang berdampak pada menurunnya tenaga pada sektor pertanian.

Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tahun sebelumnya, menunjukkan angka positif dan berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja tahun berjalan. Hal ini cukup wajar mengingat tenaga kerja yang telah terbiasa bekerja pada sektor pertanian umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga sangat sulit untuk keluar dari sektor pertanian.

7.4.2.2. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Non Pertanian

Hasil pendugaan model persamaan penyerapan tenaga kerja non pertanian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9913. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas; investasi swasta, jumlah angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja non pertanian tahun sebelumnya, secara bersama-sama dapat menjelaskan 99.13 persen fluktuasi variabel penyerapan tenaga kerja non pertanian pada taraf nyata (α) 0.0001, ditunjukkan oleh F dengan nilai 5205.17, dapat dilihat pada Tabel 31.

Hasil estimasi model juga menunjukkan bahwa, semua variabel memiliki tanda yang sesuai harapan, dan semua variabel berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja non pertanian. Koefisien elastisitas jangka pendek investasi swasta, dan jumlah angkatan kerja, berturut-turut adalah 0.0953, dan 0.1191. Sementara koefisien elastisitas jangka panjang investasi swasta, dan jumlah angkatan kerja, berturut-turut adalah dan 0.6122 dan 0.7650. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi swasta, dan jumlah angkatan kerja, tidak responsip terhadap penyerapan tenaga kerja non pertanian baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Penyerapan tenaga kerja non pertanian tahun sebelumnya, menunjukkan tanda positif dan berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja non

pertanian tahun berjalan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis, mengingat tenaga kerja yang telah terbiasa bekerja pada sektor non pertanian umumnya berusaha untuk bertahan pada sektor dimana mereka bekerja, di samping itu upah pada sektor pertanian umumnya lebih rendah dari pada upah pada sektor non pertanian.

Temuan ini sekaligus membutikan teori Todaro dan Lewis, yang menyatakan bahwa upah pada sektor modern di perkotaan umumnya lebih tinggi dari pada upah pada sektor pertanian di persedesaan. Jadi dengan meningkatkan investasi pada sektor modern membuat penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menurun, sementara penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian di perkotaan meningkat.

7.5. Kerangka Model Kinerja Perekonomian

Dalam penelitian ini kinerja perekonomian dilihat dari produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan inflasi. Oleh karena produk domestik regional bruto, dan penyerapan tenaga kerja telah dibahas dalam blok output, maka pada bagian ini hanya akan dijelaskan tentang kemiskinan dan inflasi. Hasil pendugaan model terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi, kemiskinan dan inflasi dapat dilihat pada Tabel 32.

7.5.1. Kemiskinan

Hasil pendugaan model persamaan kemiskinan menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9693. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas; produk domestik regional bruto, jumlah populasi, pengangguran, dan jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya, secara bersama-sama dapat menjelaskan 96.93 persen fluktuasi variabel kemiskinan pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 1081.79, dapat dilihat pada Tabel 32.

Hasil pendugaan model menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto, memiliki tanda negatif dan sesuai harapan, namun tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan pada kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Koefisien elastisitas produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan,

sebesar -0.0094 dalam jangka pendek dan sebesar -0.1758 dalam jangka panjang. Artinya apabila variabel produk domestik regional bruto, meningkat 10 persen, maka kemiskinan akan turun sebesar 0.094 persen dalam jangka pendek dan 1.758 persen dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi yang ada belum berkualitas. Secara teoritis apabila PDRB meningkat berarti pendapatan masyarakat meningkat, maka kemiskinan cenderung menurun, namun penurunan kemiskinan belum sebanding dengan laju pertumbuhan PDRB.

Tabel 32. Hasil Estimasi Model Kinerja Perekonomian Daerah

Peubah	Estimasi	Prob>[T]	Elastisitas		F-hitung	Adj R-Sq
			J. Pendek	J. Panjang		
Persamaan Kemiskinan (MISK)						
Intercept	580.0407	0.4902	-	-		
PDRB	-0.00024	0.6209	-0.0094	-0.1758		
POP	0.005544	0.4803	0.0409	0.7653	1081.79	0.9693
UNEP	0.03071	0.7853	0.0095	0.1776		
LMISK	0.946619	<.0001	-	-		
Persamaan Inflasi (INFL)						
Intercept	-10.9780	0.8983	-	-		
TPGPD	0.000243	0.3551	0.0639	-		
NEXP	0.000049	0.0200	0.0113	-	158,68	0.8520
INVS	-0.000040	0.1618	-0.0173	-		
SBI	-0.038560	0.4877	-0.0492	-		
INFLK	0.914515	<.0001	1.0989	-		

Jumlah penduduk memiliki tanda positif dan sesuai harapan, namun tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila jumlah penduduk meningkat, maka jumlah penduduk miskin pada kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan meningkat. Koefisien elastisitas jumlah populasi sebesar 0.0409 dalam jangka pendek dan sebesar 0.7653 dalam jangka panjang. Berarti apabila variabel jumlah populasi, meningkat 10 persen, maka kemiskinan akan naik sebesar 0.4094 persen dalam jangka pendek dan 7.653 persen dalam jangka panjang. Temuan ini cukup rasional karena apabila jumlah penduduk meningkat, besar

kemungkinan jumlah penduduk miskin akan meningkat, apalagi kalau pertambahan penduduk tersebut bersumber dari penduduk meskin yang ada.

Pengangguran memiliki tanda positif dan sesuai harapan namun tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pengangguran meningkat, maka kemiskinan akan meningkat. Koefisien elastisitas pengangguran sebesar 0.0095 dalam jangka pendek dan sebesar 0.1776 jangka panjang. Berarti apabila variabel pengangguran meningkat 10 persen, maka kemiskinan akan naik sebesar 0.094 persen dalam jangka pendek dan 1.776 persen dalam jangka panjang. Apabila pengangguran meningkat maka secara teoritis akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Mengingat para pekerja yang tidak terserap pada lapangan kerja, maka tentunya mereka tidak memperoleh pendapatan, sehingga berpontensi untuk menjadi miskin.

Jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya, memiliki tanda positif dan sesuai harapan serta berpengaruh nyata terhadap kemiskinan. Berarti jumlah penduduk miskin tahun berjalan mengikuti pola jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya. Dengan kata lain penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

7.5.2. Inflasi

Hasil pendugaan model persamaan inflasi menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.8520. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas; total pengeluaran pemerintah daerah, ekspor bersih, investasi swasta, suku bunga Bank Indonesia, dan inflasi Kota Kendari secara bersama-sama dapat menjelaskan 85.20 persen fluktuasi variabel inflasi pada taraf nyata (α) 0.0001, yang ditunjukkan oleh F dengan nilai 158.68, dapat dilihat pada Tabel 32.

Ekspor bersih memiliki tanda positif dan berpengaruh nyata terhadap inflasi. Koefisien elastisitas jangka pendek ekspor bersih sebesar 0.0113. Berarti apabila variabel ekspor bersih meningkat 10 persen, maka inflasi akan meningkat sebesar 0.113 persen. Secara teoritis apabila ekspor lebih besar dari

impor, maka ada kecenderungan harga barang akan meningkat mengikuti harga ekspor.

Total pengeluaran pemerintah daerah memiliki tanda positif dan sesuai harapan, namun tidak berpengaruh nyata terhadap inflasi. Koefisien elastisitas total pengeluaran pemerintah daerah sebesar 0.0639 dalam jangka pendek. Berarti apabila variabel total pengeluaran pemerintah daerah, meningkat 10 persen, maka inflasi akan meningkat sebesar 0.639 persen. Secara teoritis apabila pengeluaran meningkat, sementara jumlah barang dan jasa tetap, maka ada kecenderungan harga barang akan meningkat.

Investasi swasta memiliki tanda negatif dan sesuai harapan, namun tidak berpengaruh nyata terdadap inflasi. Koefisien elastisitas jangka pendek konsumsi swasta sebesar -0.0173. Berarti apabila variabel investasi swasta meningkat 10 persen, maka inflasi akan turun sebesar 0.173 persen. Secara teoritis apabila investasi meningkat, maka produksi barang dan jasa akan meningkat. Apabila permintaan tetap, maka ada kecenderungan harga barang dan jasa akan turun.

Suku bunga Bank Indonesia, memiliki tanda negatif dan sesuai harapan, namun tidak berpengaruh nyata terhadap inflasi. Koefisien elastisitas jangka pendek suku bunga Bank Indonesia, sebesar -0.0492. Berarti apabila variabel suku bunga Bank Indonesia meningkat 10 persen, maka inflasi akan turun 0.492 persen. Secara teoritis apabila suku bunga Bank Indonesia naik, maka suku bunga kredit dan suku bunga tabungan akan naik. Karena suku bunga naik, maka masyarakat cenderung meningkatkan tabungannya, sementara para investor akan mengurangi pinjamannya. Akibatnya jumlah jumlah uang beredar berkurang, sehingga inflasi akan turun.

Inflasi Kota Kendari, memiliki tanda positif dan sesuai harapan, dan berpengaruh nyata terhadap inflasi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Koefisien elastisitas jangka pendek inflasi Kota Kendari sebesar 1.0989. Berarti apabila variabel inflasi Kota Kendari meningkat 10 persen, maka inflasi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan meningkat sebesar 10.989 persen. Hal ini cukup rasional, mengingat Kota Kendari merupakan salah satu kota yang cukup dekat dengan kabupaten kota di

Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki transaksi perdagangan antara kota di provinsi Selatan yang cukup lancar, maka apabila terjadi kenaikan harga di kota Kendari, maka akan berdampak pada harga barang yang ada pada kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

7.6. Ringkasan Hasil Estimasi

Untuk memudahkan mengetahui hasil estimasi model, maka pada bagian ini dikemukakan ringkasan hasil estimasi model yang telah dilakukan:

1. Penerimaan daerah dari pajak daerah, dipengaruhi secara positif dan nyata oleh jumlah kamar hotel dan pajak daerah tahun sebelumnya. Sementara total pengeluaran pemerintah daerah dan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap penerimaan pajak daerah. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap penerimaan pajak daerah dalam jangka pendek, tetapi total pengeluaran pemerintah daerah dan jumlah kamar hotel responsif dalam jangka panjang.
2. Penerimaan daerah dari retribusi daerah dipengaruhi secara positif dan nyata oleh total pengeluaran pemerintah daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, sementara PDRB dan jumlah populasi berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap retribusi daerah. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap penerimaan daerah retribusi daerah dalam jangka pendek, tetapi total pengeluaran pemerintah daerah responsif dalam jangka panjang.

3. Penerimaan daerah dari dana alokasi umum dipengaruhi secara nyata dan positif oleh jumlah pegawai negeri sipil, belanja barang dan jasa, belanja lain-lain, dan luas daerah kabupaten kota. Sementara pendapatan asli daerah, berpengaruh nyata namun negatif terhadap penerimaan dana alokasi umum. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap penerimaan dana alokasi umum dalam jangka pendek.
4. Penerimaan daerah dari dana bagi hasil dipengaruhi secara positif dan nyata oleh produk domestik regional bruto dan penerimaan dana bagi hasil tahun sebelumnya. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap

penerimaan daerah dari dana bagi hasil baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

5. Belanja pegawai dipengaruhi secara positif dan nyata oleh jumlah pegawai negeri sipil, pendapatan asli daerah, dan belanja pegawai tahun sebelumnya. Sementara dana alokasi umum, berpengaruh positif namun tidak nyata. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap belanja pegawai baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
6. Belanja barang dan jasa dipengaruhi secara positif dan nyata oleh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan belanja barang dan jasa tahun sebelumnya. Sementara dana bagi hasil berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap belanja barang dan jasa. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap belanja barang dan jasa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
7. Belanja modal sektor pertanian dipengaruhi secara positif dan nyata oleh PDRB sektor pertanian dan belanja modal sektor pertanian tahun sebelumnya. Sementara dana alokasi khusus dan dana alokasi umum berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap belanja modal sektor pertanian. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap belanja modal sektor pertanian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
8. Belanja modal sektor lainnya dipengaruhi secara positif dan nyata oleh dana bagi hasil, dana alokasi khusus, serta belanja modal sektor pertanian tahun sebelumnya. Semua variabel penjalas tidak responsif terhadap belanja modal sektor lainnya dalam jangka pendek, tetapi dana alokasi khusus cukup responsif dalam jangka panjang.
9. Belanja lain-lain pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan nyata oleh belanja lain-lain pemerintah tahun sebelumnya. Sementara dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap belanja lain-lain pemerintah daerah. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap belanja lain-lain pemerintah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
10. Konsumsi swasta dipengaruhi secara positif dan nyata oleh produk domestik regional bruto, dan konsumsi swasta tahun sebelumnya.

Sementara belanja barang dan jasa, belanja pegawai, inflasi, berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap konsumsi swasta tahun berjalan. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap konsumsi swasta baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

11. Investasi swasta, dipengaruhi secara nyata dan positif oleh konsumsi swasta dan investasi swasta tahun sebelumnya. Sementara belanja modal berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap investasi swasta. Disisi lain pendapatan asli daerah memiliki tanda negatif dan berpengaruh nyata terhadap investasi swasta. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap investasi swasta dalam jangka pendek, tetapi pendapatan asli daerah dan konsumsi responsif dalam jangka panjang.
12. Ekspor daerah dipengaruhi secara nyata dan positif oleh produk domestik regional bruto dan ekspor daerah tahun sebelumnya. Sementara inflasi berpengaruh positif namun tidak nyata. Di sisi lain nilai tukar rupiah berpengaruh negatif dan nyata terhadap ekspor daerah. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap ekspor daerah dalam jangka pendek, tetapi nilai tukar rupiah dan produk domestik regional bruto responsif dalam jangka panjang.
13. Impor daerah hanya dipengaruhi secara positif dan nyata oleh konsumsi swasta dan impor daerah tahun sebelumnya. Sementara produk domestik regional bruto, tidak berpengaruh nyata terhadap impor daerah. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap impor daerah baik dalam jangka pendek, maupun dalam jangka panjang.
14. Produk domestik regional bruto sektor pertanian hanya dipengaruhi secara nyata oleh produk domestik regional bruto sektor pertanian tahun sebelumnya. Sementara penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, belanja modal sektor pertanian, investasi, konsumsi, dan dana dekonsentrasi tugas pembantuan tidak berpengaruh nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor pertanian. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap produk domestik regional bruto sektor pertanian baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

15. Produk domestik regional bruto sektor pertambangan dipengaruhi secara positif dan nyata oleh impor bersih dan PDRB sektor pertambangan tahun sebelumnya. Sementara penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dan dana dekonsentrasi tugas pembantuan berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap PDRB sektor pertambangan tahun berjalan. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap PDRB sektor pertambangan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
16. Produk domestik regional bruto sektor industri dipengaruhi secara positif dan nyata oleh investasi swasta dan dana dekonsentrasi tugas pembantuan. Sementara penyerapan tenaga kerja non pertanian, upah minimum provinsi, belanja modal sektor lainnya, dan inflasi berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap PDRB sektor industri. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap PDRB sektor industri dalam jangka pendek.
17. Produk domestik regional bruto sektor listrik gas dan air dipengaruhi secara positif dan nyata oleh investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya, serta PDRB sektor listrik gas dan air tahun sebelumnya. Sementara penyerapan tenaga kerja non pertanian berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap PDRB sektor listrik gas dan air. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap PDRB sektor listrik gas dan air baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
18. Produk domestik regional bruto sektor bangunan dipengaruhi secara positif dan nyata oleh investasi swasta dan dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya. Sementara penyerapan tenaga kerja non pertanian dan belanja modal sektor lainnya berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap PDRB sektor bangunan. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap PDRB sektor bangunan dalam jangka pendek.
19. Produk domestik regional bruto sektor perdagangan, dipengaruhi secara positif dan nyata oleh penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya. Sementara variabel inflasi berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap PDRB

sektor perdagangan. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap PDRB sektor perdagangan.

20. Produk domestik regional bruto sektor transportasi dan komunikasi dipengaruhi secara positif dan nyata oleh penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya. Sementara variabel inflasi berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap PDRB sektor transportasi dan komunikasi. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap PDRB sektor transportasi dan komunikasi dalam jangka pendek.
21. Produk domestik regional bruto sektor keuangan dipengaruhi secara positif dan nyata oleh penyerapan tenaga kerja non pertanian, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya. Sementara variabel inflasi berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap PDRB sektor keuangan. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap PDRB sektor keuangan dalam jangka pendek.
22. Produk domestik regional bruto sektor jasa dipengaruhi secara positif dan nyata oleh penyerapan tenaga kerja non pertanian, konsumsi swasta, investasi swasta, dana dekonsentrasi tugas pembantuan dan lainnya. Sementara variabel inflasi berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap PDRB sektor jasa. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap PDRB sektor jasa dalam jangka pendek.
23. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dipengaruhi secara positif dan nyata oleh jumlah angkatan kerja, investasi swasta, dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tahun sebelumnya**.** Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dalam jangka pendek, tetapi jumlah angkatan kerja responsif dalam jangka panjang.
24. Penyerapan tenaga kerja non pertanian dipengaruhi secara positif dan nyata oleh jumlah angkatan kerja, investasi swasta, dan penyerapan tenaga kerja non pertanian tahun sebelumnya**.** Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap penyerapan tenaga kerja non pertanian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

25. Kemiskinan hanya dipengaruhi secara nyata dan positif oleh jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya. Sementara jumlah populasi dan pengangguran memiliki tanda positif namun tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan. Disisi lain produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan tidak nyata terhadap kemiskinan. Semua variabel penjelas tidak responsif terhadap kemiskinan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
26. Inflasi dipengaruhi secara positif dan nyata oleh inflasi Kota Kendari dan ekspor bersih. Variabel total pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap inflasi. Sementara tingkat suku bunga Bank Indonesia dan investasi swasta berpengaruh negatif dan tidak nyata terhadap inflasi dalam jangka pendek. Variabel inflasi Kota Kendari responsif terhadap inflasi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara variabel penjelas lainnya tidak responsif terhadap inflasi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka pendek.

VIII. SIMULASI DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

Untuk melihat dampak kebijakan fiskal terhadap perekomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilakukan simulasi kebijakan. Simulasi kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis dampak dari berbagai alternatif kebijakan atau skenario kebijakan dengan cara mengubah variabel atau instrumen kebijakan (*policy instrument*). Dalam penelitian ini simulasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan dari variabel fiskal daerah terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam simulasi ini, kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu kabupaten yang berbasis pertanian dan kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Kelompok pertama yaitu kabupaten kota yang berbasis pertanian terdiri atas 17 kabupaten yaitu; Kabupaten Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, dan Luwu Utara. Hal tersebut didasarkan karena ke 17 kabupaten ini memiliki share produk domestik regional bruto sektor pertanian lebih dari 35 persen dari total produk domestik regional brutonya.

Kelompok kedua yaitu kabupaten kota yang berbasis non pertanian terdiri atas enam kabupaten kota yaitu; Kabupaten Luwu Timur, Pangka Je'ne Kepulauan, dan Maros, serta Kota Makassar, Pare-pare, dan Palopo. Hal tersebut didasarkan karena enam kabupaten kota ini memiliki share produk domestik regional bruto sektor pertanian kurang dari 35 persen, sehingga penulis kategorikan ke dalam kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

8.1. Validasi Model

Validasi model digunakan untuk mengetahui apakah model cukup valid digunakan untuk simulasi alternatif kebijakan atau tidak. Hal ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana model tersebut dapat mewakili dunia nyata. Dalam model ini indikator validasi statistik yang digunakan adalah *R Square* (R^2) dan *Theils Inequality Coeficient* (U). Sitepu dan Siregar

(2006) mengatakan suatu model dikatakan baik daya prediksinya apabila *Theils Inequality Coeficient* (U) mendekati nilai nol.

Hasil validasi kelompok pertama (kabupaten yang berbasis pertanian) disajikan pada Tabel 33.

Tabel 33. Hasil Validasi Model Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian Kabupaten Kota Berbasis Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Nama Peubah	Aktual	Prediksi	RMS% Error	R2	Coef U
1	Pajak daerah	1 529.1	1 687.0	69.5168	0.5455	0.2456
2	Retribusi daerah	4 060.8	4 198.5	27.5383	0.7494	0.1290
3	Dana alokasi umum	138 493	138 329	10.1743	0.8458	0.0470
4	Dana bagi hasil	15 424.4	15 532.7	23.2050	0.5683	0.1182
5	Belanja pegawai	97 987.9	98 262.3	11.4952	0.9076	0.0479
6	Belanja barang dan jasa	26 134.9	26 174.1	24.6588	0.6109	0.1147
7	Belanja modal sekt pertanian	8 169.7	7 954.0	42.9519	0.5401	0.1337
8	Belanja modal sektor lainnya	46 264.2	47 987.6	49.1557	0.5687	0.1428
9	Belanja lain-lain pemerintah	18 126.0	18 226.3	56.3095	0.6977	0.1711
10	Konsumsi swasta	742 060	739 251	6.1028	0.9806	0.0281
11	Investasi swasta	191 920	197 392	30.8723	0.7736	0.1159
12	Ekspor daerah	282 061	292 141	47.8555	0.7695	0.1234
13	Impor daerah	204 546	211 427	29.3614	0.5509	0.1265
14	PDRB sektor pertanian	650 834	587 651	9.9509	0.9476	0.0532
15	PDRB sektor pertambangan	13 194.8	13 629.2	94.7100	0.9118	0.1230
16	PDRB sektor industri	73 727.9	130 725	206.9	0.6498	0.3109
17	PDRB sektor listrik gas dan air	7 793.2	7 938.6	27.8601	0.9087	0.0793
18	PDRB sektor bangunan	56 612.3	53 797.7	41.9884	0.6074	0.2008
19	PDRB sektor perdagangan	140 470	138 089	37.4633	0.6786	0.1606
20	PDRB sektor transportasi	48 710.7	58 761.7	82.4415	0.5536	0.2216
21	PDRB sektor keuangan	599 98.1	62 230.3	39.7161	0.5371	0.1417
22	PDRB sektor jasa-jasa	166 301	152 700	23.2524	0.7085	0.1057
23	Penyerapan T. kerja pertanian	82 946.9	82 596.2	9.6352	0.9507	0.0473
24	Penyerapan T. kerja non pertanian	44 925.2	45 600.5	20.1271	0.9170	0.0765
25	Pengangguran	11 556.2	11 262.4	91.6299	0.6220	0.3537
26	Jumlah penduduk miskin	47 746.9	47 775.0	10.3121	0.9720	0.0434
27	Inflasi daerah	7.715	7.676	38.4976	0.8600	0.0719
28	Pendapatan asli daerah	9 462.4	9 758.0	13.3676	0.9041	0.0703
29	Belanja modal	54 433.9	55 941.6	38.9905	0.5548	0.1278
30	Total penerimaan daerah	192 158	192 398	7.1205	0.9227	0.0331
31	Total pengeluaran pemerintah daerah	196 683	198 604	9.7411	0.8822	0.0451
32	Total pengeluaran Pemerintah	206 355	208 276	9.1577	0.8853	0.0430
33	Net ekspor	77 514.7	80 713.9	4559.2	0.7182	0.2124
34	Produk domestik regional bruto	1 217 642	1 205 522	11.3742	0.9487	0.0486
35	Penyerapan tenaga kerja	127 872	128 197	7.7109	0.9673	0.0371
36	Pendapatan perkapita	3.8090	3.6986	11.3742	0.8391	0.0543
37	Pendapatan Petani	8.2271	7.4011	12.9999	0.8597	0.0709

Tabel 33 menunjukkan bahwa secara umum hasil validasi menunjukkan bahwa model yang dibangun cukup valid untuk digunakan dalam simulasi kebijakan. Berdasarkan indikator R Square, semua parameter dalam model

menujukkan nilai R Square yang cukup tinggi, semua di atas 0.50, sehingga model dapat dengan baik menjelaskan prilaku besarannya. Sementara berdasarkan kriteria *Theils Inequality Coeficient* (U), semua parameter berada di bawah 0.20.

Indikator validasi statistik yang sama, digunakan untuk kelompok kedua (kabupaten yang berbasis non pertanian) adalah *R Square* (R^2) dan *Theils Inequality Coeficient* (U), disajikan pafa Tebel 34.

Tabel 34. Hasil Validasi Model Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian Kabupaten Kota Berbasis Non Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Nama Peubah	Aktual	Prediksi	RMS% Error	R^2	Coef U
1	Pajak daerah	11861.1	11377.8	30.6196	0.9595	0.0806
2	Retribusi daerah	7454.1	7106.1	25.9361	0.9411	0.0780
3	Dana alokasi umum	141943	141598	11.5595	0.9512	0.0468
4	Dana bagi hasil	25962.5	25239.1	26.4178	0.8962	0.0954
5	Belanja pegawai	110746	109872	11.9670	0.9673	0.0515
6	Belanja barang dan jasa	38251.5	38946.1	26.9100	0.9576	0.0657
7	Belanja modal sekt pertanian	6336.9	6498.6	56.5222	0.4269	0.1409
8	Belanja modal sektor lainnya	57497.7	52965.7	28.0406	0.6968	0.1700
9	Belanja lain-lain pemerintah	22892.8	22399.6	65.4075	0.5694	0.1852
10	Konsumsi swasta	1984914	1991362	8.8636	0.9962	0.0241
11	Investasi swasta	856029	854737	35.1115	0.9753	0.0675
12	Ekspor daerah	2693621	2659788	35.5084	0.9928	0.0335
13	Impor daerah	2130652	2116980	54.4711	0.9931	0.0358
14	PDRB sektor pertanian	315528	286944	10.9966	0.9378	0.0577
15	PDRB sektor pertambangan	684297	682965	751.4	0.9958	0.0288
16	PDRB sektor industri	812257	626019	134.5	0.7885	0.1879
17	PDRB sektor listrik gas dan air	51807.6	51874.0	23.2331	0.9955	0.0293
18	PDRB sektor bangunan	220310	235254	262.9	0.9790	0.0631
19	PDRB sektor perdagangan	745588	782713	147.7	0.9874	0.0492
20	PDRB sektor transportasi	419762	420449	108.8	0.9837	0.0560
21	PDRB sektor keuangan	288534	290560	45.6795	0.9886	0.0459
22	PDRB sektor jasa-jasa	353240	389285	100.6	0.9831	0.0533
23	Penyerapan T. kerja pertanian	34608.3	35346.2	24.4336	0.9681	0.0468
24	Penyerapan T. kerja non pertanian	117761	116593	12.0081	0.9960	0.0252
25	Pengangguran	23483.7	23913.9	44.7027	0.8600	0.1349
26	Jumlah penduduk miskin	46370.1	46187.6	9.1900	0.9516	0.0503
27	Inflasi daerah	7.813	7.686	17.2956	0.8333	0.0802
28	Pendapatan asli daerah	23498.2	22666.9	12.2182	0.9722	0.0566
29	Belanja modal	63834.6	59464.3	24.7040	0.7049	0.1586
30	Total penerimaan daerah	230921	229022	6.3584	0.9857	0.0265
31	Total pengeluaran pemerintah daerah	235725	230682	11.1434	0.9475	0.0532
32	Total pengeluaran Pemerintah	480964	475921	10.4142	0.9978	0.0183
33	Ekspor bersih	562969	542809	214.0	0.9034	0.1309
34	Produk domestik regional bruto	3891325	3766064	23.3671	0.9766	0.0566
35	Penyerapan tenaga kerja	152369	151939	6.6575	0.9959	0.0223
36	Pendapatan perkapita	8.7583	8.4362	23.3671	0.8867	0.0882
37	Pendapatan Petani	11.9998	10.2884	24.4822	0.8262	0.1178

Tabel 34 menunjukkan bahwa secara umum hasil validasi model menunjukkan bahwa model cukup valid untuk digunakan dalam simulasi kebijakan. Berdasarkan indikator R Square yang cukup tinggi, hanya satu parameter dalam model yang miliki R Square di bawah 0.50 yaitu belanja modal sektor pertanian 0.42, sehingga model dapat dengan baik menjelaskan prilaku besarannya. Sementara berdasarkan kriteria *Theils Inequality Coeficient* (U), semua persamaan berada di bawah 0.20.

7.2. Simulasi Kebijakan

Dalam tulisan ini, simulasi kebijakan dilakukan berdasarkan pertimbangan ekonomi, sebagaimana isu-isu kebijakan fiskal yang banyak diperbincangkan dikalangan para ekonom dewasa ini. Karena itu simulasi kebijakan yang dilakukan dalam penelitian ini diarahkan untuk meningkatkan belanja modal, dan realokasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk menghindari terjadinya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Simulasi kebijakan yang dilakukan dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu; (1) simulasi kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan variabel pendapatan asli daerah, selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal, terdiri atas 3 simulasi, (2) simulasi kebijakan dengan meningkatkan variabel transfer dana dari pemerintah pusat untuk meningkatkan belanja modal, terdiri atas 2 simulasi, dan (3) simulasi kebijakan realokasi belanja pemerintah daerah terdiri atas 1 simulasi, dan (4) simulasi kebijakan non fiskal berupa peningaktan investasi swasta terdiri atas 1 simulasi.

Adapun simulasi kebijakan yang terpilih adalah:

1. Meningkatkan penerimaan dari pajak daerah 10 persen, dan meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lainnya masing-masing sebesar 2.5 persen.
2. Meningkatkan penerimaan dari retribusi daerah 10 persen, dan meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lainnya masing-masing sebesar 2.5 persen.
3. Meningkatkan pajak dan retribusi daerah sebesar 10 persen dan menaikan belanja modal sektor pertanian dan sektor lainnya masing-masing 5 persen.

4. Meningkatkan dana alokasi umum 10 persen, dan meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lain 20 persen
5. Meningkatkan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebesar 10 persen, dan meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lain 10 persen.
6. Menurunkan belanja lain-lain 20 persen, belanja barang dan jasa 20 persen, kemudian meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lain 25 persen.
7. Meningkatkan investasi swasta sebesar 10 persen.

Oleh karena beberapa variabel yang diguncang (*shock)* dalam simulasi ini merupakan variabel endogen seperti; pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal sektor pertanian, belanja modal sektor lainnya, belanja barang dan jasa, belanja lain-lain, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan investasi swasta, maka proses simulasi dilakukan dengan cara mengubah variabel tersebut menjadi variabel eksogen pada saat akan dilakukan simulasi. Proses itu dilakukan dengan cara mengeluarkan persamaan tersebut dalam model dengan memberi tanda /*...*/ seperti terlihat pada lampiran 8.

8.2.1. Simulasi Kebijakan Pertama

Dalam era otonomi daerah dewasa ini pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah. Salah satu tolok ukur kemandirian pemerintah daerah adalah kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan asli daerah. Dalam era otonomi daerah dewasa ini diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaannya. Sumber pendapatan asli daerah yang kontribusinya paling besar pada pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Oleh karena itu simulasi pertama yang dilakukan yaitu, apabila pemerintah daerah menggenjot penerimaan pajaknya, sehingga pajak dapat ditingkatkan sampai 10 persen, dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lainnya masing-masing sebesar 2.5 persen. Dampaknya terhadap perekonomian daerah, dapat dilihat pada Tabel 35.

Dampak simulasi ini terhadap permintaan agregat adalah konsumsi masyarakat turun kurang dari 0.01 persen, dan total pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 0.13 persen. Selanjutnya terjadi penurunan dalam investasi swasta sebesar 0.01 persen, ekspor daerah turun 0.02 persen, dan impor daerah turun kurang dari 0.01 persen, untuk kabupaten yang berbasis pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian terjadi kenaikan konsumsi masyarakat kurang dari 0.01 persen, dan total pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 2.99 persen. Akan tetapi disisi lain terjadi penurunan dalam investasi swasta sebesar 0.63 persen, dan ekspor daerah turun 0.03 persen, serta impor daerah juga turun sebesar 0.05 persen.

Tabel 35. Dampak Kenaikan Pajak Daerah Sebesar 10 Persen dan Kenaikan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lainnya Masing-masing 2.5 Persen

Nama Peubah	Nilai Dasar		Perubahan		Perubahan (%)	
	1	2	1	2	1	2
Konsumsi	739251	1990330	-12	8	>-0.01	<0.01
Investasi swasta	197392	818911	-23	-5391	-0.01	-0.63
Ekspor daerah	292141	2651089	-48	-818	-0.02	-0.03
Impor daerah	211427	2109499	-5	-1126	>-0.01	-0.05
PDRB sektor pertanian	587651	287177	33	34	0.01	0.01
PDRB sektor pertambangan	13629.2	682730	-2.2	-12	-0.02	>-0.01
PDRB sektor industri	130725	617873	-281	-1150	-0.21	-0.18
PDRB sektor listrik gas dan air	7938.6	51367.1	-0.3	-76.3	>-0.01	-0.15
PDRB sektor bangunan	53797.7	227866	-4.9	-1112	-0.01	-0.47
PDRB sektor perdagangan	138089	760797	-15	-3295	-0.01	-0.42
PDRB sektor transportasi	58761.7	408447	-8.2	-1798	-0.01	-0.43
PDRB sektor keuangan	62230.3	283110	-5	-1117	-0.01	-0.38
PDRB sektor jasa-jasa	152700	386814	-2	-361	>-0.01	-0.09
Penyerapan T.Kerja sek. pertanian	82596.2	35579.7	0.2	35.1	<0.01	0.10
Penyerapan T. kerja non pertanian	45600.5	115979	-0.4	-93	>-0.01	-0.08
Pengangguran	11262.4	24294.2	0.3	57.3	<0.01	0.24
Jumlah penduduk miskin	47775	46190.2	0.1	0.2	<0.01	<0.01
Inflasi	7.676	7.730	0	0.019	0.00	0.25
Ekspor bersih	80713.9	541590	-42.2	306	-0.05	0.06
Produk domestik regional bruto	1205522	3706182	-286	-6587	-0.02	-0.17
Total peng. pemerintah daerah	198604	230682	250	6898	0.13	2.99
Penyerapan tenaga kerja	128197	151559	0	-57	0.00	-0.04
Pendapatan perkapita	3.6986	8.414	-0.0005	-0.0128	-0.01	-0.15
Pendapatan rata-rata petani	7.4011	10.164	-0.0005	-0.0325	-0.01	-0.32

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pajak daerah sebesar 10 persen yang selanjutnya digunakan untuk belanja modal sektor pertanian dan sektor lainnya berdampak lebih besar pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian dibanding dengan kabupaten yang berbasis pertanian. Pada sisi investasi

swasta terlihat penurunan cukup besar yaitu 0.63 persen pada kabupaten yang berbasis non pertanian dibanding kabupaten yang berbasis pertanian hanya 0.01 persen.

Apabila dilihat dari sisi produk domestik regional bruto berdasarkan sektor, maka terjadi kenaikan pada PDRB sektor pertanian 0.01 persen. Sementara PDRB sektor pertambangan, industri, listrik gas air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan, dan jasa-jasa turun berturut-turut 0.02 persen, 0.21 persen, kurang dari 0.01 persen, 0.01 persen, 0.01, persen, 0.01 persen, dan kurang dari 0.01 persen. Jadi dampak secara keseluruhan, yaitu PDRB turun sebesar 0.02 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian terjadi kenaikan pada PDRB sektor pertanian 0.01 persen. Sementara PDRB pada sektor pertambangan, industri, listrik-gas-air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan, dan jasa-jasa turun berturut-turut 0.01 persen, 0.18 persen, 0.15 persen, 0.47 persen, kurang dari 0.42 persen, 0.43 persen, 0.38, persen, 0.09 persen. Jadi dampak secara keseluruhan yaitu PDRB turun sebesar 0.17 persen.

Kondisi pada permintaan agregate juga terjadi pada PDRB dimana peningkatan pajak daerah sebesar 10 persen lebih berdampak pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian, dimana total PDRB turun sebesar 0.17 persen dibanding dengan kabupaten yang berbasis pertanian yang hanya turun 0.02 persen.

Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, maka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian meningkat 0.01 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian, dan 0.10 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Sebaliknya penyerapan tenaga kerja non pertanian turun kurang dari 0.01 persen, untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan turun 0.08 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Selanjutnya total penyerapan tenaga kerja tetap untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan turun 0.04 persen dan untuk kabupaten kota berbasis non pertanian. Akibatnya pengangguran meningkat pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian yaitu 0.24 persen dibanding dengan kabupaten yang berbasis pertanian hanya meningkat kurang dari 0.01 persen. Sementara apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin, maka terjadi peningkatan

jumlah penduduk miskin kurang dari 0.01 persen baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Oleh karena PDRB turun, maka pendapatan perkapita juga turun masing-masing sebesar 0.01 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.15 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Di samping pendapatan perkapita, pendapatan petani juga turun, disebabkan karena meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun kabupaten kota yang berbasis non pertanian masing-masing sebesar 0.01 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.32 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pajak daerah sebesar 10 persen akan berdampak lebih buruk pada kinerja perekonomian kabupaten kota yang berbasis non pertanian, dibanding kabupaten yang berbasis pertanian. Hal ini cukup wajar mengingat sektor yang dikenakan pajak umumnya sektor non pertanian, sehingga dampaknya lebih besar pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Temuan ini juga menunjukkan bahwa peningkatan pajak daerah dapat menimbukan biaya ekonomi tinggi (*high cost economic*) yang berdampak pada turunnya kinerja perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan baik yang berbasis pertanian maupun non pertanian.

8.2.2. Simulasi Kebijakan Kedua

Simulasi kebijakan kedua yang dilakukan adalah pemerintah daerah meningkatkan intensitas dalam melakukan pemungutan retribusi daerah, sehingga retribusi daerah dapat ditingkatkan sampai 10 persen, dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lainnya masing-masing sebesar 2.5 persen. Dampaknya terhadap perekonomian daerah dapat dilihat pada Tabel 36.

Dampak simulasi ini terhadap permintaan agregat adalah konsumsi masyarakat turun 0.01 persen, total pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 0.05 persen, investasi swasta turun sebesar 0.61 persen, ekspor daerah turun 0.12 persen, serta impor daerah juga turun 0.12 persen, untuk kabupaten yang berbasis pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian

terjadi kenaikan konsumsi masyarakat 0.01 persen, total pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 2.85 persen, investasi swasta turun sebesar 0.33 persen, ekspor daerah turun 0.01 persen, serta impor daerah juga turun sebesar 0.03 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan retribusi daerah berdampak lebih besar pada kabupaten yang berbasis pertanian dibanding dengan kabupaten yang berbasis non pertanian. Investasi swasta terlihat mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 0.61persen pada kabupaten yang berbasis pertanian dibanding kabupaten yang berbasis non pertanian yang hanya sebesar 0.33 persen.

Tabel 36. Dampak Kenaikan Retribusi Daerah 10 Persen, dan Peningkatan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lainnya Masing-masing 2.5 Persen

Nama Peubah	Nilai Dasar		Perubahan		Perubahan (%)	
	1	2	1	2	1	2
Konsumsi	739251	1990330	-54	100	-0,01	0,01
Investasi swasta	197392	818911	-1204	-2819	-0,61	-0,33
Ekspor daerah	292141	2651089	-359	-140	-0,12	-0,01
Impor daerah	211427	2109499	-252	-588	-0,12	-0,03
PDRB sektor pertanian	587651	287177	40	19	0,01	0,01
PDRB sektor pertambangan	13629.2	682730	-11,2	8	-0,08	>0,01
PDRB sektor industri	130725	617873	-669	-1995	-0,51	-0,32
PDRB sektor listrik gas dan air	7938.6	51367.1	-17	-39,9	-0,21	-0,08
PDRB sektor bangunan	53797.7	227866	-248,3	-582	-0,46	-0,25
PDRB sektor perdagangan	138089	760797	-737	-1721	-0,53	-0,22
PDRB sektor transportasi	58761.7	408447	-404,1	-935	-0,69	-0,22
PDRB sektor keuangan	62230.3	283110	-250,7	-581	-0,40	-0,20
PDRB sektor jasa-jasa	152700	386814	-84	-182	-0,06	-0,05
Penyerapan T.Kerja sek. pertanian	82596.2	35579.7	7,9	18,3	0,01	0,05
Penyerapan T. kerja non pertanian	45600.5	115979	-20,6	-49	-0,05	-0,04
Pengangguran	11262.4	24294.2	12,8	30	0,11	0,13
Jumlah penduduk miskin	47775	46190.2	0,2	0,5	<0,01	<0,01
Inflasi	7.676	7.730	0,001	0,017	0,01	0,22
Ekspor bersih	80713.9	541590	-107,2	448	-0,13	0,08
Produk domestik regional bruto	1205522	3706182	-2381	-2021	-0,20	-0,05
Total peng. pemerintah daerah	198604	230682	96	6574	0,05	2,85
Penyerapan tenaga kerja	128197	151559	-13	-30	-0,01	-0,02
Pendapatan perkapita	3.6986	8.414	-0,0009	-0,0019	-0,02	-0,02
Pendapatan rata-rata petani	7.4011	10.164	-0,0003	-0,0291	>-0,01	-0,28

Apabila dilihat dari sisi produk domestik regional bruto berdasarkan sektor, maka terjadi peningkatan pada PDRB sektor pertanian sebesar 0.01 persen. Sementara PDRB pada sektor pertambangan, industri, listrik-gas-air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan, dan jasa-jasa berturut-turut mengalami penurunan sebesar 0.08 persen, 0.51 persen, 0.21 persen, 0.46 persen, 0.53 persen, 0.69, persen, 0.40 persen, dan kurang dari 0.06

persen. Jadi dampak secara keseluruhan terhadap PDRB turun sebesar 0.20 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian terjadi kenaikan pada PDRB sektor pertanian dan pertambangan masing-masing sebesar 0.01 persen dan kurang dari 0.01 persen. Sementara PDRB pada sektor industri, listrik-gas-air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan, dan jasa-jasa berturut-turut mengalami penurunan masing-masing sebesar 0.32 persen, 0.08 persen, 0.25 persen, 0.22 persen, 0.22 persen, 0.20 persen, dan 0.05 persen. Jadi dampak secara keseluruhan terhadap PDRB turun sebesar 0.05 persen.

Kondisi pada permintaan agregate juga terjadi pada pertumbuhan PDRB dimana peningkatan retribusi daerah sebesar 10 persen lebih berdampak pada kabupaten kota yang berbasis pertanian, dimana total PDRB turun sebesar 0.20 persen dibanding dengan kabupaten yang berbasis non pertanian yang hanya turun 0.05 persen.

Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, maka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian naik 0.01 pesen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.05 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian, namun sebaliknya penyerapan tenaga kerja non pertanian turun sebesar 0.05 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian, dan turun 0.04 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Total penyerapan tenaga kerja turun masing-masing 0.01 persen baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.02 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Akibatnya pengangguran naik 0.11 persen untuk kabupaten kota yang berbasis pertanian dan 0.13 persen pada dengan kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Sementara apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin kurang dari 0.01 persen baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kapupaten kota yang berbasis non pertanian.

Oleh karena PDRB turun, maka pendapatan perkapita juga ikut turun sebesar 0.02 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Di samping pendapatan perkapita, pendapatan petani juga turun disebabkan karena naiknya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun

kabupaten kota yang berbasis non pertanian masing-masing sebesar kurang dari 0.01 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.28 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Uraian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan retribusi daerah sebesar 10 persen akan berdampak lebih buruk pada kinerja perekonomian kabupaten berbasis pertanian dibanding kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Memperhatikan hasil simulasi dua terlihat bahwa apabila pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, meningkatkan itensitasnya dalam melakukan pemungutan retribusi daerah, memberi dampak lebih buruk bagi perekonomian, ditandai dengan turunnya PDRB, naiknya angka pengangguran dan kemiskinan baik pada kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Oleh karena itu simulasi kedua ini tidak ini layak dipertimbangan untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

8.2.3. Simulasi Kebijakan Ketiga

Simulasi ketiga yang dilakukan adalah gabungan dari simulasi satu dan dua yaitu pemerintah daerah menggenjot penerimaan pajak dan retribusi daerah secara bersamaan sehingga dapat ditingkatkan sampai 10 persen, dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lain masing-masing 5 persen, maka dampaknya terhadap perekonomian daerah, dapat dilihat pada Tabel 37.

Dampak simulasi ini terhadap permintaan agregat adalah konsumsi masyarakat turun kurang dari 0.01 persen, dan total pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 0.65 persen. Selanjutnya investasi swasta turun sebesar 0.37 persen, ekspor daerah turun 0.04 persen, serta impor daerah juga turun 0.07 persen, untuk kabupaten yang berbasis pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian konsumsi masyarakat turun kurang dari 0.01 persen, total pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 3.93 persen. Akan tetapi disisi lain terjadi penurunan dalam investasi swasta sebesar 1.10 persen, dan ekspor daerah turun 0.06 persen, serta impor daerah juga turun sebesar 0.09 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pajak dan retribusi daerah masing-masing 10 persen, berdampak lebih besar pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian dibanding dengan kabupaten yang berbasis pertanian. Pada sisi investasi swasta terlihat penurunan yang besar yaitu 1.10 persen pada kabupaten yang berbasis non pertanian dibanding kabupaten yang berbasis pertanian hanya 0.37 persen.

Tabel 37. Dampak Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah Sebesar 10 Persen dan Kenaikan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lainnya Masing-masing 5 Persen

Nama Peubah	Nilai Dasar		Perubahan		Perubahan (%)	
	1	2	1	2	1	2
Konsumsi	739251	1990330	-94	-83	-0.01	>-0.01
Investasi swasta	197392	818911	-730	-9367	-0.37	-1.10
Ekspor daerah	292141	2651089	-109	-1716	-0.04	-0.06
Impor daerah	211427	2109499	-153	-1956	-0.07	-0.09
PDRB sektor pertanian	587651	287177	54	72	0.01	0.03
PDRB sektor pertambangan	13629.2	682730	-1.5	-34	-0.01	-0.01
PDRB sektor industri	130725	617873	-54	-549	-0.04	-0.09
PDRB sektor listrik gas dan air	7938.6	51367.1	-10.3	-132.5	-0.13	-0.26
PDRB sektor bangunan	53797.7	227866	-150.6	-1932	-0.28	-0.82
PDRB sektor perdagangan	138089	760797	-446	-5726	-0.32	-0.73
PDRB sektor transportasi	58761.7	408447	-242.9	-3128	-0.41	-0.74
PDRB sektor keuangan	62230.3	283110	-150.7	-1943	-0.24	-0.67
PDRB sektor jasa-jasa	152700	386814	-49	-633	-0.03	-0.16
Penyerapan T.Kerja sek. pertanian	82596.2	35579.7	4.8	61	0.01	0.17
Penyerapan T. kerja non pertanian	45600.5	115979	-12.5	-161	-0.03	-0.14
Pengangguran	11262.4	24294.2	7.8	99.5	0.07	0.42
Jumlah penduduk miskin	47775	46190.2	2	3	<0.01	<0.01
Inflasi	7.676	7.730	0.0042	0.026	0.05	0.34
Ekspor bersih	80713.9	541590	43.8	239	0.05	0.04
Produk domestik regional bruto	1205522	3706182	-942	-12910	-0.08	-0.34
Total peng. pemerintah daerah	198604	230682	1358	9062	0.68	3.93
Penyerapan tenaga kerja	128197	151559	-8	-100	-0.01	-0.07
Pendapatan perkapita	3.6986	8.414	-0.0037	-0.0149	-0.10	-0.18
Pendapatan rata-rata petani	7.4011	10.164	-0.0005	-0.0542	-0.01	-0.53

Apabila dilihat dari sisi produk domestik regional bruto berdasarkan sektor, maka terjadi kenaikan pada PDRB sektor pertanian 0.01 persen. Sementara PDRB pada sektor pertambangan, industri, listrik-gas-air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan, dan jasa-jasa turun berturut-turut 0.01 persen, 0.04 persen, 0.13 persen, kurang dari 0.28 persen, 0.32 persen, 0.41, persen, 0.24 persen, dan kurang dari 0.03 persen. Jadi dampak secara keseluruhan terhadap PDRB turun sebesar 0.08 persen untuk kabupaten yang

berbasis pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian terjadi kenaikan pada PDRB sektor pertanian 0.03 persen. Selanjutnya PDRB pada sektor pertambangan, industri, listrik-gas-air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan, dan jasa-jasa turun berturut-turut sebesar 0.01 persen, 0.09 persen, 0.26 persen, 0.82 persen, 0.73 persen, 0.74 persen, 0.67 persen, dan 0.16 persen. Jadi dampak secara keseluruhan terhadap PDRB turun sebesar 0.34 persen.

Kondisi pada permintaan agregate juga terjadi pada PDRB dimana peningkatan pajak dan retribusi daerah masig-masing sebesar 10 persen lebih berdampak pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian, dimana total PDRB turun sebesar 0.34 persen dibanding dengan kabupaten yang berbasis pertanian yang hanya turun 0.08 persen.

Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, maka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian meningkat 0.01 pesen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.17 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian, namun sebaliknya penyerapan tenaga kerja non pertanian turun sebesar 0.03 persen, untuk kabupaten yang berbasis pertanian, dan turun 0.14 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Selanjutnya total penyerapan tenaga kerja turun 0.01 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.07 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Akibatnya pengangguran meningkat lebih besar pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian yaitu 0.42 persen dibanding dengan kabupaten yang berbasis pertanian yang hanya meningkat kurang dari 0.07 persen. Sementara apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin, maka terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin kurang dari 0.01 persen baik pada kabupaten kota yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten yang berbasis non pertanian.

Oleh karena PDRB turun, maka pendapatan perkapita juga turun masing-masing sebesar 0.10 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.18 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Di samping pendapatan perkapita, pendapatan petani juga turun, disebabkan karena meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun kabupaten kota yang berbasis non pertanian, masing-

masing sebesar 0.01 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian, dan 0.53 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pajak dan retribusi daerah masing-masing sebesar 10 persen akan berdampak lebih buruk pada perekonomian kabupaten kota berbasis non pertanian dibanding kabupaten yang berbasis pertanian. Hal ini cukup wayar mengingat sektor yang dikenakan pajak umumnya sektor non pertanian, sehingga dampaknya lebih besar pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat menimbukan ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*) yang berdampak pada turunnya kinerja perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang berbasis pertanian maupun non pertanian.

Memperhatikan hasil simulasi satu, dua dan tiga terlihat bahwa apabila pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, meningkatkan pajak dan retribusi daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, memberi dampak buruk bagi perekonomian, ditandai dengan turunnya PDRB, naiknya angka pengangguran dan kemiskinan baik pada kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Oleh karena itu simulasi satu, dua, dan tiga ini tidak layak dipertimbangan untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

8.2.4. Simulasi Kebijakan Keempat

Simulasi kebijakan keempat yang dilakukan adalah pemerintah pusat meningkatkan dana alokasi umum 10 persen, yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lain masing-masing sebesar 20 persen dapat dilihat pada Tebel 38.

Dampak simulasi ini terhadap permintaan agregat adalah konsumsi masyarakat naik 0.12 persen, total pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 10.97 persen, investasi swasta naik sebesar 1.35 persen, ekspor daerah naik 0.55 persen, dan impor daerah juga naik 0.27 persen, untuk kabupaten yang berbasis pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian terjadi kenaikan konsumsi masyarakat 0.05 persen, total pengeluaran pemerintah daerah

naik sebesar 5.89 persen, investasi swasta naik sebesar 0.36 persen, ekspor daerah naik 0.07 persen, dan impor daerah juga naik sebesar 0.03 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan dana alokasi umum sebesar 10 berdampak lebih besar dampaknya pada kabupaten yang berbasis pertanian dibanding dengan kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Investasi swasta terlihat mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 1.35 persen pada kabupaten yang berbasis pertanian dibanding kabupaten yang berbasis non pertanian hanya sebesar 0.36 persen

Tabel 38. Dampak Kenaikan Dana Alokasi Umum Sebesar 10 Persen dan Kenaikan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lainnya Masing-masing 20 Persen

Nama Peubah	Nilai Dasar		Perubahan		Perubahan (%)	
	1	2	1	2	1	2
Konsumsi	739251	1990330	914	1014	0.12	0.05
Investasi swasta	197392	818911	2669	3067	1.35	0.36
Ekspor daerah	292141	2651089	1613	1946	0.55	0.07
Impor daerah	211427	2109499	561	644	0.27	0.03
PDRB sektor pertanian	587651	287177	136	25	0.02	0.01
PDRB sektor pertambangan	13629.2	682730	64.4	78	0.47	0.01
PDRB sektor industri	130725	617873	4601	6068	3.52	0.97
PDRB sektor listrik gas dan air	7938.6	51367.1	37.8	43.4	0.48	0.08
PDRB sektor bangunan	53797.7	227866	550.3	632	1.02	0.27
PDRB sektor perdagangan	138089	760797	1640	1885	1.19	0.24
PDRB sektor transportasi	58761.7	408447	914.5	1051	1.56	0.25
PDRB sektor keuangan	62230.3	283110	567.3	651	0.91	0.22
PDRB sektor jasa-jasa	152700	386814	237	270	0.16	0.07
Penyerapan T.Kerja sek. pertanian	82596.2	35579.7	-17.4	-20	-0.02	-0.06
Penyerapan T. kerja non pertanian	45600.5	115979	45.8	52	0.10	0.04
Pengangguran	11262.4	24294.2	-28.3	-32.5	-0.25	-0.14
Jumlah penduduk miskin	47775	46190.2	-1.2	-1.6	>-0.01	>-0.01
Inflasi	7.676	7.730	0.029	0.033	0.38	0.43
Ekspor bersih	80713.9	541590	1052.6	1301	1.30	0.24
Produk domestik regional bruto	1205522	3706182	8749	10704	0.73	0.28
Total peng. pemerintah daerah	198604	230682	21782	13594	10.97	5.89
Penyerapan tenaga kerja	128197	151559	28	32	0.02	0.02
Pendapatan perkapita	3.6986	8.414	0.0361	0.0541	0.98	0.64
Pendapatan rata-rata petani	7.4011	10.164	0.0043	0.0024	0.06	0.02

Apabila dilihat dari sisi produk domestik regional bruto berdasarkan sektor, maka terjadi meningkatan PDRB pada semua sektor yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik-gas-air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan, dan jasa-jasa berturut-turut sebesar 0.02 persen, 0.47 persen, 3.52 persen, 0.48 persen, 1.02, persen, 1.19 persen, 1.56 persen, 0.91 persen, dan 0.16 persen. Jadi dampak secara keseluruhan terhadap PDRB naik sebesar 0.73 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian juga terjadi

kenaikan PDRB pada semua sektor yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik-gas-air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan, dan jasa-jasa berturut-turut sebesar 0.01 persen, 0.01 persen, 0.97 persen, 0.08 persen, 0.27 persen, 0.24 persen, 0.25 persen, 0,22 persen, dan 0.08 persen. Jadi dampak secara keseluruhan terhadap PDRB naik sebesar 0.28 persen.

Kondisi pada permintaan agregate juga terjadi pada pertumbuhan PDRB dimana peningkatan dana alokasi umum sebesar 10 persen lebih berdampak pada kabupaten kota yang berbasis pertanian, dimana total PDRB naik sebesar 0.73 persen dibanding dengan kabupaten yang berbasis non pertanian yang hanya naik 0.28 persen.

Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, maka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian turun 0.02 pesen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.06 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Sebaliknya penyerapan tenaga kerja non pertanian naik sebesar 0.10 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian, dan naik 0.04 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Oleh karena itu total penyerapan tenaga kerja naik masing-masing 0.02 persen baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Akibatnya pengangguran turun 0.25 untuk kabupaten kota yang berbasis pertanian dan 0.14 persen pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Sementara apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin, maka terjadi penurunan jumlah penduduk miskin kurang dari 0.01 persen baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Oleh karena PDRB naik, maka pendapatan perkapita juga ikut naik masing-masing sebesar 0.98 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.64 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Di samping pendapatan perkapita, pendapatan petani juga naik, disebabkan karena meningkatkan PDRB sektor pertanian dan turunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun kabupaten kota yang berbasis non pertanian, masing-masing sebesar 0.06 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.02 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi umum sebesar 10 persen berdampak lebih baik pada kinerja perekonomian kabupaten kota yang berbasis pertanian dibanding kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

8.2.5. Simulasi Kebijakan Kelima

Simulasi kebijakan kelima yang dilakukan adalah pemerintah pusat peningkatan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus masing-masing sebesar 10 persen, yang selanjutnya digunakan untuk peningkatan belanja modal sektor pertanian dan sektor lain masing-masing sebesar 10 persen, dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39. Dampak Peningkatan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus 10 Persen dan Peningkatan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lain Masing-masing Sebesar 10 Persen

Nama Peubah	Nilai Dasar		Perubahan		Perubahan (%)	
	1	2	1	2	1	2
Konsumsi	739251	1990330	170	494	0.02	0.02
Investasi swasta	197392	818911	1118	3066	0.57	0.36
Ekspor daerah	292141	2651089	638	1891	0.22	0.07
Impor daerah	211427	2109499	234	642	0.11	0.03
PDRB sektor pertanian	587651	287177	75	22	0.01	0.01
PDRB sektor pertambangan	13629.2	682730	25.2	76	0.18	0.01
PDRB sektor industri	130725	617873	1800	6051	1.38	0.97
PDRB sektor listrik gas dan air	7938.6	51367.1	15.8	43.4	0.20	0.08
PDRB sektor bangunan	53797.7	227866	230.5	632	0.43	0.27
PDRB sektor perdagangan	138089	760797	687	1883	0.50	0.24
PDRB sektor transportasi	58761.7	408447	381.9	1048	0.65	0.25
PDRB sektor keuangan	62230.3	283110	236.9	649	0.38	0.22
PDRB sektor jasa-jasa	152700	386814	86	238	0.06	0.06
Penyerapan T.Kerja sek. pertanian	82596.2	35579.7	-7.3	-20	-0.01	-0.06
Penyerapan T. kerja non pertanian	45600.5	115979	19.2	52	0.04	0.04
Pengangguran	11262.4	24294.2	-11.8	-32.5	-0.10	-0.14
Jumlah penduduk miskin	47775	46190.2	-0.5	-1.6	>-0.01	>-0.01
Inflasi	7.676	7.730	0.01	0.028	0.13	0.36
Ekspor bersih	80713.9	541590	404.8	1248	0.50	0.23
Produk domestik regional bruto	1205522	3706182	3540	10641	0.29	0.28
Total peng. pemerintah daerah	198604	230682	4316	11644	2.17	5.05
Penyerapan tenaga kerja	128197	151559	12	32	0.01	0.02
Pendapatan perkapita	3.6986	8.414	0.0173	0.0539	0.47	0.64
Pendapatan rata-rata petani	7.4011	10.164	0.0023	0.0022	0.03	0.02

Dampak simulasi ini terhadap permintaan agregat adalah konsumsi masyarakat naik 0.02 persen, total pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 2.17 persen, investasi swasta naik sebesar 0.57 persen, ekspor daerah naik 0.22 persen, dan impor daerah juga naik 0.11 persen, untuk kabupaten yang berbasis

pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian terjadi kenaikan konsumsi masyarakat 0.02 persen, total pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 5.05 persen, investasi swasta naik sebesar 0.36 persen, ekspor daerah naik 0.07 persen, dan impor daerah juga naik sebesar 0.03 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus masing-masing sebesar 10 berdampak lebih besar pada kabupaten yang berbasis pertanian dibanding dengan kabupaten yang berbasis non pertanian. Investasi swasta terlihat mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 0.57 persen pada kabupaten yang berbasis pertanian dibanding kabupaten yang berbasis non pertanian hanya 0.36 persen

Apabila dilihat dari sisi produk domestik regional bruto berdasarkan sektor, maka terjadi meningkatan PDRB pada semua sektor yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik-gas-air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan, dan jasa-jasa berturut-turut sebesar 0.01 persen, 0.18 persen, 1.38 persen, 0.20 persen, 0.43, persen, 0.50 persen, 0.65 persen, 0.38 persen, dan 0.06 persen. Jadi dampak secara keseluruhan terhadap PDRB naik sebesar 0.29 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian juga terjadi kenaikan PDRB pada semua sektor yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik-gas-air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan, dan jasa-jasa berturut-turut sebesar 0.01 persen, 0.01 persen, 0.97 persen, 0.08 persen, 0.27 persen, 0.24 persen, 0.25 persen, 0,22 persen, dan 0.06 persen. Jadi dampak secara keseluruhan terhadap PDRB naik sebesar 0.28 persen.

Kondisi pada permintaan agregate juga terjadi pada pertumbuhan PDRB dimana kenaikan dana dana bagi hasil dan dana alokasi khusus masing-masing sebesar 10 persen yang selanjutnya digunakan meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lainya masing-masing sebesar 10 persen lebih berdampak pada kabupaten kota yang berbasis pertanian, dimana total PDRB naik sebesar 0.29 persen dibanding dengan kabupaten yang berbasis non pertanian yang hanya naik 0.28 persen.

Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, maka penyerapan tenaga kerja

sektor pertanian turun 0.01 pesen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.06 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Sebaliknya penyerapan tenaga kerja non pertanian naik masing-masing sebesar 0.04 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Selanjutnya total penyerapan tenaga kerja naik 0.01 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.02 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Akibatnya pengangguran turun 0.10 persen untuk kabupaten kota yang berbasis pertanian dan 0.14 persen pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Sementara apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin, maka terjadi penurunan jumlah penduduk miskin kurang dari 0.01 persen baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Oleh karena PDRB naik, maka pendapatan perkapita juga ikut naik masing-masing sebesar 0.47 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.64 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Di samping pendapatan perkapita, pendapatan petani juga naik, disebabkan karena meningkatkan PDRB sektor pertanian dan turunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun kabupaten kota yang berbasis non pertanian masing-masing sebesar 0.03 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.02 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Uraian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi umum sebesar 10 persen berdampak lebih baik pada kinerja perekonomian kabupaten kota yang berbasis pertanian dibanding kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Memperhatikan hasil simulasi lima dan enam, hal mana simulasi ini diharapkan bahwa pemerintah pusat menaikkan dana transfer fiskal ke daerah berupa; dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus yang selanjutnya digunakan untuk belanja modal. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa apabila transfer fiskal berupa dana alokasi umum dinaikkan sampai 10 persen, atau dana bagi hasil dan dana alokasi khusus naik 10 persen, maka dampaknya pada perekonomian cukup baik, dapat meningkatkan PDRB, menurunkan angka pengangguran, dan kemiskinan. Oleh karena itu simulasi simulasi ini, layak dipertimbangan untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

8.2.6. Simulasi Kebijakan Keenam

Simulasi keenam adalah simulasi kebijakan ditujukan untuk melakukan realokasi pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini belanja barang dan jasa serta belanja lain-lain diturunkan masing-masing sebesar 20 persen, kemudian dialokasi untuk meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan belanja modal sektor lainnya masing-masing sebesar 25 persen, dapat dilihat Tabel 40.

Tabel 40. Dampak Penurunan Belanja Barang dan Jasa 20 Persen, Belanja Lain-Lain 20 Persen dan Peningkatan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor lain 25 Persen

Nama Peubah	Nilai Dasar		Perubahan		Perubahan (%)	
	1	2	1	2	1	2
Konsumsi	739251	1990330	151	371	0.02	0.02
Investasi swasta	197392	818911	3843	6351	1.95	0.74
Ekspor daerah	292141	2651089	1850	3302	0.63	0.12
Impor daerah	211427	2109499	802	1327	0.38	0.06
PDRB sektor pertanian	587651	287177	155	75	0.03	0.03
PDRB sektor pertambangan	13629.2	682730	69.9	127	0.51	0.02
PDRB sektor industri	130725	617873	6019	11241	4.60	1.80
PDRB sektor listrik gas dan air	7938.6	51367.1	54.4	89.9	0.69	0.17
PDRB sektor bangunan	53797.7	227866	792.5	1309	1.47	0.56
PDRB sektor perdagangan	138089	760797	2353	3891	1.70	0.50
PDRB sektor transportasi	58761.7	408447	1293.9	2143	2.20	0.51
PDRB sektor keuangan	62230.3	283110	803	1329	1.29	0.46
PDRB sektor jasa-jasa	152700	386814	268	451	0.18	0.12
Penyerapan T.Kerja sek. pertanian	82596.2	35579.7	-25	-41.4	-0.03	-0.12
Penyerapan T. kerja non pertanian	45600.5	115979	65.9	108	0.14	0.09
Pengangguran	11262.4	24294.2	-40.8	-67.4	-0.36	-0.28
Jumlah penduduk miskin	47775	46190.2	-4.6	-2.9	-0.01	-0.01
Inflasi	7.676	7.730	0.005	0.016	0.07	0.21
Ekspor bersih	80713.9	541590	1048	1975	1.30	0.36
Produk domestik regional bruto	1205522	3706182	11810	20656	0.98	0.55
Total peng. pemerintah daerah	198604	230682	2584	7194	1.30	3.12
Penyerapan tenaga kerja	128197	151559	41	67	0.03	0.04
Pendapatan perkapita	3.6986	8.414	0.047	0.0917	1.27	1.09
Pendapatan rata-rata petani	7.4011	10.164	0.0055	0.0177	0.07	0.17

Dampak simulasi ini terhadap permintaan agregat adalah konsumsi masyarakat naik 0.02 persen, total pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 1.30 persen, investasi swasta naik sebesar 1.95 persen, ekspor daerah naik 0.63 persen, dan impor daerah juga naik 0.38 persen, untuk kabupaten yang berbasis pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian terjadi kenaikan konsumsi masyarakat 0.02 persen, total pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 3.12 persen, investasi swasta naik sebesar 0.74 persen, ekspor daerah naik 0.12 persen, dan impor daerah juga naik sebesar 0.06 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realokasi belanja pemerintah daerah dengan menurunkan belanja barang dan jasa serta belanja lain-lain masing-masing sebesar 20 persen yang selanjutnya digunakan untuk menaikkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lainnya masing-masing sebesar 25 persen berdampak lebih besar pada kabupaten yang berbasis pertanian dibanding dengan kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Investasi swasta terlihat mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 1.95 persen pada kabupaten yang berbasis pertanian dibanding kabupaten yang berbasis non pertanian hanya 0.74 persen.

Apabila dilihat dari sisi produk domestik regional bruto berdasarkan sektor, maka terjadi meningkatan PDRB pada semua sektor yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik-gas-air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan, dan jasa-jasa berturut-turut sebesar 0.03 persen, 0.51 persen, 4.60 persen, 0.69 persen, 1.47, persen, 1.70 persen, 2.20 persen, 1.29 persen, dan 0.18 persen. Jadi dampak secara keseluruhan terhadap PDRB naik sebesar 0.98 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian juga terjadi kenaikan PDRB pada semua sektor yaitu sektor; pertanian, pertambangan, industri, listrik-gas-air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan, dan jasa-jasa berturut-turut sebesar 0.03 persen, 0.02 persen, 1.80 persen, 0.17 persen, 0.56 persen, 0.50 persen, 0.51 persen, 0.46 persen, dan 0.12 persen. Jadi dampak secara keseluruhan terhadap PDRB naik sebesar 0.55 persen.

Kondisi pada permintaan agregate juga terjadi pada pertumbuhan PDRB dimana realokasi penurunan belanja barang dan jasa serta belanja lain lain sebesar 20 persen, yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lainnya berdampak lebih baik pada kabupaten kota yang berbasis pertanian, dimana total PDRB naik sebesar 0.98 persen dibanding dengan kabupaten yang berbasis non pertanian hanya naik 0.55 persen.

Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, maka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian turun 0.03 pesen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.12 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Sebaliknya penyerapan tenaga kerja non pertanian naik masing-masing sebesar 0.14 persen

untuk kabupaten yang berbasis pertanian, dan 0.09 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Selanjutnya total penyerapan tenaga kerja naik 0.03 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.04 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Akibatnya pengangguran turun 0.36 untuk kabupaten kota yang berbasis pertanian dan 0.28 persen pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Sementara apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin, maka terjadi penurunan jumlah penduduk miskin kurang dari 0.01 persen baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Oleh karena PDRB naik, maka pendapatan perkapita juga ikut naik masing-masing sebesar 1.27 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 1.09 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Di samping pendapatan perkapita, pendapatan petani juga naik, disebabkan karena naiknya PDRB sektor pertanian dan turunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun kabupaten kota yang berbasis non pertanian masing-masing sebesar 0.07 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.17 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa realokasi belanja pemerintah daerah dengan menurunkan belanja barang dan jasa serta belanja lain-lain masing-masing sebesar 20 persen yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal sektor pertanian dan sektor lainnya masing-masing sebesar 25 persen, berdampak lebih baik pada kinerja perekonomian kabupaten kota yang berbasis pertanian dibanding kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

8.2.7. **Simulasi Kebijakan Ketujuh**

Simulasi ketujuh adalah simulasi kebijakan non fiskal, yaitu simulasi kebijakan menaikkan investasi swasta sebesar 10 persen. Simulasi ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran investasi swasta terhadap perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti terlihat pada Tabel 41.

Tabel 41. Dampak Kenaikan Investasi Swasta Sebesar 10 Persen

Nama Peubah	Nilai Dasar		Perubahan		Perubahan (%)	
	1	2	1	2	1	2
Konsumsi	739251	1990330	819	5185	0.11	0.26
Ekspor daerah	292141	2651089	3670	23245	1.26	0.87
Impor daerah	211427	2109499	2866	18156	1.36	0.86
PDRB sektor pertanian	587651	287177	18	-515	<0.01	-0.18
PDRB sektor pertambangan	13629.2	682730	106.3	673	0.78	0.10
PDRB sektor industri	130725	617873	4529	28683	3.46	4.58
PDRB sektor listrik gas dan air	7938.6	51367.1	194.1	1229.5	2.45	2.37
PDRB sektor bangunan	53797.7	227866	2829.2	17919	5.26	7.62
PDRB sektor perdagangan	138089	760797	8396	53175	6.08	6.79
PDRB sektor transportasi	58761.7	408447	4603.8	29159	7.83	6.94
PDRB sektor keuangan	62230.3	283110	2857.2	18096	4.59	6.23
PDRB sektor jasa-jasa	152700	386814	972	6160	0.64	1.58
Penyerapan T.Kerja sek. pertanian	82596.2	35579.7	-89.4	-566.6	-0.11	-1.06
Penyerapan T. kerja non pertanian	45600.5	115979	235.1	1488	0.52	1.28
Pengangguran	11262.4	24294.2	-145.6	-922.2	-1.29	-3.86
Jumlah penduduk miskin	47775	46190.2	-11.4	-8.8	-0.02	-0.02
Inflasi	7.676	7.730	-0.005	-0.032	-0.07	-0.42
Ekspor bersih	80713.9	541590	803.3	5087	1.00	0.94
Produk domestik regional bruto	1205522	3706182	24407	154577	2.02	4.10
Total peng. pemerintah daerah	198604	230682	15	92	0.01	0.04
Penyerapan tenaga kerja	128197	151559	145	922	0.11	0.61
Pendapatan perkapita	3.6986	8.414	0.1208	0.2842	3.27	3.37
Pendapatan rata-rata petani	7.4011	10.164	0.0107	0.2264	0.14	2.20

Dampak simulasi ini terhadap permintaan agregat adalah konsumsi masyarakat naik 0.11 persen, total pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 0.01 persen, ekspor daerah naik 1.26 persen, dan impor daerah juga naik 1.36 persen, untuk kabupaten yang berbasis pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian terjadi kenaikan konsumsi masyarakat 0.26 persen, total pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 0.04 persen, ekspor daerah naik 0.87 persen, dan impor daerah juga naik sebesar 0.86 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan investasi swasta sebesar 10 persen berdampak lebih besar pada kabupaten yang berbasis pertanian dibanding dengan kabupaten yang berbasis non pertanian jika dilihat dari sisi permintaan agregat.

Apabila dilihat dari sisi produk domestik regional bruto berdasarkan sektor, maka terjadi meningkatan PDRB pada semua sektor yaitu sektor; pertanian, pertambangan, industri, listrik-gas-air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan, dan jasa-jasa berturut-turut sebesar kurang dari 0.01 persen, 0.78 persen, 3.46 persen, 2.45 persen, 5.26 persen, 6.08 persen, 7.83 persen, 4.59 persen, dan 0.64 persen. Jadi dampak secara keseluruhan terhadap PDRB naik sebesar 2.02 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian. Sementara untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian juga

terjadi penurunan PDRB sektor pertanian sebesar 0.18 persen, sementara PDRB sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik-gas-air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan, dan jasa-jasa mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 0.10 persen, 4.58 persen, 2.37 persen, 7.62 persen, 6.79 persen, 6.98 persen, 6.23 persen, dan 1.58 persen. Jadi dampak secara keseluruhan terhadap PDRB naik sebesar 4.10 persen.

Kondisi pada permintaan agregate berbeda pada pertumbuhan PDRB dimana kenaikan investasi sebesar 10 persen lebih berdampak pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian, dimana total PDRB naik sebesar 4.10 persen dibanding dengan kabupaten yang berbasis pertanian yang hanya naik 2.02 persen.

Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, maka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian turun 0.11 pesen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 1.60 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Sebaliknya penyerapan tenaga kerja non pertanian naik masing-masing sebesar 0.52 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian, dan 1.28 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Kemudian total penyerapan tenaga kerja naik 0.11 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 0.61 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Akibatnya pengangguran turun 1.29 untuk kabupaten kota yang berbasis pertanian dan 3.86 persen pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Sementara apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin, maka terjadi penurunan jumlah penduduk miskin kurang dari 0.02 persen baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Oleh karena PDRB naik, maka pendapatan perkapita juga ikut naik masing-masing sebesar 3.27 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 3.37 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Di samping pendapatan perkapita, pendapatan petani juga naik, disebabkan karena naiknya PDRB sektor pertanian dan turunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, baik untuk kabupaten yang berbasis pertanian maupun kabupaten kota yang berbasis non pertanian masing-masing sebesar 0.14 persen untuk kabupaten yang berbasis pertanian dan 2.20 persen untuk kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan investasi swasta sebesar 10 persen, berdampak lebih baik pada kinerja perekonomian kabupaten kota yang berbasis non pertanian dibanding kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Memperhatikan hasil simulasi kebijakan fiskal yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa simulasi kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan variabel pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi daerah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersam-sama, (simulasi 1 sampai 3) tidak layak dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Hal tersebut disebabkan karena dapat menyebabkan timbulnya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), yang ditandai dengan turunnya investasi swasta yang berdampak pada turunnya PDRB, meningkatnya pengangguran, dan bertambahnya penduduk miskin baik pada kabupaten kota yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

Simulasi kebijakan fiskal dengan harapan bahwa pemerintah pusat dapat menaikkan transfer fiskal berupa dana alokasi umum, atau dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang selajutnya digunakan untuk belanja modal, (simulasi 4 dan 5), dapat meningkatkan investasi swasta, PDRB pada semua sektor, menurunkan pengangguran, dan kemiskinan baik pada kabupaten kota yang berbasis pertanian maupun kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Meskipun demikian simulasi ini sangat tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat, dan semakin mengurangi kemandirian fiskal dari pemerintah daerah.

Simulasi kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk realokasi belanja pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan belanja modal baik pada sektor pertanian maupun non pertanian, dengan cara mengurangi belanja lain-lain, serta belanja barang dan jasa, (simulasi 6) dipandang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran pada kabupaten dan kota yang basis pertanian maupun kabupaten kota yang berbasis non pertanian, dibanding dengan simulasi kebijakan meningkatkan variabel pendapatan asli daerah, maupun kebijakan peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat.

Simulasi kebijakan non fiskal dengan meningkatkan investasi swasta sebesar 10 persen (simulasi 7), memberi dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan baik pada

kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa investasi swasta memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, namun belum banyak berperan dalam menurunkan angka kemiskinan pada kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Temuan ini sejalan dengan temuan Erden and Holcombe (2006) pada sembilan belas negara berkembang, dan temuan Haroon and Nasr (2011), serta temuan Fatima (2012) di Pakistan.

IX. **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

9.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan tentang dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama belanja modal berpengaruh positif terhadap investasi swasta, pertumbuhan perekonomi, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada sisi lain kebijakan fiskal berupa pendapatan asli daerah berpengaruh nyata dan negatif terhadap investasi swasta. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemerintah daerah memaksakan untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah, maka akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy),* yang akan berdampak pada turunnya investasi swasta, sehingga mengakibatkan turunnya produk domestik regional bruto, tingginya pengangguran dan inflasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan.
2. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama belanja modal sektor pertanian berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto pada sektor pertanian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan investasi swasta juga berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto sektor pertanian. Sementara jumlah angkatan kerja berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah angkatan kerja akan mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian. Pada sisi lain peningkatan penyerapan tenaga kerja non pertanian, berpengaruh negetif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian.
3. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan nyata terhadap output (produk domestik regional bruto) pada tujuh sektor yaitu sektor ; industri, listrik gas dan air, bangunan, perdagangan,

transportasi dan komunikasi, keuangan, dan jasa-jasa. Sementara dua sektor sisanya yaitu sektor pertanian dan pertambangan, walaupun tidak berpengaruh nyata tetapi tetap berpengaruh positif. Di samping itu investasi swasta juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja non pertanian, menurunkan angka pengangguran, dan inflasi.

4. Hasil simulasi kebijakan menunjukkan bahwa realokasi anggaran dengan menurunkan belanja lain-lain, dan belanja barang dan jasa, yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan belanja modal baik pada sektor pertanian maupun pada sektor lain, memberikan hasil yang lebih baik dan lebih realistis dari alternatif kebijakan meniingkatkan variabel pendapatan asli daerah dan meningkatkan transfer diskal dari pemerintah pusat. Simulasi kebijakan ini dapat meningkatkan produk domestik regional bruto, mengurangi pengangguran lebih besar dibanding simulasi kebijakan meningkatkan variabel pendapatan asli daerah, dan simulasi kebijakan meningkatan transfer dana dari pemerintah pusat, baik pada kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian, jadi hipotesis yang dikemukakan terbukti kebenarannya.
5. Hasil simulasi kebijakan non fiskal menunjukkan bahwa peningkatan investasi swasta memberi dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto dan pengurangan pengangguran, baik pada kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi swasta memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun demikian peningkatan investasi swasta belum sepenuhnya dapat menurunkan angka kemiskinan baik pada kabupaten yang berbasis pertanian maupun pada kabupaten kota yang berbasis non pertanian.

9.2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka beberapa implikasi kebijakan dapat dilakukan yaitu:

1. Hasil estimasi dan simulasi kebijakan fiskal menunjukkan bahwa peningkatan peningkatan belanja modal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomomi. Oleh karena itu pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran pendapatan belanja daerah, perlu melakukan efisiensi penggunaan anggaran terutama pada belanja lain-lain, dan belanja barang dan jasa, seperti mengurangi biaya perjalan dinas, penghematan biaya listrik, penghematan biaya telekomunikasi, dan efisiensi penggunaan alat tulis kantor, efisisiensi biaya pemeliharaan rutin untuk digunakan dalam meningkatkan belanja modal untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sarana pendidikan, kesehatan, dan air bersih guna menarik para investor untuk menanamkan modalnya.
2. Hasil estimasi dan simulasi kebijakan fiskal menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemandirian fiskal, diharapkan pemerintah daerah bekerja keras menggali potensi penerimaan dengan tetap melakukan upaya fiskal yang dapat meningkatkan penerimaan daerah sebagai sumber dana pembangunan tanpa harus menimbulkan dampak negatif pada perekonomian. Upaya itu bisa dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam penarikan potensi pajak dan retribusi daerah pada sub sektor tertentu, memberi stimulus terhadap berkembangnya sektor swasta dengan memberi pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi berkembangnya sumber-sumber pendanaan mandiri bagi masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan dana tugas bantuan dan dekonsentrasi dari pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat diharapkan menutupi melalui pengalokasian dana alokasi umum dengan formula yang berkeadilan dan mendidik supaya tidak menimbulkan kemalasan fiskal dan ketergantungan bagi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan memberi insentif terhadap pemerintah daerah yang berhasil menurunkan kemiskinan, dan melakukan disinsentif terhadap daerah yang tidak berhasil menurunkan kemiskinan melalui formula transfer dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

3. Hasil estimasi dan simulasi menunjukkan bahwa investasi swasta merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong tumbuh kembangnya investasi swasta di daerah, termasuk di dalamnya memberi stimulus terhadap berkembangnya sektor swasta dengan memberi pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi berkembangnya sumber-sumber pendanaan mandiri bagi masyarakat dan peningkatan belanja modal dalam upaya untuk membangun dan memperbaiki infrastuktur di daerahnya, serta promosi investasi baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Hasil estimasi dan simulasi menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran sektor pertanian berdampak meningkatkan kinerja perekonomian melalui peningkatan produk domestik regional bruto sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan produksi sektor pertanian dan pendapatan petani. Untuk itu dengan keterbatasan dana untuk belanja modal, pemerintah daerah harus masih punya keberpihakan pada sektor pertanian secara konsisten membangun dan memperbaiki infrastruktur sektor pertanian di perdesaan terutama infrastruktur irigasi pada sub sektor tanaman pangan, infrastuktur tempat pelelangan ikan pada sub sektor perikanan, pembangunan jalan di perdesaan guna memperlancar mobilitas para petani, dengan menggunakan pola swadaya. Hal ini penting karena dengan pola swadaya, maka masyarakat merasa memiliki sehingga dapat memelihara pasilitas yang ada di perdesaan. Mengingat sektor pertanian masih merupakan tempat bergantungnya hidup bagi sebagian besar penduduk.
5. Walaupun tidak terformulasi dalam model, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani di perdesaan, dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah, maka dibutuhkan pendampingan kepada petani guna memperkenalkan teknologi produksi dan teknologi pasca panen lebih baik seperti; penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk, pestisida, dan teknologi pengolahan pasca panen.

6. Dalam upaya untuk mengurangi angka pengangguran, maka pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan stimulus fiskal dengan memberikan insentif khusus terhadap investor swasta yang akan menanamkan modalnya dengan menggunakan teknologi padat karya. Insentif tersebut dapat berupa kemudahan perizinan dan pengurangan pajak.
7. Pemberdayaan kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian terutama di daerah perdesaan perlu lebih ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi urbanisasi dan sekaligus meningkatkan diversivikasi ekonomi perdesaan agar pilihan usaha bagi masyarakat di perdesaan lebih beragam. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi luar pertanian di perdesaan, maka pasar bagi hasil-hasil pertanian akan semakin terbuka, dan pada gilirannya akan memacu pertumbuhan sektor pertanian di perdesaan. Apabila kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan dapat mengurangi pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan yang banyak terdapat di daerah perdesaan.
8. Kurang responsifnya kebijakan fiskal terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, menunjukkan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya berpihak pada penduduk miskin. Oleh karena itu untuk meningkatkan respons dari kebijakan maka sebaiknya pemerintah daerah perlu lebih berpihak dan terfokus serta diperlukan kebijakan yang bersifat langsung dan produktif yang ditujukan pada masyarakat miskin dan rawan pangan khususnya pada buruh dan petani gurem dengan melakukan program pendampingan.

9.3. Saran untuk Penelitian Lanjutan

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka beberapa saran yang direkomendasikan untuk dilakukan penelitian lanjut:

1. Perlu dilakukan penelitian lanjut yang lebih spesifik pada masing-masing sektor terutama yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja pada masing-masing sektor yang ada.
2. Perlu melakukan penelitian lanjut secara mendalam tentang kemiskinan dan pengangguran, guna mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan implikasi

kebijakan yang lebih spesifik.

3. Perlu dilakukan penelitian lanjut yang lebih spesifik pada masing-masing sub sektor pertanian dalam upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan implikasi kebijakan yang lebih spesifik pada masing-masing sub sektor pertanian yang ada.
4. Perlu melakukan penelitian lanjutan yang terkait dengan besarnya tarif serta jenis pajak dan retribusi daerah yang sebaiknya diberlakukan guna mengoptimalkan penerimaan daerah dari kedua jenis sumber pendapatan asli daerah tersebut. Hal ini penting guna menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan terjadinya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, A. 2005. Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di Indonesia Aplikasi Model Makro-Modfi dan CGE Indorani. Jurnal Ekonomi Indonesia. 6(1):1-35.

Adefeso, H.A., and H.I. Mobolaji. 2010. The Fiscal-Monetary Policy and economic Growth in Nigeria: Further Empirical Evidence. Pakistan Journal of Social Sciences. 7(2): 137-142.

Adeniyi, O.M. and A.O. Bashir. 2011. Sectoral Analysis of the Impact of Public Investment on Economic Growth in Nigeria (1970 – 2008). European Journal of Social Sciences. 20(1):259-266.

Adisasmita, R. 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Afonso, A. and R. M. Sousa. 2009. The Macroeconomic Effects of Fiscal Policy. Working Paper Series No. 991. European Central Bank.

Afonso, A., H. P. Gruner, and C. Kolerus. Fiscal Policy and Growth Do Financial Crises Make A Difference? Working Paper Series No. 1217. European Central Bank.

Akhmad, N.A. Achsani, M. Tambunan, S.A. Mulyo. 2012. Impact of Fiscal Policy on the Agricultural Development in an Emerging Economy: Case Study from the South Sulawesi, Indonesia. International Research Journal of Finance and Economics. 96:101-112.

Alisjahbana, A.S. 2000. Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah. Makalah Disampaikan pada Seminar Ekonomi Science, Club STIE YPKP.

Allers, M. A. and J. P. Elhorst. 2010. A Simultaneous Equations Model of Fiscal Policy Interactions. Journal of Regional Science, 20(10): 1-21.

Alm, J., R.H. Aten, and R. Bahl. 2001. Can Indonesia Decentralise Successfuly? Plans, Problems and Prospects. Buletin of Indonesian Economic Studies. 37(1): 83-102.

Arin, K. P., M. Berlemann., F. Koray, and T. Kuhlenkasper. 2011. The Taxation-Growth-Nexus Revisited. Hamburg Institute of International Economics, HWWI Researh, Paper 104.

Arsyad, L. 1999. Ekonomi Pembangunan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yayaysan Keluarga Pahlawan Negara,Yogyakarta.

Azis, I. J. 1994. Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasi. FE-UI, Jakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. 2007. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2008. Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009: Bersama Menata Perubahan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2009. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 2009. Sulawesi Selatan Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Makassar.

Bahl, R.W. and J. Lin. 1994. Fiscal Decentralization and Intergovernmental Transfer in Less Developed Countries. Oxpord Journal. 24(1):1-20.

Barbara, B. 2008. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah. Tesis Magister. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Basri, F. 2004. Tinjauan Bisnis dan Perekonomian Indonesia Setelah 5 Tahun Kelahiran Undang-Undang Nomor 5/1999. Disampaikan pada Seminar Sehari: Refleksi Lima Tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Komite Persaingan Usaha (KPPU), Medan.

Braun, V. J. and U. Grote. 2002. Does Decentralization Serve the Poor? Routledge Studies in the Modern World Economy, London and New York.

Brodjonegoro, B. and J.M. Vazques. 2002. An Analysis of Indonesia's Transfer System: Recent Performance and Future Prospect. International Studies Program. Georgia State University, Working Paper, 02-29.

Chalid, P. 2005. Keuangan Daerah Investasi, dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan. Kemitraan. Jakarta.

Claeys, P. 2008. Rules, and Their Effects on Fiscal Policy in Sweden. Swedish Economic Policy Review. 15:7-47.

Cohen, S. I. 2009. Economic Systems Analysis and Policies: Explaining Global Differences,Transitions and Developments. Palgrave Macmillan, New York.

Costa, L.F. and H.D. Dixon. 2011. Fiscal Policy Under Imperfect Competition: A Survey, Economics. The Open-Access, Open-Assessment, E-Journal, http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2011-3.

Cullis, J.G. and P.R. Jones. 1992. Public Finance and Public Choice. McGrow Hill. Singapore.

Donalson, L.1984. Economic Development Analysis and Policy. West Publishing Company, New York.

Darsono. 2008. Analisis Keefektifan Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Sektor Pertanian dengan Penekanan pada Agroindustri di Indonesia. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Departemen Dalam Negeri. 2001a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Cetakan Pertama, J &J Learning, Yogyakarta.

_____. 2001b Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Cetakan Pertama, J & J Learning,Yogyakarta

_____. 2001c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Cetakan Pertama, J & J Learning, Yogyakarta.

_____. 2004a. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Cetakan Pertama, J & J Learning, Yogyakarta.

_____. 2004b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Cetakan Pertama, J & J Learning, Yogyakarta.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2010. Data APBD Tahunan Kabupaten Kota. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2009. Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Sektor Rill. Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta

Dornbursh, R., S. Fisher, and R.Startz. 2008. Macroeconomics. Ten Edition. Mc Graw-Hill Book Company, Tokyo.

Ducanes, G., M. A. Cagas, D. Qin, P Quising, and M. A.Razzaque. 2006. Macroeconomic Effects of Fiscal Policies: Empirical Evidence from Bangladesh, China, Indonesia, and Philippines. Asian Development Bank, Working Paper No. 85.

Erden, L. and R.G. Holcombe. 2006. The Linkage Between Public And Private Investment: A Co-Integration Analysis of A Panel of Developing Countries. Eastern Economic Journal. 32(3):479-492.

Fan, S. and N. Rao. 2003**.** Public Spending In Developing Countries: Trends, Determination, and Impact. EPTD Discussion Paper No. 99. International Food Policy Research Institute. Washington, D.C.

Fatima, G. 2012. Joint Impact of Investment (Public and Private) on the Economic Growth of Pakistan: Co-Integration Approach. International Journal of Humanities and Social Science. 2(15):171-176.

Feltenstein, A. and S. Iwata. 2005. Decentralization and macroeconomic performance in China: Regional Autonomy Has its Costs. Journal of Development Economics. 76:481-501.

Forni, L., L.Moteforte , and L. Sessa. 2009. The general Equilibrium effects of Fiscal Policy: Estimates for the Euro Area. Journal of Public Economics. 93(9):559-585.

Galí, J., J. D. L.Salido, and J. Vallés. 2007. Understanding The Effects of Government Spending on Consumption. Journal of the European Economic Association. 5(1):227-270.

Gemmell, N. and R. Kneller. 2006**.** Fiscal Policy Impacts on Growth in the OECD:Are They Long- or Short-Run. University of Nottingham, UK. http://www.ucm.es/info/ecap2/ seminario/seminario05.06/Ismael_Sanz.

Guimaraes, R. 2010. What Are The Effects of Fiscal Policy Shocks in India. International Monetary Fund, Amaltas Conference Room Research Meeting, 9-10 March 2010, India Habitat Centre.

Halim, A. 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP-YKPN, Jogjakarta:

Haroon, M. and M. Nasr. 2011. Role of Private Investment in Economic Development of Pakistan. International Review of Business Research, 7(1): 420-439.

Haryanto, J.T., dan E.S. Astuty. 2009. Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan. 13 (1): 51-65.

Hess, P and C.Ross. 1997. Economic Development: Theories, Ividence, and Policies. Harcourt Brace & Company, Florida.

Hong, K. 2010. Fiscal Policy Issues in Korea After the Current Crisis. Asian Development Bank Institute, Working Paper 225, Tokyo.

Iimi, A. 2005. Decentralization and Economic Growth Revisited: An Empirical Note. Journal of Urban Economics. 57: 449-461.

Intriligator, M. D. 1978. Econometric Model, Techniques and Applications. Prentice-Hall Inc, New Jersey.

Izuchukwu, O. 2011. Analysis of the Contribution of Agricultural Sector on the Nigerian Economic Development. World Review of Business Research. 1(1):191-200.

Jhingan, M.L. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Kakar, Z.K. 2011. Impact of Fiscal Variables on Economic Development of Pakistan. Romanian Journal of Fiscal Policy. 1(2):1-10.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2010. Mengatasi Dampak Krisis Global Melalui Program Stimulus Fiskal APBN 2009. http://www. Fiskal. depkeu.go.id/2010.

Kitao, S. 2010. Short-Run Fiscal Policy: Welfare, Redistribution, and Aggregate Effects in the Short and Long Run. Federal Reserve Bank of New York, Staff Reports, No. 442.

Koutsoyiannis, A. 1977. Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods. Harper & Row Publishers Inc, New York.

Kuncoro, H. 2004. Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang. 9(1): 47-63.

Kuttner, K. N. and A.S. Posen. 2002. Fiscal Policy Effectiveness in Japan. Journal of the Japanese and International Economies. 5(16): 536-558.

Langdana, F.K. 2009. Macroeconomic Policy Demystifying Monetary and Fiscal Policy. Second edition, Springer Scienceþ Business Media, New York.

Lendvai, J. 2007. The Impact of Fiscal Policy in Hungary. ECFIN Country Focus, 4(11):1-6.

Lewis , B.D. 2001. The New Indonesian Equalisation Transfer. Bulletin of Indonesian Economic Studies. 37(3):325-343.

Lin, J.Y. and Z. Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change. 49(1):1-21.

Litvack., J. Ahmad, and R. Bird. 1998. Rethinking Decentralization in Developing Country. The World Bank, Washington D.C.

Mahi. 2000. Persiapan Menuju Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Working Paper. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta.

Mangkoesoebroto, G. 1999. Ekonomi Publik. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.

Mankiw, N.G. 2003. Macroeconomics. Fourth Edition. Worth Publishers, New York.

Masri, M. 2010. Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Regional terhadap Inflasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Thesis Magister. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Mardiasmo. 2009. Kebijakan Desentrasi Fiskal di Era Reformasi: 2005-2008: Era Baru kebijakan Fiskal. Buku Kompas. Jakarta.

Mawardi, M.I. 2009. Pembangunan Daerah Yang Berkemajuan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan. IPB Press, Bogor.

McCann, P. 2001. Urban and Regional Economics. Oxford University Press Inc. Yew York.

McConnell, C. and S.L. Brue. 2002. Economics: Principles, Problem, and Policies. McGrow-Hill, Boston.

Mehmood, R. and S. Sadiq. 2010. The Relationship between Government Expenditure and Poverty: A Cointegration Analysis. Romanian Journal of Fiscal Policy. 1(1):29-37.

Motlaleng, G.R. 2011. Effectiveness of Fiscal Spending in The Presence of Persistant Budget Deficit in Namibia: Crowding Out or Crowding In. IJER Journal. 2(1):96-117.

Mountford, A. and H.Uhlig. 2005, What are the Effects of Fiscal Policy Shocks? Economic Risk SFB 649, Discussion Paper No.39, Humboldt-Universitat, Berlin.

Muhammad, M. 2004. Kebijakan Fiskal di Masa Krisis 1997: Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Kompas, Jakarta.

Musgrave, R. A. and Musgrave, P. B. 1991. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nanga, M. 2006. Dampak Transfer Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Napirin. 1995. Ekonomi Internasional. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Norton, R.D. 2004. Agricultural Development Policy: Concepts and Experiences. John Wiley and Sons Inc, Singapore.

Nurudeen, A. and A. Usman. 2010. Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis. Business and Economics Journal. BEJ(4):1-11.

Ogbole, O.F., S.N. Amadi, and I.D. Essi. 2011. Fiscal Policy: Its Impact on Economic Growth in Nigeria 1970 to 2006. Journal of Economics and International Finance. 3(6):407-417.

Pakasi, C.B.D. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Kabupaten dan Kota di Propinsi Sulawesi Utara. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Panjaitan, M. 2006. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara: Suatu Pendekatan Ekonometrika. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Pardede, R. 2004. Dampak Desentalisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kotamadya Medan: Aplikasi Model Input Outout. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Park, D. 2010. The Role of Fiscal Policy in Rebalancing Developing Asia's Growth. Asian Development Bank Economics, Working Paper Series No.223.

Pindyck, R.S and D.L Rubinfeld. 1995. Microeconomics. Third Edition. Precentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersy.

Poque T.F. and L.G. Sgontz, 1978. Government and Aconomic Choice: An Introduction to Public Finance. Hougton Mifflin Company, Boston.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). 2007. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Edisi Keenam. Jakarta.

Ramos, X. and R.S .Oriol. 2007. Long-Term Effects of Fiscal Policy on the Size and Distribution of the Pie in the UK. Journal Compilation, Institute for Fiscal Studies. 29(3):387-411.

Rasyid M.R. 1998. Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah: dalam Kumpulan Karangan. Pembangunan Administrasi di Indonesia. Disunting Achmad Sjihabuddin. LP3ES, Jakarta.

Richardson, H.W . 2001. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, Jakarta

Rindayati, W. 2009. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Ritonga, A.A. 2002. Kebijakan Pengelolaan Anggaran. Tinjauan dalam Aspek Pengeluaran Anggaran Negara Tahun 2003. Seminar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. 29 Agustus 2002, Jakarta.

Riyanto dan H. Siregar. 2005. Dampak Dana Perimbangan terhadap Perekonomian Daerah dan Pemerataan Antar Wilayah. Jurnal Kebijakan Ekonomi.1(1):15-35.

Romer, D. 2001. Advanced Macroeconomics, Second Edition, McGraw-Hill Book Company Co, Singapore.

Saefudin. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian dan Kelembagaan di Propinsi Riau. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Safdari, M., M.A.Mehrizi, and M. Elahi. 2011. Impact of Fiscal Policy on Economic Growth in Iran. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. 1(36):87-92.

Samimi, A.J., S.K.P.Lar, G.K.Haddad, and M. Alizadeh. 2010. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 4(11):5490-5495.

Samuelson P.A and W.D. Nordhaus. 2005. Economics. Eighteenth Edition. McGrow-Hill, New York.

Salvatore, D. 1995. Ekonomi Internasional. Edisi Kedua. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sasana, H. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 10(1): 103-124.

Sen , A. K. 1981. Poverty and Famines. An Essay on Entlitements and Deprivation. Basil Blacwell, Oxford.

Seok-Kyun, S.Mallick, and D. Park. 2010. Fiscal Policy and Crowding Out in Developing Asia. Asian Development Bank Economics, Working Paper, Series No. 222.

Setiawan, D.M.D. 2006. Peranan Sektor Unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Shaheen, S. and Paul, T. 2009. Measuring the Dynamic Effects of Fiscal Policy Shocks in Pakistan. http://www.pide.org.pk/psde/25/pdf/Day3/Rozina Shaheen.pdf.

Simanjuntak, R. 2002. Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Optimasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Working Paper. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sinaga, B.M. dan H.Siregar. 2005. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Siregar, R.Y. 2001. Survey of Recent Developments, Bulletin of Indonesian Economic Studies. 37(3): 277-303.

Siregar, H. 2009. Makro-Mikro-Pembangunan: Kumpulan Makalah dan Esai. IPB Press, Bogor.

Sitepu, R.K., and Sinaga, B.M. 2006. Aplikasi Model Ekonometrika: Estimasi, Simulasi dan Peramalan Menggunakan Program SAS. Program Studi Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Snowdon, B. dan R. V. Howard. 2005. Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State. Edward Elgar, New York.

Soediono, 1992. Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional. Liberty, Yogyakarta.

Subiyantoro, H. dan S. Rifat, 2004. Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Kompas, Jakarta.

Sukirno, S. 2000. Macroeconomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumedi. 2005. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Kesenjangan Antar Daerah dan Kinerja Perekonomian Nasional dan Daerah. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi Pertama. Andi Offset, Yogyakarta.

Susiyati, B.H. 2007. Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Stiglitz. J.E. 2000. Economics of the Public Sector. W.W. Norton and Company, New York.

Tambunan, M. 2010. Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan: Menggerakkan Kekuatan Lokal dalam Globalisasi Ekonomi. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Tarigan, R. 2004. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Todaro, M.P. and S.C. Smith. 2009. Economic Development. Tenth Edition. Pearson Addison Wesley, New York.

Tondl G. 2005. Macroeconomic Effects of Fiscal Policies in the Acceding Countries. Vienna University of Economics & BA, Althanstrasse 39-45, A-1090 Wien, Austria.

Usman. 2006. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

World Bank. 2007. Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Daerah: Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007. http://siteresources.worldbank.org/ Intindonesia/Resources/226271-1168333550999.

Yodhoyono, S.B. 2004. Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisisi Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Nama Variabel, Simbol, Satuan, dan Sumber Data

NAMA VARIABEL	SIMBOL	SATUAN	SUMBER
Jumlah angkatan kerja	AKK	Orang	BPS Kab/Kota
Belanja barang dan jasa	BBJ	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Belanja lain-lain pemerintah	BLL	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Belanja modal	BMD	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Belanja modal sektor lainnya	BMDSL	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Belanja modal sektor pertanian	BMDSP	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Belanja pegawai	BPGW	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Badan usaha milik daerah	BUMD	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Dana alokasi khusus	DAK	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Dana alokasi umum	DAU	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Dana bagi hasil	DBH	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, dan lainnya	DDTBL	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Ekspor daerah	EXPD	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Impor daerah	IMPD	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Inflasi daerah	INFL	Persen	BPS Kab/Kota
Investasi swasta	INVS	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Jumlah kamar hotel	JMKH	Unit	BPS Kab/Kota
Konsumsi swasta	KONS	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Belanja barang dan jasa tahun sebelumnya	LBBJ	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Belanja lain-lain pemerintah tahun sebelumnya	LBLL	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Belanja modal sek. pertanian tahun sebelumnya	LBMDSP	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Belanja modal sekt. lainnya tahun sebelumnya	LBMDSL	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Belanja pegawai tahun sebelumnya	LBPGW	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Luas daerah kabupaten/kota	LDK	Km^2	BPS Kab/Kota
Dana bagi hasil tahun sebelumnya	LDBH	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Ekspor daerah tahun sebelumnya	LEXPD	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Impor daerah tahun sebelumnya	LIMPD	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Investasi swasta tahun sebelumnya	LINVS	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Peng konsumsi swasta tahun sebelumnya	LKONS	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya	LMISK	Orang	BPS Kab/Kota
Pajak daerah tahun sebelumnya	LPAJD	Juta rupiah	Kem. Keuangan
PDRB tahun sebelumnya	LPDRB	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor bangunan tahun sebelumnya	LPDRBBG	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor perdagangan tahun sebelumnya	LPDRBDG	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor industri tahun sebelumnya	LPDRBID	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor jasa-jasa tahun sebelumnya	LPDRBJS	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor keuangan tahun sebelumnya	LPDRBKU	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB listrik,gas,dan air tahun sebelumnya	LPDRBLG	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor pertanian tahun sebelumnya	LPDRBSP	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor pertambangan tahun sebelumnya	LPDRBTB	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor transportasi tahun sebelumnya	LPDRBTR	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Pendapatan perkapita tahun sebelumnya	LPPKT	Rupiah	BPS Kab/Kota
Penyerapan T kerja non pertanian tahun sebelumnya	LPTKNP	Orang	BPS Kab/Kota
Penyerapan T kerja pertanian tahun sebelumnya	LPTKSP	Orang	BPS Kab/Kota
Penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya	LRETD	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Pengangguran tahun sebelumnya	LUNEP	Orang	BPS Kab/Kota
Inflasi tahun sebelumnya	LINFL	Persen	BPS Kab/Kota
Jumlah penduduk miskin	MISK	Orang	BPS Kab/Kota
Jumlah kendaran bermotor	MTR	Unit	BPS Kab/Kota
Nilai tukar rupiah	NTRP	Juta rupiah	Bank Indonesia
Net ekspor	NEXP	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Pendapatan asli daerah	PAD	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Penerimaan asli daerah lain-lain	PADL	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Pajak daerah	PAJD	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Produk domestik regional bruto	PDRB	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor bangunan	PDRBBG	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor perdagangan	PDRBDG	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor industri	PDRBID	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor jasa-jasa	PDRBJS	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor keuangan	PDRBKU	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor listrik gas dan air	PDRBLGA	Juta rupiah	BPS Kab/Kota

Lampiran 1. Lanjutan

NAMA VARIABEL	SIMBOL	SATUAN	SUMBER
PDRB sektor pertanian	PDRBSP	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor pertambangan	PDRBTB	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
PDRB sektor transportasi	PDRBTR	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Penerimaan lain daerah	PLD	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Jumlah pengawai negeri sipil	PNS	Orang	BPS Kab/Kota
Jumlah penduduk	POP	Orang	BPS Kab/Kota
Penyerapan tenaga kerja	PTK	Orang	BPS Kab/Kota
Penyerapan tenaga kerja non pertanian	PTKNP	Orang	BPS Kab/Kota
Penyerapan tenaga kerja pertanian	PTKSP	Orang	BPS Kab/Kota
Retribusi daerah	RETD	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Suku bunga Bank Indonesia	SBI	Persen	Bank Indonesia
Total penerimaan daerah	TPD	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Total pengeluaran pemerintah	TPGP	Juta rupiah	BPS Kab/Kota
Total pengeluaran pemerintah daerah	TPGPD	Juta rupiah	Kem. Keuangan
Tren (tahun 1,2,3, ...n)	TREN	1,2,3....n	Tahun
Upah minimum Provinsi	UMP	Rupiah	BPS Provinsi
Pengangguran	UNEP	Orang	BPS Kab/Kota

Lampiran 2. Program Komputer Estimasi Model Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomia Kobupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan SAS Versi 9.0 SYSLIN Metode 2 SLS

```
OPTIONS NODATE NONUMBER;
DATA SULSEL;
set analisis;

/*create data*/
PAD      =  PAJD + RETD +  BUMD + PADL;
TPD      = PAD + DAU + DBH +  DAK + PLD;
BMD      = BMDSP + BMDSL;
TPGPD    = BPGW + BBJ + BMD + BLL;
TPGP     = TPGPD  +  DDTBL;
NEXP     = EXPD - IMPD;
PTK      = PTKSP + PTKNP;
PDRB     = PDRBSP + PDRBTB + PDRBID + PDRBLGA + PDRBBG + PDRBDG +
           PDRBTR + PDRBKU + PDRBJS;

LABEL
AKK      = 'Jumlah angkatan kerja'
BBJ      = 'Belanja barang dan jasa'
BLL      = 'Belanja lain-lain pemerintah'
BMD      = 'Belanja modal'
BMDSL    = 'Belanja modal sektor lainnya'
BMDSP    = 'Belanja modal sektor pertanian'
BPGW     = 'Belanja pegawai'
BUMD     = 'Badan usaha milik daerah'
DAK      = 'Dana alokasi khusus'
DAU      = 'Dana alokasi umum'
DBH      = 'Dana bagi hasil'
DDTBL    = 'Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya'
EXPD     = 'Ekspor daerah'
IMPD     = 'Impor daerah'
INFL     = 'Inflasi daerah'
INFLK    = ‘Inflasi kota Kendari’
INVS     = 'Investasi swasta'
JMKH     = 'Jumlah kamar hotel'
KONS     = 'Konsumsi swasta'
LBBJ     = 'Belanja barang dan jasa tahun sebelumnya'
LBLL     = 'Belanja lain-lain pemerintah tahun sebelumnya'
LBMDSP   = 'Belanja modal sek pertanian tahun sebelumnya'
LBMDSL   = 'Belanja modal sekt lainnya tahun sebelumnya'
LBPGW    = 'Belanja pegawai tahun sebelumnya'
LDK      = 'Luas daerah kabupaten/kota'
LDBH     = ‘Dana bagi hasil tahun sebelumnya'
LEXPD    = 'Ekspor daerah tahun sebelumnya'
LIMPD    = 'Impor daerah tahun sebelumnya'
LINVS    = 'Investasi swasta  tahun sebelumnya'
LKONS    = 'Peng konsumsi swasta  tahun sebelumnya'
LMISK    = 'Jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya'
LPAJD    = 'Pajak daerah tahun sebelumnya'
LPDRB    = 'PDRB tahun sebelumnya'
LPDRBBG  = 'PDRB sektor bangunan tahun sebelumnya'
LPDRBDG  = 'PDRB sektor perdagangan tahun sebelumnya'
LPDRBID  = 'PDRB sektor industri tahun sebelumnya'
LPDRBJS  = 'PDRB sektor jasa-jasa tahun sebelumnya'
```

Lampiran 2. Lanjutan

```
LPDRBKU = 'PDRB sektor keuangan tahun sebelumnya'
LPDRBLGA= 'PDRB listrik,gas,dan air tahun sebelumnya'
LPDRBSP  = 'PDRB sektor pertanian tahun sebelumnya'
LPDRBTB  = 'PDRB sektor pertambangan tahun sebelumnya'
LPDRBTR  = 'PDRB sektor transportasi tahun sebelumnya'
LPPKT    = 'Pendapatan perkapita tahun sebelumnya'
LPTKNP   = 'Penyerapan T kerja non pertanian tahun sebelumnya'
LPTKSP   = 'Penyerapan T kerja pertanian tahun sebelumnya'
LRETD    = 'Penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya'
LUNEP    = 'Pengangguran tahun sebelumnya'
LINFL    = 'Inflasi tahun sebelumnya'
MISK     = 'Jumlah penduduk miskin'
MTR      = 'Jumlah kendaran bermotor'
NTRP     = 'Nilai tukar rupiah'
NEXP     = 'Net ekspor'
PAD      = 'Pendapatan asli daerah'
PADL     = 'Penerimaan asli daerah lain-lain'
PAJD     = 'Pajak daerah'
PDRB     = 'Produk domestik regional bruto'
PDRBBG   = 'PDRB sektor bangunan'
PDRBDG   = 'PDRB sektor perdagangan'
PDRBID   = 'PDRB sektor industri'
PDRBJS   = 'PDRB sektor jasa-jasa'
PDRBKU   = 'PDRB  sektor keuangan'
PDRBLGA = 'PDRB sektor listrik gas dan air'
PDRBSP   = 'PDRB  sektor pertanian'
PDRBTB   = 'PDRB  sektor pertambangan'
PDRBTR   = 'PDRB  sektor transportasi'
PLD      = 'Penerimaan lain daerah'
PNS      = 'Jumlah pengawai negeri sipil'
POP      = 'Jumlah penduduk'
PTK      = 'Penyerapan tenaga kerja'
PTKNP    = 'Penyerapan tenaga  kerja non pertanian'
PTKSP    = 'Penyerapan tenaga kerja  pertanian'
RETD     = 'Retribusi daerah'
SBI      = 'Suku bunga Bank Indonesia'
TPD      = 'Total penerimaan daerah'
TPGP     = 'Total pengeluaran pemerintah'
TPGPD    = 'Total pengeluaran pemerintah daerah'
TREN     = 'Tren (tahun 1,2,3, ...n)'
UMP      = 'Upah  minimum Provinsi'
UNEP     = 'Pengangguran';
RUN;

PROC SYSLIN 2SLS DATA=SULSEL;
ENDOGENOUS   PAJD  RETD DAU DBH BPGW BBJ BMDSP BMDSL BLL KONS INVS
                   EXPD IMPD PDRBSP PDRBTB PDRBID PDRBLGA PDRBBG PDRBDG
                   PDRBTR PDRBKU PDRBJS PTKSP PTKNP UNEP MISK INFL PAD TPD
                   BMD TPGPD TPGP NEXP PDRB PTK;

INSTRUMENTS  POP MTR LPAJD LRETD LDAU LDK PNS TREN LBPGW LBBJ JMKH
                   LBMDSP LBMDSL  LBLL LKONS  SBI UMP LINVS NTRP LEXPD
                   LIMPD INFLK DDTBL AKK LPTKSP LPTKNP  LUNEP  LMISK  BUMD
                   PADL  DAK PLD LDBH LPDRBTB LPDRBID;
```

Lampiran 2. Lanjutan

```
MODEL PAJD       =  TPGPD MTR JMKH LPAJD/DW;
MODEL RETD       =  PDRB  TPGPD POP LRETD/DW;
MODEL DAU        =  PNS PAD BBJ BLL LDK INFL/DW;
MODEL DBH        =  PDRB TREN LDBH/DW;
MODEL BPGW       =  PNS  PAD DAU LBPGW/DW;
MODEL BBJ        =  PAD  DAU DBH LBBJ/DW;
MODEL BMDSP      =  DAK DAU PDRBSP LBMDSP/DW;
MODEL BMDSL      =  DBH DAK LBMDSL/DW;
MODEL BLL        =  DAU DBH PAD LBLL/DW;
MODEL KONS       =  PDRB  BBJ  BPGW  INFL LKONS/DW;
MODEL INVS       =  BMD PAD KONS LINVS/DW;
MODEL EXPD       =  NTRP PDRB INFL LEXPD/DW;
MODEL IMPD       =  KONS INVS LIMPD/DW;
MODEL PDRBSP     =  PTKSP BMDSP INVS KONS DDTBL LPDRBSP/DW;
MODEL PDRBTB     =  PTKNP INVS DDTBL NEXP LPDRBTB/DW;
MODEL PDRBID     =  PTKNP INVS DDTBL BMDSL UMP INFL/DW;
MODEL PDRBLGA=  PTKNP INVS DDTBL LPDRBLGA/DW;
MODEL PDRBBG   =  PTKNP INVS DDTBL BMDSL /DW;
MODEL PDRBDG   =  PTKNP DDTBL  INVS INFL /DW;
MODEL PDRBTR   =  PTKNP INVS DDTBL INFL/DW;
MODEL PDRBKU   =  PTKNP INVS DDTBL INFL /DW;
MODEL PDRBJS     =  PTKNP KONS DDTBL INVS INFL/DW;
MODEL PTKSP      =  AKK INVS LPTKSP/DW;
MODEL PTKNP      =  INVS  AKK LPTKNP/DW;
MODEL MISK       =  PDRB POP UNEP LMISK/DW;
MODEL INFL       =  TPGPD NEXP INVS SBI INFLK /DW;

IDENTITY PAD       = PAJD + RETD +  BUMD + PADL;
IDENTITY UNEP    = AKK – PTK;
IDENTITY TPD       = PAD + DAU + DBH +  DAK + PLD;
IDENTITY BMD       = BMDSP + BMDSL;
IDENTITY TPGPD   = BPGW +  BBJ + BMD + BLL;
IDENTITY TPGP      = TPGPD  +  DDTBL;
IDENTITY NEXP      = EXPD - IMPD;
IDENTITY PTK       = PTKSP + PTKNP;
IDENTITY PDRB      = PDRBSP + PDRBTB + PDRBID + PDRBLGA + PDRBBG + PDRBDG
                        + PDRBTR + PDRBKU + PDRBJS;


RUN;
```

Lampiran 3. Hasil Estimasi Model Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomia Kobupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan SAS Versi 9.0 SYSLIN Metode 2 SLS

Model : Pajak daerah (PAJD)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	PAJD
Dependent Variable	PAJD
Label	Pajak daerah

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	9.6268E9	2.4067E9	832.09	<.0001
Error	133	3.8468E8	2892356		
Corrected Total	137	1.001E10			

Root MSE	1700.69281	R-Square	0.96158
Dependent Mean	3825.37681	Adj R-Sq	0.96042
Coeff Var	44.45818		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-894.889	546.3061	-1.64	0.1038	Intercept
TPGPD	1	0.003597	0.003012	1.19	0.2345	Total pengeluaran pemerintah daerah
MTR	1	0.000999	0.003774	0.26	0.7917	Jumlah kendaran bermotor
JMKH	1	1.697810	0.510411	3.33	0.0011	Jumlah kamar hotel
LPAJD	1	0.851925	0.043998	19.36	<.0001	Pajak daerah tahun sebelumnya

Durbin-Watson	1.889319
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.054658

Lampiran 3. Lanjutan

Model : Retribusi daerah (RETD)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	RETD
Dependent Variable	RETD
Label	Retribusi daerah

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	1.9261E9	4.8154E8	299.11	<.0001
Error	133	2.1412E8	1609900		
Corrected Total	137	2.1456E9			

Root MSE	1268.81853	R-Square	0.89996
Dependent Mean	4859.66667	Adj R-Sq	0.89695
Coeff Var	26.10917		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-506.919	411.9061	-1.23	0.2206	Intercept
PDRB	1	0.000033	0.000089	0.37	0.7120	Produk domestik regional bruto
TPGPD	1	0.006649	0.003039	2.19	0.0304	Total pengeluaran pemerintah daerah
POP	1	0.000028	0.001184	0.02	0.9815	Jumlah penduduk
LRETD	1	0.831304	0.052452	15.85	<.0001	Penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya

Durbin-Watson	1.914018
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.041987

Lampiran 3. Lanjutan

Model : Dana Alokasi Umum (DAU)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	DAU
Dependent Variable	DAU
Label	Dana alokasi umum

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	6	2.414E11	4.023E10	239.57	<.0001
Error	131	2.2E10	1.6792E8		
Corrected Total	137	2.636E11			

Root MSE	12958.3117	R-Square	0.91648
Dependent Mean	136544.572	Adj R-Sq	0.91265
Coeff Var	9.49017		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	30475.51	4601.761	6.62	<.0001	Intercept
PNS	1	13.69660	0.754482	18.15	<.0001	Jumlah pengawai negeri sipil
PAD	1	-0.53122	0.248029	-2.14	0.0341	Pendapatan asli daerah
BBJ	1	0.485651	0.161263	3.01	0.0031	Belanja barang dan jasa
BLL	1	0.562410	0.207177	2.71	0.0075	Belanja lain-lain pemerintah
LDK	1	1.234813	0.604494	2.04	0.0431	Luas daerah kabupaten/kota
INFL	1	8.802526	3.649584	2.41	0.0173	Inflasi daerah

Durbin-Watson	1.317229
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.340778

Lampiran 3. Lanjutan

Model : Dana Bagi Hasil (DBH)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	DBH
Dependent Variable	DBH
Label	Dana bagi hasil

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	3	1.439E10	4.7982E9	241.79	<.0001
Error	134	2.6591E9	19844224		
Corrected Total	137	1.705E10			

Root MSE	4454.68564	R-Square	0.84407
Dependent Mean	17537.3913	Adj R-Sq	0.84058
Coeff Var	25.40107		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	2751.065	1119.076	2.46	0.0152	Intercept
PDRB	1	0.000693	0.000315	2.20	0.0294	Produk domestik regional bruto
TREN	1	23.83727	222.7611	0.11	0.9149	Tren (tahun 1,2,3, ...n)
LDBH	1	0.814383	0.069728	11.68	<.0001	Dana bagi hasil tahun sebelumnya

Durbin-Watson	1.757372
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.120147

Lampiran 3. Lanjutan

Model : Belanja Pegawai (BPGW)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	BPGW
Dependent Variable	BPGW
Label	Belanja pegawai

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	2.841E11	7.102E10	588.76	<.0001
Error	133	1.604E10	1.2062E8		
Corrected Total	137	3E11			

Root MSE	10982.8300	R-Square	0.94654
Dependent Mean	98461.7246	Adj R-Sq	0.94494
Coeff Var	11.15442		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-18.8553	4349.203	-0.00	0.9965	Intercept
PNS	1	4.759793	1.648381	2.89	0.0045	Jumlah pengawai negeri sipil
PAD	1	0.350788	0.127827	2.74	0.0069	Pendapatan asli daerah
DAU	1	0.114625	0.074325	1.54	0.1254	Dana alokasi umum
LBPGW	1	0.545952	0.082012	6.66	<.0001	Belanja pegawai tahun sebelumnya

Durbin-Watson	1.164905
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.41657

Lampiran 3. Lanjutan

Model : Belanja Barang Dan Jasa (BBJ)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	BBJ
Dependent Variable	BBJ
Label	Belanja barang dan jasa

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	3.996E10	9.9888E9	238.36	<.0001
Error	133	5.5735E9	41905986		
Corrected Total	137	4.561E10			

Root MSE	6473.48326	R-Square	0.87758
Dependent Mean	28956.9203	Adj R-Sq	0.87390
Coeff Var	22.35557		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	353.7153	2346.321	0.15	0.8804	Intercept
PAD	1	0.250704	0.100735	2.49	0.0141	Pendapatan asli daerah
DAU	1	0.040235	0.019929	2.02	0.0455	Dana alokasi umum
DBH	1	0.087965	0.082359	1.07	0.2874	Dana bagi hasil
LBBJ	1	0.722516	0.058719	12.30	<.0001	Belanja barang dan jasa tahun sebelumnya

Durbin-Watson	1.874866
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.052821

Lampiran 3. Lanjutan

Model : Belanja Modal Sektor Pertanian (BMDSP)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	BMDSP
Dependent Variable	BMDSP
Label	Belanja modal sektor pertanian

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	3.1258E8	78145606	17.15	<.0001
Error	133	6.0586E8	4555370		
Corrected Total	137	9.2144E8			

Root MSE	2134.33137	R-Square	0.34034
Dependent Mean	7540.77536	Adj R-Sq	0.32050
Coeff Var	28.30387		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	3128.957	739.4939	4.23	<.0001	Intercept
DAK	1	0.027119	0.027804	0.98	0.3312	Dana alokasi khusus
DAU	1	0.000922	0.004477	0.21	0.8371	Dana alokasi umum
PDRBSP	1	0.001142	0.000655	1.74	0.0836	PDRB sektor pertanian
LBMDSP	1	0.441545	0.080968	5.45	<.0001	Belanja modal sek pertanian tahun sebelumnya

Durbin-Watson	2.089873
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	-0.04519

Lampiran 3. Lanjutan

Model : Belanja modal sektor lainnya (BMDSL)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	BMDSL
Dependent Variable	BMDSL
Label	Belanja modal sektor lainnya

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	3	6.806E10	2.269E10	86.55	<.0001
Error	134	3.513E10	2.6213E8		
Corrected Total	137	1.041E11			

Root MSE	16190.4658	R-Square	0.65960
Dependent Mean	48725.8261	Adj R-Sq	0.65198
Coeff Var	33.22769		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-8386.77	4368.544	-1.92	0.0570	Intercept
DBH	1	0.634638	0.150884	4.21	<.0001	Dana bagi hasil
DAK	1	1.385087	0.252770	5.48	<.0001	Dana alokasi khusus
LBMDSL	1	0.531635	0.082577	6.44	<.0001	Belanja modal sekt lainnya tahun sebelumnya

Durbin-Watson	2.144169
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	-0.07747

Lampiran 3. Lanjutan

Model : Belanja Lain-lain Pemerintah (BLL)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	BLL
Dependent Variable	BLL
Label	Belanja lain-lain pemerintah

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	7.8137E9	1.9534E9	34.45	<.0001
Error	133	7.542E9	56706479		
Corrected Total	137	1.537E10			

Root MSE	7530.37041	R-Square	0.50885
Dependent Mean	18976.5652	Adj R-Sq	0.49408
Coeff Var	39.68247		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	1438.420	2750.889	0.52	0.6019	Intercept
DAU	1	0.034405	0.023518	1.46	0.1458	Dana alokasi umum
DBH	1	0.135642	0.095024	1.43	0.1558	Dana bagi hasil
PAD	1	0.019118	0.107934	0.18	0.8597	Pendapatan asli daerah
LBLL	1	0.515788	0.082328	6.27	<.0001	Belanja lain-lain pemerintah tahun sebelumnya

Durbin-Watson	1.749115
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.124248

Lampiran 3. Lanjutan

Model : Konsumsi Swasta (KONS)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	KONS
Dependent Variable	KONS
Label	Konsumsi swasta

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	5	2.411E14	4.823E13	7499.55	<.0001
Error	132	8.489E11	6.431E9		
Corrected Total	137	2.42E14			

Root MSE	80193.3759	R-Square	0.99649
Dependent Mean	987507.536	Adj R-Sq	0.99636
Coeff Var	8.12079		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-58432.8	27464.25	-2.13	0.0352	Intercept
PDRB	1	0.034252	0.017717	1.93	0.0553	Produk domestik regional bruto
BBJ	1	0.021192	0.876278	0.02	0.9807	Belanja barang dan jasa
BPGW	1	0.304371	0.315747	0.96	0.3368	Belanja pegawai
INFL	1	34.36591	22.88060	1.50	0.1355	Inflasi daerah
LKONS	1	0.993811	0.039858	24.93	<.0001	Peng konsumsi swasta tahun sebelumnya

Durbin-Watson	1.960193
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.019156

Lampiran 3. Lanjutan

Model : Investasi Swasta (INVS)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	INVS
Dependent Variable	INVS
Label	Investasi swasta

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	7.157E13	1.789E13	1586.91	<.0001
Error	133	1.5E12	1.128E10		
Corrected Total	137	7.309E13			

Root MSE	106186.478	R-Square	0.97948
Dependent Mean	333570.072	Adj R-Sq	0.97886
Coeff Var	31.83333		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-56197.4	23171.28	-2.43	0.0166	Intercept
BMD	1	0.325015	0.387048	0.84	0.4026	Belanja modal
PAD	1	-4.27491	2.151831	-1.99	0.0490	Pendapatan asli daerah
KONS	1	0.166592	0.042444	3.92	0.0001	Konsumsi swasta
LINVS	1	0.859675	0.070341	12.22	<.0001	Investasi swasta tahun sebelumnya

Durbin-Watson	2.110014
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	-0.05585

Lampiran 3. Lanjutan

Model: Ekspor daerah (EXPD)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	EXPD
Dependent Variable	EXPD
Label	Ekspor daerah

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	5.042E14	1.261E14	5260.21	<.0001
Error	133	3.187E12	2.396E10		
Corrected Total	137	5.075E14			

Root MSE	154803.974	R-Square	0.99372
Dependent Mean	809486.536	Adj R-Sq	0.99353
Coeff Var	19.12372		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	885709.3	314830.3	2.81	0.0056	Intercept
NTRP	1	-112.862	37.38489	-3.02	0.0030	Nilai tukar rupiah
PDRB	1	0.152388	0.029468	5.17	<.0001	Produk domestik regional bruto
INFL	1	97.14248	76.09374	1.28	0.2040	Inflasi daerah
LEXPD	1	0.888123	0.040102	22.15	<.0001	Ekspor daerah tahun sebelumnya

Durbin-Watson	1.671489
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.16354

Lampiran 3. Lanjutan

Model: Impor daerah (IMPD)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	IMPD
Dependent Variable	IMPD
Label	Impor daerah

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	3	4.803E14	1.601E14	8099.41	<.0001
Error	134	2.649E12	1.977E10		
Corrected Total	137	4.831E14			

Root MSE	140595.434	R-Square	0.99452
Dependent Mean	631105.232	Adj R-Sq	0.99439
Coeff Var	22.27765		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-27584.5	26452.75	-1.04	0.2989	Intercept
KONS	1	0.004562	0.046918	0.10	0.9227	Konsumsi swasta
INVS	1	0.208677	0.095151	2.19	0.0300	Investasi swasta
LIMPD	1	0.959934	0.040828	24.49	<.0001	Impor daerah tahun sebelumnya

Durbin-Watson	1.399379
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.29896

Lampiran 3. Lanjutan

Model: PDRB Sektor Pertanian (PDRBSP)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	PDRBSP
Dependent Variable	PDRBSP
Label	PDRB sektor pertanian

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	6	1.541E13	2.569E12	5379.04	<.0001
Error	131	6.256E10	4.7755E8		
Corrected Total	137	1.548E13			

Root MSE	21852.9159	R-Square	0.99596
Dependent Mean	535528.370	Adj R-Sq	0.99577
Coeff Var	4.08063		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-509.331	7938.994	-0.06	0.9489	Intercept
PTKSP	1	0.002354	0.072469	0.03	0.9741	Penyerapan tenaga kerja pertanian
BMDSP	1	0.079091	1.137519	0.07	0.9447	Belanja modal sektor pertanian
INVS	1	0.00636	0.014736	0.43	0.6668	Investasi swasta
KONS	1	0.007406	0.010994	0.67	0.5017	Konsumsi swasta
DDTBL	1	-0.02479	0.029224	-0.85	0.3978	Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya
LPDRBSP	1	0.931768	0.010879	94.84	<.0001	PDRB sektor pertanian tahun sebelumnya

Durbin-Watson	1.858478
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.070083

Lampiran 3. Lanjutan

Model: PDRB Sektor Pertambangan (PDRBTB)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	PDRBTB
Dependent Variable	PDRBTB
Label	PDRB sektor pertambangan

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	5	6.622E13	1.324E13	8393.12	<.0001
Error	132	2.083E11	1.578E9		
Corrected Total	137	6.644E13			

Root MSE	39724.5173	R-Square	0.99686
Dependent Mean	163141.768	Adj R-Sq	0.99675
Coeff Var	24.34969		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	4165.460	6207.374	0.67	0.5034	Intercept
PTKNP	1	-0.18759	0.165032	-1.14	0.2577	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
INVS	1	0.008108	0.016496	0.49	0.6239	Investasi swasta
DDTBL	1	0.044087	0.039349	1.12	0.2646	Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya
NEXP	1	0.048805	0.020538	2.38	0.0189	Net ekspor
LPDRBTB	1	0.978771	0.015867	61.69	<.0001	PDRB sektor pertambangan tahun sebelumnya

Durbin-Watson	2.159684
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	-0.07993

Lampiran 3. Lanjutan

Model: PDRB Sektor Industri (PDRBID)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	PDRBID
Dependent Variable	PDRBID
Label	PDRB sektor industri

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	6	3.904E13	6.506E12	117.98	<.0001
Error	131	7.224E12	5.514E10		
Corrected Total	137	4.623E13			

Root MSE	234824.227	R-Square	0.84384
Dependent Mean	235763.261	Adj R-Sq	0.83669
Coeff Var	99.60170		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	3107.836	119053.0	0.03	0.9792	Intercept
PTKNP	1	1.461541	0.932260	1.57	0.1194	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
INVS	1	0.305956	0.095432	3.21	0.0017	Investasi swasta
DDTBL	1	0.796363	0.235051	3.39	0.0009	Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya
BMDSL	1	0.480399	1.100201	0.44	0.6631	Belanja modal sektor lainnya
UMP	1	-0.08983	0.215373	-0.42	0.6773	Upah minimum Provinsi
INFL	1	34.93782	67.43198	0.52	0.6052	Inflasi daerah

Durbin-Watson	1.863041
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.067784

Lampiran 3. Lanjutan

Model: PDRB Sektor Listrik Gas dan Air (PDRBLGA)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	PDRBLGA
Dependent Variable	PDRBLGA
Label	PDRB sektor listrik gas dan air

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	3.071E11	7.678E10	11664.2	<.0001
Error	133	8.7547E8	6582514		
Corrected Total	137	3.079E11			

Root MSE	2565.64097	R-Square	0.99716
Dependent Mean	17487.5507	Adj R-Sq	0.99707
Coeff Var	14.67124		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-997.755	414.2772	-2.41	0.0174	Intercept
PTKNP	1	0.008217	0.011145	0.74	0.4622	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
INVS	1	0.014008	0.002048	6.84	<.0001	Investasi swasta
DDTBL	1	0.012725	0.004308	2.95	0.0037	Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya
LPDRBLGA	1	0.769387	0.057730	13.33	<.0001	PDRB listrik,gas,dan air tahun sebelumnya

Durbin-Watson	2.01421
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	-0.00745

Lampiran 3. Lanjutan

Model: PDRB Sektor Bangunan (PDRBBG)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	PDRBBG
Dependent Variable	PDRBBG
Label	PDRB sektor bangunan

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	5.29E12	1.323E12	2162.13	<.0001
Error	133	8.135E10	6.1167E8		
Corrected Total	137	5.363E12			

Root MSE	24731.9854	R-Square	0.98485
Dependent Mean	92249.9493	Adj R-Sq	0.98440
Coeff Var	26.80976		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	9524.944	5334.414	1.79	0.0764	Intercept
PTKNP	1	0.042254	0.097971	0.43	0.6670	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
INVS	1	0.205493	0.009983	20.58	<.0001	Investasi swasta
DDTBL	1	0.184136	0.024141	7.63	<.0001	Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya
BMDSL	1	0.002987	0.085687	0.03	0.9722	Belanja modal sektor lainnya

Durbin-Watson	1.870577
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.063562

Lampiran 3. Lanjutan

Model: PDRB sektor perdagangan (PDRBDG)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	PDRBDG
Dependent Variable	PDRBDG
Label	PDRB sektor perdagangan

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	6.641E13	1.66E13	3609.91	<.0001
Error	133	6.117E11	4.5995E9		
Corrected Total	137	6.698E13			

Root MSE	67819.5000	R-Square	0.99087
Dependent Mean	274767.478	Adj R-Sq	0.99060
Coeff Var	24.68251		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-23241.6	17500.58	-1.33	0.1864	Intercept
PTKNP	1	0.722010	0.268251	2.69	0.0080	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
DDTBL	1	0.845538	0.065654	12.88	<.0001	Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya
INVS	1	0.599660	0.027318	21.95	<.0001	Investasi swasta
INFL	1	2.423793	18.76695	0.13	0.8974	Inflasi daerah

Durbin-Watson	1.665741
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.165512

Lampiran 3. Lanjutan

Model: PDRB Sektor Transportasi (PDRBTR)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	PDRBTR
Dependent Variable	PDRBTR
Label	PDRB sektor transportasi

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	2.091E13	5.226E12	3215.55	<.0001
Error	133	2.162E11	1.6253E9		
Corrected Total	137	2.112E13			

Root MSE	40315.2218	R-Square	0.98977
Dependent Mean	135486.341	Adj R-Sq	0.98946
Coeff Var	29.75593		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-36194.9	10403.20	-3.48	0.0007	Intercept
PTKNP	1	0.452899	0.159462	2.84	0.0052	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
INVS	1	0.328033	0.016239	20.20	<.0001	Investasi swasta
DDTBL	1	0.483506	0.039028	12.39	<.0001	Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya
INFL	1	6.352968	11.15599	0.57	0.5700	Inflasi daerah

Durbin-Watson	1.858367
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.065432

Lampiran 3. Lanjutan

Model: PDRB Sektor Keuangan (PDRBKU)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model		PDRBKU
Dependent Variable		PDRBKU
Label	PDRB	sektor keuangan

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	8.463E12	2.116E12	4802.20	<.0001
Error	133	5.859E10	4.4056E8		
Corrected Total	137	8.519E12			

Root MSE	20989.4031	R-Square	0.99312
Dependent Mean	110368.522	Adj R-Sq	0.99292
Coeff Var	19.01756		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-7047.39	5416.240	-1.30	0.1955	Intercept
PTKNP	1	0.539378	0.083021	6.50	<.0001	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
INVS	1	0.199153	0.008455	23.56	<.0001	Investasi swasta
DDTBL	1	0.250975	0.020319	12.35	<.0001	Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya
INFL	1	3.834177	5.808169	0.66	0.5103	Inflasi daerah

Durbin-Watson	1.997108
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	-0.00368

Lampiran 3. Lanjutan

Model: PDRB Sektor Jasa-Jasa (PDRBJS)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	PDRBJS
Dependent Variable	PDRBJS
Label	PDRB sektor jasa-jasa

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	5	9.357E12	1.871E12	944.82	<.0001
Error	132	2.614E11	1.9807E9		
Corrected Total	137	9.612E12			

Root MSE	44504.6302	R-Square	0.97282
Dependent Mean	201075.674	Adj R-Sq	0.97179
Coeff Var	22.13327		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	31367.64	12267.21	2.56	0.0117	Intercept
PTKNP	1	1.465487	0.191524	7.65	<.0001	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
KONS	1	0.060057	0.016958	3.54	0.0006	Konsumsi swasta
DDTBL	1	0.125627	0.045732	2.75	0.0069	Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya
INVS	1	0.042223	0.024742	1.71	0.0903	Investasi swasta
INFL	1	0.727640	12.42335	0.06	0.9534	Inflasi daerah

Durbin-Watson	1.634413
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.179755

Lampiran 3. Lanjutan

Model: Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian (PTKSP)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	PTKSP
Dependent Variable	PTKSP
Label	Penyerapan tenaga kerja pertanian

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	3	2.388E11	7.962E10	1358.40	<.0001
Error	134	7.8538E9	58610486		
Corrected Total	137	2.467E11			

Root MSE	7655.74857	R-Square	0.96816
Dependent Mean	67196.5870	Adj R-Sq	0.96745
Coeff Var	11.39306		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-1167.51	1415.957	-0.82	0.4111	Intercept
AKK	1	0.052376	0.021492	2.44	0.0161	Jumlah angkatan kerja
INVS	1	-0.00652	0.002933	-2.22	0.0280	Investasi swasta
LPTKSP	1	0.949041	0.029982	31.65	<.0001	Penyerapan T kerja pertanian tahun sebelumnya

Durbin-Watson	1.810213
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.094773

Lampiran 3. Lanjutan

Model: Penyerapan Tenaga Kerja Non Pertanian (PTKNP)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	PTKNP
Dependent Variable	PTKNP
Label	Penyerapan tenaga kerja non pertanian

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	3	9.624E11	3.208E11	5205.17	<.0001
Error	134	8.2581E9	61627890		
Corrected Total	137	9.708E11			

Root MSE	7850.34329	R-Square	0.99149
Dependent Mean	59987.5435	Adj R-Sq	0.99130
Coeff Var	13.08662		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-624.690	1449.973	-0.43	0.6673	Intercept
INVS	1	0.017133	0.002785	6.15	<.0001	Investasi swasta
AKK	1	0.050626	0.015213	3.33	0.0011	Jumlah angkatan kerja
LPTKNP	1	0.844376	0.032311	26.13	<.0001	Penyerapan T kerja non pertanian tahun sebelumnya

Durbin-Watson	1.396938
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.301355

Lampiran 3. Lanjutan

Model: Jumlah Penduduk Miskin (MISK)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	MISK
Dependent Variable	MISK
Label	Jumlah penduduk miskin

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	4	1.053E11	2.632E10	1081.79	<.0001
Error	133	3.2356E9	24327601		
Corrected Total	137	1.085E11			

Root MSE	4932.30182	R-Square	0.97018
Dependent Mean	45116.2319	Adj R-Sq	0.96928
Coeff Var	10.93243		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	580.0407	838.3493	0.69	0.4902	Intercept
PDRB	1	-0.00024	0.000490	-0.50	0.6209	Produk domestik regional bruto
POP	1	0.005544	0.007833	0.71	0.4803	Jumlah penduduk
UNEP	1	0.03071	0.112499	0.27	0.7853	Pengangguran
LMISK	1	0.946619	0.028800	32.87	<.0001	Jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya

Durbin-Watson	1.553265
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.223248

Lampiran 3. Lanjutan

Model: Inflasi Daerah (INFL)

The SAS System

The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation

Model	INFL
Dependent Variable	INFL
Label	Inflasi daerah

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	5	12447460	2489492	158.68	<.0001
Error	132	2070951	15689.02		
Corrected Total	137	14513012			

Root MSE	125.25584	R-Square	0.85736
Dependent Mean	771.02899	Adj R-Sq	0.85195
Coeff Var	16.24528		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|	Variable Label
Intercept	1	-10.9780	85.70002	-0.13	0.8983	Intercept
TPGPD	1	0.000243	0.000262	0.93	0.3551	Total pengeluaran pemerintah daerah
NEXP	1	0.000049	0.000021	2.35	0.0200	Net ekspor
INVS	1	-0.00004	0.000025	-1.41	0.1618	Investasi swasta
SBI	1	-0.03856	0.055411	-0.70	0.4877	Suku bunga Bank Indonesia
INFLK	1	0.914515	0.034119	26.80	<.0001	Inflasi kota Kendari

Durbin-Watson	1.327861
Number of Observations	138
First-Order Autocorrelation	0.334318

Lampiran 4. Program Komputer Validasi Model untuk Kabupaten Berbasis Pertanian

```
OPTIONS NODATE NONUMBER;
DATA SULSEL;
SET ANALISIS;

PAD      = PAJD + RETD + BUMD + PADL;
TPD      = PAD + DAU + DBH + DAK + PLD;
BMD      = BMDSP + BMDSL;
TPGPD    = BPGW + BBJ + BMD + BLL;
TPGP     = TPGPD + DDTBL;
PTK      = PTKSP + PTKNP;
NEXP     = EXPD - IMPD ;
PDRB     = PDRBSP + PDRBTB + PDRBID + PDRBLGA + PDRBBG + PDRBDG + PDRBTR
           + PDRBKU + PDRBJS;;
PPKT     = PDRB/POP;
PDTANI   = PDRBSP/PTKSP;

LABEL
AKK      = 'Jumlah angkatan kerja'
BBJ      = 'Belanja barang dan jasa'
BLL      = 'Belanja lain-lain pemerintah'
BMD      = 'Belanja modal'
BMDSL    = 'Belanja modal sektor lainnya'
BMDSP    = 'Belanja modal sektor pertanian'
BPGW     = 'Belanja pegawai'
BUMD     = 'Badan usaha milik daerah'
DAK      = 'Dana alokasi khusus'
DAU      = 'Dana alokasi umum'
DBH      = 'Dana bagi hasil'
DDTBL    = 'Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya'
EXPD     = 'Ekspor daerah'
IMPD     = 'Impor daerah'
INFL     = 'Inflasi daerah'
INVS     = 'Investasi swasta'
JMKH     = 'Jumlah kamar hotel'
KONS     = 'Konsumsi swasta'
LBBJ     = 'Belanja barang dan jasa tahun sebelumnya'
LBLL     = 'Belanja lain-lain pemerintah tahun sebelumnya'
LBMDSP   = 'Belanja modal sek pertanian tahun sebelumnya'
LBMDSL   = 'Belanja modal sekt lainnya tahun sebelumnya'
LBPGW    = 'Belanja pegawai tahun sebelumnya'
LDK      = 'Luas daerah kabupaten/kota'
LDBH     = `Dana bagi hasil tahun sebelumnya'
LEXPD    = 'Ekspor daerah tahun sebelumnya'
LIMPD    = 'Impor daerah tahun sebelumnya'
LINVS    = 'Investasi swasta  tahun sebelumnya'
LKONS    = 'Peng konsumsi swasta  tahun sebelumnya'
LMISK    = 'Jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya'
LPAJD    = 'Pajak daerah tahun sebelumnya'
LPDRB    = 'PDRB tahun sebelumnya'
LPDRBID  = 'PDRB sektor industri tahun sebelumnya'
LPDRBTB  = 'PDRB sektor pertambangan tahun sebelumnya'
LPPKT    = 'Pendapatan perkapita tahun sebelumnya'
LPTKNP   = 'Penyerapan T kerja non pertanian tahun sebelumnya'
LPTKSP   = 'Penyerapan T kerja pertanian tahun sebelumnya'
LRETD    = 'Penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya'
LUNEP    = 'Pengangguran tahun sebelumnya'
MISK     = 'Jumlah penduduk miskin'
```

Lampiran 4. Lanjutan

```
MTR      = 'Jumlah kendaran bermotor'
NTRP     = 'Nilai tukar rupiah'
NEXP     = 'Net ekspor'
PAD      = 'Pendapatan asli daerah'
PADL     = 'Penerimaan asli daerah lain-lain'
PAJD     = 'Pajak daerah'
PDRB     = 'Produk domestik regional bruto'
PDRBBG   = 'PDRB sektor bangunan'
PDRBDG   = 'PDRB sektor perdagangan'
PDRBID   = 'PDRB sektor industri'
PDRBJS   = 'PDRB sektor jasa-jasa'
PDRBKU   = 'PDRB sektor keuangan'
PDRBLGA  = 'PDRB sektor listrik gas dan air'
PDRBSP   = 'PDRB sektor pertanian'
PDRBTB   = 'PDRB sektor pertambangan'
PDRBTR   = 'PDRB sektor transportasi'
PLD      = 'Penerimaan lain daerah'
PNS      = 'Jumlah pengawai negeri sipil'
POP      = 'Jumlah penduduk'
PTK      = 'Penyerapan tenaga kerja'
PTKNP    = 'Penyerapan tenaga  kerja non pertanian'
PTKSP    = 'Penyerapan tenaga kerja  pertanian'
RETD     = 'Retribusi daerah'
SBI      = 'Suku bunga Bank Indonesia'
TPD      = 'Total penerimaan daerah'
TPGP     = 'Total pengeluaran pemerintah'
TPGPD    = 'Total pengeluaran pemerintah daerah'
TREN     = 'Tren (tahun 1,2,3, ...n)'
UMP      = 'Upah  minimum Provinsi'
UNEP     = 'Pengangguran'
PPKT     = ‘Pendapatan perkapita’
PDTANI   = ‘Pendapatan Petani’;
RUN;

PROC SIMNLIN DATA=SULSEL SIMULATE STAT OUTPREDICT THEIL;
ENDOGENOUS  PAJD RETD DAU DBH  BPGW BBJ BMDSP BMDSL BLL KONS INVS EXPD
            IMPD PDRBSP PDRBTB PDRBID PDRBLGA PDRBBG PDRBDG  PDRBTR
            PDRBKU PDRBJS  PTKSP PTKNP UNEP MISK INFL PAD BMD TPD TPGPD
            TPGP NEXP PDRB PTK PPKT PDTANI;
INSTRUMENTS  POP MTR LDK PNS TREN JMKH SBI UMP  LINVS NTRP LEXPD  LIMPD
            DDTBL AKK INFLK  BUMD PADL DAK PLD LPAJD  LRETD  LBPGW  LBBJ
            LBMDSP LBMDSL LBLL LKONS LINVS LEXPD LIMPD LPTKNP LPTKNP
            LUNEP LMISK LDBH LPDRBSP LPDRBTB LPDRBID LPDRB;

PARM a0 -894.889  a1 0.003597  a2 0.000999  a3 1.697810 a4 0.851925
      b0  -506.919  b1 0.000033 b2 0.006649  b3 0.000028 b4 0.831304
      c0  30475.51 c1 13.69660  c2-0.53122  c3 0.485651 c4 0.562410  c5 1.234813 c6 8.802526
      d0 2751.065  d1 0.000693  d2 23.83727 d3 0.814383
      e0 -18.8553 e1 4.759793 e2 0.350788 e3 0.114625 e4 0.545952
      f0 353.7153  f1 0.250704 f2 0.040235 f3 0.087965 f4 0.722516
      g0 3128.957 g1 0.027119 g2 0.000922 g3 0.001142 g4 0.441545
      h0 -8386.77  h1 0.634638  h2 1.385087  h3 0.531635
      i0 1438.420 i1 0.034405 i2 0.135642 i3 0.019118 i4 0.515788
      j0 -58432.8  j1 0.034252  j2 0.021192  j3 0.304371  j4 34.36591 j5 0.993811
      k0  -56197.4 k1 0.325015 k2 -4.27491 k3 0.166592 k4 0.859675
      l0  885709.3 l1 -112.862  l2 0.152388 l3 97.14248 l4 0.888123
      m0  -27584.5 m1 0.004562 m2 0.208677 m3 0.999934
      n0  -509.331 n1 0.002354 n2 0.079091 n3 -0.00636 n4
```

Lampiran 4. Lanjutan

```
      0.007406 n5-0.02479 n6 0.931768
      o0 4165.460 o1 -0.18759 o2 0.008108 o3 0.044087 o4 0.048805 o5 0.978771
      p0  3107.836 p1 1.461541 p2 0.305956 p3 0.796363  p4 0.480399 p5 -0.08983 p6 34.93782
      q0  -997.755  q1 0.008217 q2 0.014008  q3 0.012725 q4 0.769387
      r0  9524.944 r1 0.042254 r2 0.205493 r3 0.184136 r4 0.002987
      s0  -23241.6  s1 0.722010 s2 0.845538 s3 0.599660 s4 2.423793
      t0  -36194.9  t1 0.452899 t2 0.328033  t3 0.483506  t4 6.352968
      u0  -7047.39  u1 0.539378 u2  0.199153 u3 0.250975  u4 3.834177
      v0  31367.64 v1 1.465487 v2 0.060057 v3 0.125627 v4 0.042223 v5 0.727640
      w0  -1167.51 w1 0.052376  w2 -0.00652 w3 0.949041
      x0  -624.690 x1 0.017133  x2 0.050626  x3 0.844376
      y0  580.0407   y1 -0.00024  y2 0.005544 y3 -0.03071 y4 0.946619
      z0 -10.9780  z1 0.000243  z2 0.000049  z3 -0.00004 z4 -0.03856 z5 0.914515;

PAJD   = a0 + a1*TPGPD + a2*MTR + a3*JMKH + a4*LPAJD;
RETD   = b0 + b1*PDRB + b2*TPGPD + b3*POP + b4*LRETD;
DAU    = c0 + c1*PNS + C2*PAD + c3*BBJ + c4*BLL + c5*LDK + c6*INFL;
DBH    = d0 + d1*PDRB + d2*TREN + d3*LDBH;
BPGW   = e0 + e1*PNS + e2*PAD + e3*DAU + e4*LBPGW;
BBJ    = f0 + f1*PAD + f2*DAU + f3*DBH + f4*LBBJ;
BMDSP  =  g0 + g1*DAK + g2*DAU + g3*PDRBSP + g4*LBMDSP;
BMDSL  =  h0 + h1*DBH + h2*DAK + h3*LBMDSL;
BLL    =  i0 + i1*DAU + i2*DBH + i3*PAD + i4*LBLL;
KONS   = j0 + j1*PDRB + j2*BBJ + j3*BPGW + j4*INFL + j5*LKONS;
INVS   = k0 + k1*BMD + k2*PAD + k3*KONS + k4*LINVS;
EXPD    =  l0 + l1*NTRP + l2*PDRB +  l3*INFL + l4*LEXPD;
IMPD    =  m0 + m1*KONS + m2*INVS + m3*LIMPD;
PDRBSP  = n0 + n1*PTKSP + n2*BMDSP + n3* INVS + n4*KONS + n5* DDTBL +
          n6*LPDRBSP;
PDRBTB  = o0 + o1* PTKNP + o2*INVS + o3*DDTBL + o4*NEXP + o5*LPDRBTB;
PDRBID  = p0 + p1*PTKNP + p2*INVS + p3*DDTBL + p4*BMDSL + p5*UMP +
p6*INFL;
PDRBLGA = q0 + q1*PTKNP + q2*INVS + q3*DDTBL + q4*LPDRBLGA;
PDRBBG   = r0 + r1*PTKNP + r2*INVS + r3*DDTBL + r4*INFL;
PDRBDG   = s0 + s1*PTKNP + s2*DDTBL + s3*INVS + s4*INFL;
PDRBTR   = t0 + t1*PTKNP + t2*INVS + t3*DDTBL + t4*INFL;
PDRBKU   = u0 + u1*PTKNP + u2*INVS + u3*DDTBL + u4*INFL;
PDRBJS   = v0 + v1*PTKNP + v2*KONS + v3*DDTBL + v4*INVS + v5*INFL;
PTKSP    = w0 + w1*AKK + w2*INVS + w3*LPTKSP;
PTKNP    = x0 + x1*INVS + x2*AKK + x3*LPTKNP;
MISK     = y0 + y1*PDRB + y2*POP +  y3*UNEP + y4*LMISK;
INFL     =  z0 + z1*TPGPD + z2*NEXP + z3*INVS + z4*SBI + z5*INFLK;
PAD      =  PAJD + RETD +  BUMD + PADL;
UNEP      = AKK - PTK;
TPD      = PAD + DAU + DBH +  DAK + PLD;
BMD      = BMDSP + BMDSL;
TPGPD    = BPGW +  BBJ   + BMD    + BLL;
TPGP     = TPGPD  +  DDTBL;
NEXP     = EXPD - IMPD ;
PTK      = PTKSP + PTKNP;
PDRB     = PDRBSP + PDRBTB + PDRBID + PDRBLGA + PDRBBG + PDRBDG + PDRBTR
           + PDRBKU + PDRBJS;
PPKT     = PDRB/POP;
PDTANI   = PDRBSP/PTKSP;
range kriteria=1 to 17;

RUN;
```

Lampiran 5. Hasil Validasi Model Validasi Model untuk Kabupaten Berbasis Pertanian

The SAS System

The SIMNLIN Procedure

Model Summary

Model Variables	37
Endogenous	37
Parameters	135
Range Variable	Kriteria
Equations	37
Number of Statements	37

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Data Set Options

DATA= SULSEL

Solution Summary

Variables Solved	37
Solution Range	Kriteria
First	1
Last	17
Solution Method	NEWTON
CONVERGE=	1E-8
Maximum CC	6.45E-15
Maximum Iterations	2
Total Iterations	194
Average Iterations	2

Observations Processed

Read	97
Solved	97

Lampiran 5. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 1 To 17
Descriptive Statistics

Variable	N Obs	N	Actual Mean	Actual Std Dev	Predicted Mean	Predicted Std Dev	Label
PAJD	97	97	1529.1	825.7	1687.0	1330.0	Pajak daerah
RETD	97	97	4060.8	2454.8	4198.5	2204.5	Retribusi daerah
DAU	97	97	138493	34208.8	138329	29821.5	Dana alokasi umum
DBH	97	97	15424.4	5940.4	15532.7	5039.4	Dana bagi hasil
BPGW	97	97	97987.9	32630.6	98262.3	30785.3	Belanja pegawai
BBJ	97	97	26134.9	10279.1	26174.1	8677.4	Belanja barang dan jasa
BMDSP	97	97	8169.7	2401.9	7954.0	1308.9	Belanja modal sektor pertanian
BMDSL	97	97	46264.2	22683.4	47987.6	20907.2	Belanja modal sektor lainnya
BLL	97	97	18126.0	8653.9	18226.3	5303.8	Belanja lain-lain pemerintah
KONS	97	97	742060	330817	739251	351980	Konsumsi swasta
INVS	97	97	191920	112827	197392	134678	Investasi swasta
EXPD	97	97	282061	185382	292141	244826	Ekspor daerah
IMPD	97	97	204546	87894.7	211427	115523	Impor daerah
PDRBSP	97	97	650834	322887	587651	291430	PDRB sek. pertanian
PDRBTB	97	97	13194.8	22161.3	13629.2	24043.4	PDRB sek.pertambangan
PDRBID	97	97	73727.9	59937.5	130725	77025.9	PDRB sektor industri
PDRBLGA	97	97	7793.2	4967.2	7938.6	5417.7	PDRB sektor listrik gas dan air
PDRBBG	97	97	56612.3	30311.9	53797.7	28626.7	PDRB sektor bangunan
PDRBDG	97	97	140470	96128.4	138089	95457.9	PDRB sek.perdagangan
PDRBTR	97	97	48710.7	36045.9	58761.7	53557.9	PDRB sek.transportasi
PDRBKU	97	97	59998.1	29216.5	62230.3	38179.6	PDRB sektor keuangan
PDRBJS	97	97	166301	67693.1	152700	61410.8	PDRB sek.jasa-jasa
PTKSP	97	97	82946.9	39125.5	82596.2	38409.3	Penyerapan tenaga kerja pertanian
PTKNP	97	97	44925.2	28274.3	45600.5	26875.1	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
UNEP	97	97	11556.2	7036.5	11262.4	11409.3	Pengangguran
MISK	97	97	47746.9	29061.7	47775.0	28577.6	Jumlah pend.miskin
INFL	97	97	7.715	320.4	7.676	298.3	Inflasi daerah
PAD	97	97	9462.4	4939.9	9758.0	5065.1	Pendapatan asli daerah
BMD	97	97	54433.9	22900.0	55941.6	21480.6	Belanja modal
TPD	97	97	192158	47271.2	192398	44253.3	Total penerimaan daerah
TPGPD	97	97	196683	54076.5	198604	54026.1	Total pengeluaran pemerintah daerah
TPGP	97	97	206355	54794.2	208276	55429.1	Total pengeluaran pemerintah
NEXP	97	97	77514.7	133599	80713.9	159787	Net ekspor
PDRB	97	97	1217642	584868	1205522	636323	Produk domestik regional bruto
PTK	97	97	127872	57889.1	128197	58202.8	Penyerapan T. kerja
PPKT	97	97	3.8090	1.0667	3.6986	1.1689	Pendapatan perkapita
PDTANI	97	97	8.2271	3.1787	7.4011	2.7588	Pendapatan Petani

Lampiran 5. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 1 To 17

Statistics of fit

Variable	N	Mean Error	Mean % Error	Mean Abs Error	Mean Abs % Error	RMS Error	RMS % Error	R-Square	Label
PAJD	97	158.0	4.9347	554.6	39.8096	952.8	69.5168	0.5455	Pajak daerah
RETD	97	137.7	10.6793	788.5	20.9576	1222.4	27.5383	0.7494	Retribusi daerah
DAU	97	-163.8	0.9860	10119.2	7.4814	13365.5	10.1743	0.8458	Dana alokasi umum
DBH	97	108.3	5.0436	2561.0	16.9943	3883.0	23.2050	0.5683	Dana bagi hasil
BPGW	97	274.4	1.3728	8029.7	8.7884	9869.1	11.4952	0.9076	Belanja pegawai
BBJ	97	39.1404	5.3962	4547.7	18.6458	6378.9	24.6588	0.6109	Belanja barang dan jasa
BMDSP	97	-215.7	4.9905	1506.0	21.1473	2215.9	42.9519	0.5401	Belanja modal sektor pertanian
BMDSL	97	1723.5	15.4033	11873.9	32.0823	14819.6	49.1557	0.5687	Belanja modal sektor lainnya
BLL	97	100.3	15.2726	4769.4	32.5764	6681.6	56.3095	0.6977	Belanja lain-lain pemerintah
KONS	97	-2808.9	-1.6299	31907.8	4.6146	45829.6	6.1028	0.9806	Konsumsi swasta
INVS	97	5472.1	-0.6649	39128.8	23.4051	53407.0	30.8723	0.7736	Investasi swasta
EXPD	97	10079.6	-10.5622	70292.0	34.4204	88551.4	47.8555	0.7695	Ekspor daerah
IMPD	97	6880.5	1.1899	41202.2	21.3171	58600.7	29.3614	0.5509	Impor daerah
PDRBSP	97	-63183.1	-9.6007	63369.6	9.6310	73519.2	9.9509	0.9476	PDRB sek.pertanian
PDRBTB	97	434.3	-7.2863	5226.4	72.0834	6546.2	94.7100	0.9118	PDRB s.pertambangan
PDRBID	97	56997.1	143.8	60021.5	145.8	76587.5	206.9	0.6498	PDRB sek. industri
PDRBLGA	97	145.5	1.5171	1162.3	19.5786	1492.9	27.8601	0.9087	PDRB sek. listrik gas dan air
PDRBBG	97	-2814.6	0.4861	18906.6	33.7062	25096.6	41.9884	0.6074	PDRB sek. bangunan
PDRBDG	97	-2381.2	-1.0228	39158.9	29.5760	54218.2	37.4633	0.6786	PDRB s, perdagangan
PDRBTR	97	10051.0	14.0731	23970.3	62.9355	30980.5	82.4415	0.5536	PDRB s.transportasi
PDRBKU	97	2232.2	2.0605	15372.0	28.9954	19774.5	39.7161	0.5371	PDRB sek keuangan
PDRBJS	97	-13600.9	-4.4743	30353.1	19.8346	36357.3	23.2524	0.7085	PDRB s.jasa-jasa
PTKSP	97	-350.6	0.3997	4808.9	6.0635	8644.0	9.6352	0.9507	Penyerapan tenaga kerja pertanian
PTKNP	97	675.3	4.5023	5247.9	13.2580	8101.3	20.1271	0.9170	Penyerapan t. kerja non pertanian
UNEP	97	-293.8	4.5337	6830.9	63.3117	10433.7	91.6299	0.6220	Pengangguran
MISK	97	28.0762	1.1546	3491.1	7.8775	4836.0	10.3121	0.9720	Jumlah pend.miskin
INFL	97	-3.8424	5.1654	88.3098	16.3217	119.3	38.4976	0.8600	Inflasi daerah
PAD	97	295.7	3.4414	998.3	10.0265	1522.0	13.3676	0.9041	Pendapatan asli daerah
BMD	97	1507.7	10.4381	12015.2	25.6546	15200.3	38.9905	0.5548	Belanja modal
TPD	97	240.2	0.6858	9801.6	5.2508	13078.3	7.1205	0.9227	Total penerimaan daerah
TPGPD	97	1921.5	1.4277	14534.0	7.5941	18461.4	9.7411	0.8822	Total pengeluaran pemerintah daerah
TPGP	97	1921.5	1.2637	14534.0	7.1790	18461.4	9.1577	0.8853	Total pengeluaran pemerintah
NEXP	97	3199.2	428.4	55842.7	673.8	70554.2	4559.2	0.7182	Net ekspor
PDRB	97	-12119.7	-3.0621	104180	9.1615	131838	11.3742	0.9487	Produk domestik regional bruto
PTK	97	324.7	0.4416	6800.0	5.4548	10420.6	7.7109	0.9673	Penyerapan T.kerja
PPKT	97	-0.1104	-3.0621	0.3419	9.1615	0.4256	11.3742	0.8391	Pend. perkapita
PDTANI	97	-0.8260	-9.1365	0.9398	11.1529	1.1845	12.9999	0.8597	Pendapatan Petani

Lampiran 5. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 1 To 17

Theil Forecast Error Statistics

			MSE Decomposition Proportions							
			Corr	Bias	Reg	Dist	Var	Covar	Inequality Coef	
Variable	N	MSE	(R)	(UM)	(UR)	(UD)	(US)	(UC)	U1	U
PAJD	97	907906	0.71	0.03	0.60	0.37	0.28	0.70	0.5490	0.2456
RETD	97	1494327	0.87	0.01	0.00	0.98	0.04	0.95	0.2580	0.1290
DAU	97	1.7864E8	0.92	0.00	0.02	0.98	0.11	0.89	0.0937	0.0470
DBH	97	15077792	0.76	0.00	0.02	0.98	0.05	0.95	0.2351	0.1182
BPGW	97	97398238	0.95	0.00	0.00	1.00	0.03	0.96	0.0956	0.0479
BBJ	97	40689805	0.78	0.00	0.01	0.99	0.06	0.94	0.2273	0.1147
BMDSP	97	4910200	0.41	0.01	0.02	0.97	0.24	0.75	0.2603	0.1337
BMDSL	97	2.1962E8	0.77	0.01	0.05	0.93	0.01	0.97	0.2879	0.1428
BLL	97	44643406	0.63	0.00	0.00	1.00	0.25	0.75	0.3330	0.1711
KONS	97	2.1004E9	0.99	0.00	0.26	0.74	0.21	0.79	0.0565	0.0281
INVS	97	2.8523E9	0.92	0.01	0.33	0.66	0.17	0.82	0.2402	0.1159
EXPD	97	7.8414E9	0.95	0.01	0.59	0.40	0.45	0.54	0.2628	0.1234
IMPD	97	3.434E9	0.87	0.01	0.44	0.54	0.22	0.77	0.2634	0.1265
PDRBSP	97	5.4051E9	1.00	0.44	0.17	0.09	0.18	0.08	0.1013	0.0532
PDRBTB	97	42852316	0.96	0.00	0.17	0.83	0.08	0.91	0.2548	0.1230
PDRBID	97	5.8656E9	0.75	0.55	0.18	0.27	0.05	0.40	0.8077	0.3109
PDRBLGA	97	2228657	0.96	0.01	0.18	0.81	0.09	0.90	0.1618	0.0793
PDRBBG	97	6.2984E8	0.64	0.01	0.13	0.85	0.00	0.98	0.3913	0.2008
PDRBDG	97	2.9396E9	0.84	0.00	0.07	0.92	0.00	1.00	0.3191	0.1606
PDRBTR	97	9.5979E8	0.85	0.11	0.53	0.36	0.32	0.58	0.5122	0.2216
PDRBKU	97	3.9103E8	0.86	0.01	0.43	0.56	0.20	0.78	0.2966	0.1417
PDRBJS	97	1.3219E9	0.87	0.14	0.01	0.85	0.03	0.83	0.2026	0.1057
PTKSP	97	74718332	0.98	0.00	0.00	1.00	0.01	0.99	0.0943	0.0473
PTKNP	97	65631013	0.96	0.01	0.00	0.99	0.03	0.96	0.1528	0.0765
UNEP	97	1.0886E8	0.43	0.00	0.63	0.37	0.17	0.83	0.7722	0.3537
MISK	97	23386450	0.99	0.00	0.00	1.00	0.01	0.99	0.0866	0.0434
INFL	97	14222.6	0.93	0.00	0.00	1.00	0.03	0.96	0.1429	0.0719
PAD	97	2316507	0.96	0.04	0.05	0.91	0.01	0.96	0.1427	0.0703
BMD	97	2.3105E8	0.77	0.01	0.07	0.92	0.01	0.98	0.2576	0.1278
TPD	97	1.7104E8	0.96	0.00	0.01	0.99	0.05	0.95	0.0661	0.0331
TPGPD	97	3.4082E8	0.94	0.01	0.03	0.96	0.00	0.99	0.0905	0.0451
TPGP	97	3.4082E8	0.94	0.01	0.04	0.95	0.00	0.99	0.0865	0.0430
NEXP	97	4.9779E9	0.90	0.00	0.31	0.68	0.14	0.86	0.4586	0.2124
PDRB	97	1.738E10	0.98	0.01	0.23	0.77	0.15	0.84	0.0977	0.0486
PTK	97	1.0859E8	0.98	0.00	0.01	0.98	0.00	1.00	0.0743	0.0371
PPKT	97	0.1811	0.94	0.07	0.16	0.77	0.06	0.88	0.1076	0.0543
PDTANI	97	1.4031	0.97	0.49	0.07	0.44	0.12	0.39	0.1344	0.0709

Lampiran 5. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 1 To 17

Theil Relative Change Forecast Error Statistics

	Relative Change		MSE Decomposition Proportions						
			Corr	Bias	Reg	Dist	Var	Covar	Inequality Coef
Variable	N	MSE	(R)	(UM)	(UR)	(UD)	(US)	(UC)	U1	U
PAJD	96	0.4099	0.68	0.00	0.57	0.43	0.22	0.78	1.1060	0.4390
RETD	96	0.1119	0.91	0.01	0.22	0.76	0.44	0.55	0.4709	0.2763
DAU	96	0.0117	0.85	0.00	0.00	1.00	0.06	0.94	0.5188	0.2773
DBH	96	0.0788	0.58	0.00	0.00	1.00	0.34	0.66	0.8064	0.5243
BPGW	96	0.0115	0.91	0.01	0.02	0.98	0.11	0.88	0.4087	0.2188
BBJ	96	0.0679	0.73	0.00	0.00	1.00	0.17	0.83	0.6681	0.3859
BMDSP	96	0.1077	0.80	0.03	0.18	0.79	0.52	0.45	0.6668	0.4422
BMDSL	96	0.2355	0.83	0.00	0.13	0.87	0.42	0.58	0.5768	0.3517
BLL	96	0.1224	0.78	0.00	0.04	0.96	0.30	0.70	0.6294	0.3781
KONS	96	0.00342	0.98	0.06	0.02	0.92	0.00	0.94	0.2072	0.1036
INVS	96	0.1005	0.66	0.01	0.22	0.77	0.01	0.99	0.8343	0.4075
EXPD	96	0.2575	0.91	0.02	0.57	0.42	0.38	0.61	0.6401	0.2686
IMPD	96	0.0651	0.59	0.00	0.16	0.84	0.00	0.99	0.8741	0.4509
PDRBSP	96	0.0113	0.99	0.88	0.03	0.09	0.04	0.09	0.3486	0.1784
PDRBTB	96	1.1182	0.77	0.01	0.47	0.53	0.18	0.81	0.8630	0.3660
PDRBID	96	4.6739	0.58	0.45	0.40	0.15	0.19	0.36	2.0895	0.6027
PDRBLGA	96	0.0627	0.90	0.01	0.24	0.75	0.09	0.90	0.4901	0.2278
PDRBBG	96	0.1680	0.53	0.00	0.61	0.39	0.19	0.81	1.3343	0.5203
PDRBDG	96	0.1708	0.76	0.00	0.74	0.25	0.45	0.54	1.2766	0.4463
PDRBTR	96	0.8184	0.69	0.05	0.76	0.18	0.48	0.47	1.6611	0.5184
PDRBKU	96	0.1630	0.68	0.01	0.72	0.27	0.39	0.61	1.3750	0.4806
PDRBJS	96	0.0564	0.78	0.06	0.39	0.55	0.13	0.81	0.8314	0.3628
PTKSP	96	0.0104	0.95	0.00	0.00	1.00	0.02	0.98	0.3002	0.1536
PTKNP	96	0.0300	0.95	0.01	0.00	0.98	0.04	0.95	0.3085	0.1585
UNEP	96	0.8189	0.33	0.01	0.62	0.37	0.13	0.86	1.5137	0.6005
MISK	96	0.0192	0.98	0.00	0.01	0.99	0.00	1.00	0.2196	0.1098
INFL	96	0.0330	0.98	0.01	0.01	0.99	0.03	0.96	0.2089	0.1067
PAD	96	0.0188	0.90	0.04	0.00	0.96	0.03	0.93	0.4352	0.2237
BMD	96	0.1393	0.85	0.00	0.17	0.83	0.45	0.55	0.5691	0.3500
TPD	96	0.00588	0.91	0.00	0.00	1.00	0.07	0.93	0.4034	0.2125
TPGPD	96	0.00957	0.89	0.01	0.01	0.98	0.11	0.88	0.4597	0.2478
TPGP	96	0.00861	0.89	0.01	0.00	0.99	0.08	0.91	0.4568	0.2434
NEXP	96	5173.9	-0.99	0.01	0.99	0.00	0.00	0.99	2.1181	0.9976
PDRB	96	0.0154	0.95	0.03	0.38	0.58	0.25	0.72	0.4016	0.1831
PTK	96	0.00636	0.97	0.00	0.00	1.00	0.01	0.99	0.2514	0.1269
PPKT	96	0.0127	0.86	0.06	0.40	0.54	0.18	0.76	0.6966	0.3033
PDTANI	96	0.0213	0.92	0.50	0.02	0.48	0.07	0.43	0.5746	0.3034

Lampiran 6. Program Komputer Validasi Model untuk Kabupaten Berbasis Non Pertanian

```
OPTIONS NODATE NONUMBER;
DATA SULSEL;
SET ANALISIS;

PAD      = PAJD + RETD + BUMD + PADL;
TPD      = PAD + DAU + DBH + DAK + PLD;
BMD      = BMDSP + BMDSL;
TPGPD    = BPGW + BBJ + BMD + BLL;
TPGP     = TPGPD + DDTBL;
PTK      = PTKSP + PTKNP;
NEXP     = EXPD - IMPD ;
PDRB     = PDRBSP + PDRBTB + PDRBID + PDRBLGA + PDRBBG + PDRBDG + PDRBTR
           + PDRBKU + PDRBJS;;
PPKT     = PDRB/POP;
PDTANI   = PDRBSP/PTKSP;

LABEL
AKK      = 'Jumlah angkatan kerja'
BBJ      = 'Belanja barang dan jasa'
BLL      = 'Belanja lain-lain pemerintah'
BMD      = 'Belanja modal'
BMDSL    = 'Belanja modal sektor lainnya'
BMDSP    = 'Belanja modal sektor pertanian'
BPGW     = 'Belanja pegawai'
BUMD     = 'Badan usaha milik daerah'
DAK      = 'Dana alokasi khusus'
DAU      = 'Dana alokasi umum'
DBH      = 'Dana bagi hasil'
DDTBL    = 'Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya'
EXPD     = 'Ekspor daerah'
IMPD     = 'Impor daerah'
INFL     = 'Inflasi daerah'
INVS     = 'Investasi swasta'
JMKH     = 'Jumlah kamar hotel'
KONS     = 'Konsumsi swasta'
LBBJ     = 'Belanja barang dan jasa tahun sebelumnya'
LBLL     = 'Belanja lain-lain pemerintah tahun sebelumnya'
LBMDSP   = 'Belanja modal sek pertanian tahun sebelumnya'
LBMDSL   = 'Belanja modal sekt lainnya tahun sebelumnya'
LBPGW    = 'Belanja pegawai tahun sebelumnya'
LDK      = 'Luas daerah kabupaten/kota'
LDBH     = `Dana bagi hasil tahun sebelumnya'
LEXPD    = 'Ekspor daerah tahun sebelumnya'
LIMPD    = 'Impor daerah tahun sebelumnya'
LINVS    = 'Investasi swasta  tahun sebelumnya'
LKONS    = 'Peng konsumsi swasta  tahun sebelumnya'
LMISK    = 'Jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya'
LPAJD    = 'Pajak daerah tahun sebelumnya'
LPDRB    = 'PDRB tahun sebelumnya'
LPDRBID  = 'PDRB sektor industri tahun sebelumnya'
LPDRBTB  = 'PDRB sektor pertambangan tahun sebelumnya'
LPPKT    = 'Pendapatan perkapita tahun sebelumnya'
LPTKNP   = 'Penyerapan T kerja non pertanian tahun sebelumnya'
LPTKSP   = 'Penyerapan T kerja pertanian tahun sebelumnya'
LRETD    = 'Penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya'
```

Lampiran 6. Lanjutan

```
LUNEP    = 'Pengangguran tahun sebelumnya'
MISK     = 'Jumlah penduduk miskin'
MTR      = 'Jumlah kendaran bermotor'
NTRP     = 'Nilai tukar rupiah'
NEXP     = 'Net ekspor'
PAD      = 'Pendapatan asli daerah'
PADL     = 'Penerimaan asli daerah lain-lain'
PAJD     = 'Pajak daerah'
PDRB     = 'Produk domestik regional bruto'
PDRBBG   = 'PDRB sektor bangunan'
PDRBDG   = 'PDRB sektor perdagangan'
PDRBID   = 'PDRB sektor industri'
PDRBJS   = 'PDRB sektor jasa-jasa'
PDRBKU   = 'PDRB sektor keuangan'
PDRBLGA  = 'PDRB sektor listrik gas dan air'
PDRBSP   = 'PDRB sektor pertanian'
PDRBTB   = 'PDRB sektor pertambangan'
PDRBTR   = 'PDRB sektor transportasi'
PLD      = 'Penerimaan lain daerah'
PNS      = 'Jumlah pengawai negeri sipil'
POP      = 'Jumlah penduduk'
PTK      = 'Penyerapan tenaga kerja'
PTKNP    = 'Penyerapan tenaga  kerja non pertanian'
PTKSP    = 'Penyerapan tenaga kerja  pertanian'
RETD     = 'Retribusi daerah'
SBI      = 'Suku bunga Bank Indonesia'
TPD      = 'Total penerimaan daerah'
TPGP     = 'Total pengeluaran pemerintah'
TPGPD    = 'Total pengeluaran pemerintah daerah'
TREN     = 'Tren (tahun 1,2,3, ...n)'
UMP      = 'Upah  minimum Provinsi'
UNEP     = 'Pengangguran'
PPKT     = ‘Pendapatan perkapita’
PDTANI   = ‘Pendapatan Petani’;
RUN;

PROC SIMNLIN DATA=SULSEL SIMULATE STAT OUTPREDICT THEIL;
ENDOGENOUS  PAJD RETD DAU DBH  BPGW BBJ BMDSP BMDSL BLL KONS INVS EXPD
            IMPD PDRBSP PDRBTB PDRBID PDRBLGA PDRBBG PDRBDG  PDRBTR
            PDRBKU PDRBJS  PTKSP PTKNP UNEP MISK INFL PAD BMD TPD TPGPD
            TPGP NEXP PDRB PTK PPKT PDTANI;
INSTRUMENTS  POP MTR LDK PNS TREN JMKH SBI UMP  LINVS NTRP LEXPD  LIMPD
            DDTBL AKK INFLK  BUMD PADL DAK PLD LPAJD  LRETD  LBPGW  LBBJ
            LBMDSP LBMDSL LBLL LKONS LINVS LEXPD LIMPD LPTKNP LPTKNP
            LUNEP LMISK LDBH LPDRBSP LPDRBTB LPDRBID LPDRB;

PARM a0 -894.889  a1 0.003597  a2 0.000999  a3 1.697810 a4 0.851925
      b0  -506.919  b1 0.000033 b2 0.006649  b3 0.000028 b4 0.831304
      c0  30475.51 c1 13.69660  c2-0.53122  c3 0.485651 c4 0.562410  c5 1.234813 c6 8.802526
      d0 2751.065  d1 0.000693  d2 23.83727 d3 0.814383
      e0 -18.8553 e1 4.759793 e2 0.350788 e3 0.114625 e4 0.545952
      f0 353.7153  f1 0.250704 f2 0.040235 f3 0.087965 f4 0.722516
      g0 3128.957 g1 0.027119 g2 0.000922 g3 0.001142 g4 0.441545
      h0 -8386.77  h1 0.634638  h2 1.385087  h3 0.531635
      i0 1438.420 i1 0.034405 i2 0.135642 i3 0.019118 i4 0.515788
      j0 -58432.8  j1 0.034252  j2 0.021192  j3 0.304371  j4 34.36591 j5 0.993811
      k0  -56197.4 k1 0.325015 k2 -4.27491 k3 0.166592 k4 0.859675
```

Lampiran 6. Lanjutan

```
l0  885709.3 l1 -112.862  l2 0.152388 l3 97.14248 l4 0.888123
m0  -27584.5 m1 0.004562 m2 0.208677 m3 0.999934
n0  -509.331 n1 0.002354 n2 0.079091 n3 -0.00636 n4 0.007406 n5-0.02479 n6 0.931768
o0 4165.460 o1 -0.18759 o2 0.008108 o3 0.044087 o4 0.048805 o5 0.978771
p0  3107.836 p1 1.461541 p2 0.305956 p3 0.796363  p4 0.480399 p5 -0.08983 p6 34.93782
q0  -997.755  q1 0.008217 q2 0.014008  q3 0.012725 q4 0.769387
r0  9524.944 r1 0.042254 r2 0.205493 r3 0.184136 r4 0.002987
s0  -23241.6  s1 0.722010 s2 0.845538 s3 0.599660 s4 2.423793
t0  -36194.9  t1 0.452899 t2 0.328033  t3 0.483506  t4 6.352968
u0  -7047.39  u1 0.539378 u2  0.199153 u3 0.250975  u4 3.834177
v0  31367.64 v1 1.465487 v2 0.060057 v3 0.125627 v4 0.042223 v5 0.727640
w0  -1167.51 w1 0.052376  w2 -0.00652 w3 0.949041
x0  -624.690 x1 0.017133  x2 0.050626  x3 0.844376
y0  580.0407   y1 -0.00024  y2 0.005544 y3 -0.03071 y4 0.946619
z0 -10.9780  z1 0.000243  z2 0.000049  z3 -0.00004 z4 -0.03856 z5 0.914515;

PAJD   = a0 + a1*TPGPD + a2*MTR + a3*JMKH + a4*LPAJD;
RETD   = b0 + b1*PDRB + b2*TPGPD + b3*POP + b4*LRETD;
DAU    = c0 + c1*PNS + C2*PAD + c3*BBJ + c4*BLL + c5*LDK + c6*INFL;
DBH    = d0 + d1*PDRB + d2*TREN + d3*LDBH;
BPGW   = e0 + e1*PNS + e2*PAD + e3*DAU + e4*LBPGW;
BBJ    = f0 + f1*PAD + f2*DAU + f3*DBH + f4*LBBJ;
BMDSP  =  g0 + g1*DAK + g2*DAU + g3*PDRBSP + g4*LBMDSP;
BMDSL  =  h0 + h1*DBH + h2*DAK + h3*LBMDSL;
BLL    =  i0 + i1*DAU + i2*DBH + i3*PAD + i4*LBLL;
KONS   = j0 + j1*PDRB + j2*BBJ + j3*BPGW + j4*INFL + j5*LKONS;
INVS   = k0 + k1*BMD + k2*PAD + k3*KONS + k4*LINVS;
EXPD    =  l0 + l1*NTRP + l2*PDRB +  l3*INFL + l4*LEXPD;
IMPD    =  m0 + m1*KONS + m2*INVS + m3*LIMPD;
PDRBSP  = n0 + n1*PTKSP + n2*BMDSP + n3* INVS + n4*KONS + n5* DDTBL + n6*LPDRBSP;
PDRBTB  = o0 + o1* PTKNP + o2*INVS + o3*DDTBL + o4*NEXP + o5*LPDRBTB;
PDRBID  = p0 + p1*PTKNP + p2*INVS + p3*DDTBL + p4*BMDSL + p5*UMP + p6*INFL;
PDRBLGA = q0 + q1*PTKNP + q2*INVS + q3*DDTBL + q4*LPDRBLGA;
PDRBBG    = r0 + r1*PTKNP + r2*INVS + r3*DDTBL + r4*INFL;
PDRBDG    = s0 + s1*PTKNP + s2*DDTBL + s3*INVS + s4*INFL;
PDRBTR    = t0 + t1*PTKNP + t2*INVS + t3*DDTBL + t4*INFL;
PDRBKU    = u0 + u1*PTKNP + u2*INVS + u3*DDTBL + u4*INFL;
PDRBJS    = v0 + v1*PTKNP + v2*KONS + v3*DDTBL + v4*INVS + v5*INFL;
PTKSP     = w0 + w1*AKK + w2*INVS + w3*LPTKSP;
PTKNP     = x0 + x1*INVS + x2*AKK + x3*LPTKNP;
MISK      = y0 + y1*PDRB + y2*POP +  y3*UNEP + y4*LMISK;
INFL      =  z0 + z1*TPGPD + z2*NEXP + z3*INVS + z4*SBI + z5*INFLK;
PAD       =  PAJD + RETD +  BUMD + PADL;
UNEP      = AKK - PTK;
TPD       = PAD + DAU + DBH +  DAK + PLD;
BMD       = BMDSP + BMDSL;
TPGPD     = BPGW +  BBJ   + BMD    + BLL;
TPGP      = TPGPD  +  DDTBL;
NEXP      = EXPD - IMPD ;
PTK       = PTKSP + PTKNP;
PDRB      = PDRBSP + PDRBTB + PDRBID + PDRBLGA + PDRBBG + PDRBDG + PDRBTR + PDRBKU
             + PDRBJS;
PPKT      = PDRB/POP;
PDTANI    = PDRBSP/PTKSP;
range kriteria=18 to 23;

RUN;
```

Lampiran 7. Hasil Validasi Model Validasi Model untuk Kabupaten Kota Berbasis Non Pertanian

The SAS System

The SIMNLIN Procedure

Model Summary

Model Variables	37
Endogenous	37
Parameters	135
Range Variable	Kriteria
Equations	37
Number of Statements	37

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Data Set Options

DATA= SULSEL

Solution Summary

Variables Solved	37
Solution Range	Kriteria
First	18
Last	23
Solution Method	NEWTON
CONVERGE=	1E-8
Maximum CC	4.29E-15
Maximum Iterations	2
Total Iterations	62
Average Iterations	2

Observations Processed

Read	31
Solved	31
First	103
Last	133

Lampiran 7. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 18 To 23

Descriptive Statistics

Variable	N Obs	Actual N	Actual Mean	Actual Std Dev	Predicted Mean	Predicted Std Dev	Label
PAJD	31	31	11861.1	15663.9	11377.8	15485.3	Pajak daerah
RETD	31	31	7454.1	6237.3	7106.1	6310.6	Retribusi daerah
DAU	31	31	141943	67503.7	141598	69141.3	Dana alokasi umum
DBH	31	31	25962.5	18862.3	25239.1	17869.5	Dana bagi hasil
BPGW	31	31	110746	77547.7	109872	76751.6	Belanja pegawai
BBJ	31	31	38251.5	32070.3	38946.1	30853.3	Belanja barang dan jasa
BMDSP	31	31	6336.9	2543.2	6498.6	1347.0	Belanja modal sektor pertanian
BMDSL	31	31	57497.7	40507.3	52965.7	26758.2	Belanja modal sektor lainnya
BLL	31	31	22892.8	15120.8	22399.6	12185.7	Belanja lain-lain pemerintah
KONS	31	31	1984914	2514250	1991362	2493477	Konsumsi swasta
INVS	31	31	856029	1424008	854737	1398282	Investasi swasta
EXPD	31	31	2693621	3473012	2659788	3462976	Ekspor daerah
IMPD	31	31	2130652	3616571	2116980	3605335	Impor daerah
PDRBSP	31	31	315528	157630	286944	142055	PDRB sek.pertanian
PDRBTB	31	31	684297	1360538	682965	1363473	PDRB .pertambangan
PDRBID	31	31	812257	1041925	626019	1041034	PDRB sektor industri
PDRBLGA	31	31	51807.6	92779.1	51874.0	92366.5	PDRB sektor listrik gas dan air
PDRBBG	31	31	220310	392247	235254	380416	PDRB sektor bangunan
PDRBDG	31	31	745588	1380668	782713	1352110	PDRB sek.perdagangan
PDRBTR	31	31	419762	768486	420449	758686	PDRB sek.transportasi
PDRBKU	31	31	288534	488321	290560	482114	PDRB sektor keuangan
PDRBJS	31	31	353240	521355	389285	500455	PDRB sek.jasa-jasa
PTKSP	31	31	34608.3	21799.3	35346.2	21563.3	Penyerapan tenaga kerja pertanian
PTKNP	31	31	117761	158769	116593	159147	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
UNEP	31	31	23483.7	25503.7	23913.9	26268.8	Pengangguran
MISK	31	31	46370.1	24151.3	46187.6	24077.7	Jumlah pend.miskin
INFL	31	31	7.813	334.6	7.686	310.7	Inflasi daerah
PAD	31	31	23498.2	21717.7	22666.9	21723.9	Pendapatan asli daerah
BMD	31	31	63834.6	41962.2	59464.3	27572.2	Belanja modal
TPD	31	31	230921	115751	229022	118331	Total penerimaan daerah
TPGPD	31	31	235725	124924	230682	129096	Total pengeluaran pemerintah daerah
TPGP	31	31	480964	606123	475921	614860	Total pengeluaran pemerintah
NEXP	31	31	562969	1013851	542809	1114307	Net ekspor
PDRB	31	31	3891325	4341049	3766064	4435400	Produk domestik regional bruto
PTK	31	31	152369	148209	151939	148757	Penyerapan t.kerja
PPKT	31	31	8.7583	5.6429	8.4362	6.8861	Pendapatan perkapita
PDTANI	31	31	11.9998	7.4523	10.2884	6.0469	Pendapatan Petani

Lampiran 7. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 18 To 23

Statistics of fit

Variable	N	Mean Error	Mean % Error	Mean Abs Error	Mean Abs % Error	RMS Error	RMS % Error	R-Square	Label
PAJD	31	-483.3	-1.1460	1495.2	20.1073	3100.4	30.6196	0.9595	Pajak daerah
RETD	31	-348.0	-2.9077	1097.7	18.9732	1489.0	25.9361	0.9411	Retribusi daerah
DAU	31	-344.3	-0.2697	10830.1	8.3973	14674.9	11.5595	0.9512	Dana alokasi umum
DBH	31	-723.4	3.5769	4167.0	19.0452	5979.4	26.4178	0.8962	Dana bagi hasil
BPGW	31	-873.5	-1.4729	10149.5	9.8059	13784.9	11.9670	0.9673	Belanja pegawai
BBJ	31	694.6	8.7763	5224.9	20.0787	6499.0	26.9100	0.9576	Belanja barang dan jasa
BMDSP	31	161.7	19.7589	1525.1	35.0940	1894.0	56.5222	0.4269	Belanja modal sektor pertanian
BMDSL	31	-4532.0	1.0910	14154.1	23.3264	21942.8	28.0406	0.6968	Belanja modal sektor lainnya
BLL	31	-493.3	17.2566	7431.5	41.1788	9761.2	65.4075	0.5694	Belanja lain-lain pemerintah
KONS	31	6448.6	-0.1945	92212.1	6.2482	152827	8.8636	0.9962	Konsumsi swasta
INVS	31	-1291.8	1.7487	124404	25.7619	220239	35.1115	0.9753	Investasi swasta
EXPD	31	-33833.3	-11.3830	196251	23.3449	290873	35.5084	0.9928	Ekspor daerah
IMPD	31	-13672.4	5.5361	171275	23.1025	296436	54.4711	0.9931	Impor daerah
PDRBSP	31	-28583.9	-8.6666	31062.9	9.7272	38687.4	10.9966	0.9378	PDRB s. pertanian
PDRBTB	31	-1331.9	-184.2	42733.4	393.3	86670.8	751.4	0.9958	PDRB s.pertambangan
PDRBID	31	-186238	50.2431	291051	102.7	471365	134.5	0.7885	PDRB sektor industri
PDRBLGA	31	66.4453	4.4593	2998.2	15.1566	6132.8	23.2331	0.9955	PDRB sektor listrik gas dan air
PDRBBG	31	14943.3	134.0	37848.3	145.0	55914.7	262.9	0.9790	PDRB sektor bangunan
PDRBDG	31	37124.9	72.6964	104030	82.4350	152180	147.7	0.9874	PDRB s. perdagangan
PDRBTR	31	687.0	34.0341	62286.4	66.6932	96428.2	108.8	0.9837	PDRB s.transportasi
PDRBKU	31	2025.1	12.5665	35060.5	32.3041	51248.1	45.6795	0.9886	PDRB sektor keuangan
PDRBJS	31	36045.3	55.4436	50010.9	56.4210	66610.3	100.6	0.9831	PDRB sek.jasa-jasa
PTKSP	31	737.8	7.3123	2898.0	14.1301	3831.8	24.4336	0.9681	Penyerapan tenaga kerja pertanian
PTKNP	31	-1168.1	-1.3851	6984.7	9.6710	9866.1	12.0081	0.9960	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
UNEP	31	430.3	9.5280	6399.9	35.8768	9386.5	44.7027	0.8600	Pengangguran
MISK	31	-182.6	-0.1196	3662.6	7.5841	5226.6	9.1900	0.9516	Jumlah pend.miskin
INFL	31	-12.6825	0.5483	107.2	14.2779	134.4	17.2956	0.8333	Inflasi daerah
PAD	31	-831.3	-5.0315	2087.6	9.3170	3562.6	12.2182	0.9722	Pendapatan asli daerah
BMD	31	-4370.3	1.3380	14061.8	19.3987	22425.3	24.7040	0.7049	Belanja modal
TPD	31	-1899.0	-1.1935	9896.6	4.6464	13609.3	6.3584	0.9857	Total penerimaan daerah
TPGPD	31	-5042.5	-2.3896	19383.0	8.6296	28169.9	11.1434	0.9475	Total pengeluaran pemerintah daerah
TPGP	31	-5042.5	-2.8555	19383.0	7.5789	28169.9	10.4142	0.9978	Total pengeluaran pemerintah
NEXP	31	-20160.8	-10.0614	209407	113.7	310022	214.0	0.9034	Net ekspor
PDRB	31	-125262	-9.5430	490355	16.9959	653464	23.3671	0.9766	Produk domestik regional bruto
PTK	31	-430.3	-1.0469	6399.9	5.2238	9386.5	6.6575	0.9959	Penyerapan tenaga kerja
PPKT	31	-0.3220	-9.5430	1.3900	16.9959	1.8687	23.3671	0.8867	Pendapatan perkapita
PDTANI	31	-1.7113	-11.1566	2.1928	17.6403	3.0565	24.4822	0.8262	Pendapatan Petani

Lampiran 7. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 18 To 23

Theil Forecast Error Statistics

				MSE Decomposition Proportions						
			Corr	Bias	Reg	Dist	Var	Covar	Inequality Coef	
Variable	N	MSE	(R)	(UM)	(UR)	(UD)	(US)	(UC)	U1	U
PAJD	31	9612715	0.98	0.02	0.00	0.97	0.00	0.97	0.1594	0.0806
RETD	31	2217179	0.97	0.05	0.03	0.92	0.00	0.94	0.1542	0.0780
DAU	31	2.1535E8	0.98	0.00	0.05	0.95	0.01	0.99	0.0936	0.0468
DBH	31	35753391	0.95	0.01	0.00	0.99	0.03	0.96	0.1874	0.0954
BPGW	31	1.9002E8	0.98	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.1025	0.0515
BBJ	31	42236731	0.98	0.01	0.01	0.98	0.03	0.95	0.1311	0.0657
BMDSP	31	3587129	0.67	0.01	0.04	0.96	0.39	0.61	0.2780	0.1409
BMDSL	31	4.8149E8	0.87	0.04	0.14	0.82	0.38	0.58	0.3137	0.1700
BLL	31	95281284	0.76	0.00	0.01	0.99	0.09	0.91	0.3575	0.1852
KONS	31	2.336E10	1.00	0.00	0.01	0.99	0.02	0.98	0.0482	0.0241
INVS	31	4.851E10	0.99	0.00	0.00	1.00	0.01	0.99	0.1342	0.0675
EXPD	31	8.461E10	1.00	0.01	0.00	0.99	0.00	0.99	0.0669	0.0335
IMPD	31	8.787E10	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.0715	0.0358
PDRBSP	31	1.4967E9	0.99	0.55	0.13	0.33	0.16	0.30	0.1100	0.0577
PDRBTB	31	7.5118E9	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.0577	0.0288
PDRBID	31	2.222E11	0.91	0.16	0.04	0.81	0.00	0.84	0.3604	0.1879
PDRBLGA	31	37611597	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.0584	0.0293
PDRBBG	31	3.1265E9	0.99	0.07	0.02	0.91	0.04	0.89	0.1258	0.0631
PDRBDG	31	2.316E10	0.99	0.06	0.02	0.92	0.03	0.91	0.0982	0.0492
PDRBTR	31	9.2984E9	0.99	0.00	0.00	1.00	0.01	0.99	0.1115	0.0560
PDRBKU	31	2.6264E9	0.99	0.00	0.00	0.99	0.01	0.98	0.0915	0.0459
PDRBJS	31	4.4369E9	0.99	0.29	0.07	0.64	0.10	0.61	0.1070	0.0533
PTKSP	31	14682606	0.98	0.04	0.00	0.96	0.00	0.96	0.0941	0.0468
PTKNP	31	97340376	1.00	0.01	0.00	0.98	0.00	0.98	0.0504	0.0252
UNEP	31	88105844	0.93	0.00	0.07	0.93	0.01	0.99	0.2731	0.1349
MISK	31	27317831	0.98	0.00	0.01	0.99	0.00	1.00	0.1003	0.0503
INFL	31	18056.1	0.91	0.01	0.00	0.99	0.03	0.96	0.1585	0.0802
PAD	31	12692447	0.99	0.05	0.01	0.94	0.00	0.95	0.1122	0.0566
BMD	31	5.0289E8	0.87	0.04	0.16	0.80	0.40	0.56	0.2950	0.1586
TPD	31	1.8521E8	0.99	0.02	0.06	0.92	0.03	0.95	0.0529	0.0265
TPGPD	31	7.9355E8	0.98	0.03	0.06	0.91	0.02	0.95	0.1060	0.0532
TPGP	31	7.9355E8	1.00	0.03	0.11	0.86	0.09	0.87	0.0368	0.0183
NEXP	31	9.611E10	0.96	0.00	0.20	0.80	0.10	0.89	0.2707	0.1309
PDRB	31	4.27E11	0.99	0.04	0.05	0.92	0.02	0.94	0.1131	0.0566
PTK	31	88105844	1.00	0.00	0.01	0.99	0.00	0.99	0.0445	0.0223
PPKT	31	3.4922	0.97	0.03	0.53	0.44	0.43	0.54	0.1802	0.0882
PDTANI	31	9.3420	0.95	0.31	0.11	0.58	0.20	0.48	0.2174	0.1178

Lampiran 7. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 18 To 23

Theil Relative Change Forecast Error Statistics

		Relative Change		MSE Decomposition Proportions						
			Corr	Bias	Reg	Dist	Var	Covar	Inequality Coef	
Variable	N	MSE	(R)	(UM)	(UR)	(UD)	(US)	(UC)	U1	U
PAJD	30	0.6603	0.99	0.07	0.80	0.13	0.84	0.09	0.3153	0.1854
RETD	30	0.1301	0.73	0.09	0.01	0.91	0.20	0.71	0.6830	0.4120
DAU	30	0.0193	0.92	0.01	0.08	0.90	0.01	0.98	0.4008	0.1972
DBH	30	0.0580	0.63	0.00	0.01	0.99	0.14	0.86	0.7757	0.4529
BPGW	30	0.0200	0.95	0.04	0.01	0.95	0.00	0.96	0.3213	0.1630
BBJ	30	0.0658	0.79	0.00	0.01	0.99	0.17	0.83	0.5823	0.3278
BMDSP	30	0.1369	0.74	0.00	0.08	0.92	0.01	0.99	0.6756	0.3459
BMDSL	30	0.0965	0.80	0.04	0.00	0.95	0.15	0.81	0.5845	0.3341
BLL	30	0.2031	0.82	0.03	0.13	0.84	0.41	0.56	0.5895	0.3664
KONS	30	0.00958	0.99	0.00	0.28	0.71	0.23	0.77	0.1410	0.0682
INVS	30	0.1565	0.96	0.01	0.53	0.46	0.40	0.59	0.4018	0.1781
EXPD	30	0.1759	0.96	0.13	0.03	0.84	0.09	0.78	0.3029	0.1599
IMPD	30	0.1648	0.92	0.01	0.01	0.97	0.01	0.98	0.3786	0.1931
PDRBSP	30	0.0169	0.99	0.51	0.07	0.42	0.10	0.39	0.2315	0.1202
PDRBTB	30	41.8623	0.88	0.01	0.42	0.57	0.21	0.78	0.6231	0.2743
PDRBID	30	19.2788	0.73	0.00	0.02	0.98	0.06	0.93	0.6648	0.3641
PDRBLGA	30	0.4878	1.00	0.05	0.85	0.09	0.84	0.11	0.1608	0.0747
PDRBBG	30	9.5678	0.96	0.25	0.32	0.43	0.22	0.53	0.4196	0.1869
PDRBDG	30	3.8546	0.98	0.21	0.40	0.39	0.33	0.45	0.2760	0.1264
PDRBTR	30	3.5143	0.99	0.09	0.52	0.40	0.45	0.46	0.2186	0.1013
PDRBKU	30	0.5321	0.99	0.08	0.54	0.38	0.48	0.44	0.2166	0.1003
PDRBJS	30	1.1068	0.97	0.29	0.23	0.48	0.15	0.56	0.3363	0.1547
PTKSP	30	0.0364	0.99	0.03	0.00	0.97	0.01	0.96	0.1519	0.0762
PTKNP	30	0.0209	1.00	0.03	0.09	0.88	0.11	0.86	0.0754	0.0382
UNEP	30	0.2329	0.78	0.00	0.24	0.76	0.03	0.97	0.7028	0.3303
MISK	30	0.0113	0.99	0.00	0.17	0.83	0.12	0.88	0.1559	0.0759
INFL	30	0.0595	0.97	0.02	0.19	0.79	0.29	0.68	0.2665	0.1440
PAD	30	0.0325	0.97	0.16	0.20	0.64	0.31	0.53	0.3094	0.1714
BMD	30	0.0766	0.82	0.04	0.01	0.95	0.15	0.80	0.5676	0.3234
TPD	30	0.00521	0.96	0.06	0.00	0.94	0.02	0.93	0.2778	0.1421
TPGPD	30	0.0203	0.87	0.10	0.01	0.89	0.13	0.77	0.5144	0.2875
TPGP	30	0.0172	0.99	0.12	0.01	0.87	0.00	0.88	0.1696	0.0851
NEXP	30	13.7920	-0.12	0.03	0.31	0.66	0.13	0.84	1.1805	0.7664
PDRB	30	0.0810	0.80	0.14	0.18	0.68	0.02	0.84	0.7277	0.3451
PTK	30	0.00452	1.00	0.03	0.02	0.95	0.04	0.94	0.0974	0.0492
PPKT	30	0.0577	0.64	0.18	0.40	0.42	0.11	0.71	1.1748	0.4713
PDTANI	30	0.0741	0.69	0.28	0.06	0.66	0.01	0.71	0.8735	0.4553

Lampiran 8. Program Komputer Simulasi Menaikkan Pajak dan Retribusi Daerah 10 Persen dan Menaikkan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lain 2.5 Persen untuk Kabupaten Berbasis Pertanian

```
OPTIONS NODATE NONUMBER;
DATA SULSEL;
SET ANALISIS;

PAD      = PAJD + RETD + BUMD + PADL;
TPD      = PAD + DAU + DBH + DAK + PLD;
BMD      = BMDSP + BMDSL;
TPGPD    = BPGW + BBJ + BMD + BLL;
TPGP     = TPGPD + DDTBL;
PTK      = PTKSP + PTKNP;
NEXP     = EXPD - IMPD ;
PDRB     = PDRBSP + PDRBTB + PDRBID + PDRBLGA + PDRBBG + PDRBDG + PDRBTR
           + PDRBKU + PDRBJS;;
PPKT     = PDRB/POP;
PDTANI   = PDRBSP/PTKSP;

LABEL
AKK      = 'Jumlah angkatan kerja'
BBJ      = 'Belanja barang dan jasa'
BLL      = 'Belanja lain-lain pemerintah'
BMD      = 'Belanja modal'
BMDSL    = 'Belanja modal sektor lainnya'
BMDSP    = 'Belanja modal sektor pertanian'
BPGW     = 'Belanja pegawai'
BUMD     = 'Badan usaha milik daerah'
DAK      = 'Dana alokasi khusus'
DAU      = 'Dana alokasi umum'
DBH      = 'Dana bagi hasil'
DDTBL    = 'Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya'
EXPD     = 'Ekspor daerah'
IMPD     = 'Impor daerah'
INFL     = 'Inflasi daerah'
INVS     = 'Investasi swasta'
JMKH     = 'Jumlah kamar hotel'
KONS     = 'Konsumsi swasta'
LBBJ     = 'Belanja barang dan jasa tahun sebelumnya'
LBLL     = 'Belanja lain-lain pemerintah tahun sebelumnya'
LBMDSP   = 'Belanja modal sek pertanian tahun sebelumnya'
LBMDSL   = 'Belanja modal sekt lainnya tahun sebelumnya'
LBPGW    = 'Belanja pegawai tahun sebelumnya'
LDK      = 'Luas daerah kabupaten/kota'
LDBH     = `Dana bagi hasil tahun sebelumnya'
LEXPD    = 'Ekspor daerah tahun sebelumnya'
LIMPD    = 'Impor daerah tahun sebelumnya'
LINVS    = 'Investasi swasta  tahun sebelumnya'
LKONS    = 'Peng konsumsi swasta  tahun sebelumnya'
LMISK    = 'Jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya'
LPAJD    = 'Pajak daerah tahun sebelumnya'
LPDRB    = 'PDRB tahun sebelumnya'
LPDRBID  = 'PDRB sektor industri tahun sebelumnya'
LPDRBTB  = 'PDRB sektor pertambangan tahun sebelumnya'
LPPKT    = 'Pendapatan perkapita tahun sebelumnya'
LPTKNP   = 'Penyerapan T kerja non pertanian tahun sebelumnya'
LPTKSP   = 'Penyerapan T kerja pertanian tahun sebelumnya'
LRETD    = 'Penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya'
```

Lampiran 8. Lanjutan

```
LUNEP    = 'Pengangguran tahun sebelumnya'
MISK     = 'Jumlah penduduk miskin'
MTR      = 'Jumlah kendaran bermotor'
NTRP     = 'Nilai tukar rupiah'
NEXP     = 'Net ekspor'
PAD      = 'Pendapatan asli daerah'
PADL     = 'Penerimaan asli daerah lain-lain'
PAJD     = 'Pajak daerah'
PDRB     = 'Produk domestik regional bruto'
PDRBBG   = 'PDRB sektor bangunan'
PDRBDG   = 'PDRB sektor perdagangan'
PDRBID   = 'PDRB sektor industri'
PDRBJS   = 'PDRB sektor jasa-jasa'
PDRBKU   = 'PDRB sektor keuangan'
PDRBLGA  = 'PDRB sektor listrik gas dan air'
PDRBSP   = 'PDRB sektor pertanian'
PDRBTB   = 'PDRB sektor pertambangan'
PDRBTR   = 'PDRB sektor transportasi'
PLD      = 'Penerimaan lain daerah'
PNS      = 'Jumlah pengawai negeri sipil'
POP      = 'Jumlah penduduk'
PTK      = 'Penyerapan tenaga kerja'
PTKNP    = 'Penyerapan tenaga  kerja non pertanian'
PTKSP    = 'Penyerapan tenaga kerja  pertanian'
RETD     = 'Retribusi daerah'
SBI      = 'Suku bunga Bank Indonesia'
TPD      = 'Total penerimaan daerah'
TPGP     = 'Total pengeluaran pemerintah'
TPGPD    = 'Total pengeluaran pemerintah daerah'
TREN     = 'Tren (tahun 1,2,3, ...n)'
UMP      = 'Upah  minimum Provinsi'
UNEP     = 'Pengangguran'
PPKT     = 'Pendapatan perkapita'
PDTANI   = 'Pendapatan Petani';
PAJD     = 1.1*PAJD;
RETD     = 1.1*RETD;
BMDSP    = 1.05*BMDSP;
BMDSL    = 1.05*BMDSL;
RUN;

PROC SIMNLIN DATA=SULSEL SIMULATE STAT OUTPREDICT THEIL;
ENDOGENOUS  DAU DBH  BPGW BBJ BLL KONS INVS EXPD IMPD PDRBSP PDRBTB
            PDRBID PDRBLGA PDRBBG PDRBDG  PDRBTR PDRBKU PDRBJS  PTKSP
            PTKNP UNEP MISK INFL PAD BMD TPD TPGPD TPGP NEXP PDRB PTK
            PPKT PDTANI;
INSTRUMENTS  POP MTR LDK PNS TREN JMKH SBI UMP  LINVS NTRP LEXPD  LIMPD
            DDTBL AKK INFLK  BUMD PADL DAK PLD LPAJD  LRETD  LBPGW  LBBJ
            LBMDSP LBMDSL LBLL LKONS LINVS LEXPD LIMPD LPTKNP LPTKNP
            LUNEP LMISK LDBH LPDRBSP LPDRBTB LPDRBID LPDRB;

PARM a0 -894.889  a1 0.003597  a2 0.000999  a3 1.697810 a4 0.851925
      b0  -506.919  b1 0.000033 b2 0.006649  b3 0.000028 b4 0.831304
      c0  30475.51 c1 13.69660  c2-0.53122  c3 0.485651 c4 0.562410  c5 1.234813 c6 8.802526
      d0 2751.065  d1 0.000693  d2 23.83727 d3 0.814383
      e0 -18.8553 e1 4.759793 e2 0.350788 e3 0.114625 e4 0.545952
      f0 353.7153  f1 0.250704 f2 0.040235 f3 0.087965 f4 0.722516
      g0 3128.957 g1 0.027119 g2 0.000922 g3 0.001142 g4 0.441545
      h0 -8386.77  h1 0.634638  h2 1.385087  h3 0.531635
```

Lampiran 8. Lanjutan

```
i0 1438.420 i1 0.034405 i2 0.135642 i3 0.019118 i4 0.515788
j0 -58432.8  j1 0.034252  j2 0.021192  j3 0.304371  j4 34.36591 j5 0.993811
k0  -56197.4 k1 0.325015 k2 -4.27491 k3 0.166592 k4 0.859675
l0  885709.3 l1 -112.862  l2 0.152388 l3 97.14248 l4 0.888123
m0  -27584.5 m1 0.004562 m2 0.208677 m3 0.999934
n0  -509.331 n1 0.002354 n2 0.079091 n3 -0.00636 n4 0.007406 n5-0.02479 n6 0.931768
o0 4165.460 o1 -0.18759 o2 0.008108 o3 0.044087 o4 0.048805 o5 0.978771
p0  3107.836 p1 1.461541 p2 0.305956 p3 0.796363  p4 0.480399 p5 -0.08983 p6 34.93782
q0  -997.755  q1 0.008217 q2 0.014008  q3 0.012725 q4 0.769387
r0  9524.944 r1 0.042254 r2 0.205493 r3 0.184136 r4 0.002987
s0  -23241.6  s1 0.722010 s2 0.845538 s3 0.599660 s4 2.423793
t0  -36194.9  t1 0.452899 t2 0.328033  t3 0.483506  t4 6.352968
u0  -7047.39  u1 0.539378 u2  0.199153 u3 0.250975  u4 3.834177
v0  31367.64 v1 1.465487 v2 0.060057 v3 0.125627 v4 0.042223 v5 0.727640
w0  -1167.51 w1 0.052376  w2 -0.00652 w3 0.949041
x0  -624.690 x1 0.017133  x2 0.050626  x3 0.844376
y0  580.0407   y1 -0.00024  y2 0.005544 y3 -0.03071 y4 0.946619
z0 -10.9780  z1 0.000243  z2 0.000049  z3 -0.00004 z4 -0.03856 z5 0.914515;

/*PAJD = a0 + a1*TPGPD + a2*MTR + a3*JMKH + a4*LPAJD;*/
/*RETD  = b0 + b1*PDRB + b2*TPGPD + b3*POP + b4*LRETD; */
DAU     = c0 + c1*PNS + C2*PAD + c3*BBJ + c4*BLL + c5*LDK + c6*INFL;
DBH     = d0 + d1*PDRB + d2*TREN + d3*LDBH;
BPGW    = e0 + e1*PNS + e2*PAD + e3*DAU + e4*LBPGW;
BBJ     = f0 + f1*PAD + f2*DAU + f3*DBH + f4*LBBJ;
/*BMDSP=  g0 + g1*DAK + g2*DAU + g3*PDRBSP + g4*LBMDSP; */
/*BMDSL=  h0 + h1*DBH + h2*DAK + h3*LBMDSL; */
BLL     =  i0 + i1*DAU + i2*DBH + i3*PAD + i4*LBLL;
KONS    = j0 + j1*PDRB + j2*BBJ + j3*BPGW + j4*INFL + j5*LKONS;
INVS    = k0 + k1*BMD + k2*PAD + k3*KONS + k4*LINVS;
EXPD     =  l0 + l1*NTRP + l2*PDRB +  l3*INFL + l4*LEXPD;
IMPD     =  m0 + m1*KONS + m2*INVS + m3*LIMPD;
PDRBSP   = n0 + n1*PTKSP + n2*BMDSP + n3* INVS + n4*KONS + n5* DDTBL + n6*LPDRBSP;
PDRBTB   = o0 + o1* PTKNP + o2*INVS + o3*DDTBL + o4*NEXP + o5*LPDRBTB;
PDRBID   = p0 + p1*PTKNP + p2*INVS + p3*DDTBL + p4*BMDSL + p5*UMP + p6*INFL;
PDRBLGA  = q0 + q1*PTKNP + q2*INVS + q3*DDTBL + q4*LPDRBLGA;
PDRBBG    = r0 + r1*PTKNP + r2*INVS + r3*DDTBL + r4*INFL;
PDRBDG    = s0 + s1*PTKNP + s2*DDTBL + s3*INVS + s4*INFL;
PDRBTR    = t0 + t1*PTKNP + t2*INVS + t3*DDTBL + t4*INFL;
PDRBKU    = u0 + u1*PTKNP + u2*INVS + u3*DDTBL + u4*INFL;
PDRBJS    = v0 + v1*PTKNP + v2*KONS + v3*DDTBL + v4*INVS + v5*INFL;
PTKSP     = w0 + w1*AKK + w2*INVS + w3*LPTKSP;
PTKNP     = x0 + x1*INVS + x2*AKK + x3*LPTKNP;
MISK      = y0 + y1*PDRB + y2*POP +  y3*UNEP + y4*LMISK;
INFL      =  z0 + z1*TPGPD + z2*NEXP + z3*INVS + z4*SBI + z5*INFLK;
PAD       =  PAJD + RETD +  BUMD + PADL;
UNEP       = AKK - PTK;
TPD       = PAD + DAU + DBH +  DAK + PLD;
BMD       = BMDSP + BMDSL;
TPGPD     = BPGW +  BBJ   + BMD    + BLL;
TPGP      = TPGPD  +  DDTBL;
NEXP      = EXPD - IMPD ;
PTK       = PTKSP + PTKNP;
PDRB      = PDRBSP + PDRBTB + PDRBID + PDRBLGA + PDRBBG + PDRBDG + PDRBTR + PDRBKU
             + PDRBJS;
PPKT      = PDRB/POP;
PDTANI    = PDRBSP/PTKSP;
range kriteria=1 to 17;

RUN;
```

Lampiran 9. Hasil Simulasi Menaikkan Pajak dan Retribusi Daerah 10 Persen dan Menaikkan Belanja Modal Sektor Pertanian dan Sektor Lain 5 Persen untuk Kabupaten Berbasis Pertanian

The SAS System

The SIMNLIN Procedure

Model Summary

Model Variables	33
Endogenous	33
Parameters	135
Range Variable	Kriteria
Equations	33
Number of Statements	33

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Data Set Options

DATA= SULSEL

Solution Summary

Variables Solved	33
Solution Range	Kriteria
First	1
Last	17
Solution Method	NEWTON
CONVERGE=	1E-8
Maximum CC	2.07E-14
Maximum Iterations	2
Total Iterations	194
Average Iterations	2

Observations Processed

Read	97
Solved	97

Lampiran 9. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 1 To 17

Descriptive Statistics

Variable	N Obs	Actual N	Actual Mean	Actual Std Dev	Predicted Mean	Predicted Std Dev	Label
DAU	97	97	138493	34208.8	138223	29805.8	Dana alokasi umum
DBH	97	97	15424.4	5940.4	15532.1	5039.1	Dana bagi hasil
BPGW	97	97	97987.9	32630.6	98342.5	30804.0	Belanja pegawai
BBJ	97	97	26134.9	10279.1	26235.8	8632.3	Belanja barang dan jasa
BLL	97	97	18126.0	8653.9	18227.6	5305.5	Belanja lain-lain pemerintah
KONS	97	97	742060	330817	739257	351866	Konsumsi swasta
INVS	97	97	191920	112827	196662	133605	Investasi swasta
EXPD	97	97	282061	185382	292032	244359	Ekspor daerah
IMPD	97	97	204546	87894.7	211274	115416	Impor daerah
PDRBSP	97	97	650834	322887	587705	291425	PDRB sek.pertanian
PDRBTB	97	97	13194.8	22161.3	13627.7	24037.7	PDRB sek.pertambangan
PDRBID	97	97	73727.9	59937.5	130779	75797.5	PDRB sektor industri
PDRBLGA	97	97	7793.2	4967.2	7928.3	5396.2	PDRB sektor listrik gas dan air
PDRBBG	97	97	56612.3	30311.9	53647.1	28391.5	PDRB sektor bangunan
PDRBDG	97	97	140470	96128.4	137643	94655.5	PDRB sek.perdagangan
PDRBTR	97	97	48710.7	36045.9	58518.8	53106.8	PDRB sek.transportasi
PDRBKU	97	97	59998.1	29216.5	62079.6	37875.0	PDRB sektor keuangan
PDRBJS	97	97	166301	67693.1	152651	61287.6	PDRB sek.jasa-jasa
PTKSP	97	97	82946.9	39125.5	82601.0	38412.6	Penyerapan tenaga kerja pertanian
PTKNP	97	97	44925.2	28274.3	45588.0	26845.5	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
UNEP	97	97	11556.2	7036.5	11270.2	11397.2	Pengangguran
MISK	97	97	47746.9	29061.7	47775.0	28577.8	Jumlah pend. miskin
INFL	97	97	771.5	320.4	7.680	298.3	Inflasi daerah
PAD	97	97	9462.4	4939.9	10021.4	5202.1	Pendapatan asli daerah
BMD	97	97	54433.9	22900.0	57155.6	24045.0	Belanja modal
TPD	97	97	192158	47271.2	192555	44294.5	Total penerimaan daerah
TPGPD	97	97	196683	54076.5	199962	52733.6	Total pengeluaran pemerintah daerah
TPGP	97	97	206355	54794.2	209633	53729.9	Total pengeluaran pemerintah
NEXP	97	97	77514.7	133599	80757.7	159513	Net ekspor
PDRB	97	97	1217642	584868	1204580	632352	Produk domestik regional bruto
PTK	97	97	127872	57889.1	128189	58190.8	Penyerapan t.kerja
PPKT	97	97	3.8090	1.0667	3.7000	1.1578	Pendapatan perkapita
PDTANI	97	97	8.2271	3.1787	7.4016	2.7581	Pendapatan Petani

Lampiran 9. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Statistics of fit

Variable	N	Mean Error	Mean % Error	Mean Abs Error	Mean Abs % Error	RMS Error	RMS % Error	R-Square	Label
DAU	97	-269.8	0.9069	10069.0	7.4380	13368.2	10.1601	0.8457	Dana alokasi umum
DBH	97	107.6	5.0415	2561.1	16.9958	3884.2	23.2181	0.5680	Dana bagi hasil
BPGW	97	354.6	1.4593	8100.4	8.8611	9869.6	11.4757	0.9076	Belanja pegawai
BBJ	97	100.8	5.6460	4513.8	18.6222	6240.1	24.6109	0.6276	Belanja barang dan jasa
BLL	97	101.6	15.2809	4769.9	32.5793	6682.6	56.3140	0.3975	Belanja lain-lain pemerintah
KONS	97	-2803.0	-1.6190	31876.7	4.6040	45755.7	6.0875	0.9807	Konsumsi swasta
INVS	97	4741.9	-0.6554	39536.2	23.4477	53941.3	31.2955	0.7690	Investasi swasta
EXPD	97	9971.1	-10.4260	70089.6	34.2322	88670.8	47.7797	0.7688	Ekspor daerah
IMPD	97	6728.1	1.1239	41130.1	21.2859	58623.4	29.3855	0.5505	Impor daerah
PDRBSP	97	-63129.0	-9.5901	63319.7	9.6211	73479.9	9.9415	0.9477	PDRB sektor pertanian
PDRBTB	97	432.9	-7.1608	5203.0	71.7408	6535.5	94.5276	0.9121	PDRB sektor pertambangan
PDRBID	97	57051.4	147.5	60468.3	149.8	76291.7	212.2	-.6370	PDRB sektor industri
PDRBLGA	97	135.1	1.4503	1145.9	19.2656	1478.7	27.7063	0.9105	PDRB sektor listrik gas dan air
PDRBBG	97	-2965.2	0.3570	18772.4	33.2503	25198.1	41.6177	0.3018	PDRB sektor bangunan
PDRBDG	97	-2827.2	-1.0546	38414.3	29.1342	53618.0	37.1871	0.6856	PDRB sektor perdagangan
PDRBTR	97	9808.1	14.0676	23477.5	61.3210	30563.5	81.0443	0.2736	PDRB sektor transportasi
PDRBKU	97	2081.4	1.9335	15143.6	28.5298	19559.2	39.2793	0.5472	PDRB sektor keuangan
PDRBJS	97	-13649.5	-4.4911	30316.7	19.7897	36327.6	23.2060	0.7090	PDRB sektor jasa-jasa
PTKSP	97	-345.9	0.4030	4813.5	6.0678	8653.3	9.6453	0.9506	Penyerapan tenaga kerja pertanian
PTKNP	97	662.8	4.5115	5241.3	13.2516	8098.0	20.1887	0.9171	PenyerapaN T.kerja non pertanian
UNEP	97	-286.0	4.5931	6809.5	63.1614	10419.4	91.5346	-1.216	Pengangguran
MISK	97	28.0643	1.1543	3491.6	7.8787	4836.4	10.3132	0.9720	Jumlah penduduk miskin
INFL	97	-3.4813	5.1482	87.8003	16.1646	118.8	38.0534	0.8611	Inflasi daerah
PAD	97	559.0	5.8507	559.0	5.8507	638.6	6.0554	0.9831	Pendapatan asli daerah
BMD	97	2721.7	5.0000	2721.7	5.0000	2950.4	5.0000	0.9832	Belanja modal
TPD	97	396.8	0.7653	9724.6	5.2174	12939.9	7.0765	0.9243	Total penerimaan daerah
TPGPD	97	3278.7	2.0761	8609.3	4.8014	11174.0	6.5999	0.9569	Total pengeluaran pemerintah daerah
TPGP	97	3278.7	1.9279	8609.3	4.5382	11174.0	6.2065	0.9580	Total pengeluaran pemerintah
NEXP	97	3243.0	434.0	55846.0	682.1	70695.8	4633.6	0.7171	Net ekspor
PDRB	97	-13062.0	-2.9626	102231	8.9284	129893	11.1128	0.9502	Produk domestik regional bruto
PTK	97	316.9	0.4393	6778.5	5.4415	10406.4	7.7057	0.9673	Penyerapan tenaga kerja
PPKT	97	-0.1090	-2.9626	0.3348	8.9284	0.4196	11.1128	0.8436	Penda. perkapita
PDTANI	97	-0.8256	-9.1279	0.9403	11.1556	1.1848	12.9959	0.8596	Pendapatan Petani

Lampiran 9. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Theil Forecast Error Statistics

				MSE Decomposition Proportions						
			Corr	Bias	Reg	Dist	Var	Covar	Inequality Coef	
Variable	N	MSE	(R)	(UM)	(UR)	(UD)	(US)	(UC)	U1	U
DAU	97	1.7871E8	0.92	0.00	0.02	0.98	0.11	0.89	0.0937	0.0471
DBH	97	15086679	0.76	0.00	0.02	0.98	0.05	0.95	0.2351	0.1183
BPGW	97	97408842	0.95	0.00	0.00	1.00	0.03	0.96	0.0956	0.0479
BBJ	97	38939068	0.79	0.00	0.01	0.99	0.07	0.93	0.2224	0.1121
BLL	97	44656518	0.63	0.00	0.00	1.00	0.25	0.75	0.3330	0.1712
KONS	97	2.0936E9	0.99	0.00	0.26	0.74	0.21	0.79	0.0564	0.0281
INVS	97	2.9097E9	0.92	0.01	0.31	0.68	0.15	0.85	0.2426	0.1173
EXPD	97	7.8625E9	0.95	0.01	0.58	0.41	0.44	0.55	0.2631	0.1237
IMPD	97	3.4367E9	0.87	0.01	0.44	0.55	0.22	0.77	0.2635	0.1266
PDRBSP	97	5.3993E9	1.00	0.74	0.17	0.09	0.18	0.08	0.1012	0.0532
PDRBTB	97	42713106	0.96	0.00	0.17	0.83	0.08	0.91	0.2544	0.1228
PDRBID	97	5.8204E9	0.74	0.56	0.17	0.27	0.04	0.40	0.8046	0.3104
PDRBLGA	97	2186472	0.96	0.01	0.17	0.82	0.08	0.91	0.1602	0.0786
PDRBBG	97	6.3494E8	0.63	0.01	0.13	0.86	0.01	0.98	0.3928	0.2020
PDRBDG	97	2.8749E9	0.84	0.00	0.07	0.93	0.00	1.00	0.3155	0.1592
PDRBTR	97	9.3413E8	0.85	0.10	0.53	0.37	0.31	0.59	0.5053	0.2194
PDRBKU	97	3.8256E8	0.86	0.01	0.42	0.57	0.19	0.79	0.2934	0.1404
PDRBJS	97	1.3197E9	0.87	0.14	0.01	0.85	0.03	0.83	0.2025	0.1057
PTKSP	97	74879281	0.98	0.00	0.00	1.00	0.01	0.99	0.0944	0.0474
PTKNP	97	65577667	0.96	0.01	0.00	0.99	0.03	0.96	0.1528	0.0765
UNEP	97	1.0856E8	0.44	0.00	0.63	0.37	0.17	0.83	0.7712	0.3532
MISK	97	23391014	0.99	0.00	0.00	1.00	0.01	0.99	0.0866	0.0434
INFL	97	14110.5	0.93	0.00	0.00	1.00	0.03	0.96	0.1423	0.0716
PAD	97	407828	1.00	0.77	0.17	0.06	0.17	0.07	0.0599	0.0291
BMD	97	8705132	1.00	0.85	0.15	0.00	0.15	0.00	0.0500	0.0244
TPD	97	1.6744E8	0.96	0.00	0.01	0.99	0.05	0.95	0.0654	0.0327
TPGPD	97	1.2486E8	0.98	0.09	0.00	0.91	0.01	0.90	0.0548	0.0272
TPGP	97	1.2486E8	0.98	0.09	0.00	0.91	0.01	0.90	0.0524	0.0260
NEXP	97	4.9979E9	0.90	0.00	0.31	0.69	0.13	0.86	0.4595	0.2130
PDRB	97	1.687E10	0.98	0.01	0.20	0.79	0.13	0.86	0.0963	0.0480
PTK	97	1.0829E8	0.98	0.00	0.01	0.99	0.00	1.00	0.0742	0.0370
PPKT	97	0.1761	0.94	0.07	0.14	0.79	0.05	0.89	0.1061	0.0536
PDTANI	97	1.4038	0.97	0.49	0.07	0.44	0.12	0.39	0.1344	0.0709

Lampiran 9. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 1 To 17

Theil Relative Change Forecast Error Statistics

	Relative Change			MSE Decomposition Proportions						
			Corr	Bias	Reg	Dist	Var	Covar	Inequality Coef	
Variable	N	MSE	(R)	(UM)	(UR)	(UD)	(US)	(UC)	U1	U
DAU	96	0.0116	0.85	0.00	0.00	1.00	0.07	0.93	0.5172	0.2774
DBH	96	0.0788	0.58	0.00	0.00	1.00	0.34	0.66	0.8064	0.5244
BPGW	96	0.0115	0.91	0.01	0.01	0.98	0.11	0.89	0.4083	0.2180
BBJ	96	0.0660	0.74	0.00	0.00	1.00	0.17	0.83	0.6590	0.3796
BLL	96	0.1223	0.78	0.00	0.04	0.96	0.30	0.70	0.6294	0.3780
KONS	96	0.00340	0.98	0.06	0.02	0.92	0.00	0.94	0.2068	0.1034
INVS	96	0.0985	0.66	0.01	0.20	0.79	0.00	0.99	0.8256	0.4096
EXPD	96	0.2535	0.91	0.02	0.56	0.42	0.37	0.62	0.6351	0.2673
IMPD	96	0.0649	0.59	0.00	0.16	0.84	0.01	0.99	0.8725	0.4515
PDRBSP	96	0.0112	0.99	0.88	0.03	0.09	0.04	0.09	0.3482	0.1782
PDRBTB	96	1.1194	0.77	0.01	0.47	0.53	0.18	0.81	0.8635	0.3663
PDRBID	96	4.8890	0.56	0.45	0.41	0.15	0.19	0.36	2.1370	0.6108
PDRBLGA	96	0.0607	0.90	0.01	0.23	0.77	0.08	0.92	0.4823	0.2254
PDRBBG	96	0.1645	0.53	0.00	0.60	0.40	0.18	0.82	1.3205	0.5193
PDRBDG	96	0.1653	0.75	0.00	0.73	0.26	0.44	0.56	1.2561	0.4436
PDRBTR	96	0.7798	0.68	0.05	0.75	0.19	0.46	0.49	1.6214	0.5142
PDRBKU	96	0.1573	0.68	0.01	0.71	0.28	0.37	0.62	1.3510	0.4769
PDRBJS	96	0.0561	0.78	0.06	0.38	0.56	0.13	0.81	0.8292	0.3625
PTKSP	96	0.0104	0.95	0.00	0.00	1.00	0.02	0.98	0.3006	0.1538
PTKNP	96	0.0301	0.95	0.01	0.00	0.98	0.04	0.95	0.3091	0.1589
UNEP	96	0.8160	0.34	0.01	0.62	0.37	0.13	0.86	1.5111	0.5999
MISK	96	0.0192	0.98	0.00	0.01	0.99	0.00	1.00	0.2196	0.1098
INFL	96	0.0331	0.98	0.01	0.00	0.99	0.03	0.96	0.2094	0.1068
PAD	96	0.00429	1.00	0.86	0.08	0.06	0.08	0.06	0.2081	0.0992
BMD	96	0.00427	1.00	0.76	0.24	0.00	0.24	0.00	0.0996	0.0482
TPD	96	0.00583	0.92	0.00	0.00	1.00	0.06	0.94	0.4019	0.2111
TPGPD	96	0.00393	0.96	0.13	0.02	0.85	0.00	0.87	0.2945	0.1455
TPGP	96	0.00350	0.96	0.13	0.03	0.85	0.00	0.87	0.2914	0.1438
NEXP	96	5179.0	-0.99	0.01	0.99	0.00	0.00	0.99	2.1192	0.9976
PDRB	96	0.0144	0.95	0.03	0.36	0.61	0.23	0.74	0.3881	0.1781
PTK	96	0.00635	0.97	0.00	0.00	1.00	0.01	0.99	0.2511	0.1267
PPKT	96	0.0119	0.86	0.06	0.38	0.56	0.17	0.77	0.6762	0.2971
PDTANI	96	0.0213	0.92	0.50	0.02	0.48	0.08	0.43	0.5745	0.3035

Lampiran 10. Hasil Simulasi Menaikkan Investasi Swasta 10 Persen untuk Kabupaten Kota Berbasis Non Pertanian

```
OPTIONS NODATE NONUMBER;
DATA SULSEL;
SET ANALISIS;

PAD      = PAJD + RETD + BUMD + PADL;
TPD      = PAD + DAU + DBH + DAK + PLD;
BMD      = BMDSP + BMDSL;
TPGPD    = BPGW + BBJ + BMD + BLL;
TPGP     = TPGPD + DDTBL;
PTK      = PTKSP + PTKNP;
NEXP     = EXPD - IMPD ;
PDRB     = PDRBSP + PDRBTB + PDRBID + PDRBLGA + PDRBBG + PDRBDG + PDRBTR
           + PDRBKU + PDRBJS;;
PPKT     = PDRB/POP;
PDTANI   = PDRBSP/PTKSP;

LABEL
AKK      = 'Jumlah angkatan kerja'
BBJ      = 'Belanja barang dan jasa'
BLL      = 'Belanja lain-lain pemerintah'
BMD      = 'Belanja modal'
BMDSL    = 'Belanja modal sektor lainnya'
BMDSP    = 'Belanja modal sektor pertanian'
BPGW     = 'Belanja pegawai'
BUMD     = 'Badan usaha milik daerah'
DAK      = 'Dana alokasi khusus'
DAU      = 'Dana alokasi umum'
DBH      = 'Dana bagi hasil'
DDTBL    = 'Dana dekonsentrasi, T perbantuan, dan lainnya'
EXPD     = 'Ekspor daerah'
IMPD     = 'Impor daerah'
INFL     = 'Inflasi daerah'
INVS     = 'Investasi swasta'
JMKH     = 'Jumlah kamar hotel'
KONS     = 'Konsumsi swasta'
LBBJ     = 'Belanja barang dan jasa tahun sebelumnya'
LBLL     = 'Belanja lain-lain pemerintah tahun sebelumnya'
LBMDSP   = 'Belanja modal sek pertanian tahun sebelumnya'
LBMDSL   = 'Belanja modal sekt lainnya tahun sebelumnya'
LBPGW    = 'Belanja pegawai tahun sebelumnya'
LDK      = 'Luas daerah kabupaten/kota'
LDBH     = `Dana bagi hasil tahun sebelumnya'
LEXPD    = 'Ekspor daerah tahun sebelumnya'
LIMPD    = 'Impor daerah tahun sebelumnya'
LINVS    = 'Investasi swasta  tahun sebelumnya'
LKONS    = 'Peng konsumsi swasta  tahun sebelumnya'
LMISK    = 'Jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya'
LPAJD    = 'Pajak daerah tahun sebelumnya'
LPDRB    = 'PDRB tahun sebelumnya'
LPDRBID  = 'PDRB sektor industri tahun sebelumnya'
LPDRBTB  = 'PDRB sektor pertambangan tahun sebelumnya'
LPPKT    = 'Pendapatan perkapita tahun sebelumnya'
LPTKNP   = 'Penyerapan T kerja non pertanian tahun sebelumnya'
LPTKSP   = 'Penyerapan T kerja pertanian tahun sebelumnya'
LRETD    = 'Penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya'
LUNEP    = 'Pengangguran tahun sebelumnya'
```

Lampiran 10. Lanjutan

```
MISK      = 'Jumlah penduduk miskin'
MTR       = 'Jumlah kendaran bermotor'
NTRP      = 'Nilai tukar rupiah'
NEXP      = 'Net ekspor'
PAD       = 'Pendapatan asli daerah'
PADL      = 'Penerimaan asli daerah lain-lain'
PAJD      = 'Pajak daerah'
PDRB      = 'Produk domestik regional bruto'
PDRBBG    = 'PDRB sektor bangunan'
PDRBDG    = 'PDRB sektor perdagangan'
PDRBID    = 'PDRB sektor industri'
PDRBJS    = 'PDRB sektor jasa-jasa'
PDRBKU    = 'PDRB sektor keuangan'
PDRBLGA   = 'PDRB sektor listrik gas dan air'
PDRBSP    = 'PDRB sektor pertanian'
PDRBTB    = 'PDRB sektor pertambangan'
PDRBTR    = 'PDRB sektor transportasi'
PLD       = 'Penerimaan lain daerah'
PNS       = 'Jumlah pengawai negeri sipil'
POP       = 'Jumlah penduduk'
PTK       = 'Penyerapan tenaga kerja'
PTKNP     = 'Penyerapan tenaga  kerja non pertanian'
PTKSP     = 'Penyerapan tenaga kerja  pertanian'
RETD      = 'Retribusi daerah'
SBI       = 'Suku bunga Bank Indonesia'
TPD       = 'Total penerimaan daerah'
TPGP      = 'Total pengeluaran pemerintah'
TPGPD     = 'Total pengeluaran pemerintah daerah'
TREN      = 'Tren (tahun 1,2,3, ...n)'
UMP       = 'Upah  minimum Provinsi'
UNEP      = 'Pengangguran'
PPKT      = ‘Pendapatan perkapita’
PDTANI    = ‘Pendapatan Petani’;
INVS      = 1.1*INVS;
RUN;

PROC SIMNLIN DATA=SULSEL SIMULATE STAT OUTPREDICT THEIL;
ENDOGENOUS  PAJD RETD DAU DBH  BPGW BBJ BMDSP BMDSL BLL KONS EXPD IMPD
            PDRBSP PDRBTB PDRBID PDRBLGA PDRBBG PDRBDG  PDRBTR PDRBKU
            PDRBJS  PTKSP PTKNP UNEP MISK INFL PAD BMD TPD TPGPD TPGP
            NEXP PDRB PTK PPKT PDTANI;
INSTRUMENTS  POP MTR LDK PNS TREN JMKH SBI UMP  LINVS NTRP LEXPD  LIMPD
            DDTBL AKK INFLK  BUMD PADL DAK PLD LPAJD  LRETD  LBPGW  LBBJ
            LBMDSP LBMDSL LBLL LKONS LINVS LEXPD LIMPD LPTKNP LPTKNP
            LUNEP LMISK LDBH LPDRBSP LPDRBTB LPDRBID LPDRB;

PARM a0 -894.889  a1 0.003597  a2 0.000999  a3 1.697810 a4 0.851925
      b0  -506.919  b1 0.000033 b2 0.006649  b3 0.000028 b4 0.831304
      c0  30475.51 c1 13.69660  c2-0.53122  c3 0.485651 c4 0.562410  c5 1.234813 c6 8.802526
      d0 2751.065  d1 0.000693  d2 23.83727 d3 0.814383
      e0 -18.8553 e1 4.759793 e2 0.350788 e3 0.114625 e4 0.545952
      f0 353.7153  f1 0.250704 f2 0.040235 f3 0.087965 f4 0.722516
      g0 3128.957 g1 0.027119 g2 0.000922 g3 0.001142 g4 0.441545
      h0 -8386.77  h1 0.634638  h2 1.385087  h3 0.531635
      i0 1438.420 i1 0.034405 i2 0.135642 i3 0.019118 i4 0.515788
      j0 -58432.8  j1 0.034252  j2 0.021192  j3 0.304371  j4 34.36591 j5 0.993811
      k0  -56197.4 k1 0.325015 k2 -4.27491 k3 0.166592 k4 0.859675
```

Lampiran 10. Lanjutan

```
l0  885709.3 l1 -112.862  l2 0.152388 l3 97.14248 l4 0.888123
m0  -27584.5 m1 0.004562 m2 0.208677 m3 0.999934
n0  -509.331 n1 0.002354 n2 0.079091 n3 -0.00636 n4 0.007406 n5-0.02479 n6 0.931768
o0 4165.460 o1 -0.18759 o2 0.008108 o3 0.044087 o4 0.048805 o5 0.978771
p0  3107.836 p1 1.461541 p2 0.305956 p3 0.796363  p4 0.480399 p5 -0.08983 p6 34.93782
q0  -997.755  q1 0.008217 q2 0.014008  q3 0.012725 q4 0.769387
r0  9524.944 r1 0.042254 r2 0.205493 r3 0.184136 r4 0.002987
s0  -23241.6  s1 0.722010 s2 0.845538 s3 0.599660 s4 2.423793
t0  -36194.9  t1 0.452899 t2 0.328033  t3 0.483506  t4 6.352968
u0  -7047.39  u1 0.539378 u2  0.199153 u3 0.250975  u4 3.834177
v0  31367.64 v1 1.465487 v2 0.060057 v3 0.125627 v4 0.042223 v5 0.727640
w0  -1167.51 w1 0.052376  w2 -0.00652 w3 0.949041
x0  -624.690 x1 0.017133  x2 0.050626  x3 0.844376
y0  580.0407   y1 -0.00024  y2 0.005544 y3 -0.03071 y4 0.946619
z0 -10.9780  z1 0.000243  z2 0.000049  z3 -0.00004 z4 -0.03856 z5 0.914515;

PAJD   = a0 + a1*TPGPD + a2*MTR + a3*JMKH + a4*LPAJD;
RETD   = b0 + b1*PDRB + b2*TPGPD + b3*POP + b4*LRETD;
DAU    = c0 + c1*PNS + C2*PAD + c3*BBJ + c4*BLL + c5*LDK + c6*INFL;
DBH    = d0 + d1*PDRB + d2*TREN + d3*LDBH;
BPGW   = e0 + e1*PNS + e2*PAD + e3*DAU + e4*LBPGW;
BBJ    = f0 + f1*PAD + f2*DAU + f3*DBH + f4*LBBJ;
BMDSP  =  g0 + g1*DAK + g2*DAU + g3*PDRBSP + g4*LBMDSP;
BMDSL  =  h0 + h1*DBH + h2*DAK + h3*LBMDSL;
BLL    =  i0 + i1*DAU + i2*DBH + i3*PAD + i4*LBLL;
KONS   = j0 + j1*PDRB + j2*BBJ + j3*BPGW + j4*INFL + j5*LKONS;
/*INVS  = k0 + k1*BMD + k2*PAD + k3*KONS + k4*LINVS;*/
EXPD    =  l0 + l1*NTRP + l2*PDRB +  l3*INFL + l4*LEXPD;
IMPD    =  m0 + m1*KONS + m2*INVS + m3*LIMPD;
PDRBSP  = n0 + n1*PTKSP + n2*BMDSP + n3* INVS + n4*KONS + n5* DDTBL + n6*LPDRBSP;
PDRBTB  = o0 + o1* PTKNP + o2*INVS + o3*DDTBL + o4*NEXP + o5*LPDRBTB;
PDRBID  = p0 + p1*PTKNP + p2*INVS + p3*DDTBL + p4*BMDSL + p5*UMP + p6*INFL;
PDRBLGA  = q0 + q1*PTKNP + q2*INVS + q3*DDTBL + q4*LPDRBLGA;
PDRBBG    = r0 + r1*PTKNP + r2*INVS + r3*DDTBL + r4*INFL;
PDRBDG    = s0 + s1*PTKNP + s2*DDTBL + s3*INVS + s4*INFL;
PDRBTR    = t0 + t1*PTKNP + t2*INVS + t3*DDTBL + t4*INFL;
PDRBKU    = u0 + u1*PTKNP + u2*INVS + u3*DDTBL + u4*INFL;
PDRBJS    = v0 + v1*PTKNP + v2*KONS + v3*DDTBL + v4*INVS + v5*INFL;
PTKSP     = w0 + w1*AKK + w2*INVS + w3*LPTKSP;
PTKNP     = x0 + x1*INVS + x2*AKK + x3*LPTKNP;
MISK      = y0 + y1*PDRB + y2*POP +  y3*UNEP + y4*LMISK;
INFL      =  z0 + z1*TPGPD + z2*NEXP + z3*INVS + z4*SBI + z5*INFLK;
PAD       =  PAJD + RETD +  BUMD + PADL;
UNEP       = AKK - PTK;
TPD       = PAD + DAU + DBH +  DAK + PLD;
BMD       = BMDSP + BMDSL;
TPGPD     = BPGW +  BBJ   + BMD    + BLL;
TPGP      = TPGPD  +  DDTBL;
NEXP      = EXPD - IMPD ;
PTK       = PTKSP + PTKNP;
PDRB      = PDRBSP + PDRBTB + PDRBID + PDRBLGA + PDRBBG + PDRBDG + PDRBTR + PDRBKU
             + PDRBJS;
PPKT      = PDRB/POP;
PDTANI    = PDRBSP/PTKSP;
range kriteria=18 to 23;

RUN;
```

Lampiran 11. Hasil Simulasi Menaikkan Investasi Swasta 10 Persen untuk Kabupaten Kota Berbasis Non Pertanian

The SAS System

The SIMNLIN Procedure

Model Summary

Model Variables	36
Endogenous	36
Parameters	135
Range Variable	Kriteria
Equations	36
Number of Statements	36

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Data Set Options

DATA= SULSEL

Solution Summary

Variables Solved	36
Solution Range	Kriteria
First	18
Last	23
Solution Method	NEWTON
CONVERGE=	1E-8
Maximum CC	8.56E-10
Maximum Iterations	4
Total Iterations	64
Average Iterations	2.064516

Observations Processed

Read	31
Solved	31
First	103
Last	133

Lampiran 11. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 18 To 23

Descriptive Statistics

Variable	N Obs	N	Actual Mean	Actual Std Dev	Predicted Mean	Predicted Std Dev	Label
PAJD	31	31	11861.1	15663.9	11378.1	15485.8	Pajak daerah
RETD	31	31	7454.1	6237.3	7111.8	6320.4	Retribusi daerah
DAU	31	31	141943	67503.7	141580	69110.5	Dana alokasi umum
DBH	31	31	25962.5	18862.3	25346.3	17988.6	Dana bagi hasil
BPGW	31	31	110746	77547.7	109872	76751.5	Belanja pegawai
BBJ	31	31	38251.5	32070.3	38956.3	30871.2	Belanja barang dan jasa
BMDSP	31	31	6336.9	2543.2	6498.0	1347.1	Belanja modal sektor pertanian
BMDSL	31	31	57497.7	40507.3	53033.7	26778.4	Belanja modal sektor lainnya
BLL	31	31	22892.8	15120.8	22413.6	12201.8	Belanja lain-lain pemerintah
KONS	31	31	1984914	2514250	1996547	2501921	Konsumsi swasta
EXPD	31	31	2693621	3473012	2683033	3502613	Ekspor daerah
IMPD	31	31	2130652	3616571	2135136	3638005	Impor daerah
PDRBSP	31	31	315528	157630	286429	142742	PDRB sek.pertanian
PDRBTB	31	31	684297	1360538	683638	1362961	PDRB s.pertambangan
PDRBID	31	31	812257	1041925	654702	1089451	PDRB sektor industri
PDRBLGA	31	31	51807.6	92779.1	53103.5	94586.4	PDRB sektor listrik gas dan air
PDRBBG	31	31	220310	392247	253173	412976	PDRB sektor bangunan
PDRBDG	31	31	745588	1380668	835888	1445959	PDRB sek.perdagangan
PDRBTR	31	31	419762	768486	449608	810028	PDRB sek.transportasi
PDRBKU	31	31	288534	488321	308656	514212	PDRB sektor keuangan
PDRBJS	31	31	353240	521355	395445	510821	PDRB sek.jasa-jasa
PTKSP	31	31	34608.3	21799.3	34779.6	22242.1	Penyerapan tenaga kerja pertanian
PTKNP	31	31	117761	158769	118081	161703	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
UNEP	31	31	23483.7	25503.7	22991.7	24501.1	Pengangguran
MISK	31	31	46370.1	24151.3	46178.8	24070.8	Jumlah pend. miskin
INFL	31	31	7.813	334.6	7.654	309.1	Inflasi daerah
PAD	31	31	23498.2	21717.7	22672.9	21733.6	Pendapatan asli daerah
BMD	31	31	63834.6	41962.2	59531.7	27590.9	Belanja modal
TPD	31	31	230921	115751	229116	118473	Total penerimaan daerah
TPGPD	31	31	235725	124924	230774	129239	Total pengeluaran pemerintah daerah
TPGP	31	31	480964	606123	476013	614987	Total pengeluaran pemerintah
NEXP	31	31	562969	1013851	547896	1111666	Net ekspor
PDRB	31	31	3891325	4341049	3920641	4674502	Produk domestik regional bruto
PTK	31	31	152369	148209	152861	150294	Penyerapan t.kerja
PPKT	31	31	8.7583	5.6429	8.7204	6.6398	Pendapatan perkapita
PDTANI	31	31	10.9998	7.4523	10.5148	10.5089	Pendapatan Petani

Lampiran 11. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 18 To 23

Statistics of fit

Variable	N	Mean Error	Mean % Error	Mean Abs Error	Mean Abs % Error	RMS Error	RMS % Error	R-Square	Label
PAJD	31	-483.0	-1.1430	1495.1	20.1028	3100.6	30.6204	0.9595	Pajak daerah
RETD	31	-342.3	-2.8676	1103.2	18.9859	1494.9	25.9486	0.9406	Retribusi daerah
DAU	31	-362.8	-0.2784	10845.1	8.3994	14686.7	11.5519	0.9511	Dana alokasi umum
DBH	31	-616.3	3.9818	4170.1	19.1119	6016.9	26.5815	0.8949	Dana bagi hasil
BPGW	31	-873.5	-1.4729	10149.5	9.8059	13784.9	11.9670	0.9673	Belanja pegawai
BBJ	31	704.8	8.7950	5225.1	20.0913	6498.9	26.9280	0.9576	Belanja barang dan jasa
BMDSP	31	161.1	19.7474	1524.9	35.0883	1893.9	56.5138	0.4270	Bel. modal sektor pertanian
BMDSL	31	-4464.1	1.2422	14212.0	23.4114	21956.9	28.0747	0.6964	Belanja modal sektor lainnya
BLL	31	-479.2	17.3225	7440.5	41.2259	9766.5	65.4620	0.5689	Belanja lain-lain pemerintah
KONS	31	11633.3	0.1261	86690.1	5.9704	141169	8.5968	0.9967	Konsumsi swasta
EXPD	31	-10588.8	-5.7770	200056	21.7428	309419	31.7653	0.9918	Ekspor daerah
IMPD	31	4484.1	8.0069	158176	22.6371	277732	52.8809	0.9939	Impor daerah
PDRBSP	31	-29099.6	-9.1548	31440.9	10.0579	38833.4	11.3646	0.9373	PDRB sek.pertanian
PDRBTB	31	-658.3	-137.1	43058.7	413.1	86958.8	808.3	0.9958	PDRB s.pertambangan
PDRBID	31	-157555	64.8699	282781	113.6	466390	163.1	0.7930	PDRB sek industri
PDRBLGA	31	1295.9	6.9243	2569.3	11.6291	5213.3	20.2230	0.9967	PDRB sek listrik gas dan air
PDRBBG	31	32862.4	139.1	35175.8	142.8	46591.3	247.0	0.9854	PDRB sek bangunan
PDRBDG	31	90299.3	78.8768	99859.6	81.3672	140754	134.8	0.9893	PDRB s.perdagangan
PDRBTR	31	29845.3	46.8852	47353.3	61.6493	72445.2	134.5	0.9908	PDRB s.transportasi
PDRBKU	31	20121.1	19.3417	29477.4	28.0991	45061.5	49.5047	0.9912	PDRB sek keuangan
PDRBJS	31	42205.1	56.7951	47012.8	57.1369	62339.6	100.7	0.9852	PDRB sek jasa-jasa
PTKSP	31	171.3	2.2738	3262.7	16.8676	4305.1	29.5791	0.9597	Penyerapan tenaga kerja pertanian
PTKNP	31	320.7	-0.5929	6331.1	8.8319	8875.0	10.6248	0.9968	Penyerapan tenaga kerja non pertanian
UNEP	31	-491.9	6.4058	6048.2	32.6542	8386.3	40.7802	0.8883	Pengangguran
MISK	31	-191.4	-0.1380	3661.5	7.5835	5229.8	9.1937	0.9515	Jumlah pend.miskin
INFL	31	-15.8867	0.1262	105.5	14.0683	133.9	17.2971	0.8345	Inflasi daerah
PAD	31	-825.3	-5.0104	2087.1	9.3059	3568.3	12.2136	0.9721	Pendapatan asli daerah
BMD	31	-4303.0	1.4699	14102.0	19.4754	22439.9	24.7441	0.7045	Belanja modal
TPD	31	-1804.4	-1.1632	9843.4	4.6407	13582.7	6.3753	0.9858	Total penerimaan daerah
TPGPD	31	-4951.0	-2.3601	19370.1	8.6385	28174.3	11.1625	0.9474	Total pengeluaran pemerintah daerah
TPGP	31	-4951.0	-2.8388	19370.1	7.5911	28174.3	10.4311	0.9978	Total pengeluaran pemerintah
NEXP	31	-15072.9	-14.5765	212378	115.5	318685	226.5	0.8979	Net ekspor
PDRB	31	29315.7	-3.5907	437839	16.3133	591860	22.6443	0.9808	Produk domestik regional bruto
PTK	31	491.9	-0.5710	6048.2	4.8574	8386.3	6.1949	0.9967	Penyerapan t.kerja
PPKT	31	-0.0379	-3.5907	1.3046	16.3133	1.8130	22.6443	0.8933	Pend perkapita
PDTANI	31	0.6151	13.3598	4.0858	39.2430	11.3320	120.8	-1.389	Pendapatan Petani

Lampiran 11. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 18 To 23

Theil Forecast Error Statistics

				MSE Decomposition Proportions						
			Corr	Bias	Reg	Dist	Var	Covar	Inequality Coef	
Variable	N	MSE	(R)	(UM)	(UR)	(UD)	(US)	(UC)	U1	U
PAJD	31	9613928	0.98	0.02	0.00	0.97	0.00	0.97	0.1595	0.0806
RETD	31	2234594	0.97	0.05	0.03	0.92	0.00	0.94	0.1548	0.0783
DAU	31	2.157E8	0.98	0.00	0.05	0.95	0.01	0.99	0.0937	0.0468
DBH	31	36202717	0.95	0.01	0.00	0.99	0.02	0.97	0.1885	0.0958
BPGW	31	1.9002E8	0.98	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.1025	0.0515
BBJ	31	42235484	0.98	0.01	0.01	0.98	0.03	0.96	0.1311	0.0657
BMDSP	31	3586774	0.67	0.01	0.04	0.96	0.39	0.61	0.2780	0.1409
BMDSL	31	4.821E8	0.87	0.04	0.14	0.82	0.38	0.58	0.3139	0.1700
BLL	31	95384997	0.76	0.00	0.01	0.99	0.09	0.91	0.3577	0.1852
KONS	31	1.993E10	1.00	0.01	0.00	0.99	0.01	0.99	0.0445	0.0223
EXPD	31	9.574E10	1.00	0.00	0.02	0.98	0.01	0.99	0.0711	0.0355
IMPD	31	7.713E10	1.00	0.00	0.01	0.99	0.01	0.99	0.0670	0.0334
PDRBSP	31	1.508E9	0.99	0.56	0.11	0.33	0.14	0.30	0.1105	0.0579
PDRBTB	31	7.5618E9	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.0578	0.0289
PDRBID	31	2.175E11	0.91	0.11	0.08	0.80	0.01	0.88	0.3566	0.1819
PDRBLGA	31	27178957	1.00	0.06	0.13	0.81	0.12	0.82	0.0497	0.0246
PDRBBG	31	2.1708E9	1.00	0.50	0.21	0.30	0.19	0.31	0.1049	0.0505
PDRBDG	31	1.981E10	1.00	0.41	0.23	0.36	0.21	0.38	0.0908	0.0440
PDRBTR	31	5.2483E9	1.00	0.17	0.35	0.49	0.32	0.51	0.0838	0.0407
PDRBKU	31	2.0305E9	1.00	0.20	0.34	0.46	0.32	0.48	0.0804	0.0391
PDRBJS	31	3.8862E9	1.00	0.46	0.02	0.52	0.03	0.51	0.1001	0.0494
PTKSP	31	18534019	0.98	0.00	0.04	0.96	0.01	0.99	0.1057	0.0526
PTKNP	31	78765941	1.00	0.00	0.12	0.88	0.11	0.89	0.0454	0.0225
UNEP	31	70330772	0.94	0.00	0.00	0.99	0.01	0.98	0.2440	0.1239
MISK	31	27350630	0.98	0.00	0.01	0.99	0.00	1.00	0.1004	0.0503
INFL	31	17932.0	0.91	0.01	0.00	0.99	0.04	0.95	0.1580	0.0801
PAD	31	12733102	0.99	0.05	0.01	0.94	0.00	0.95	0.1124	0.0567
BMD	31	5.0355E8	0.87	0.04	0.16	0.81	0.40	0.57	0.2952	0.1586
TPD	31	1.8449E8	0.99	0.02	0.06	0.92	0.04	0.94	0.0528	0.0264
TPGPD	31	7.9379E8	0.98	0.03	0.07	0.90	0.02	0.95	0.1060	0.0532
TPGP	31	7.9379E8	1.00	0.03	0.11	0.86	0.10	0.87	0.0368	0.0183
NEXP	31	1.016E11	0.96	0.00	0.19	0.81	0.09	0.91	0.2783	0.1346
PDRB	31	3.503E11	0.99	0.00	0.36	0.64	0.31	0.69	0.1024	0.0501
PTK	31	70330772	1.00	0.00	0.07	0.92	0.06	0.94	0.0398	0.0198
PPKT	31	3.2869	0.97	0.00	0.41	0.59	0.29	0.71	0.1748	0.0853
PDTANI	31	128.4	0.42	0.00	0.65	0.35	0.19	0.81	0.8059	0.3584

Lampiran 11. Lanjutan

The SAS System

The SIMNLIN Procedure
Simultaneous Simulation

Solution Range Kriteria = 18 To 23
Theil Relative Change Forecast Error Statistics

	Relative Change			MSE Decomposition Proportions						
			Corr	Bias	Reg	Dist	Var	Covar	Inequality Coef	
Variable	N	MSE	(R)	(UM)	(UR)	(UD)	(US)	(UC)	U1	U
PAJD	30	0.6604	0.99	0.07	0.80	0.13	0.84	0.09	0.3153	0.1854
RETD	30	0.1302	0.73	0.09	0.01	0.91	0.20	0.71	0.6831	0.4123
DAU	30	0.0193	0.92	0.01	0.08	0.90	0.01	0.98	0.4006	0.1971
DBH	30	0.0588	0.63	0.00	0.01	0.99	0.13	0.87	0.7815	0.4553
BPGW	30	0.0200	0.95	0.04	0.01	0.95	0.00	0.96	0.3213	0.1630
BBJ	30	0.0658	0.79	0.00	0.01	0.99	0.17	0.83	0.5823	0.3278
BMDSP	30	0.1370	0.74	0.00	0.08	0.92	0.01	0.99	0.6756	0.3459
BMDSL	30	0.0971	0.80	0.04	0.00	0.95	0.15	0.81	0.5862	0.3347
BLL	30	0.2034	0.82	0.03	0.13	0.84	0.41	0.56	0.5898	0.3666
KONS	30	0.00891	0.99	0.00	0.27	0.73	0.22	0.78	0.1360	0.0659
EXPD	30	0.1457	0.96	0.07	0.05	0.89	0.12	0.82	0.2756	0.1453
IMPD	30	0.1798	0.91	0.00	0.01	0.99	0.01	0.99	0.3954	0.2025
PDRBSP	30	0.0179	0.99	0.54	0.06	0.39	0.09	0.37	0.2386	0.1239
PDRBTB	30	48.3526	0.86	0.00	0.44	0.56	0.21	0.79	0.6697	0.2914
PDRBID	30	18.9617	0.74	0.00	0.01	0.99	0.09	0.91	0.6593	0.3666
PDRBLGA	30	0.3080	1.00	0.06	0.88	0.05	0.88	0.06	0.1277	0.0602
PDRBBG	30	5.0933	0.97	0.34	0.14	0.52	0.09	0.57	0.3062	0.1435
PDRBDG	30	1.6374	0.99	0.37	0.21	0.42	0.18	0.45	0.1799	0.0857
PDRBTR	30	1.2696	0.99	0.11	0.32	0.56	0.28	0.61	0.1314	0.0632
PDRBKU	30	0.1845	1.00	0.16	0.35	0.49	0.31	0.52	0.1276	0.0613
PDRBJS	30	0.9658	0.97	0.31	0.18	0.51	0.12	0.57	0.3141	0.1462
PTKSP	30	0.0855	0.97	0.01	0.01	0.98	0.00	0.99	0.2326	0.1166
PTKNP	30	0.0214	1.00	0.04	0.26	0.70	0.29	0.67	0.0764	0.0391
UNEP	30	0.2198	0.80	0.00	0.27	0.73	0.06	0.94	0.6828	0.3161
MISK	30	0.0113	0.99	0.00	0.17	0.82	0.12	0.88	0.1563	0.0760
INFL	30	0.0591	0.97	0.03	0.19	0.78	0.30	0.67	0.2657	0.1438
PAD	30	0.0325	0.97	0.16	0.20	0.64	0.31	0.53	0.3097	0.1715
BMD	30	0.0770	0.82	0.04	0.01	0.95	0.15	0.81	0.5691	0.3240
TPD	30	0.00524	0.96	0.05	0.00	0.95	0.02	0.93	0.2786	0.1425
TPGPD	30	0.0204	0.87	0.10	0.01	0.89	0.13	0.77	0.5152	0.2881
TPGP	30	0.0173	0.99	0.12	0.01	0.87	0.00	0.88	0.1699	0.0853
NEXP	30	13.0696	-0.08	0.03	0.27	0.70	0.15	0.82	1.1492	0.7560
PDRB	30	0.0742	0.78	0.04	0.18	0.78	0.01	0.94	0.6964	0.3365
PTK	30	0.00423	1.00	0.02	0.07	0.91	0.09	0.89	0.0942	0.0478
PPKT	30	0.0584	0.65	0.03	0.56	0.41	0.20	0.76	1.1818	0.4623
PDTANI	30	0.9246	0.02	0.00	0.90	0.10	0.41	0.59	3.0851	0.7773

Lampiran 12. Rakapitulasi Hasil Simulasi Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Kabupaten Berbasis Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Peubah	Nilai Dasar	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
		Δ %	Δ %	Δ %	Δ %	Δ %	Δ %	Δ %
Konsumsi	739251	>-0.01	-0,01	-0.01	0.12	0.02	0.02	0.11
Investasi swasta	197392	-0.01	-0,61	-0.37	1.35	0.57	1.95	shock
Ekspor daerah	292141	-0.02	-0,12	-0.04	0.55	0.22	0.63	1.26
Impor daerah	211427	>-0.01	-0,12	-0.07	0.27	0.11	0.38	1.36
PDRB sektor pertanian	587651	0.01	0,01	0.01	0.02	0.01	0.03	<0.01
PDRB sektor pertambangan	13629.2	-0.02	-0,08	-0.01	0.47	0.18	0.51	0.78
PDRB sektor industri	130725	-0.21	-0,51	-0.04	3.52	1.38	4.60	3.46
PDRB sektor listrik gas dan air	7938.6	>-0.01	-0,21	-0.13	0.48	0.20	0.69	2.45
PDRB sektor bangunan	53797.7	-0.01	-0,46	-0.28	1.02	0.43	1.47	5.26
PDRB sektor perdagangan	138089	-0.01	-0,53	-0.32	1.19	0.50	1.70	6.08
PDRB sektor transportasi	58761.7	-0.01	-0,69	-0.41	1.56	0.65	2.20	7.83
PDRB sektor keuangan	62230.3	-0.01	-0,40	-0.24	0.91	0.38	1.29	4.59
PDRB sektor jasa-jasa	152700	>-0.01	-0,06	-0.03	0.16	0.06	0.18	0.64
Penyerapan T.Kerja sek. pertanian	82596.2	<0.01	0,01	0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.11
Penyerapan T. kerja non pertanian	45600.5	>-0.01	-0,05	-0.03	0.10	0.04	0.14	0.52
Pengangguran	11262.4	<0.01	0,11	0.07	-0.25	-0.10	-0.36	-1.29
Jumlah penduduk miskin	47775	<0.01	<0,01	>-0.01	>-0.01	>-0.01	-0.01	-0.02
Inflasi	7.676	0.00	0,01	0.05	0.38	0.13	0.07	-0.07
Ekspor bersih	80713.9	-0.05	-0,13	0.05	1.30	0.50	1.30	1.00
Produk domestik regional bruto	1205522	-0.02	-0,20	-0.28	0.73	0.29	0.98	2.02
Total peng. pemerintah daerah	198604	0.13	0,05	0.68	10.97	2.17	1.30	0.01
Penyerapan tenaga kerja	128197	0.00	-0,01	-0.01	0.02	0.01	0.03	0.11
Pendapatan perkapita	3.6986	-0.01	-0,02	-0.10	0.98	0.47	1.27	3.27
Pendapatan rata-rata petani	7.4011	-0.01	>-0,01	0.01	0.06	0.03	0.07	0.14

Lampiran 13. Rakapitulasi Hasil Simulasi Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Kabupaten Kota Berbasis Non Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Peubah	Nilai Dasar	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
		Δ %	Δ %	Δ %	Δ %	Δ %	Δ %	Δ %
Konsumsi	1990330	<0.01	0,01	>-0.01	0.05	0.02	0.02	0.26
Investasi swasta	818911	-0.63	-0,33	-1.10	0.36	0.36	0.74	shock
Ekspor daerah	2651089	-0.03	-0,01	-0.06	0.07	0.07	0.12	0.87
Impor daerah	2109499	-0.05	-0,03	-0.09	0.03	0.03	0.06	0.86
PDRB sektor pertanian	287177	0.01	0,01	0.03	0.01	0.01	0.03	-0.18
PDRB sektor pertambangan	682730	>-0.01	>0,01	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.10
PDRB sektor industri	617873	-0.18	-0,32	-0.09	0.97	0.97	1.80	4.58
PDRB sektor listrik gas dan air	51367.1	-0.15	-0,08	-0.26	0.08	0.08	0.17	2.37
PDRB sektor bangunan	227866	-0.47	-0,25	-0.82	0.27	0.27	0.56	7.62
PDRB sektor perdagangan	760797	-0.42	-0,22	-0.73	0.24	0.24	0.50	6.79
PDRB sektor transportasi	408447	-0.43	-0,22	-0.74	0.25	0.25	0.51	6.94
PDRB sektor keuangan	283110	-0.38	-0,20	-0.67	0.22	0.22	0.46	6.23
PDRB sektor jasa-jasa	386814	-0.09	-0,05	-0.16	0.07	0.06	0.12	1.58
Penyerapan T.Kerja sek. pertanian	35579.7	0.10	0,05	0.17	-0.06	-0.06	-0.12	-1.06
Penyerapan T. kerja non pertanian	115979	-0.08	-0,04	-0.14	0.04	0.04	0.09	1.28
Pengangguran	24294.2	0.24	0,13	0.42	-0.14	-0.14	-0.28	-3.86
Jumlah penduduk miskin	46190.2	<0.01	<0,01	<0.01	>-0.01	>-0.01	-0.01	-0.02
Inflasi	7.730	0.25	0,22	0.34	0.43	0.36	0.21	-0.42
Ekspor bersih	541590	0.06	0,08	0.04	0.24	0.23	0.36	0.94
Produk domestik regional bruto	3706182	-0.17	-0,05	-0.34	0.28	0.28	0.55	4.10
Total peng. pemerintah daerah	230682	2.99	2,85	3.93	5.89	5.05	3.12	0.04
Penyerapan tenaga kerja	151559	-0.04	-0,02	-0.07	0.02	0.02	0.04	0.61
Pendapatan perkapita	8.414	-0.15	-0,02	-0.18	0.64	0.64	1.09	3.37
Pendapatan rata-rata petani	10.164	-0.32	-0,28	-0.53	0.02	0.02	0.17	2.20

Lampiran 14. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan